Katalog: 4301002
ISSN 2086-4566

STATISTIK PENDIDIKAN 2025

VOLUME 14, 2025

BADAN PUSAT STATISTIK

https://www.bps.go.id

Katalog: 4301002
ISSN 2086-4566

https://www.bps.go.id

STATISTIK PENDIDIKAN 2025

VOLUME 14, 2025

BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK PENDIDIKAN 2025

Volume 14, 2025

Katalog : **4301002**
ISSN : **2086-4566**
Nomor Publikasi : **04200.25022**

Ukuran Buku : **18,2 cm x 25,7 cm**
Jumlah Halaman : **xxx+217 halaman**

Penyusun Naskah :
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Penyunting :
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Pembuat Kover :
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Penerbit :
©Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi :
flaticon.com; freepik.com; canva.com

https://www.bps.go.id

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

ISSN 2086-4566

TIM PENYUSUN

STATISTIK PENDIDIKAN 2025

Volume 14, 2025

Pengarah:
Ateng Hartono

Penanggung Jawab:
Ahmad Avenzora

Penyunting:
Yeni Rachmawati
Raden Sinang
Ika Maylasari
Budi Santoso

Penulis Naskah dan Pengolah Data:
Mega Silviliyana
Nindya Putri Sulistyowati
Ruth Juniar Herista
Ganish Anggraeni

Penata Letak:
Mega Silviliyana

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Agenda pembangunan pendidikan 2025–2029 menekankan transformasi sistem pendidikan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Transformasi dilakukan dengan fokus pada peningkatan kualitas, pemerataan akses, dan relevansi pendidikan, sehingga peningkatan kualitas pendidikan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global.

Statistik Pendidikan 2025 disusun berdasarkan hasil Susenas Maret 2025. Data yang disajikan mencakup beberapa indikator utama proses dan output pendidikan. Selain itu juga disajikan data pendidikan hasil registrasi yang dikumpulkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Tahun Ajaran 2024/2025. Data ini memuat informasi mengenai input pendidikan yang mencakup data jumlah sekolah, peserta didik, pendidik, sarana prasarana pendidikan.

Publikasi ini ditujukan untuk memberikan gambaran potret pendidikan di Indonesia dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna data terutama pemerintah pusat/daerah dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan bidang pendidikan. Kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan publikasi ini, kami sampaikan terima kasih. Kritik dan saran membangun untuk perbaikan publikasi serupa di masa datang sangat diharapkan.

Jakarta, November 2025
Kepala Badan Pusat Statistik

Amalia Adininggar Widyasanti

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

RINGKASAN

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas dan akses pendidikan melalui berbagai kebijakan. Tujuannya adalah menciptakan sistem pendidikan yang membentuk sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Tantangan utama meliputi kesenjangan akses di daerah terpencil dan rendahnya partisipasi di pendidikan menengah dan tinggi. Di sisi lain, teknologi memberi peluang besar melalui *e-learning* dan *platform* digital. Data pendidikan yang akurat, seperti yang disajikan dalam publikasi ini, sangat penting untuk merancang kebijakan yang tepat dan mendukung pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas, diperlukan sumber daya pendidikan yang berkualitas pula, khususnya sarana dan prasarana. Data yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pada tahun ajaran 2024/2025 menunjukkan bahwa jumlah sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengalami peningkatan dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Apabila dibedakan menurut status sekolah, pada jenjang SD dan SMP didominasi oleh sekolah negeri, sebaliknya pada jenjang SMA dan SMK didominasi sekolah swasta. Namun, menurut ruang kelas, persentase ruang kelas pada sekolah negeri lebih tinggi daripada sekolah swasta pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Jika dilihat dari kondisi ruang kelas tersebut, pada jenjang SMP, SMA, dan SMK telah memiliki ruang kelas dengan kondisi baik di atas 50 persen, namun pada jenjang SD ruang kelas dalam kondisi baik hanya sebesar 39,68 persen.

Pemerataan akses pendidikan tidak cukup hanya pada upaya peningkatan jumlah dan pemenuhan kualitas sekolah dan ruang kelas saja, tetapi juga perlu memperhatikan kecukupan antara ruang kelas yang tersedia dengan jumlah peserta didik. Pada tahun ajaran 2024/2025 terlihat bahwa rasio peserta didik per rombongan belajar (rombel) pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK masih berada

https://www.bps.go.id

pada rentang ketentuan yang berlaku. Selain itu, jika dilihat menurut rasio rombongan belajar per kelas baik pada jenjang SD, SMP, SMA, maupun SMK bernilai kurang dari satu. Artinya jumlah ruang kelas yang tersedia masih mencukupi untuk menampung rombongan belajar peserta didik pada setiap jenjang.

Bukan hanya kuantitas sekolah dan ruang kelas, satinasi sekolah juga menjadi langkah awal dalam mewujudkan lingkungan belajar yang sehat. Mayoritas sekolah pada setiap jenjang pendidikan telah memiliki sumber air cukup. Akan tetapi, masih terdapat sekitar 1 hingga 2 persen sekolah yang perlu perhatian pada jenjang SD hingga SMA dan SMK karena tidak memiliki sumber air. Apabila ditinjau dari sisi ketersediaan toilet, pada setiap jenjang pendidikan secara umum mayoritas sekolah telah memiliki sarana toilet siswa, baik itu toilet terpisah ataupun toilet bersama. Meskipun masih ada sekolah yang tidak memiliki toilet, yaitu 18,76 persen pada jenjang SD, 13,93 persen SMP, 10,85 persen SMA, dan 12,91 persen SMK yang tidak memiliki toilet.

Sebagai pendidik profesional yang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi murid, kualitas guru turut menentukan kualitas pendidikan di setiap sekolah. Pada tahun ajaran 2024/2025 jumlah guru pada jenjang SD, SMP, dan SMK mengalami peningkatan, namun pada jenjang SMK mengalami penurunan jumlah guru. Meskipun demikian, dari sisi persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 mengalami peningkatan pada setiap jenjang pada tahun ajaran 2024/2025 jika dibandingkan tahun ajaran 2023/2024. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyebutkan bahwa pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid, sementara pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid. Pada Tahun Ajaran 2024/2025, rasio murid-guru pada semua jenjang pendidikan masih memenuhi standar ideal yang ditetapkan.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan program pendidikan yang paling fundamental dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, hasil pendataan Susenas Maret 2025 menunjukkan hanya sebesar 34,15

https://www.bps.go.id

persen anak usia 0–6 tahun yang sedang/pernah mengikuti pendidikan prasekolah pada tahun 2025. APK PAUD 2025 juga menunjukkan hanya sekitar 36 dari 100 anak usia 3–6 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan prasekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2025 pada seluruh kelompok umur dan Angka Partisipasi Kasar (APK) 2025 pada seluruh jenjang pendidikan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan angka tahun 2024. Sementara itu, untuk Angka Partisipasi Murni (APM) 2025 yang mengalami peningkatan adalah APM jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat dan Pendidikan Tinggi (PT). APM SD sederajat dan SMP sederajat mengalami penurunan. Selain melalui APS, APK, dan APM, evaluasi pembangunan di bidang pendidikan dapat pula dilihat melalui Angka Tidak Sekolah (ATS). Jika dibandingkan dengan 2024, ATS kelompok umur 7–12 tahun, 13–15 tahun, serta 16–18 tahun mengalami penurunan pada tahun 2025.

Melalui pendataan Susenas Maret 2025, dapat juga diperoleh data terkait persentase peserta didik yang memiliki akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Namun, informasi yang diperoleh hanya terbatas pada persentase peserta didik berumur 5–23 tahun yang menggunakan telepon seluler, komputer/laptop, serta internet, dan tidak berkaitan dengan kemampuan TIK (*IT skills*) peserta didik tersebut. Mayoritas peserta didik umur 5–23 tahun sudah menggunakan telepon seluler dan internet, tetapi masih hanya sedikit yang menggunakan komputer/laptop. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi persentase penggunaan telepon seluler, komputer/laptop, serta internet. Penggunaan komputer/laptop banyak digunakan pada peserta didik jenjang Pendidikan Tinggi (PT).

Selain bersekolah, tidak menutup kemungkinan terdapat peserta didik yang juga melakukan kegiatan lain seperti mengurus rumah tangga, bahkan bekerja atau membantu memperoleh penghasilan dalam kegiatan sehari-harinya. Pada tahun 2025, sebanyak 40,76 persen peserta didik umur 10–23 tahun yang bekerja dan 7,27 persen yang mengurus rumah tangga. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi pula peserta didik yang bekerja dan mengurus rumah tangga. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase

https://www.bps.go.id

peserta didik yang bekerja lebih banyak pada kelompok laki-laki dan persentase peserta didik yang mengurus rumah tangga lebih banyak pada kelompok perempuan.

Pemantauan proses pendidikan dapat dilihat melalui indikator yang digunakan untuk mengukur proses pendidikan, salah satunya yaitu angka putus sekolah. Data Susenas 2025 menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, angka putus sekolah juga semakin meningkat. Angka putus sekolah tertinggi berada pada jenjang SMA/SMK sederajat yaitu sebesar 0,86 persen.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pendidikan antara lain tingkat penyelesaian pendidikan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah. Data Susenas tahun 2025 menunjukkan pola semakin tinggi jenjang pendidikan, tingkat penyelesaian pendidikan justru semakin rendah baik pada capaian nasional maupun menurut karakteristik demografinya. Tingkat penyelesaian pendidikan untuk jenjang pendidikan SD sederajat sebesar 97,65 persen, jenjang SMP sederajat sebesar 91,45 persen, sedangkan untuk jenjang SMA/SMK sederajat hanya sebesar 73,90 persen.

Tingkat pendidikan penduduk Indonesia didominasi oleh pendidikan menengah. Sebanyak 64,74 persen penduduk 15 tahun ke atas merupakan tamatan SMP sederajat ke atas. Akan tetapi, di sisi lain masih terdapat 11 dari 100 penduduk yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak tamat SD. Selain itu, masih terdapat ketimpangan tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk 15 tahun ke atas untuk penduduk yang tinggal di perdesaan, kondisi ekonomi rumah tangga yang rendah, serta para penyandang disabilitas. Capaian penduduk dengan angka melek huruf (AMH) terendah terjadi pada kelompok umur 15 tahun ke atas yaitu sebesar 97,10 persen. Sementara itu, capaian pendidikan lainnya yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2025 mencapai 9,41 tahun atau setara kelas 9 SMP sederajat. Capaian tersebut telah melampaui capaian tahun 2024 yang sebesar 9,22 persen sekaligus melampaui target RPJMN tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 9,33 tahun.

https://www.bps.go.id

ISSN 2086-4566

DAFTAR ISI

STATISTIK PENDIDIKAN 2025

Volume 14, 2025

Halaman

KATA PENGANTAR v
RINGKASAN vii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xxi
PENJELASAN TEKNIS xxv

BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Tantangan dan Peluang Pendidikan 4
1.2 Data Pendidikan untuk Pembangunan 5
1.3 Sistematika Penulisan 6

BAB 2 SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN 7
2.1 Jumlah Sekolah 9
2.2 Ketersediaan dan Kondisi Ruang Kelas 12
2.3 Sanitasi Sekolah 16
2.4 Guru 18

https://www.bps.go.id

Halaman

BAB 3 PARTISIPASI PENDIDIKAN 43

3.1 Pendidikan Anak Usia Dini 45

3.2 Angka Partisipasi Sekolah 51

3.3 Angka Partisipasi Kasar 53

3.4 Angka Partisipasi Murni 55

3.5 Angka Anak Tidak Sekolah.....57

BAB 4 KEGIATAN PESERTA DIDIK..... 107

4.1 Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)..... 109

4.2 Aktivitas Peserta Didik selain Bersekolah 113

BAB 5 PROSES DAN CAPAIAN PENDIDIKAN..... 129

5.1 Angka Putus Sekolah 131

5.2 Tingkat Penyelesaian Pendidikan 133

5.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan..... 138

5.4 Angka Melek Huruf..... 140

5.5 Rata-Rata Lama Sekolah 142

DAFTAR PUSTAKA 175

LAMPIRAN 181

https://www.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Jumlah dan Persentase Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025 22
Tabel 2.2 Jumlah dan Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025 23
Tabel 2.3 Jumlah dan Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025 24
Tabel 2.4 Jumlah dan Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025 25
Tabel 2.5 Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2024/2025 26
Tabel 2.6 Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2024/2025 27
Tabel 2.7 Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2024/2025 28
Tabel 2.8 Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2024/2025 29
Tabel 2.9 Rasio Peserta Didik per Rombel Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2024/2025 30
Tabel 2.10 Rasio Rombel per Kelas Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2024/2025 31
Tabel 2.11 Persentase Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi dan Kecukupan Sumber Air, Tahun Ajaran 2024/2025 32
Tabel 2.12 Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Provinsi dan Kecukupan Sumber Air, Tahun Ajaran 2024/2025 33
Tabel 2.13 Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Provinsi dan Kecukupan Sumber Air, Tahun Ajaran 2024/2025 34

https://www.bps.go.id

Tabel 2.14 Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Provinsi dan Kecukupan Sumber Air, Tahun Ajaran 2024/2025 35
Tabel 2.15 Persentase Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi dan Kepemilikan Toilet Siswa, Tahun Ajaran 2024/2025 36
Tabel 2.16 Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Provinsi dan Kepemilikan Toilet Siswa, Tahun Ajaran 2024/2025 37
Tabel 2.17 Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Provinsi dan Kepemilikan Toilet Siswa, Tahun Ajaran 2024/2025 38
Tabel 2.18 Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Provinsi dan Kepemilikan Toilet Siswa, Tahun Ajaran 2024/2025 39
Tabel 2.19 Jumlah dan Persentase Guru Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2024/2025 40
Tabel 2.20 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2024/2025 41
Tabel 2.21 Rasio Murid-Guru Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2024/2025 42
Tabel 3.1 Indikator Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Karakteristik Demografi, 2025 60
Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Karakteristik Demografi, 2025 61
Tabel 3.3 Persentase Penduduk 7–23 Tahun Menurut Kelompok Umur dan Alasan Utama Belum Pernah Bersekolah atau Tidak Bersekolah Lagi, 2025 62
Tabel 3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2025 63
Tabel 3.5 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2025 64
Tabel 3.6 Angka Anak Tidak Sekolah (*Out of School Children*/OOSC) Menurut Kelompok Umur dan Karakteristik Demografi, 2025 65
Tabel 3.7 Persentase Penduduk 0–6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025 66
Tabel 3.8 Angka Partisipasi Kasar (APK) 3–6 Tahun Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025 67

https://www.bps.go.id

Tabel 3.9 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025 68
Tabel 3.10 Angka Kesiapan Sekolah (AKS) Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025 69
Tabel 3.11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Perkotaan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 70
Tabel 3.12 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Perdesaan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 71
Tabel 3.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Laki-laki Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 72
Tabel 3.14 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Perempuan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 73
Tabel 3.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 74
Tabel 3.16 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Perkotaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 75
Tabel 3.17 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Perdesaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 76
Tabel 3.18 Angka Partisipasi Kasar (APK) Laki-laki Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 77
Tabel 3.19 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 78
Tabel 3.20 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 79
Tabel 3.21 Angka Partisipasi Murni (APM) di Perkotaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 80
Tabel 3.22 Angka Partisipasi Murni (APM) di Perdesaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 81
Tabel 3.23 Angka Partisipasi Murni (APM) Laki-laki Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 82
Tabel 3.24 Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 83
Tabel 3.25 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 84
Tabel 3.26 Angka Anak Tidak Sekolah (*Out of School Children*/OOSC) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 85

https://www.bps.go.id

Tabel 3.27 *Sampling Error* Persentase Penduduk 0–6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 86
Tabel 3.28 *Sampling Error* Persentase Penduduk 0–6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 87
Tabel 3.29 *Sampling Error* Angka Partisipasi Kasar (APK) 3–6 Tahun Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 88
Tabel 3.30 *Sampling Error* Angka Partisipasi Kasar (APK) 3–6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 89
Tabel 3.31 *Sampling Error* Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 90
Tabel 3.32 *Sampling Error* Angka Kesiapan Sekolah Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 91
Tabel 3.33 *Sampling Error* Angka Kesiapan Sekolah Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 92
Tabel 3.34 *Sampling Error* Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7–12 Tahun Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 93
Tabel 3.35 *Sampling Error* Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13–15 Tahun Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 94
Tabel 3.36 *Sampling Error* Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16–18 Tahun Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 95
Tabel 3.37 *Sampling Error* Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19–23 Tahun Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 96
Tabel 3.38 *Sampling Error* Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 97
Tabel 3.39 *Sampling Error* Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 98
Tabel 3.40 *Sampling Error* Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 99
Tabel 3.41 *Sampling Error* Angka Partisipasi Kasar (APK) PT (19–23 Tahun) Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 100
Tabel 3.42 *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 101
Tabel 3.43 *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 102

https://www.bps.go.id

Tabel 3.44 *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK Sederajat Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025.....103
Tabel 3.45 *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni (APM) PT (19–23 Tahun) Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025.....104
Tabel 3.46 *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni (APM) PT (19–23 Tahun) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025.....105
Tabel 3.47 *Sampling Error* Angka Anak Tidak Sekolah (ATS/OOSC) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025.....106
Tabel 4.1 Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Menurut Media Mengakses TIK dan Karakteristik Demografi, 2025.....116
Tabel 4.2 Persentase Peserta Didik Umur 10–23 Tahun Menurut Kegiatan Selain Bersekolah dan Karakteristik Demografi, 2025.....117
Tabel 4.3 Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025 118
Tabel 4.4 Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Menggunakan Komputer/Laptop Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025 119
Tabel 4.5 Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Menggunakan Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025.....120
Tabel 4.6 Persentase Peserta Didik Umur 10–23 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025 121
Tabel 4.7 Persentase Peserta Didik Umur 10–23 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025.....122
Tabel 4.8 *Sampling Error* Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Menggunakan Komputer/Laptop Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025.....123
Tabel 4.9 *Sampling Error* Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Menggunakan Komputer/Laptop Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025.....124
Tabel 4.10 *Sampling Error* Persentase Peserta Didik Umur 10–23 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025.....125
Tabel 4.11 *Sampling Error* Persentase Peserta Didik Umur 10-23 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025.....126

https://www.bps.go.id

Tabel 4.12 *Sampling Error* Persentase Peserta Didik Umur 10–23 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 127
Tabel 5.1 Angka Putus Sekolah Menurut Karakteristik dan Jenjang Pendidikan, 2025 146
Tabel 5.2 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur/Jenjang Pendidikan, 2025 147
Tabel 5.3 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 148
Tabel 5.4 Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2025 149
Tabel 5.5 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik, 2025 150
Tabel 5.6 Tingkat Penyelesaian Pendidikan di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 151
Tabel 5.7 Tingkat Penyelesaian Pendidikan di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 152
Tabel 5.8 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Penduduk Laki-Laki Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 153
Tabel 5.9 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Penduduk Perempuan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 154
Tabel 5.10 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025 155
Tabel 5.11 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 156
Tabel 5.12 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 157
Tabel 5.13 Persentase Penduduk Laki-Laki Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 158
Tabel 5.14 Persentase Penduduk Perempuan Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 159

https://www.bps.go.id

Halaman

Tabel 5.15 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 160
Tabel 5.16 Angka Melek Huruf (AMH) di Perkotaan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 161
Tabel 5.17 Angka Melek Huruf (AMH) di Perdesaan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 162
Tabel 5.18 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Laki-Laki Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 163
Tabel 5.19 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Perempuan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 164
Tabel 5.20 Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 165
Tabel 5.21 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 166
Tabel 5.22 *Sampling Error* Tingkat Penyelesaian Pendidikan Penduduk Umur 13–15 Tahun Lulus SD Sederajat Menurut Provinsi, Jenjang Pendidikan, dan Klasifikasi Desa, 2025 167
Tabel 5.23 *Sampling Error* Tingkat Penyelesaian Pendidikan Penduduk Umur 16–18 Tahun Lulus SMP Sederajat Menurut Provinsi, Jenjang Pendidikan, dan Klasifikasi Desa, 2025 168
Tabel 5.24 *Sampling Error* Tingkat Penyelesaian Pendidikan Penduduk Umur 19–21 Tahun Lulus SMA/SMK Sederajat Menurut Provinsi, Jenjang Pendidikan, dan Klasifikasi Desa, 2025 169
Tabel 5.25 *Sampling Error* Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 170
Tabel 5.26 *Sampling Error* Persentase Penduduk Laki-Laki 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 172
Tabel 5.27 *Sampling Error* Angka Melek Huruf (AMH) 15-24 Tahun di Perkotaan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 173

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023, 2023/2024, dan 2024/2025 10
Gambar 2.2 Persentase Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025 11
Gambar 2.3 Persentase Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025 12
Gambar 2.4 Persentase Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi Ruang Kelas, Tahun Ajaran 2024/2025 13
Gambar 2.5 Rasio Peserta Didik per Rombel Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2024/2025 15
Gambar 2.6 Rasio Rombel per Kelas Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2024/2025 16
Gambar 2.7 Persentase Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Kecukupan Sumber Air, Tahun Ajaran 2024/2025 17
Gambar 2.8 Persentase Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Ketersediaan Toilet Siswa Tahun Ajaran 2024/2025 18
Gambar 2.9 Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024 dan 2024/2025 19
Gambar 2.10 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024 dan 2024/2025 20
Gambar 2.11 Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2024/2025 21
Gambar 3.1 Partisipasi Anak Usia 0–6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Desa, 2025 46
Gambar 3.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Anak Usia 3–6 Tahun, 2021–2025 47
Gambar 3.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Anak Usia 3–6 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Desa, 2025 47
Gambar 3.4 Partisipasi Anak Usia 3–6 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah, Tetapi Mengikuti Kegiatan Kursus Menurut Karakteristik Demografi, 2025 49

https://www.bps.go.id

Gambar 3.5 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Desa, 2025 50
Gambar 3.6 Angka Kesiapan Sekolah (AKS), 2021–2025 51
Gambar 3.7 Angka Kesiapan Sekolah (AKS) Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Desa, 2025 51
Gambar 3.8 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur, 2021–2025 52
Gambar 3.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Karakteristik Demografi dan Kelompok Umur, 2025 53
Gambar 3.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, 2021–2025 54
Gambar 3.11 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Karakteristik Demografi dan Jenjang Pendidikan, 2025 55
Gambar 3.12 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, 2021–2025 56
Gambar 3.13 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Karakteristik Demografi dan Jenjang Pendidikan, 2025 57
Gambar 3.14 Anak Tidak Sekolah (ATS) Menurut Kelompok Umur, 2021–2025 58
Gambar 3.15 Anak Tidak Sekolah (ATS) Menurut Kelompok Umur dan Karakteristik Demografi, 2025 59
Gambar 4.1 Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler, Komputer/Laptop, dan Internet, 2025 110
Gambar 4.2 Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler, Komputer/Laptop, dan Internet Menurut Jenjang Pendidikan, 2025 111
Gambar 4.3 Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler, Komputer/Laptop, dan Internet Menurut Karakteristik Demografi, 2025 112
Gambar 4.4 Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Menggunakan Internet Menurut Tujuan Penggunaan Internet, 2025 113
Gambar 4.5 Persentase Peserta Didik Umur 10–23 Tahun yang Bekerja dan Mengurus Rumah Tangga, 2021–2025 114

https://www.bps.go.id

Gambar 4.6 Persentase Peserta Didik Umur 10–23 Tahun yang Bekerja dan Mengurus Rumah Tangga Menurut Jenjang Pendidikan, 2025 115
Gambar 4.7 Persentase Peserta Didik Umur 10–23 Tahun yang Bekerja dan Mengurus Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Desa, 2025 115
Gambar 5.1 Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik, 2025 132
Gambar 5.2 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Karakteristik, 2025 134
Gambar 5.3 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 136
Gambar 5.4 Analisis Alur Pendidikan Penduduk Usia 19–21 Tahun, 2025 137
Gambar 5.5 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik, 2025 139
Gambar 5.6 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, 2025 141
Gambar 5.7 Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik, 2025 142
Gambar 5.8 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik, 2025 143
Gambar 5.9 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, 2025 144

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

PENJELASAN TEKNIS

Metodologi

Susenas merupakan survei rumah tangga dengan cakupan variabel yang sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. Pengumpulan data Susenas dilakukan dua kali dalam setahun yaitu pada Susenas Maret (level estimasi hingga tingkat kabupaten/kota) dan Susenas September (level estimasi hingga tingkat provinsi).

Susenas Maret 2025 menghasilkan data yang representatif untuk disajikan pada tingkat nasional, provinsi, sampai dengan tingkat kabupaten/kota, (BPS, 2025). Namun pada publikasi ini secara umum disajikan hanya sampai dengan level provinsi. Unit observasi Susenas adalah rumah tangga, sedangkan yang menjadi unit analisis adalah rumah tangga dan individu. Selain mengumpulkan karakteristik rumah tangga, Susenas juga mengumpulkan karakteristik individu.

Jumlah sampel Susenas Maret 2025 mencakup 345.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Pada setiap blok sensus yang dipilih secara *Probability Proportional to Size* (PPS) dilakukan pemilihan sampel sebanyak 10 rumah tangga dengan *systematic sampling* sehingga jumlah sampel blok sensus untuk Susenas Maret sebanyak 34.500 blok sensus. Stratifikasi dilakukan pada level blok sensus dan pada level rumah tangga di blok sensus terpilih untuk menghasilkan *representative sample*. Stratifikasi blok sensus dilakukan secara eksplisit (seluruh populasi blok sensus biasa Sensus Penduduk 2020 dikelompokkan menurut klasifikasi perkotaan/perdesaan), sedangkan *implicit stratification* dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan kepala rumah tangga.

https://www.bps.go.id

Relative Standard Error

Nilai-nilai indikator yang diestimasi dari hasil Susenas Maret 2025 dipengaruhi oleh dua jenis kesalahan (*error*), yaitu *non sampling error* dan *sampling error*. *Non sampling error* adalah kesalahan yang terjadi ketika proses pengumpulan maupun pengolahan data. Sedangkan *sampling error* adalah kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknik sampling tertentu dalam suatu survei. Secara statistik, besarnya *sampling error* hasil Susenas 2025 ditunjukkan oleh nilai *standard error* (galat baku) dari suatu ukuran statistik (rata-rata, persentase, atau jumlah). Untuk mengukur presisi suatu indikator digunakan nilai *relative standard error* (RSE), yaitu perbandingan nilai *standard error* terhadap estimasi indikatornya, yang dinyatakan dalam persen. *Standard error* juga digunakan untuk menghitung besaran selang kepercayaan (*confidence interval*), yaitu interval nilai yang dapat menggambarkan populasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan selang kepercayaan (*interval estimation*) dengan batas bawah/atas sebesar nilai estimasi dikurangi/ditambah dua *standard error*. Semakin rendah nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan menunjukkan nilai indikator yang semakin baik.

Kualitas hasil estimasi suatu survei bisa diamati dari RSE yang dihasilkan dimana keputusan mengenai keakuratan suatu estimasi bisa diamati dari hasil penghitungan RSE tersebut. Kesalahan sampling dari beberapa estimasi harus digunakan secara hati-hati. Secara umum, besaran SE meningkat seiring dengan meningkatnya besaran estimasi begitu juga sebaliknya. Nilai estimasi dengan RSE≤25% dianggap akurat, sedangkan nilai estimasi dengan RSE>25% tetapi ≤50% perlu hati-hati jika ingin digunakan, dan estimasi dengan RSE>50% dianggap sangat tidak akurat dan seharusnya digabungkan dengan estimasi yang lain untuk memberikan estimasi dengan RSE≤25 %. Penghitungan tingkat *sampling error* menggunakan paket pemrograman dengan desain yang mengikuti desain sampling Susenas. Pada publikasi ini, selain dari RSE, keakuratan nilai estimasi juga dilihat dari jumlah sampel. Nilai estimasi dengan jumlah sampel n≤30, tidak disajikan.

https://www.bps.go.id

Konsep Definisi

Klasifikasi Desa menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.

Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 1 tahun dan tidak berniat pindah.

Tidak Termasuk Anggota Rumah Tangga yakni orang yang telah bepergian selama 1 tahun atau lebih, atau kurang dari 1 tahun tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 1 tahun atau lebih). Di sisi lain, orang yang telah 1 tahun atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 1 tahun tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran perkapita sebulan, dengan asumsi bahwa pengeluaran perkapita sebulan sama dengan pendapatannya. Distribusi pengeluaran rumah tangga digolongkan menjadi lima kuintil. Kuintil 1 dan 2 untuk status ekonomi terendah, Kuintil 3 dan 4 untuk status ekonomi menengah, dan Kuintil 5 untuk status ekonomi tertinggi.

Rasio Murid-Guru adalah gambaran jumlah murid terhadap jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu.

Rasio Murid-Kelas adalah perbandingan jumlah murid dalam suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah kelas yang tersedia.

https://www.bps.go.id

Rombel (Rombongan Belajar) adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan, atau identik dengan banyaknya kelas dalam suatu sekolah.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

APK PAUD 3—6 Tahun adalah jumlah anak yang terdaftar dalam pendidikan usia dini (TK/BA/RA, PAUD) tanpa memandang usia terhadap penduduk kelompok usia 3—6 tahun.

APM PAUD 3—6 Tahun adalah jumlah anak yang yang terdaftar dalam pendidikan umur dini (TK/BA/RA, PAUD) berumur 3-6 tahun terhadap penduduk kelompok umur 3—6 tahun.

Angka Kesiapan Sekolah (AKS) adalah persentase peserta didik yang sedang duduk di kelas 1 SD sederajat yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terhadap seluruh anak yang sedang duduk di kelas 1 SD sederajat.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa memandang usia terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut.

Angka Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan adalah persentase peserta didik yang pada tahun ajaran sekarang tidak melanjutkan sekolah lagi sebelum

https://www.bps.go.id

lulus dari jenjang pendidikan tertentu, terhadap peserta didik yang pada tahun ajaran lalu masih bersekolah di jenjang pendidikan yang sama.

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah persentase penduduk usia jenjang pendidikan tertentu yang tidak sedang bersekolah. Penduduk yang sedang prasekolah dianggap sebagai bersekolah. Penduduk usia 16—18 tahun yang tidak bersekolah lagi namun telah memiliki ijazah SMA/SMK sederajat ke atas dianggap sebagai bersekolah. Umur yang digunakan dalam penghitungan indikator ini adalah umur pada saat awal tahun pembelajaran.

Tingkat Penyelesaian Pendidikan adalah persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu sesuai kelompok umur referensi pada jenjang pendidikan tersebut. Kelompok umur referensi menurut UNESCO adalah 3—5 tahun di atas batas usia kelas terakhir pada usia dari tiap jenjang pendidikan.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk kelompok umur tersebut.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD sederajat diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP sederajat diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA/SMK sederajat diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

BAB 1

PENDAHULUAN

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

Untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi semua warga negara, pemerintah Indonesia mengatur pendidikan dalam berbagai kebijakan dan regulasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan landasan hukum dan kerangka kerja untuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini menjadi payung hukum dalam mewujudkan visi pendidikan Indonesia, yaitu menciptakan sistem pendidikan yang menghasilkan individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mencapai visi tersebut, Indonesia memiliki misi pendidikan yaitu memperluas akses pendidikan berkualitas, meningkatkan mutu pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi, serta mempromosikan keadilan dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022a). Upaya ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang menetapkan arah kebijakan pembangunan nasional termasuk transformasi pendidikan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Strategi ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029.

https://www.kps.go.id

1.1 Tantangan dan Peluang Pendidikan

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses pendidikan. Masalah infrastruktur masih menjadi isu krusial, khususnya di daerah terpencil, yang ditindaklanjuti melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perbaikan fasilitas pendidikan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021).

Tantangan lain adalah perubahan kurikulum yang sering berubah serta kurangnya pelatihan bagi tenaga pendidik. Program Guru Penggerak diluncurkan untuk meningkatkan kompetensi guru agar mampu memimpin inovasi di sekolah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Tingkat partisipasi sekolah di tingkat menengah atas dan pendidikan tinggi masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2024, APK SMA/SMK masih berada di sekitar 87,29 persen, sedangkan untuk APK Pendidikan Tinggi hanya sekitar 32,00 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Untuk mengatasi hal ini, Program Indonesia Pintar (PIP) memberikan bantuan finansial kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu agar dapat terus bersekolah (Kementerian Keuangan, 2023).

Di sisi lain, perkembangan teknologi membuka peluang besar melalui pendidikan jarak jauh dan *e-learning*. *Platform* belajar.id menjadi sarana digital yang memungkinkan akses pembelajaran merata di seluruh Indonesia (World Bank, 2021). Pemerintah juga mendorong kurikulum yang berorientasi pada keterampilan abad ke-21 agar lulusan siap menghadapi tantangan global (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022b).

Meski berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, masih banyak aspek lain yang masih perlu diperhatikan. Kualitas sumber daya manusia merupakan pondasi penting untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan memahami tantangan dan peluang serta dukungan ketersediaan data pendidikan, Indonesia dapat meningkatkan kualitas pendidikan mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk Indonesia maju.

https://www.bps.go.id

1.2 Data Pendidikan untuk Pembangunan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu negara. Informasi pendidikan yang akurat dan *up-to-date* sangat penting untuk merancang kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi dan kondisi pendidikan Indonesia terkini. Hal ini dikarenakan, selain untuk perencanaan, informasi tersebut juga digunakan sebagai bahan evaluasi berbagai program pembangunan, khususnya di sektor pendidikan. Evaluasi berbasis data memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dan program yang berjalan agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Gambaran situasi, kondisi, dan capaian pembangunan bidang pendidikan di Indonesia pada tahun 2025 salah satunya tercermin pada beberapa indikator pendidikan yang disajikan dalam publikasi "Statistik Pendidikan Indonesia 2025". Informasi yang ada pada publikasi ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan serta evaluasi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, data yang ada juga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional.

https://www.bps.go.id

Pendidikan merupakan faktor kunci dalam pembangunan nasional. Informasi pendidikan yang akurat sangat penting untuk merancang kebijakan yang efektif. Publikasi Statistik Pendidikan Indonesia 2025 menyajikan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor Maret 2025, mencakup 345.000 rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Data ini ditabulasikan menurut jenis kelamin, jenjang pendidikan, status disabilitas, distribusi pengeluaran, dan klasifikasi desa.

Selain itu, data sekunder dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun ajaran 2024/2025 digunakan untuk melengkapi informasi sarana dan prasarana pendidikan. Evaluasi berbasis data ini mendukung perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan arah RPJMN 2025–2029.

1.3 Sistematika Penulisan

Penulisan Publikasi Statistik Pendidikan Tahun 2025 secara sistematis disajikan dalam lima bab berikut:

Bab I Pendahuluan, menceritakan bagaimana gambaran tantangan dan peluang pendidikan, pentingnya data pendidikan untuk pembangunan serta sistematika penulisan dari publikasi.

Bab II Sarana dan Prasarana Pendidikan, memaparkan jumlah sekolah dan peserta didik, kondisi dan kecukupan ruang kelas, kualifikasi dan beban kerja pendidik, serta sanitasi sekolah.

Bab III Partisipasi Pendidikan, yaitu tentang partisipasi sekolah anak usia dini, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni pada jenjang Pendidikan SD sampai Pendidikan Tinggi, serta gambaran angka anak tidak sekolah.

Bab IV Kegiatan Peserta Didik, menjelaskan akses teknologi informasi dan komunikasi, aktivitas peserta didik selain sekolah yang meliputi peserta didik yang bekerja dan mengurus rumah tangga.

Bab V Proses dan Capaian Pendidikan, menjelaskan angka putus sekolah, tingkat penyelesaian pendidikan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, angka melek huruf, serta rata-rata lama sekolah.

Tabel indikator menurut karakteristik demografi dan provinsi disajikan pada setiap akhir bab. Selain itu juga ditampilkan hasil penghitungan *sampling error* dari hasil estimasi beberapa indikator pendidikan untuk melihat tingkat kesalahan yang ditimbulkan oleh teknik pengambilan sampel. Sementara itu, penjelasan mengenai konsep definisi dimasukkan ke dalam metadata dan penjelasan teknis.

https://www.bps.go.id

BAB 2

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

BAB 2
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Dalam proses untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas, diperlukan sumber daya pendidikan yang berkualitas pula. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa sumber daya pendidikan meliputi segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, termasuk juga sarana dan prasarana. Mendukung hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, dijelaskan secara rinci lingkup hingga komponen standar sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan satuan pendidikan. Sarana diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran, seperti bahan pembelajaran, alat pembelajaran, serta perlengkapan. Sementara itu, prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan, seperti lahan, bangunan, dan ruang. Kedua hal tersebut, sarana dan prasarana, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan yang menjadi penentu kualitas penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

https://www.nbc.go.id

2.1 Jumlah Sekolah

Fasilitas dasar yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan, salah satunya adalah bangunan sekolah. Sebagai bangunan tempat para siswa

menuntut pendidikan, diperlukan sekolah yang nyaman dengan lingkungan yang mendukung proses belajar mengajar yang optimal. Namun, satu hal penting yang harus menjadi perhatian adalah jumlah dan sebaran sekolah harus disesuaikan dengan distribusi populasi anak usia sekolah agar akses pendidikan merata dengan jarak tempuh yang wajar (World Bank, 1983 dan Barret, et.al, 2019).

Data jumlah sekolah yang diambil dari Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK menunjukkan bahwa jumlah sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada tahun ajaran 2024/2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023/2024. Penambahan jumlah sekolah paling banyak ada pada jenjang SMP (meningkat 550 sekolah). Sementara itu, pada jenjang SD terjadi peningkatan sebesar 276 sekolah, sedangkan pada jenjang SMK hanya meningkat sebesar 73 sekolah pada tahun ajaran 2024/2025.

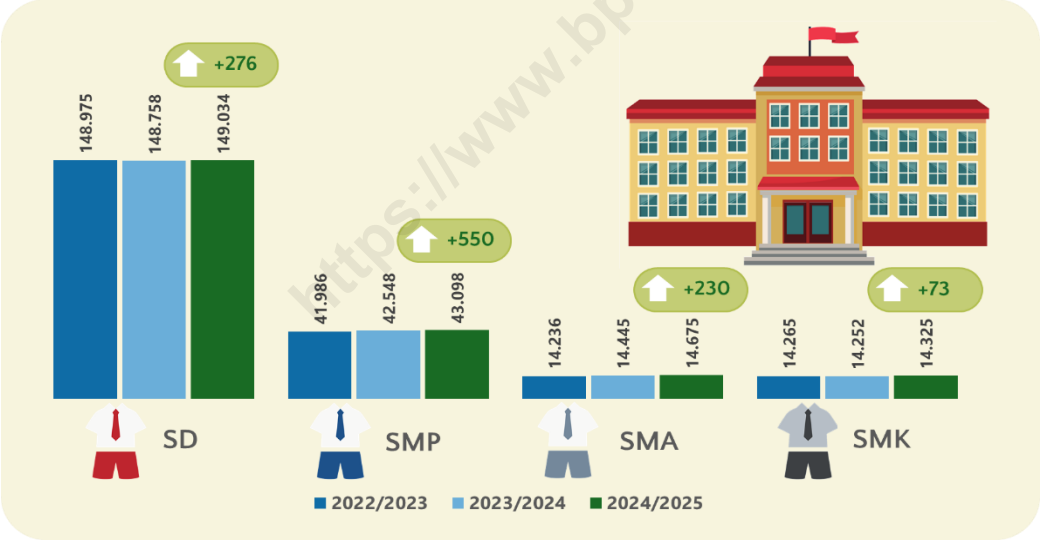

Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023–2024/2025

Gambar 2.1 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023, 2023/2024, dan 2024/2025

Untuk memastikan akses pendidikan yang setara, baik bagi peserta didik maupun guru, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak membedakan antara sekolah negeri maupun swasta, karena

memiliki tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024). Dalam laman yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq menyebutkan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak dapat dipegang sendiri oleh pemerintah, melainkan perlu dukungan dari swasta. Disebutkan pula bahwa telah menjadi tugas pemerintah dalam melahirkan kebijakan-kebijakan berkeadilan yang memungkinkan sekolah swasta juga memiliki kesempatan berkembang yang sama sebagaimana sekolah negeri.

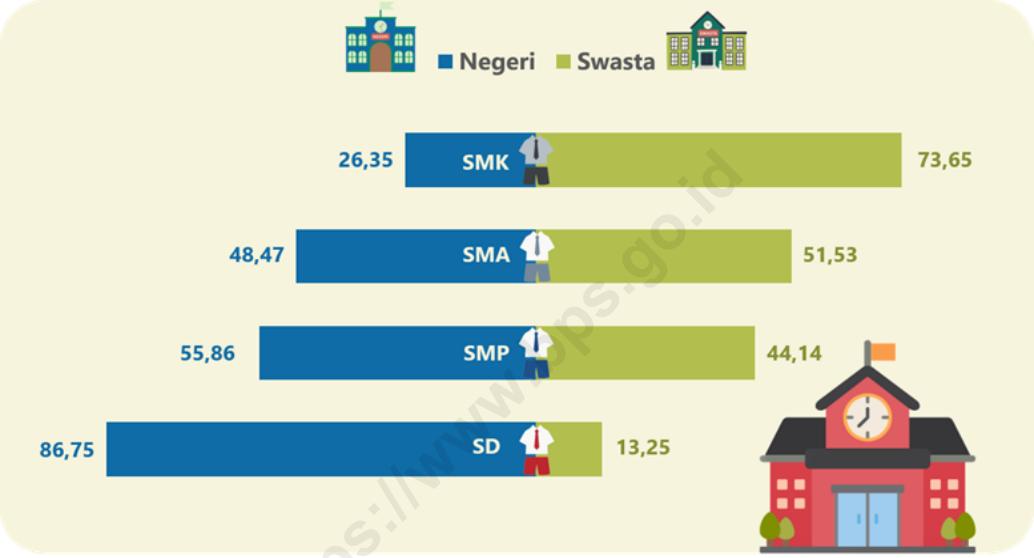

Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

Gambar 2.2 Persentase Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025

Pada jenjang pendidikan dasar, sekolah negeri lebih mendominasi dibandingkan sekolah swasta, yaitu sebesar 86,75 persen pada jenjang SD dan 55,86 persen pada jenjang SMP. Sebaliknya, pada jenjang pendidikan menengah, yang mendominasi adalah sekolah swasta, yaitu sebesar 51,53 persen pada jenjang SMA dan 73,65 persen pada jenjang SMK. Terlihat dari Gambar 2.2 bahwa proporsi sekolah negeri pada jenjang SMK hanya sekitar 26,35 persen.

2.2 Ketersediaan dan Kondisi Ruang Kelas

Salah satu prasarana yang menjadi fasilitas dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi satuan pendidikan adalah ruang kelas. Peningkatan jumlah ruang kelas akan mengikuti peningkatan jumlah sekolah pada seluruh jenjang. Pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Pasal 12 menyebutkan bahwa ruang kelas digunakan sebagai tempat kegiatan pembelajaran teori dan/atau praktik (baik yang tidak memerlukan peralatan khusus maupun dengan alat khusus yang mudah dihadirkan). Karena pentingnya fungsi ruang kelas tersebut, kenyamanan ruang kelas harus diutamakan agar dapat menunjang optimalisasi pembelajaran di ruang kelas.

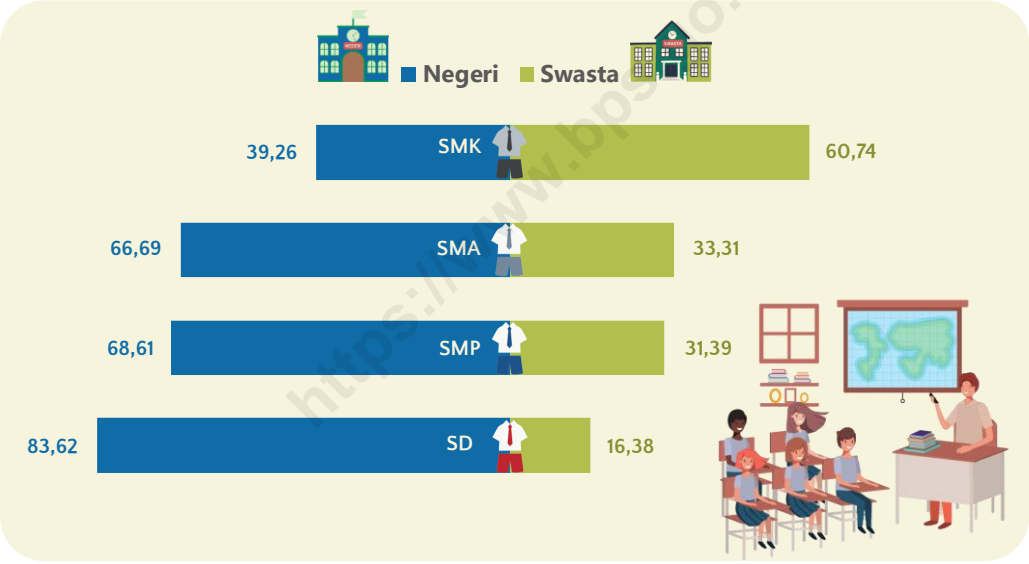

Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

Gambar 2.3 Persentase Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025

Secara umum, pola persentase ruang kelas pada setiap jenjang pendidikan menurut status sekolah sejalan dengan pola persentase sekolah pada setiap jenjang pendidikan menurut status sekolah. Terlihat pada Gambar 2.3 bahwa persentase ruang kelas di sekolah negeri pada jenjang SD dan SMP lebih

mendominasi dibandingkan sekolah swasta. Sebaliknya, pada jenjang SMK persentase ruang kelas di sekolah swasta jauh lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri, yaitu 60,74 persen berbanding 39,26 persen. Sementara itu, pada jenjang SMA terjadi perbedaan komposisi antara jumlah sekolah dan ruang kelas. Terlihat bahwa persentase sekolah pada jenjang SMA lebih besar pada sekolah swasta (Gambar 2.2), sedangkan persentase ruang kelas di jenjang yang sama lebih besar pada sekolah negeri (Gambar 2.3).

Kenyamanan ruang kelas bukan hanya dilihat dari sisi jumlah, tetapi penting juga untuk melihat kondisi dan keadaan ruang kelas tersebut. Pada Gambar 2.4 terlihat bahwa jenjang SD memiliki persentase ruang kelas dengan kondisi rusak berat yang paling tinggi dibandingkan jenjang lainnya, yaitu sekitar 10,81 persen. Sementara itu, SMK memiliki persentase ruang kelas dengan kondisi baik yang paling tinggi dibandingkan jenjang lainnya. Bahkan, hanya sekitar 3,74 persen ruang kelas SMK dalam kondisi rusak berat, jauh lebih rendah dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.

https://www.bps.go.id

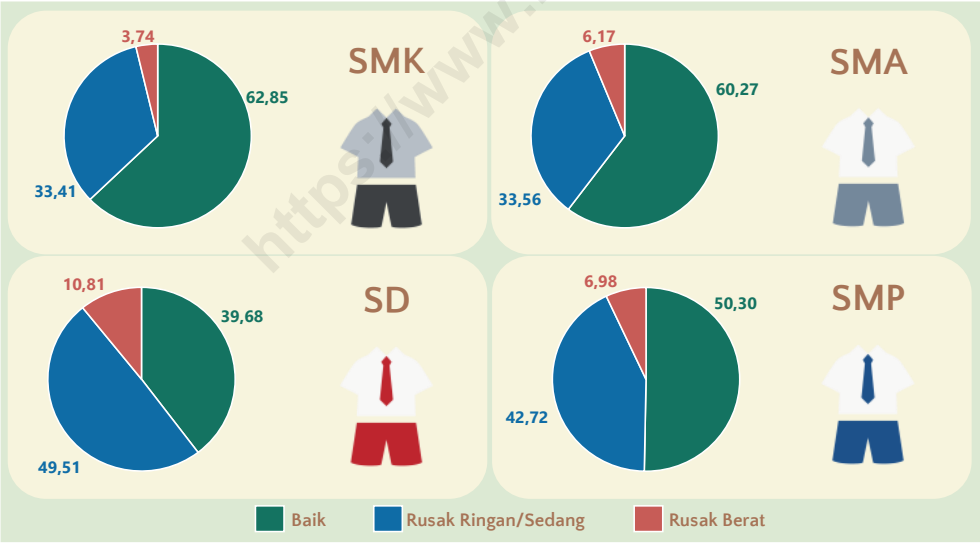

Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

Gambar 2.4 Persentase Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi Ruang Kelas, Tahun Ajaran 2024/2025

Selain dilihat dari jumlah dan kondisi ruang kelas, keseimbangan dan kecukupan antara jumlah kelas yang tersedia dengan jumlah peserta didik juga menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam proses pembelajaran. Kecukupan tersebut dapat diukur dari rasio peserta didik per rombongan belajar (rombel) dan rasio rombel per kelas. Rombongan belajar diartikan sebagai kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025a.)

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 dijelaskan bahwa rombel merupakan kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. Pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah diatur jumlah paling banyak peserta didik pada rombongan belajar di setiap jenjang pendidikan. Jumlah peserta didik yang diatur pada jenjang SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI) mencakup maksimal 28 peserta didik, SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) maksimal 32 peserta didik, dan SMA/Madrasah Aliyah (MA)/SMK/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) maksimal mencakup 36 peserta didik pada setiap rombel. Sementara itu, jumlah rombel pada setiap satuan pendidikan juga diatur sebagai berikut: pada jenjang SD/MI mencakup 6–24 rombongan belajar, SMP/MTs mencakup 3–33 rombongan belajar, SMA/MA maksimal mencakup 3–36 rombongan belajar, dan SMK/MAK mencakup 3–72 rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan.

Untuk menjaga efektivitas dan kenyamanan proses belajar mengajar, diperlukan aturan jumlah peserta didik di setiap rombongan belajar maupun jumlah rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan. Pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 juga dijelaskan mengenai ketentuan peserta didik per rombongan belajar paling banyak ditetapkan sebagai berikut: 28 peserta didik pada jenjang SD/MI, 32 peserta didik SMP/MTs, dan 36 peserta didik SMA/MA/SMK/MAK.

https://www.bps.go.id

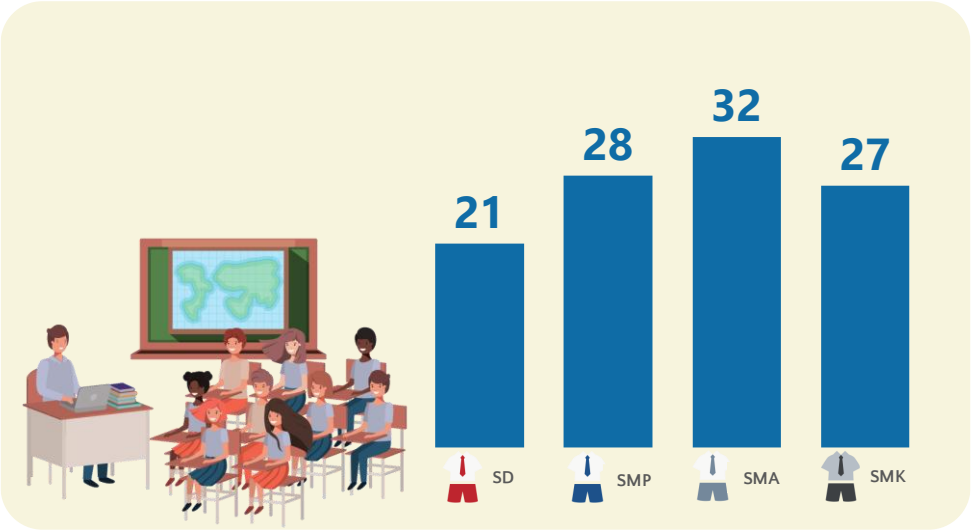

Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

Gambar 2.5 Rasio Peserta Didik per Rombel Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2024/2025

Terlihat pada Gambar 2.5 bahwa pada tahun ajaran 2024/2025, rasio peserta didik per rombel pada setiap jenjang dari SD hingga SMK sudah sesuai dengan jumlah maksimal yang ditentukan. Rasio peserta didik per rombel paling banyak pada jenjang SMA sebesar 32, artinya setiap rombel pada jenjang SMA terdiri dari 32 peserta didik. Sementara itu, setiap rombel pada jenjang SD memiliki 21 peserta didik.

Selain rasio peserta didik per rombel, indikator lain yang tidak kalah penting adalah rasio rombel per ruang kelas. Jika jumlah rombel sama dengan jumlah kelas pada setiap jenjang pendidikan maka ditunjukkan dengan rasio rombel per kelas adalah 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa satu rombel memiliki tepat satu kelas dan tidak ada ruang kelas yang digunakan untuk dua atau lebih rombel yang berbeda.

https://www.bps.go.id

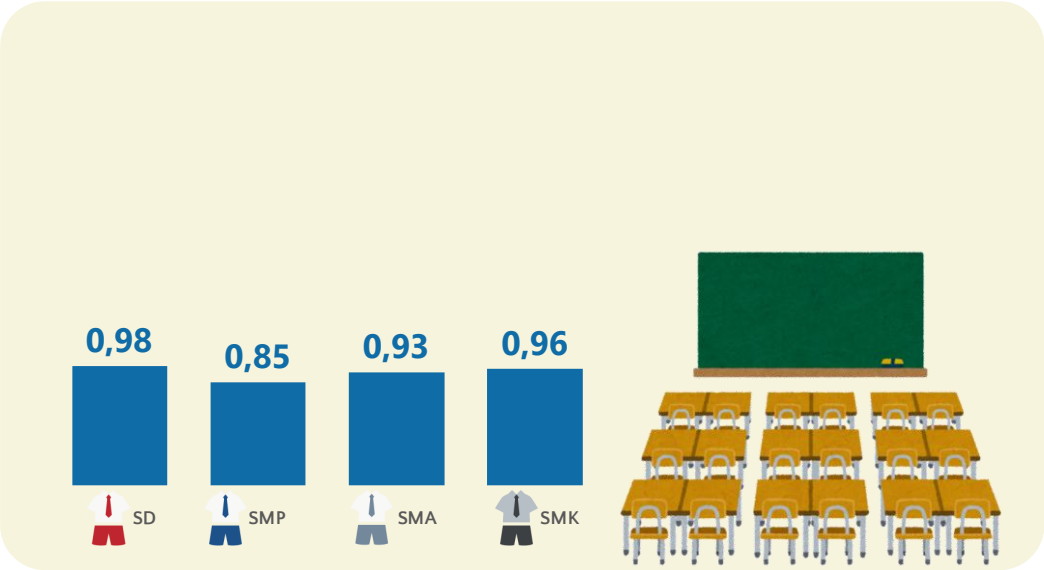

Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

Gambar 2.6 Rasio Rombel per Kelas Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2024/2025

Secara umum dapat terlihat bahwa dari jenjang SD sampai SMA dan SMK memiliki rasio rombel per kelas kurang dari satu. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah ruang kelas yang tersedia lebih besar daripada jumlah rombel. Dengan kata lain, ruang kelas yang tersedia masih mencukupi untuk jumlah peserta didik pada setiap jenjang, dengan tetap memperhatikan ketentuan daya tampung maksimal peserta didik. Dari keempat jenjang, terlihat bahwa rasio rombel per kelas yang paling rendah adalah SMP (0,85) dan yang paling tinggi adalah SD (0,98).

2.3 Sanitasi Sekolah

Salah satu prasarana yang mendukung kesuksesan dan kelancaran proses belajar di sekolah adalah sanitasi. Sanitasi yang baik mencerminkan lingkungan belajar yang nyaman dan sehat untuk proses belajar mengajar. Pemenuhan sanitasi juga menjadi salah satu penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah seperti yang tertera pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

https://www.bps.go.id

Tahun 2025–2029. Pemenuhan fasilitas dasar pendidikan, termasuk sanitasi dan air juga menjadi salah satu indikator SDGs (4.a.1).

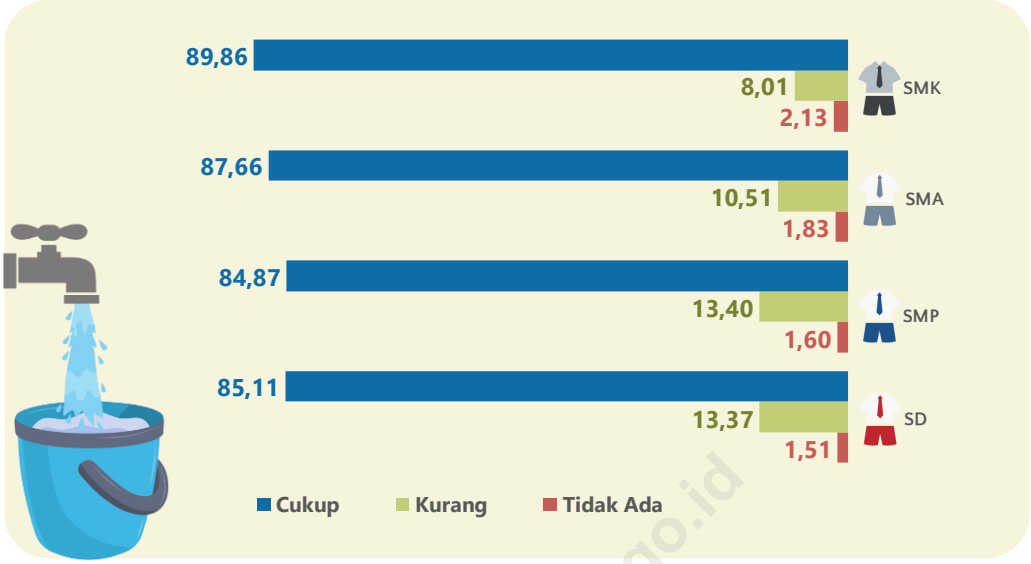

Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

Gambar 2.7 Persentase Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Kecukupan Sumber Air, Tahun Ajaran 2024/2025

Data pada tahun ajaran 2024/2025 menunjukkan semua jenjang pendidikan telah memiliki jumlah air yang cukup, yaitu di atas 80 persen. Dari semua jenjang, SMP memiliki persentase sekolah dengan sumber air cukup yang paling rendah (sebesar 84,87 persen). Sementara itu, masih ada sekitar 1 hingga 2 persen sekolah pada setiap jenjang yang tidak memiliki sumber air.

Bukan hanya kecukupan air, keberadaan toilet sekolah juga merupakan fasilitas sanitasi yang penting menunjang kenyamanan peserta didik ke sekolah. Sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Pasal 20 juga mengatur ketentuan yang diperlukan dalam penyediaan toilet di sekolah, termasuk terpisah sesuai jenis kelamin.

https://www.bps.go.id

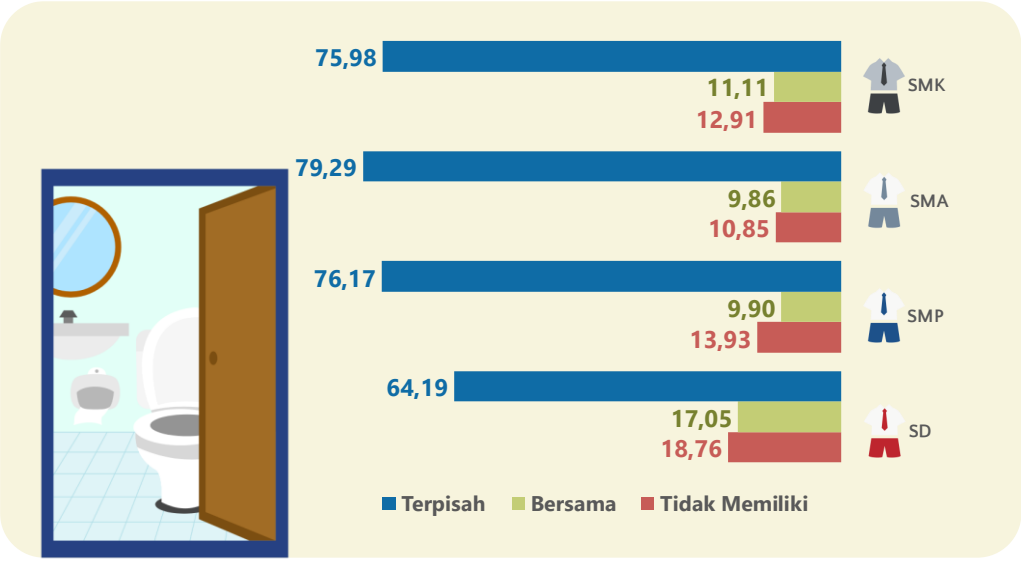

Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

Gambar 2.8 Persentase Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Ketersediaan Toilet Siswa Tahun Ajaran 2024/2025

Secara umum, pada setiap jenjang pendidikan setidaknya 8 dari 10 sekolah memiliki sarana toilet siswa (baik toilet terpisah maupun bersama). Jika dilihat lebih dalam, mayoritas sekolah juga telah memiliki toilet terpisah pada setiap jenjang. Dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, SD memiliki persentase ketersediaan toilet siswa terpisah yang paling rendah dibandingkan jenjang pendidikan lainnya (64,19 persen). Selain itu, persentase sekolah yang tidak memiliki fasilitas toilet siswa tertinggi juga terdapat pada jenjang SD (18,76 persen).

2.4 Guru

Selain kondisi ruang kelas dan sanitasi yang baik, jumlah dan kualitas guru yang mengajar turut menentukan kualitas pendidikan di setiap sekolah. Guru bertugas sebagai pendidik profesional yang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi murid sesuai yang tertera pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru Pasal 1.

https://www.bps.go.id

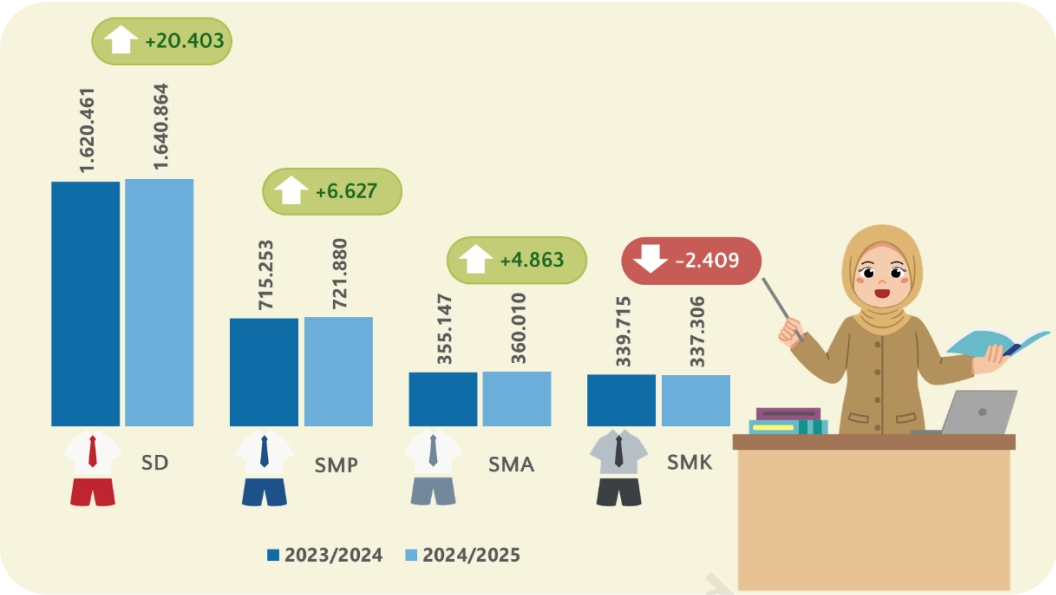

Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2023/2024 dan 2024/2025

Gambar 2.9 Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024 dan 2024/2025

Gambar 2.9 menunjukkan jumlah guru semakin rendah seiring semakin tingginya jenjang pendidikan. Menurut jenjang pendidikan, jumlah guru paling banyak terdapat pada jenjang SD, yaitu sekitar 1,6 juta guru. Sementara itu, jumlah guru pada jenjang SMA dan SMK yang paling rendah, yaitu 360.010 guru SMA dan 337.306 guru SMK pada tahun ajaran 2024/2025.

Pada tahun 2030, target Indonesia adalah secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2024a). Gambar 2.10 menunjukkan persentase guru yang memenuhi kualifikasi pada tahun ajaran 2024/2025. Guru yang memenuhi kualifikasi yang dimaksud adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Standar kualifikasi tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

https://www.bps.go.id

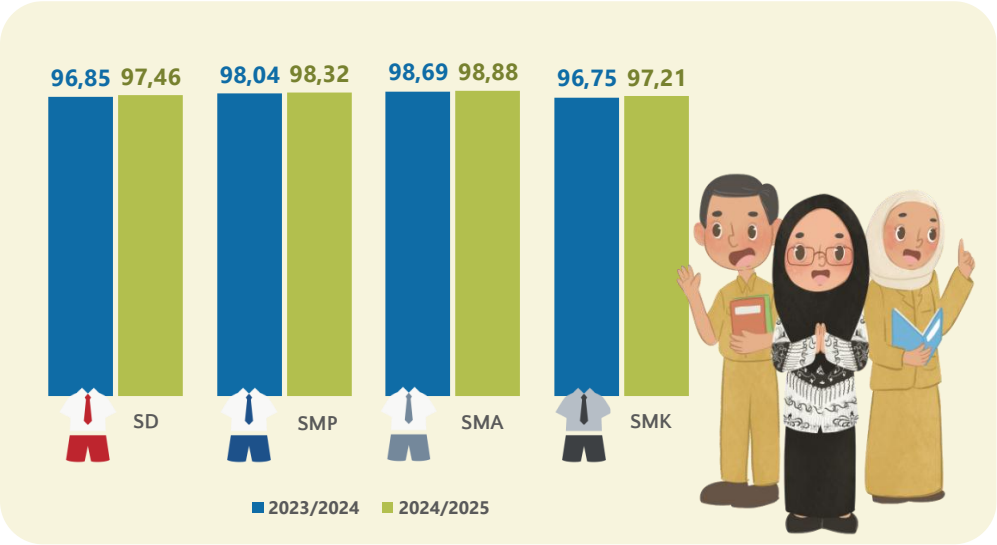

Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2023/2024 dan 2024/2025

Gambar 2.10 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024 dan 2024/2025

Data Kemendikdasmen menunjukkan bahwa secara umum, persentase guru yang memenuhi kualifikasi pada tahun ajaran 2024/2025 di setiap jenjang telah melebihi 95 persen. Jika dibandingkan dengan tahun ajaran 2023/2024, pada setiap jenjang pendidikan juga mengalami peningkatan guru yang memenuhi kualifikasi. Pada tahun ajaran 2024/2025, persentase guru yang memenuhi kualifikasi yang paling tinggi adalah pada jenjang SMA, yaitu 98,88 persen dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.

Kualitas pendidikan bukan hanya ditentukan dari jumlah guru dan guru yang memenuhi kualifikasi, melainkan bagaimana penyebaran dan distribusi guru di seluruh wilayah Indonesia. Sebaran jumlah guru idealnya sejalan dengan jumlah peserta didik di setiap wilayah. Dengan demikian, harapannya beban kerja guru dalam menangani peserta didik (yang dapat dilihat melalui rasio murid-guru) juga turut merata.

https://www.bps.go.id

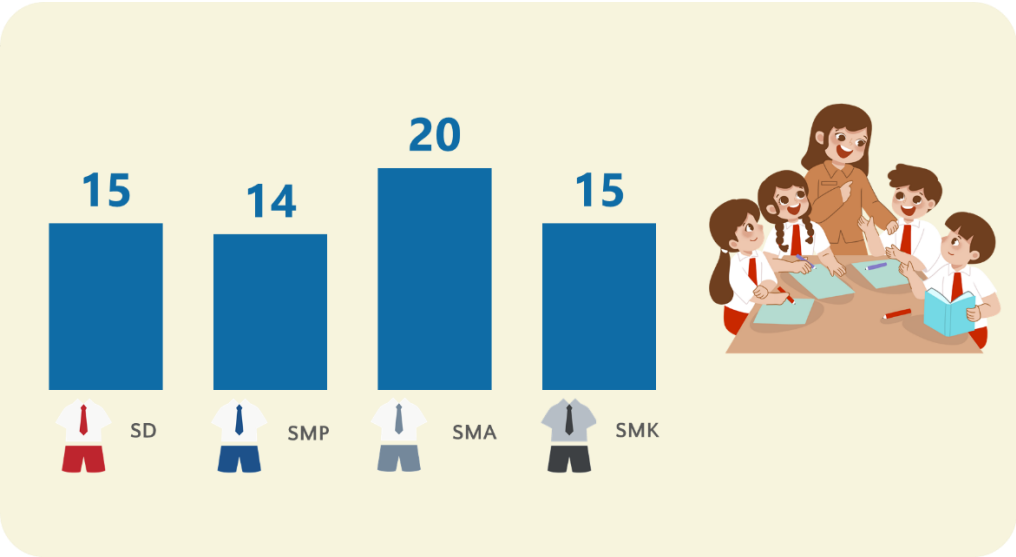

Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

Gambar 2.11 Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2024/2025

Rasio murid-guru merupakan rata-rata jumlah murid per jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi rasio murid-guru menunjukkan bahwa setiap guru bertanggung jawab atas semakin banyak murid. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyebutkan bahwa rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru yaitu 20:1 untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, serta 15:1 untuk jenjang SMK. Gambar 2.11 menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 2024/2025 rasio murid-guru di setiap jenjang masih dapat dikatakan ideal.

https://www.bps.go.id

Tabel 2.1 Jumlah dan Persentase Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025

Provinsi	Negeri		Swasta		Negeri+Swasta	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	3.336	94,16	207	5,84	3.543	100,00
Sumatera Utara	8.116	83,27	1.631	16,73	9.747	100,00
Sumatera Barat	3.892	92,25	327	7,75	4.219	100,00
Riau	3.232	84,23	605	15,77	3.837	100,00
Jambi	2.302	93,05	172	6,95	2.474	100,00
Sumatera Selatan	4.250	89,68	489	10,32	4.739	100,00
Bengkulu	1.289	91,55	119	8,45	1.408	100,00
Lampung	4.295	90,57	447	9,43	4.742	100,00
Kep. Bangka Belitung	761	91,47	71	8,53	832	100,00
Kepulauan Riau	683	69,13	305	30,87	988	100,00
DKI Jakarta	1.305	58,70	918	41,30	2.223	100,00
Jawa Barat	16.980	86,91	2.558	13,09	19.538	100,00
Jawa Tengah	17.254	92,78	1.343	7,22	18.597	100,00
DI Yogyakarta	1.418	77,02	423	22,98	1.841	100,00
Jawa Timur	16.864	88,87	2.111	11,13	18.975	100,00
Banten	3.853	82,82	799	17,18	4.652	100,00
Bali	2.251	93,52	156	6,48	2.407	100,00
Nusa Tenggara Barat	3.008	89,74	344	10,26	3.352	100,00
Nusa Tenggara Timur	3.415	65,08	1.832	34,92	5.247	100,00
Kalimantan Barat	4.139	92,91	316	7,09	4.455	100,00
Kalimantan Tengah	2.412	90,92	241	9,08	2.653	100,00
Kalimantan Selatan	2.737	93,64	186	6,36	2.923	100,00
Kalimantan Timur	1.664	85,60	280	14,40	1.944	100,00
Kalimantan Utara	437	89,92	49	10,08	486	100,00
Sulawesi Utara	1.349	61,04	861	38,96	2.210	100,00
Sulawesi Tengah	2.676	90,74	273	9,26	2.949	100,00
Sulawesi Selatan	6.071	94,09	381	5,91	6.452	100,00
Sulawesi Tenggara	2.265	96,30	87	3,70	2.352	100,00
Gorontalo	897	96,14	36	3,86	933	100,00
Sulawesi Barat	1.296	97,59	32	2,41	1.328	100,00
Maluku	1.299	70,75	537	29,25	1.836	100,00
Maluku Utara	1.116	84,67	202	15,33	1.318	100,00
Papua Barat	412	71,78	162	28,22	574	100,00
Papua Barat Daya	305	55,05	249	44,95	554	100,00
Papua	515	60,59	335	39,41	850	100,00
Papua Selatan	377	61,00	241	39,00	618	100,00
Papua Tengah	295	52,68	265	47,32	560	100,00
Papua Pegunungan	518	76,40	160	23,60	678	100,00
Indonesia	**129.284**	**86,75**	**19.750**	**13,25**	**149.034**	**100,00**

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

https://www.bps.go.id

Tabel 2.2 Jumlah dan Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025

Provinsi	Negeri		Swasta		Negeri+Swasta	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	906	68,22	422	31,78	1.328	100,00
Sumatera Utara	1.340	49,46	1.369	50,54	2.709	100,00
Sumatera Barat	676	78,15	189	21,85	865	100,00
Riau	889	67,91	420	32,09	1.309	100,00
Jambi	559	77,64	161	22,36	720	100,00
Sumatera Selatan	905	61,86	558	38,14	1.463	100,00
Bengkulu	380	82,61	80	17,39	460	100,00
Lampung	710	47,88	773	52,12	1.483	100,00
Kep. Bangka Belitung	164	68,91	74	31,09	238	100,00
Kepulauan Riau	236	55,66	188	44,34	424	100,00
DKI Jakarta	293	27,43	775	72,57	1.068	100,00
Jawa Barat	1.993	32,94	4.058	67,06	6.051	100,00
Jawa Tengah	1.771	51,24	1.685	48,76	3.456	100,00
DI Yogyakarta	214	47,24	239	52,76	453	100,00
Jawa Timur	1.737	34,41	3.311	65,59	5.048	100,00
Banten	576	35,51	1.046	64,49	1.622	100,00
Bali	277	68,91	125	31,09	402	100,00
Nusa Tenggara Barat	606	55,44	487	44,56	1.093	100,00
Nusa Tenggara Timur	1.396	75,13	462	24,87	1.858	100,00
Kalimantan Barat	1.037	74,71	351	25,29	1.388	100,00
Kalimantan Tengah	719	81,98	158	18,02	877	100,00
Kalimantan Selatan	522	82,46	111	17,54	633	100,00
Kalimantan Timur	459	64,02	258	35,98	717	100,00
Kalimantan Utara	157	79,29	41	20,71	198	100,00
Sulawesi Utara	478	65,12	256	34,88	734	100,00
Sulawesi Tengah	735	83,24	148	16,76	883	100,00
Sulawesi Selatan	1.269	73,31	462	26,69	1.731	100,00
Sulawesi Tenggara	699	87,92	96	12,08	795	100,00
Gorontalo	313	90,99	31	9,01	344	100,00
Sulawesi Barat	319	83,51	63	16,49	382	100,00
Maluku	561	79,57	144	20,43	705	100,00
Maluku Utara	380	72,66	143	27,34	523	100,00
Papua Barat	126	76,36	39	23,64	165	100,00
Papua Barat Daya	125	67,20	61	32,80	186	100,00
Papua	196	71,01	80	28,99	276	100,00
Papua Selatan	95	71,97	37	28,03	132	100,00
Papua Tengah	101	59,06	70	40,94	171	100,00
Papua Pegunungan	157	75,48	51	24,52	208	100,00
Indonesia	**24.076**	**55,86**	**19.022**	**44,14**	**43.098**	**100,00**

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

https://www.bps.go.id

Tabel 2.3 Jumlah dan Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025

Provinsi	Negeri		Swasta		Negeri+Swasta	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	395	72,74	148	27,26	543	100,00
Sumatera Utara	438	40,74	637	59,26	1.075	100,00
Sumatera Barat	238	68,99	107	31,01	345	100,00
Riau	321	66,74	160	33,26	481	100,00
Jambi	163	64,68	89	35,32	252	100,00
Sumatera Selatan	330	53,23	290	46,77	620	100,00
Bengkulu	110	71,90	43	28,10	153	100,00
Lampung	240	44,61	298	55,39	538	100,00
Kep. Bangka Belitung	47	61,04	30	38,96	77	100,00
Kepulauan Riau	96	53,93	82	46,07	178	100,00
DKI Jakarta	117	23,21	387	76,79	504	100,00
Jawa Barat	514	28,24	1.306	71,76	1.820	100,00
Jawa Tengah	362	41,71	506	58,29	868	100,00
DI Yogyakarta	69	39,43	106	60,57	175	100,00
Jawa Timur	421	27,77	1.095	72,23	1.516	100,00
Banten	161	26,39	449	73,61	610	100,00
Bali	90	55,90	71	44,10	161	100,00
Nusa Tenggara Barat	150	39,68	228	60,32	378	100,00
Nusa Tenggara Timur	397	64,24	221	35,76	618	100,00
Kalimantan Barat	292	60,46	191	39,54	483	100,00
Kalimantan Tengah	182	73,39	66	26,61	248	100,00
Kalimantan Selatan	143	68,10	67	31,90	210	100,00
Kalimantan Timur	146	60,58	95	39,42	241	100,00
Kalimantan Utara	49	69,01	22	30,99	71	100,00
Sulawesi Utara	121	52,84	108	47,16	229	100,00
Sulawesi Tengah	177	74,37	61	25,63	238	100,00
Sulawesi Selatan	337	55,16	274	44,84	611	100,00
Sulawesi Tenggara	254	79,87	64	20,13	318	100,00
Gorontalo	62	87,32	9	12,68	71	100,00
Sulawesi Barat	77	82,80	16	17,20	93	100,00
Maluku	216	73,97	76	26,03	292	100,00
Maluku Utara	139	61,78	86	38,22	225	100,00
Papua Barat	45	68,18	21	31,82	66	100,00
Papua Barat Daya	50	61,73	31	38,27	81	100,00
Papua	62	52,54	56	47,46	118	100,00
Papua Selatan	24	60,00	16	40,00	40	100,00
Papua Tengah	31	51,67	29	48,33	60	100,00
Papua Pegunungan	47	69,12	21	30,88	68	100,00
Indonesia	**7.113**	**48,47**	**7.562**	**51,53**	**14.675**	**100,00**

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

https://www.bps.go.id

Tabel 2.4 Jumlah dan Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025

Provinsi	Negeri		Swasta		Negeri+Swasta	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	154	68,75	70	31,25	224	100,00
Sumatera Utara	279	29,28	674	70,72	953	100,00
Sumatera Barat	116	53,70	100	46,30	216	100,00
Riau	139	44,84	171	55,16	310	100,00
Jambi	108	59,02	75	40,98	183	100,00
Sumatera Selatan	121	38,41	194	61,59	315	100,00
Bengkulu	65	63,11	38	36,89	103	100,00
Lampung	112	22,76	380	77,24	492	100,00
Kep. Bangka Belitung	36	61,02	23	38,98	59	100,00
Kepulauan Riau	38	35,85	68	64,15	106	100,00
DKI Jakarta	73	13,13	483	86,87	556	100,00
Jawa Barat	288	9,86	2.634	90,14	2.922	100,00
Jawa Tengah	239	15,45	1.308	84,55	1.547	100,00
DI Yogyakarta	50	24,15	157	75,85	207	100,00
Jawa Timur	299	13,84	1.861	86,16	2.160	100,00
Banten	98	13,30	639	86,70	737	100,00
Bali	58	34,32	111	65,68	169	100,00
Nusa Tenggara Barat	100	29,33	241	70,67	341	100,00
Nusa Tenggara Timur	178	50,14	177	49,86	355	100,00
Kalimantan Barat	120	51,06	115	48,94	235	100,00
Kalimantan Tengah	94	67,63	45	32,37	139	100,00
Kalimantan Selatan	64	50,79	62	49,21	126	100,00
Kalimantan Timur	88	40,74	128	59,26	216	100,00
Kalimantan Utara	22	64,71	12	35,29	34	100,00
Sulawesi Utara	94	48,96	98	51,04	192	100,00
Sulawesi Tengah	107	58,47	76	41,53	183	100,00
Sulawesi Selatan	168	41,38	238	58,62	406	100,00
Sulawesi Tenggara	103	60,59	67	39,41	170	100,00
Gorontalo	40	67,80	19	32,20	59	100,00
Sulawesi Barat	60	46,88	68	53,13	128	100,00
Maluku	84	69,42	37	30,58	121	100,00
Maluku Utara	63	41,72	88	58,28	151	100,00
Papua Barat	16	76,19	5	23,81	21	100,00
Papua Barat Daya	16	41,03	23	58,97	39	100,00
Papua	35	71,43	14	28,57	49	100,00
Papua Selatan	21	84,00	4	16,00	25	100,00
Papua Tengah	17	31,48	37	68,52	54	100,00
Papua Pegunungan	12	54,55	10	45,45	22	100,00
Indonesia	**3.775**	**26,35**	**10.550**	**73,65**	**14.325**	**100,00**

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

https://www.bps.go.id

Tabel 2.5 Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2024/2025

Provinsi	Kondisi Ruang Kelas			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan/Sedang	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	37,12	51,15	11,74	100,00
Sumatera Utara	41,22	45,46	13,32	100,00
Sumatera Barat	36,67	52,39	10,94	100,00
Riau	45,92	43,41	10,67	100,00
Jambi	36,20	51,61	12,19	100,00
Sumatera Selatan	39,58	52,29	8,13	100,00
Bengkulu	35,36	57,55	7,09	100,00
Lampung	33,20	56,20	10,60	100,00
Kep. Bangka Belitung	45,28	43,60	11,13	100,00
Kepulauan Riau	61,09	31,81	7,10	100,00
DKI Jakarta	83,55	15,42	1,03	100,00
Jawa Barat	38,49	51,67	9,84	100,00
Jawa Tengah	35,38	54,46	10,16	100,00
DI Yogyakarta	53,18	42,71	4,11	100,00
Jawa Timur	39,77	49,88	10,34	100,00
Banten	50,24	41,17	8,59	100,00
Bali	47,55	46,55	5,91	100,00
Nusa Tenggara Barat	31,04	62,91	6,05	100,00
Nusa Tenggara Timur	30,76	52,49	16,75	100,00
Kalimantan Barat	34,85	50,32	14,83	100,00
Kalimantan Tengah	37,42	50,80	11,78	100,00
Kalimantan Selatan	37,90	53,69	8,41	100,00
Kalimantan Timur	54,48	36,88	8,64	100,00
Kalimantan Utara	46,27	36,23	17,50	100,00
Sulawesi Utara	41,46	44,15	14,38	100,00
Sulawesi Tengah	36,52	48,38	15,10	100,00
Sulawesi Selatan	34,01	54,47	11,52	100,00
Sulawesi Tenggara	34,43	49,85	15,73	100,00
Gorontalo	44,29	46,17	9,54	100,00
Sulawesi Barat	28,34	50,30	21,35	100,00
Maluku	35,31	47,56	17,14	100,00
Maluku Utara	27,86	57,18	14,96	100,00
Papua Barat	40,65	49,85	9,50	100,00
Papua Barat Daya	40,51	45,20	14,29	100,00
Papua	31,32	52,32	16,36	100,00
Papua Selatan	33,34	51,67	14,99	100,00
Papua Tengah	37,38	52,20	10,42	100,00
Papua Pegunungan	29,71	48,94	21,35	100,00
Indonesia	**39,68**	**49,51**	**10,81**	**100,00**

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

https://www.bps.go.id

Tabel 2.6 Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2024/2025

Provinsi	Kondisi Ruang Kelas			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan/Sedang	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	45,77	44,37	9,85	100,00
Sumatera Utara	49,62	41,07	9,31	100,00
Sumatera Barat	48,89	42,99	8,12	100,00
Riau	50,63	41,23	8,14	100,00
Jambi	44,11	47,51	8,38	100,00
Sumatera Selatan	46,79	48,52	4,69	100,00
Bengkulu	40,34	55,60	4,06	100,00
Lampung	45,64	47,61	6,75	100,00
Kep. Bangka Belitung	57,66	34,96	7,38	100,00
Kepulauan Riau	65,00	29,75	5,25	100,00
DKI Jakarta	86,27	13,26	0,47	100,00
Jawa Barat	52,72	41,44	5,84	100,00
Jawa Tengah	48,96	45,81	5,22	100,00
DI Yogyakarta	55,62	40,30	4,08	100,00
Jawa Timur	51,27	41,40	7,33	100,00
Banten	61,07	34,12	4,81	100,00
Bali	63,14	33,80	3,06	100,00
Nusa Tenggara Barat	40,77	53,65	5,59	100,00
Nusa Tenggara Timur	41,53	48,23	10,24	100,00
Kalimantan Barat	40,49	50,45	9,06	100,00
Kalimantan Tengah	46,07	46,72	7,21	100,00
Kalimantan Selatan	49,86	44,15	5,99	100,00
Kalimantan Timur	63,40	30,28	6,32	100,00
Kalimantan Utara	59,96	32,19	7,85	100,00
Sulawesi Utara	41,43	48,53	10,04	100,00
Sulawesi Tengah	41,97	47,21	10,82	100,00
Sulawesi Selatan	45,04	48,12	6,84	100,00
Sulawesi Tenggara	44,02	44,74	11,25	100,00
Gorontalo	52,83	39,61	7,55	100,00
Sulawesi Barat	34,78	49,98	15,23	100,00
Maluku	42,05	43,18	14,77	100,00
Maluku Utara	31,23	57,62	11,15	100,00
Papua Barat	39,55	50,87	9,58	100,00
Papua Barat Daya	42,19	46,12	11,69	100,00
Papua	30,84	58,35	10,81	100,00
Papua Selatan	44,63	45,96	9,41	100,00
Papua Tengah	46,57	49,02	4,41	100,00
Papua Pegunungan	31,14	49,07	19,79	100,00
Indonesia	**50,30**	**42,72**	**6,98**	**100,00**

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

https://www.bps.go.id

Tabel 2.7 Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2024/2025

Provinsi	Kondisi Ruang Kelas			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan/Sedang	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	47,20	42,27	10,53	100,00
Sumatera Utara	59,78	33,88	6,34	100,00
Sumatera Barat	53,68	38,89	7,43	100,00
Riau	66,28	29,53	4,19	100,00
Jambi	55,33	36,46	8,22	100,00
Sumatera Selatan	56,47	40,50	3,03	100,00
Bengkulu	48,12	47,73	4,16	100,00
Lampung	56,30	33,98	9,72	100,00
Kep. Bangka Belitung	64,48	24,36	11,16	100,00
Kepulauan Riau	76,36	18,80	4,84	100,00
DKI Jakarta	91,62	7,95	0,43	100,00
Jawa Barat	62,41	33,04	4,55	100,00
Jawa Tengah	63,47	30,60	5,93	100,00
DI Yogyakarta	68,86	26,76	4,38	100,00
Jawa Timur	65,15	29,63	5,21	100,00
Banten	69,29	26,29	4,42	100,00
Bali	76,24	18,69	5,07	100,00
Nusa Tenggara Barat	42,85	51,85	5,30	100,00
Nusa Tenggara Timur	53,88	37,13	8,99	100,00
Kalimantan Barat	60,47	30,93	8,59	100,00
Kalimantan Tengah	57,23	36,44	6,33	100,00
Kalimantan Selatan	70,81	25,93	3,26	100,00
Kalimantan Timur	52,90	43,46	3,64	100,00
Kalimantan Utara	62,55	31,41	6,04	100,00
Sulawesi Utara	50,69	42,45	6,86	100,00
Sulawesi Tengah	58,68	33,96	7,36	100,00
Sulawesi Selatan	50,65	41,99	7,36	100,00
Sulawesi Tenggara	49,25	37,19	13,55	100,00
Gorontalo	72,23	18,34	9,43	100,00
Sulawesi Barat	59,74	34,74	5,53	100,00
Maluku	43,86	44,90	11,23	100,00
Maluku Utara	50,57	38,71	10,71	100,00
Papua Barat	56,42	39,49	4,09	100,00
Papua Barat Daya	43,08	47,03	9,89	100,00
Papua	30,36	59,57	10,07	100,00
Papua Selatan	56,30	39,71	3,99	100,00
Papua Tengah	53,82	40,41	5,77	100,00
Papua Pegunungan	35,07	49,27	15,66	100,00
Indonesia	**60,27**	**33,56**	**6,17**	**100,00**

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

https://www.bps.go.id

Tabel 2.8 Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2024/2025

Provinsi	Kondisi Ruang Kelas			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan/Sedang	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	51,83	41,24	6,93	100,00
Sumatera Utara	62,37	33,35	4,28	100,00
Sumatera Barat	60,13	36,20	3,67	100,00
Riau	66,83	29,74	3,43	100,00
Jambi	50,88	45,15	3,97	100,00
Sumatera Selatan	61,67	35,50	2,83	100,00
Bengkulu	43,85	47,73	8,43	100,00
Lampung	57,13	37,81	5,06	100,00
Kep. Bangka Belitung	68,40	23,56	8,04	100,00
Kepulauan Riau	72,35	26,58	1,07	100,00
DKI Jakarta	85,97	13,60	0,44	100,00
Jawa Barat	63,39	33,73	2,88	100,00
Jawa Tengah	63,84	33,85	2,31	100,00
DI Yogyakarta	68,77	26,08	5,14	100,00
Jawa Timur	67,94	29,78	2,28	100,00
Banten	61,99	35,82	2,19	100,00
Bali	71,52	27,55	0,93	100,00
Nusa Tenggara Barat	51,04	40,86	8,10	100,00
Nusa Tenggara Timur	53,51	35,87	10,62	100,00
Kalimantan Barat	56,05	38,34	5,61	100,00
Kalimantan Tengah	50,76	43,05	6,19	100,00
Kalimantan Selatan	69,05	27,47	3,48	100,00
Kalimantan Timur	63,01	33,44	3,55	100,00
Kalimantan Utara	59,73	32,66	7,61	100,00
Sulawesi Utara	55,58	41,01	3,41	100,00
Sulawesi Tengah	54,12	40,64	5,24	100,00
Sulawesi Selatan	56,54	37,28	6,18	100,00
Sulawesi Tenggara	49,16	38,19	12,65	100,00
Gorontalo	58,04	37,32	4,64	100,00
Sulawesi Barat	57,58	29,39	13,03	100,00
Maluku	42,77	40,28	16,95	100,00
Maluku Utara	41,83	47,49	10,68	100,00
Papua Barat	59,52	39,46	1,02	100,00
Papua Barat Daya	49,56	45,35	5,09	100,00
Papua	44,53	49,00	6,47	100,00
Papua Selatan	48,12	41,45	10,43	100,00
Papua Tengah	29,75	63,56	6,69	100,00
Papua Pegunungan	50,57	43,75	5,68	100,00
Indonesia	**62,85**	**33,41**	**3,74**	**100,00**

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

https://www.bps.go.id

Tabel 2.9 Rasio Peserta Didik per Rombel Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2024/2025

Provinsi	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	19	25	29	21
Sumatera Utara	20	28	32	26
Sumatera Barat	18	27	32	25
Riau	22	27	32	25
Jambi	19	26	31	23
Sumatera Selatan	21	28	32	28
Bengkulu	18	26	31	22
Lampung	21	28	31	26
Kep. Bangka Belitung	23	30	33	28
Kepulauan Riau	23	31	32	27
DKI Jakarta	27	32	32	29
Jawa Barat	26	31	33	28
Jawa Tengah	20	30	34	30
DI Yogyakarta	19	29	32	28
Jawa Timur	19	28	32	28
Banten	27	31	33	29
Bali	22	32	34	29
Nusa Tenggara Barat	21	26	30	23
Nusa Tenggara Timur	18	26	29	22
Kalimantan Barat	18	27	30	26
Kalimantan Tengah	15	24	29	23
Kalimantan Selatan	17	26	31	27
Kalimantan Timur	22	28	32	27
Kalimantan Utara	19	26	30	25
Sulawesi Utara	15	24	29	18
Sulawesi Tengah	16	23	30	21
Sulawesi Selatan	19	26	31	23
Sulawesi Tenggara	17	24	29	18
Gorontalo	18	22	32	19
Sulawesi Barat	16	24	30	20
Maluku	17	24	28	18
Maluku Utara	16	24	28	18
Papua Barat	17	26	29	21
Papua Barat Daya	16	25	25	20
Papua	19	27	31	21
Papua Selatan	22	28	30	23
Papua Tengah	27	30	31	22
Papua Pegunungan	27	32	30	30
Indonesia	**21**	**28**	**32**	**27**

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

https://www.bps.go.id

Tabel 2.10 Rasio Rombel per Kelas Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2024/2025

Provinsi	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,95	0,73	0,74	0,96
Sumatera Utara	0,94	0,81	0,89	0,97
Sumatera Barat	0,95	0,78	0,87	1,11
Riau	1,00	0,83	0,88	1,11
Jambi	0,94	0,76	0,85	0,99
Sumatera Selatan	1,05	0,88	0,91	1,21
Bengkulu	0,90	0,79	0,90	0,98
Lampung	0,94	0,84	0,92	1,09
Kep. Bangka Belitung	0,91	0,86	0,90	0,88
Kepulauan Riau	1,03	0,91	0,90	1,33
DKI Jakarta	0,97	0,88	0,85	1,02
Jawa Barat	1,09	0,88	0,98	1,21
Jawa Tengah	0,94	0,89	0,91	1,24
DI Yogyakarta	0,94	0,90	0,85	1,13
Jawa Timur	0,95	0,87	0,87	1,22
Banten	1,07	0,86	0,89	1,15
Bali	0,97	0,96	0,86	1,39
Nusa Tenggara Barat	1,03	0,85	0,92	1,11
Nusa Tenggara Timur	0,86	0,80	0,84	1,03
Kalimantan Barat	1,00	0,85	0,91	1,21
Kalimantan Tengah	0,95	0,81	0,85	0,92
Kalimantan Selatan	0,94	0,76	0,84	1,14
Kalimantan Timur	1,04	0,85	0,90	1,09
Kalimantan Utara	1,04	0,88	0,89	0,97
Sulawesi Utara	0,94	0,79	0,76	0,96
Sulawesi Tengah	0,93	0,77	0,91	0,94
Sulawesi Selatan	0,98	0,79	0,81	0,86
Sulawesi Tenggara	0,97	0,76	0,82	0,94
Gorontalo	0,90	0,75	0,85	0,87
Sulawesi Barat	0,98	0,78	0,83	0,82
Maluku	0,90	0,76	0,80	0,92
Maluku Utara	0,95	0,78	0,84	0,94
Papua Barat	0,98	0,90	0,84	1,08
Papua Barat Daya	1,04	0,84	0,83	0,94
Papua	0,90	0,88	0,91	0,92
Papua Selatan	0,90	0,92	0,97	0,95
Papua Tengah	0,95	1,01	0,97	0,88
Papua Pegunungan	0,98	1,14	1,03	0,91
Indonesia	**0,98**	**0,85**	**0,93**	**0,96**

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

https://www.bps.go.id

Tabel 2.11 Persentase Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi dan Kecukupan Sumber Air, Tahun Ajaran 2024/2025

Provinsi	Kecukupan Sumber Air		
	Cukup	Kurang	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	81,94	16,26	1,81
Sumatera Utara	80,62	17,75	1,63
Sumatera Barat	84,36	14,39	1,26
Riau	83,27	15,27	1,46
Jambi	83,59	15,24	1,17
Sumatera Selatan	85,02	13,38	1,60
Bengkulu	83,74	14,70	1,56
Lampung	88,25	10,50	1,24
Kep. Bangka Belitung	84,01	14,42	1,56
Kepulauan Riau	86,74	10,32	2,94
DKI Jakarta	96,63	2,34	1,03
Jawa Barat	87,91	10,56	1,53
Jawa Tengah	93,13	5,54	1,33
DI Yogyakarta	95,27	4,07	0,65
Jawa Timur	91,86	6,91	1,22
Banten	89,36	9,22	1,42
Bali	92,90	6,15	0,96
Nusa Tenggara Barat	85,71	12,74	1,55
Nusa Tenggara Timur	59,90	38,08	2,02
Kalimantan Barat	67,41	30,71	1,89
Kalimantan Tengah	78,55	20,02	1,43
Kalimantan Selatan	89,02	9,65	1,33
Kalimantan Timur	81,84	16,46	1,70
Kalimantan Utara	74,28	23,66	2,06
Sulawesi Utara	86,97	11,27	1,76
Sulawesi Tengah	81,45	17,12	1,42
Sulawesi Selatan	86,61	12,00	1,39
Sulawesi Tenggara	82,53	16,50	0,98
Gorontalo	85,74	12,86	1,39
Sulawesi Barat	80,27	17,77	1,96
Maluku	77,40	20,04	2,56
Maluku Utara	82,47	14,49	3,03
Papua Barat	65,68	33,10	1,22
Papua Barat Daya	66,43	31,41	2,17
Papua	63,41	33,29	3,29
Papua Selatan	43,37	54,53	2,10
Papua Tengah	63,39	32,50	4,11
Papua Pegunungan	44,54	51,03	4,42
Indonesia	**85,11**	**13,37**	**1,51**

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

https://www.bps.go.id

Tabel 2.12 Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Provinsi dan Kecukupan Sumber Air, Tahun Ajaran 2024/2025

Provinsi	Kecukupan Sumber Air		
	Cukup	Kurang	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	80,12	17,70	2,18
Sumatera Utara	83,39	14,80	1,81
Sumatera Barat	83,93	14,57	1,50
Riau	83,35	15,20	1,45
Jambi	82,36	15,42	2,22
Sumatera Selatan	84,83	13,06	2,12
Bengkulu	88,26	11,09	0,65
Lampung	89,95	8,63	1,42
Kep. Bangka Belitung	84,87	13,87	1,26
Kepulauan Riau	88,21	9,67	2,12
DKI Jakarta	97,10	1,87	1,03
Jawa Barat	89,56	8,81	1,64
Jawa Tengah	93,55	5,53	0,93
DI Yogyakarta	94,48	4,64	0,88
Jawa Timur	91,28	7,25	1,47
Banten	92,42	5,73	1,85
Bali	93,53	5,97	0,50
Nusa Tenggara Barat	83,26	14,91	1,83
Nusa Tenggara Timur	60,76	37,30	1,94
Kalimantan Barat	71,61	26,87	1,51
Kalimantan Tengah	78,45	20,64	0,91
Kalimantan Selatan	85,94	12,16	1,90
Kalimantan Timur	83,68	14,09	2,23
Kalimantan Utara	75,25	23,23	1,52
Sulawesi Utara	82,83	15,40	1,77
Sulawesi Tengah	81,65	17,10	1,25
Sulawesi Selatan	84,92	13,23	1,85
Sulawesi Tenggara	82,89	15,72	1,38
Gorontalo	85,47	13,95	0,58
Sulawesi Barat	79,32	18,85	1,83
Maluku	77,02	21,42	1,56
Maluku Utara	76,10	21,22	2,68
Papua Barat	69,70	28,48	1,82
Papua Barat Daya	63,98	34,41	1,61
Papua	68,84	27,90	3,26
Papua Selatan	58,33	39,39	2,27
Papua Tengah	70,18	27,49	2,34
Papua Pegunungan	50,48	46,15	3,37
Indonesia	**84,87**	**13,40**	**1,60**

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

https://www.bps.go.id

Tabel 2.13 Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Provinsi dan Kecukupan Sumber Air, Tahun Ajaran 2024/2025

Provinsi	Kecukupan Sumber Air		
	Cukup	Kurang	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	86,92	11,23	1,84
Sumatera Utara	86,33	11,72	1,95
Sumatera Barat	88,41	10,72	0,87
Riau	86,28	11,23	2,49
Jambi	88,10	9,92	1,98
Sumatera Selatan	87,10	11,29	1,61
Bengkulu	86,93	11,11	1,96
Lampung	91,82	6,88	1,30
Kep. Bangka Belitung	79,22	18,18	2,60
Kepulauan Riau	84,83	10,67	4,49
DKI Jakarta	97,42	0,79	1,79
Jawa Barat	91,04	6,81	2,14
Jawa Tengah	94,70	4,15	1,15
DI Yogyakarta	96,00	3,43	0,57
Jawa Timur	91,75	6,13	2,11
Banten	93,44	4,59	1,97
Bali	93,79	4,97	1,24
Nusa Tenggara Barat	90,48	7,14	2,38
Nusa Tenggara Timur	72,33	26,38	1,29
Kalimantan Barat	76,40	20,50	3,11
Kalimantan Tengah	80,24	17,74	2,02
Kalimantan Selatan	88,10	10,00	1,90
Kalimantan Timur	87,55	10,37	2,07
Kalimantan Utara	81,69	16,90	1,41
Sulawesi Utara	89,52	10,04	0,44
Sulawesi Tengah	86,13	12,61	1,26
Sulawesi Selatan	91,00	7,86	1,15
Sulawesi Tenggara	84,59	14,15	1,26
Gorontalo	85,92	12,68	1,41
Sulawesi Barat	81,72	18,28	–
Maluku	76,03	21,92	2,05
Maluku Utara	85,33	12,44	2,22
Papua Barat	74,24	24,24	1,52
Papua Barat Daya	66,67	30,86	2,47
Papua	78,81	20,34	0,85
Papua Selatan	77,50	22,50	–
Papua Tengah	70,00	26,67	3,33
Papua Pegunungan	39,71	57,35	2,94
Indonesia	**87,66**	**10,51**	**1,83**

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

https://www.bps.go.id

Tabel 2.14 Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Provinsi dan Kecukupan Sumber Air, Tahun Ajaran 2024/2025

Provinsi	Kecukupan Sumber Air		
	Cukup	Kurang	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	90,18	8,48	1,34
Sumatera Utara	86,25	10,91	2,83
Sumatera Barat	85,65	12,04	2,31
Riau	91,61	6,77	1,61
Jambi	89,62	7,10	3,28
Sumatera Selatan	87,94	7,94	4,13
Bengkulu	88,35	6,80	4,85
Lampung	91,06	7,11	1,83
Kep. Bangka Belitung	89,83	8,47	1,69
Kepulauan Riau	90,57	7,55	1,89
DKI Jakarta	95,50	2,70	1,80
Jawa Barat	91,92	5,92	2,16
Jawa Tengah	94,57	3,81	1,62
DI Yogyakarta	94,20	4,83	0,97
Jawa Timur	93,19	5,23	1,57
Banten	92,13	5,29	2,58
Bali	91,72	4,73	3,55
Nusa Tenggara Barat	87,39	9,97	2,64
Nusa Tenggara Timur	71,83	26,20	1,97
Kalimantan Barat	78,30	19,15	2,55
Kalimantan Tengah	79,86	18,71	1,44
Kalimantan Selatan	92,06	6,35	1,59
Kalimantan Timur	88,43	7,87	3,70
Kalimantan Utara	79,41	17,65	2,94
Sulawesi Utara	88,54	8,85	2,60
Sulawesi Tengah	85,79	13,11	1,09
Sulawesi Selatan	85,96	11,08	2,96
Sulawesi Tenggara	85,88	11,76	2,35
Gorontalo	86,44	13,56	–
Sulawesi Barat	76,56	20,31	3,13
Maluku	75,21	24,79	–
Maluku Utara	84,77	13,25	1,99
Papua Barat	80,95	19,05	–
Papua Barat Daya	84,62	15,38	–
Papua	83,67	16,33	–
Papua Selatan	60,00	32,00	8,00
Papua Tengah	74,07	22,22	3,70
Papua Pegunungan	54,55	40,91	4,55
Indonesia	**89,86**	**8,01**	**2,13**

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

https://www.bps.go.id

Tabel 2.15 Persentase Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi dan Kepemilikan Toilet Siswa, Tahun Ajaran 2024/2025

Provinsi	Kepemilikan Toilet Siswa		
	Terpisah	Bersama	Tidak Memiliki
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	56,96	21,03	22,02
Sumatera Utara	59,48	15,84	24,67
Sumatera Barat	69,47	14,51	16,02
Riau	67,92	13,92	18,17
Jambi	59,70	16,01	24,29
Sumatera Selatan	69,40	16,14	14,45
Bengkulu	57,32	18,89	23,79
Lampung	64,15	17,74	18,11
Kep. Bangka Belitung	87,50	7,93	4,57
Kepulauan Riau	79,66	9,82	10,53
DKI Jakarta	91,72	5,13	3,15
Jawa Barat	68,11	18,91	12,97
Jawa Tengah	77,46	14,75	7,79
DI Yogyakarta	90,66	6,08	3,26
Jawa Timur	64,09	18,32	17,59
Banten	66,55	15,78	17,67
Bali	77,07	13,50	9,43
Nusa Tenggara Barat	59,19	17,48	23,33
Nusa Tenggara Timur	51,53	17,11	31,35
Kalimantan Barat	67,05	17,55	15,40
Kalimantan Tengah	50,85	22,50	26,65
Kalimantan Selatan	60,93	22,24	16,83
Kalimantan Timur	74,13	14,15	11,73
Kalimantan Utara	65,02	15,23	19,75
Sulawesi Utara	54,12	24,39	21,49
Sulawesi Tengah	48,19	19,43	32,38
Sulawesi Selatan	54,98	20,35	24,67
Sulawesi Tenggara	49,28	20,41	30,31
Gorontalo	61,41	18,33	20,26
Sulawesi Barat	36,75	18,90	44,35
Maluku	41,12	19,77	39,11
Maluku Utara	35,05	21,62	43,32
Papua Barat	38,85	17,07	44,08
Papua Barat Daya	45,49	14,62	39,89
Papua	45,29	14,12	40,59
Papua Selatan	44,17	14,40	41,42
Papua Tengah	37,32	11,07	51,61
Papua Pegunungan	20,65	9,14	70,21
Indonesia	**64,19**	**17,05**	**18,76**

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

https://www.bps.go.id

Tabel 2.16 Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Provinsi dan Kepemilikan Toilet Siswa, Tahun Ajaran 2024/2025

Provinsi	Kepemilikan Toilet Siswa		
	Terpisah	Bersama	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	67,24	14,68	18,07
Sumatera Utara	76,93	8,82	14,25
Sumatera Barat	84,39	7,17	8,44
Riau	79,07	7,56	13,37
Jambi	70,97	10,00	19,03
Sumatera Selatan	81,20	8,20	10,59
Bengkulu	78,04	11,09	10,87
Lampung	75,79	10,65	13,55
Kep. Bangka Belitung	90,34	3,36	6,30
Kepulauan Riau	84,91	5,19	9,91
DKI Jakarta	92,98	4,21	2,81
Jawa Barat	80,91	8,99	10,10
Jawa Tengah	88,57	6,71	4,72
DI Yogyakarta	93,16	3,53	3,31
Jawa Timur	76,68	10,28	13,03
Banten	81,07	9,49	9,43
Bali	86,07	5,47	8,46
Nusa Tenggara Barat	58,65	13,91	27,45
Nusa Tenggara Timur	61,36	10,98	27,66
Kalimantan Barat	79,97	10,16	9,87
Kalimantan Tengah	68,53	13,91	17,56
Kalimantan Selatan	84,04	10,58	5,37
Kalimantan Timur	82,29	7,25	10,46
Kalimantan Utara	74,75	8,59	16,67
Sulawesi Utara	68,66	14,17	17,17
Sulawesi Tengah	70,33	12,80	16,87
Sulawesi Selatan	73,14	14,27	12,59
Sulawesi Tenggara	71,19	10,82	17,99
Gorontalo	78,20	11,63	10,17
Sulawesi Barat	58,90	12,04	29,06
Maluku	47,09	14,47	38,44
Maluku Utara	44,93	17,40	37,67
Papua Barat	55,76	11,52	32,73
Papua Barat Daya	63,98	9,14	26,88
Papua	61,59	11,59	26,81
Papua Selatan	75,00	6,82	18,18
Papua Tengah	53,22	13,45	33,33
Papua Pegunungan	36,06	11,06	52,88
Indonesia	**76,17**	**9,90**	**13,93**

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

https://www.bps.go.id

Tabel 2.17 Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Provinsi dan Kepemilikan Toilet Siswa, Tahun Ajaran 2024/2025

Provinsi	Kepemilikan Toilet Siswa		
	Terpisah	Bersama	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	80,85	10,13	9,02
Sumatera Utara	81,02	10,51	8,47
Sumatera Barat	85,51	7,54	6,96
Riau	84,82	9,15	6,03
Jambi	80,16	11,11	8,73
Sumatera Selatan	81,77	8,23	10,00
Bengkulu	90,20	3,92	5,88
Lampung	80,48	10,22	9,29
Kep. Bangka Belitung	84,42	9,09	6,49
Kepulauan Riau	84,83	5,06	10,11
DKI Jakarta	93,25	3,77	2,98
Jawa Barat	81,81	9,29	8,90
Jawa Tengah	85,94	7,72	6,34
DI Yogyakarta	91,43	5,71	2,86
Jawa Timur	80,15	10,69	9,17
Banten	83,44	8,52	8,03
Bali	91,93	3,73	4,35
Nusa Tenggara Barat	64,29	14,55	21,16
Nusa Tenggara Timur	67,31	11,33	21,36
Kalimantan Barat	79,30	9,11	11,59
Kalimantan Tengah	74,19	13,31	12,50
Kalimantan Selatan	84,29	7,62	8,10
Kalimantan Timur	86,72	6,64	6,64
Kalimantan Utara	76,06	8,45	15,49
Sulawesi Utara	75,98	12,66	11,35
Sulawesi Tengah	76,89	9,66	13,45
Sulawesi Selatan	76,43	13,09	10,47
Sulawesi Tenggara	68,24	15,41	16,35
Gorontalo	83,10	4,23	12,68
Sulawesi Barat	76,34	9,68	13,98
Maluku	56,16	18,15	25,68
Maluku Utara	52,44	18,67	28,89
Papua Barat	68,18	9,09	22,73
Papua Barat Daya	62,96	8,64	28,40
Papua	70,34	8,47	21,19
Papua Selatan	65,00	10,00	25,00
Papua Tengah	65,00	13,33	21,67
Papua Pegunungan	39,71	7,35	52,94
Indonesia	**79,29**	**9,86**	**10,85**

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

https://www.bps.go.id

Tabel 2.18 Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Provinsi dan Kepemilikan Toilet Siswa, Tahun Ajaran 2024/2025

Provinsi	Kecukupan Sumber Air		
	Terpisah	Bersama	Tidak Memiliki
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	78,57	10,71	10,71
Sumatera Utara	75,66	11,75	12,59
Sumatera Barat	81,48	10,65	7,87
Riau	77,74	11,94	10,32
Jambi	80,33	7,65	12,02
Sumatera Selatan	82,22	9,21	8,57
Bengkulu	88,35	5,83	5,83
Lampung	80,28	8,94	10,77
Kep. Bangka Belitung	81,36	10,17	8,47
Kepulauan Riau	82,08	2,83	15,09
DKI Jakarta	87,77	7,37	4,86
Jawa Barat	77,72	10,92	11,36
Jawa Tengah	84,23	9,44	6,33
DI Yogyakarta	84,06	9,18	6,76
Jawa Timur	72,50	13,84	13,66
Banten	79,38	8,96	11,67
Bali	81,66	7,69	10,65
Nusa Tenggara Barat	57,77	16,13	26,10
Nusa Tenggara Timur	59,44	10,14	30,42
Kalimantan Barat	80,85	7,23	11,91
Kalimantan Tengah	73,38	10,07	16,55
Kalimantan Selatan	87,30	3,97	8,73
Kalimantan Timur	81,48	10,19	8,33
Kalimantan Utara	61,76	17,65	20,59
Sulawesi Utara	66,15	10,94	22,92
Sulawesi Tengah	68,85	12,02	19,13
Sulawesi Selatan	70,20	14,29	15,52
Sulawesi Tenggara	64,71	12,94	22,35
Gorontalo	61,02	10,17	28,81
Sulawesi Barat	55,47	14,84	29,69
Maluku	55,37	15,70	28,93
Maluku Utara	37,75	26,49	35,76
Papua Barat	71,43	9,52	19,05
Papua Barat Daya	64,10	5,13	30,77
Papua	75,51	14,29	10,20
Papua Selatan	72,00	12,00	16,00
Papua Tengah	51,85	18,52	29,63
Papua Pegunungan	40,91	18,18	40,91
Indonesia	**75,98**	**11,11**	**12,91**

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

https://www.bps.go.id

Tabel 2.19 Jumlah dan Persentase Guru Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2024/2025

Provinsi	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	49.993	24.328	14.302	7.299
Sumatera Utara	113.295	45.871	24.662	20.961
Sumatera Barat	49.301	18.146	10.893	7.153
Riau	54.359	21.916	12.671	8.554
Jambi	29.088	11.664	5.991	4.424
Sumatera Selatan	61.446	26.314	15.475	8.841
Bengkulu	17.697	8.794	4.406	3.041
Lampung	57.654	24.336	12.524	10.669
Kep. Bangka Belitung	9.824	3.903	1.905	1.716
Kepulauan Riau	14.383	6.558	3.926	2.580
DKI Jakarta	38.987	19.472	12.114	11.620
Jawa Barat	214.568	97.139	44.558	57.274
Jawa Tengah	167.119	69.629	26.094	45.706
DI Yogyakarta	20.181	8.734	4.124	6.162
Jawa Timur	181.940	79.888	34.987	48.639
Banten	58.652	23.979	12.734	14.081
Bali	25.803	11.110	5.893	5.654
Nusa Tenggara Barat	46.093	22.959	10.149	8.235
Nusa Tenggara Timur	56.753	32.379	17.083	9.500
Kalimantan Barat	41.287	17.147	8.996	4.955
Kalimantan Tengah	27.080	10.831	5.278	3.198
Kalimantan Selatan	30.414	9.659	5.052	4.149
Kalimantan Timur	27.106	11.291	5.582	5.412
Kalimantan Utara	6.203	2.967	1.496	908
Sulawesi Utara	20.426	10.322	4.583	4.013
Sulawesi Tengah	30.039	12.548	5.895	3.990
Sulawesi Selatan	71.024	30.050	15.995	10.189
Sulawesi Tenggara	29.517	15.087	9.333	4.533
Gorontalo	8.732	4.412	2.020	1.733
Sulawesi Barat	15.160	5.890	2.480	2.549
Maluku	19.210	11.434	6.643	2.753
Maluku Utara	13.696	7.324	4.037	2.065
Papua Barat	5.714	2.476	1.378	657
Papua Barat Daya	5.450	2.636	1.453	818
Papua	7.889	4.016	2.396	1.292
Papua Selatan	4.666	2.091	926	694
Papua Tengah	5.539	2.487	1.089	1.014
Papua Pegunungan	4.576	2.093	887	275
Indonesia	**1.640.864**	**721.880**	**360.010**	**337.306**

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

https://www.bps.go.id

Tabel 2.20 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2024/2025

Provinsi	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	96,91	98,63	99,31	99,12
Sumatera Utara	97,55	98,29	98,45	96,68
Sumatera Barat	98,48	98,91	99,50	98,84
Riau	96,59	97,80	98,79	97,57
Jambi	96,88	98,61	99,20	98,49
Sumatera Selatan	97,31	98,46	98,66	96,69
Bengkulu	97,81	98,86	99,16	97,24
Lampung	97,17	97,42	98,86	96,57
Kep. Bangka Belitung	98,47	98,87	99,21	97,73
Kepulauan Riau	96,96	98,17	98,85	97,75
DKI Jakarta	97,37	98,17	98,17	96,29
Jawa Barat	98,01	97,67	98,58	95,99
Jawa Tengah	98,88	98,84	99,10	97,73
DI Yogyakarta	98,46	98,81	98,88	97,70
Jawa Timur	98,73	98,57	99,02	97,71
Banten	97,87	98,10	98,90	97,04
Bali	99,03	99,29	99,10	97,12
Nusa Tenggara Barat	98,14	98,56	99,11	97,90
Nusa Tenggara Timur	96,40	98,46	98,76	95,74
Kalimantan Barat	96,52	97,95	98,27	96,59
Kalimantan Tengah	97,41	98,67	99,26	97,62
Kalimantan Selatan	97,91	99,08	98,91	98,22
Kalimantan Timur	97,85	98,45	99,21	97,86
Kalimantan Utara	98,11	99,02	99,60	99,23
Sulawesi Utara	96,24	97,74	99,32	98,08
Sulawesi Tengah	95,34	98,80	99,86	99,85
Sulawesi Selatan	98,21	99,00	99,32	98,65
Sulawesi Tenggara	97,35	98,81	98,83	97,60
Gorontalo	98,45	98,89	99,75	98,67
Sulawesi Barat	94,80	98,08	99,31	97,21
Maluku	91,17	97,38	98,81	96,26
Maluku Utara	90,85	98,02	98,59	96,32
Papua Barat	91,35	97,46	98,11	97,41
Papua Barat Daya	95,05	98,10	98,21	96,70
Papua	90,05	96,81	98,04	94,35
Papua Selatan	88,71	97,85	98,81	96,83
Papua Tengah	86,10	95,42	98,26	93,10
Papua Pegunungan	79,35	90,01	96,51	95,64
Indonesia	**97,46**	**98,32**	**98,88**	**97,21**

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

https://www.bps.go.id

Tabel 2.21 Rasio Murid-Guru Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2024/2025

Provinsi	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	10	9	10	7
Sumatera Utara	13	14	16	14
Sumatera Barat	12	11	14	12
Riau	14	12	14	12
Jambi	13	10	14	11
Sumatera Selatan	14	14	15	14
Bengkulu	11	10	13	9
Lampung	14	14	15	14
Kep. Bangka Belitung	16	17	17	14
Kepulauan Riau	16	16	15	15
DKI Jakarta	19	18	16	17
Jawa Barat	21	19	19	18
Jawa Tengah	15	18	18	18
DI Yogyakarta	13	15	15	15
Jawa Timur	14	16	16	16
Banten	21	19	18	18
Bali	15	17	16	17
Nusa Tenggara Barat	11	8	12	10
Nusa Tenggara Timur	12	10	12	10
Kalimantan Barat	14	14	15	15
Kalimantan Tengah	10	10	12	10
Kalimantan Selatan	12	12	14	14
Kalimantan Timur	16	15	15	16
Kalimantan Utara	13	11	13	12
Sulawesi Utara	11	9	14	11
Sulawesi Tengah	11	9	14	10
Sulawesi Selatan	12	11	14	11
Sulawesi Tenggara	10	8	10	7
Gorontalo	12	9	15	9
Sulawesi Barat	9	9	12	9
Maluku	11	8	10	8
Maluku Utara	10	8	11	9
Papua Barat	9	12	13	10
Papua Barat Daya	12	10	10	11
Papua	12	13	14	10
Papua Selatan	11	14	15	10
Papua Tengah	10	17	16	11
Papua Pegunungan	15	22	17	17
Indonesia	**15**	**14**	**20**	**15**

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat Data dan Teknologi Informasi), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2024/2025

https://www.bps.go.id

BAB 3

PARTISIPASI PENDIDIKAN

https://www.bps.go.id

Pendidikan dipandang sebagai determinan utama dalam mendorong kemajuan suatu bangsa. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat krusial, khususnya dalam memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Peningkatan mutu serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor strategis yang perlu mendapat prioritas dalam perencanaan pembangunan. Salah satu indikator yang secara luas digunakan untuk mengukur capaian pembangunan sektor pendidikan adalah tingkat partisipasi sekolah. Semakin tinggi tingkat partisipasi pendidikan pada setiap jenjang, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Monitoring keberhasilan pendidikan melalui partisipasi sekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Anak Tidak Sekolah.

https://www.bps.go.id

3.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Masa usia dini merupakan periode emas yang menentukan optimalisasi potensi anak sehingga memerlukan stimulasi tepat melalui pendidikan terstruktur (Oktarina, S., dkk., 2025, 349–351). Pendidikan anak usia dini berfungsi sebagai pondasi utama bagi perkembangan kepribadian dan kesiapan anak menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya. Pemerintah telah membuat program dalam bidang pendidikan yang dibuat khusus untuk anak usia dini, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). PAUD merupakan program pendidikan

yang paling fundamental dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.

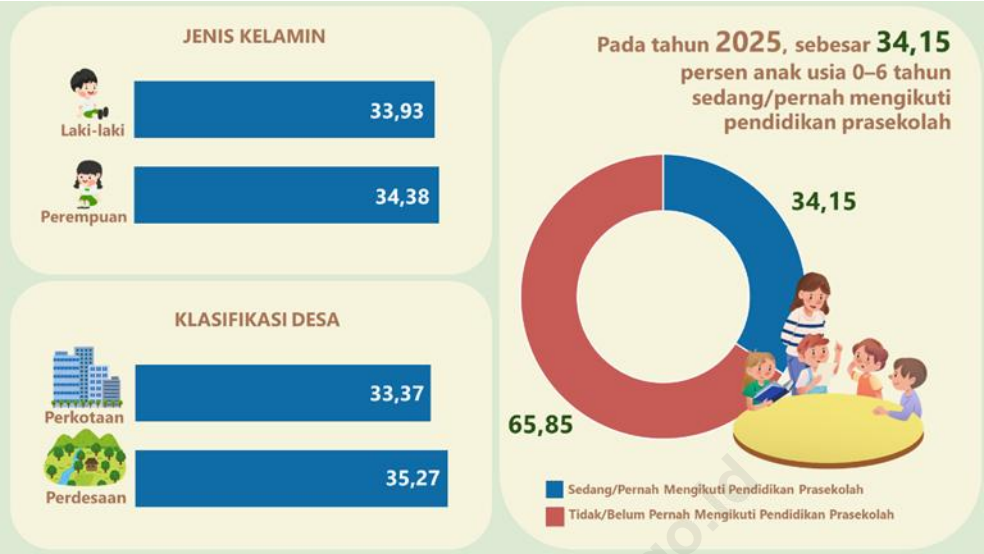

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.1 Partisipasi Anak Usia 0–6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Desa, 2025

Meskipun program pendidikan prasekolah telah dilaksanakan sejak lama, anak usia 0–6 tahun yang memperoleh layanan pendidikan di Indonesia masih cukup rendah. Pada tahun 2025, hanya sebesar 34,15 persen anak usia 0–6 tahun di Indonesia yang memperoleh layanan pendidikan prasekolah (Gambar 3.1). Kesenjangan partisipasi pendidikan prasekolah antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu besar, hanya terdapat perbedaan persentase sebesar 0,45 persen poin. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah perkotaan dan perdesaan, terdapat perbedaan persentase sebesar 1,9 persen poin. Seperti yang terlihat pada Gambar 3.1, partisipasi anak usia 0–6 tahun yang memiliki akses terhadap pendidikan prasekolah di daerah perdesaan (35,27 persen) lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan (33,37 persen).

Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3–6 tahun memberikan gambaran perbandingan antara jumlah penduduk umur 0–6 tahun yang mengikuti PAUD dengan jumlah penduduk umur 3–6 tahun. APK PAUD dapat dijadikan suatu indikator keberhasilan program pemerintah dalam memperluas

https://www.bps.go.id

kesempatan mengenyam pendidikan prasekolah. Pada tahun 2025, APK PAUD tercatat sebesar 36,19 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian APK PAUD pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan, tetapi masih di bawah capaian tahun 2023.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Anak Usia 3–6 Tahun, 2021–2025

APK PAUD laki-laki sedikit lebih tinggi dibanding perempuan. Sementara itu, APK PAUD daerah perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan. Seperti yang terlihat pada Gambar 3.3, di mana APK PAUD di perkotaan tercatat sebesar 37,55 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 34,25 persen.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Anak Usia 3–6 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Desa, 2025

https://www.bps.go.id

Anak usia 3–6 tahun yang tidak mengikuti pendidikan prasekolah, tetapi berpartisipasi dalam kursus yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung menunjukkan adanya alternatif stimulasi pendidikan di luar jalur formal. Kegiatan ini berfokus pada pengenalan membaca, menulis, menghitung, serta keterampilan dasar lain yang dapat mendukung kesiapan anak untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya, sehingga tetap memiliki peran penting dalam pengembangan potensi anak sejak dini.

Pada tahun 2025, dari seluruh anak usia 3–6 tahun yang tidak atau belum pernah mengikuti pendidikan prasekolah, terdapat sekitar 1,00 persen anak yang mengikuti kegiatan kursus (Gambar 3.4). Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang mengikuti kegiatan kursus hanya terpaut 0,06 persen poin. Namun, jika dilihat berdasarkan wilayah, anak usia 3–6 tahun yang mengikuti kursus di perkotaan lebih besar daripada di perdesaan dengan perbedaan persentase sebesar 1,19 persen poin. Jika dibandingkan berdasarkan status ekonomi rumah tangga, semakin tinggi distribusi pengeluaran, semakin banyak anak usia 3–6 tahun di kelompok tersebut yang mengikuti kursus. Persentase anak usia 3–6 tahun yang tidak/belum pernah mengikuti pendidikan prasekolah tetapi mengikuti kegiatan kursus pada status ekonomi tertinggi (kuintil 5) adalah sebesar 2,13 persen sementara pada status ekonomi terendah (kuintil 1) adalah 0,30 persen.

https://www.bps.go.id

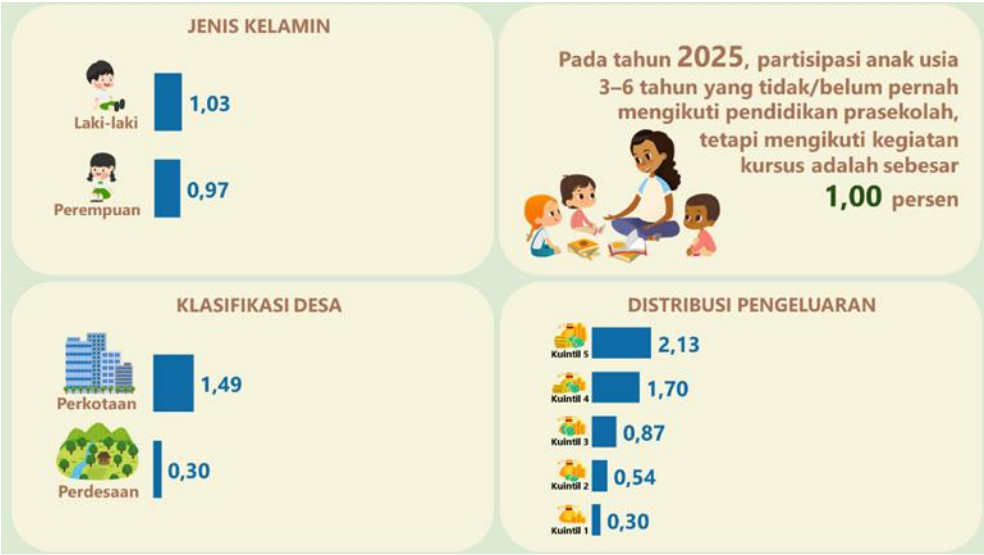

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.4 Partisipasi Anak Usia 3–6 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah, Tetapi Mengikuti Kegiatan Kursus Menurut Karakteristik Demografi, 2025

Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) yang digambarkan pada Gambar 3.5 merupakan indikator yang mengukur persentase anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk sekolah dasar) yang terdaftar sebagai peserta didik aktif, baik di tingkat PAUD maupun SD sederajat. Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh anak usia dini terpapar dengan proses belajar yang terorganisir, khususnya satu tahun sebelum masuk SD. Paparan terhadap pendidikan yang terorganisir membantu anak untuk lebih siap bersekolah di SD, sehingga tingginya proporsi anak usia 6 tahun yang bersekolah dapat mengindikasikan tingginya akses pendidikan untuk anak-anak usia dini.

Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) merupakan indikator yang mengukur angka partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk sekolah dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yaitu pendidikan anak usia dini (prasekolah) yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), dan PAUD, serta SD sederajat. Pada Gambar 3.5 dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut adalah sebesar 97,70 persen di tahun

https://www.bps.go.id

2025. Hal ini mengindikasikan bahwa akses pendidikan untuk anak usia dini di Indonesia sudah cukup tinggi. Jika dibandingkan berdasarkan jenis kelamin, tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, jika dibandingkan berdasarkan wilayah, perbedaan persentase antara perkotaan dan perdesaan hanya sekitar 0,96 persen poin.

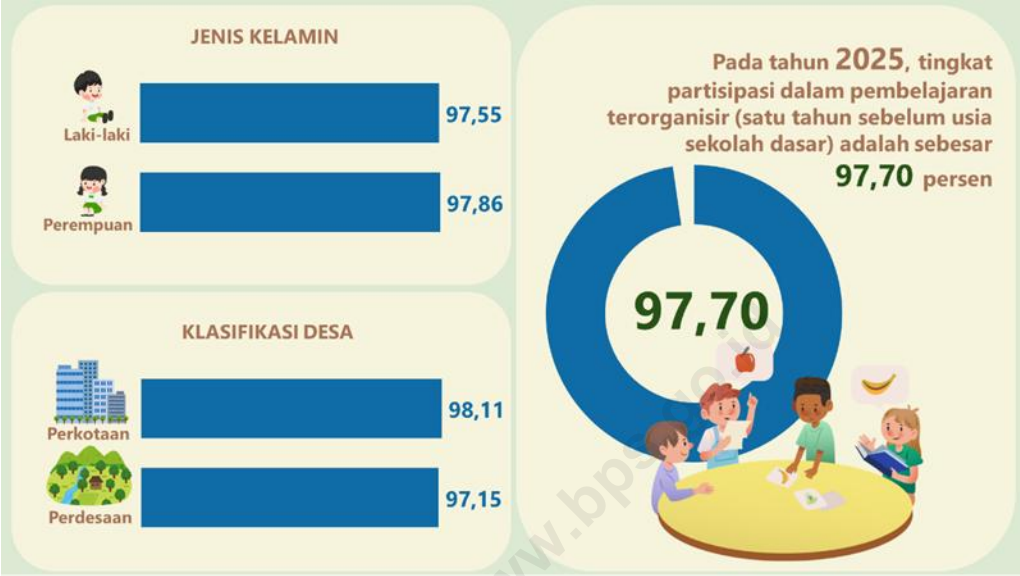

Catatan: Usia yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah usia sekolah (*school age*)
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.5 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Desa, 2025

Gambar 3.6 menunjukkan bahwa capaian Angka Kesiapan Sekolah (AKS) tahun 2025 meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun menunjukkan penurunan pada tahun 2022, capaian AKS menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 sampai 2025. Sebanyak 80,29 persen anak yang sedang bersekolah di kelas 1 SD sederajat pernah mengikuti pendidikan prasekolah jenis TK/RA/BA dan PAUD sejenis lainnya pada tahun 2025.

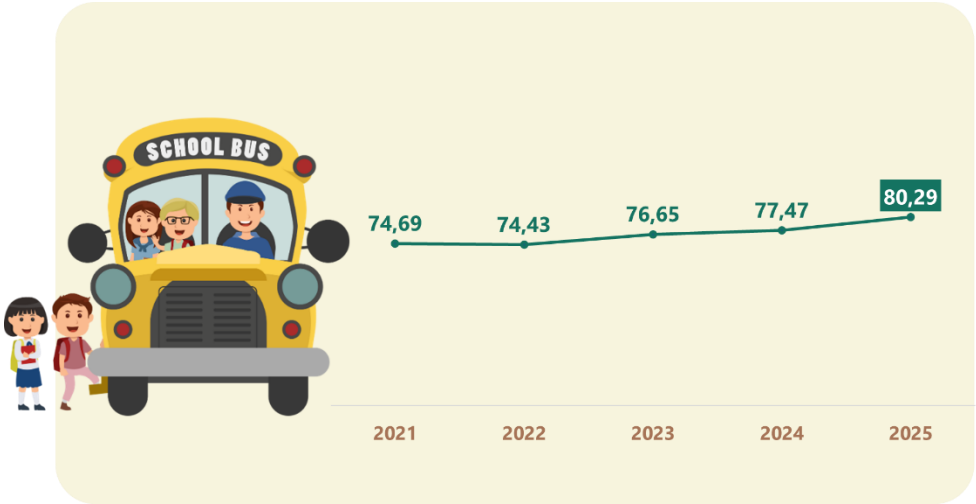

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.6 Angka Kesiapan Sekolah (AKS), 2021–2025

Meskipun terdapat perbedaan capaian AKS laki-laki dan perempuan, perbedaan persentase tersebut hanya sekitar 0,75 persen poin (Gambar 3.7). Sementara itu, AKS daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan AKS perdesaan dengan selisih persentase sekitar 5,12 persen poin (Gambar 3.7).

https://www.bps.go.id

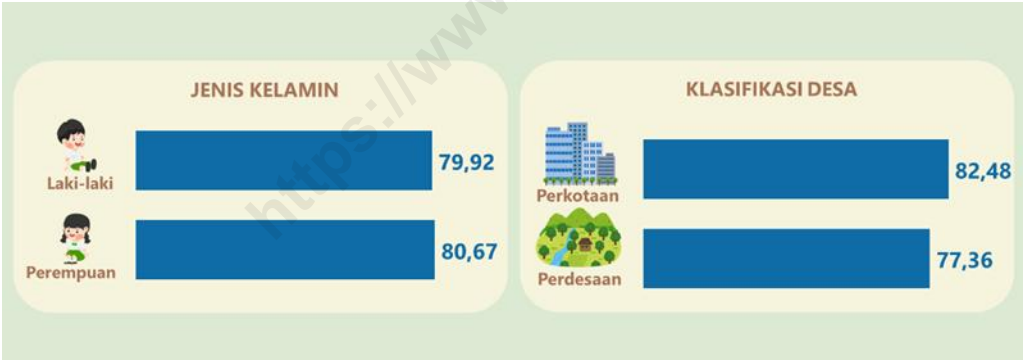

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.7 Angka Kesiapan Sekolah (AKS) Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Desa, 2025

3.2 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa besar kesempatan seseorang dalam memperoleh pendidikan. APS terbagi dalam empat kategori kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Daya serap lembaga pendidikan terhadap

penduduk usia sekolah dapat tergambar dari APS. Semakin tinggi capaian APS maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.8 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur, 2021–2025

Capaian APS tahun 2025 pada masing-masing kelompok umur mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (Gambar 3.8). Pada Gambar 3.8 juga dapat dilihat bahwa capaian APS kelompok umur 7–12 tahun sudah mendekati angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk pada kelompok umur 7–12 tahun sudah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal. Ketimpangan nilai APS antarkelompok umur semakin lebar seiring bertambahnya kelompok umur. Hal ini dapat diakibatkan karena semakin mendekati usia dewasa, peluang memasuki kegiatan ekonomi semakin terbuka dan mengakibatkan adanya pilihan antara melanjutkan pendidikan atau bekerja untuk menghasilkan pendapatan.

https://www.bps.go.id

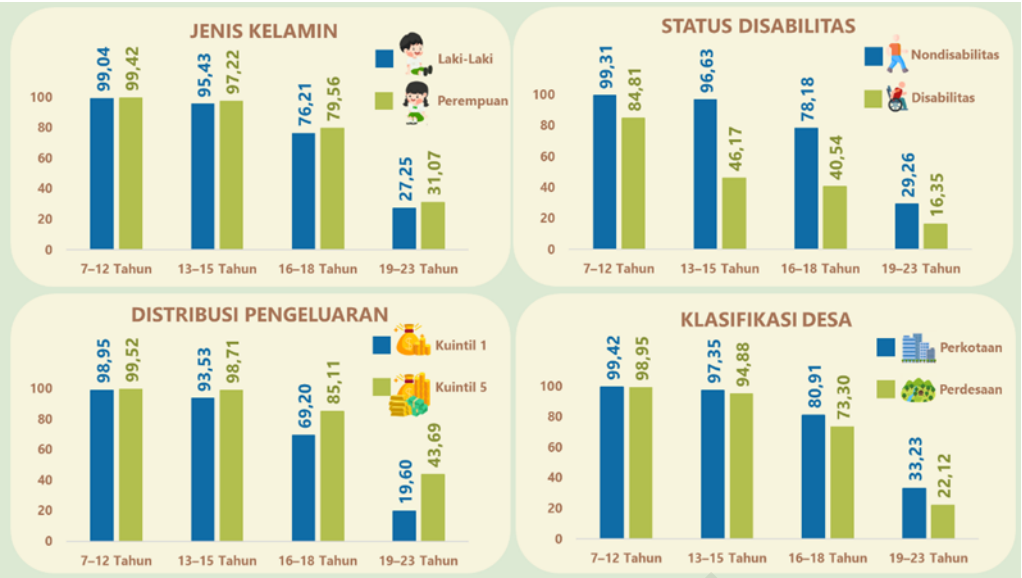

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Karakteristik Demografi dan Kelompok Umur, 2025

Faktor ekonomi memiliki peran penting dalam menentukan tingkat pendidikan seseorang. Anak-anak dari keluarga miskin menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan yang layak dan dampak psikologi kemiskinan juga dapat memengaruhi motivasi dan kualitas belajar (Maharani, dkk., 2024, 1–10). Pada Gambar 3.9 terlihat bahwa perbedaan capaian APS antara status ekonomi terendah (kuintil 1) dan tertinggi (kuintil 5) semakin lebar seiring dengan kenaikan kelompok umur. Selain berdasarkan distribusi pengeluaran, terdapat pula perbedaan capaian APS antara kelompok nondisabilitas dengan disabilitas, antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta antara laki-laki dan perempuan.

3.3 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. APK dapat memberikan gambaran tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu tanpa memperhatikan usia peserta didik yang seharusnya bersesuaian dengan jenjang tersebut. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Semakin

https://www.bps.go.id

tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu. Nilai APK lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa penduduk yang bersekolah pada jenjang tersebut ada yang belum mencapai umur atau justru melebihi umur yang seharusnya.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, 2021–2025

https://www.bps.go.id

Capaian APK SD sederajat, SMP sederajat, SMA/SMK sederajat, dan Pendidikan Tinggi (PT) mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pemerintah menjadikan APK sebagai salah satu indikator pendidikan yang dipantau pergerakannya. APK jenjang SMA/SMK sederajat dan Pendidikan Tinggi (PT) digunakan untuk mengukur akses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2029 untuk APK PT adalah 33,94 persen pada tahun 2025. Akan tetapi, capaian APK PT pada tahun 2025 (32,89 persen) belum mampu mencapai target tersebut.

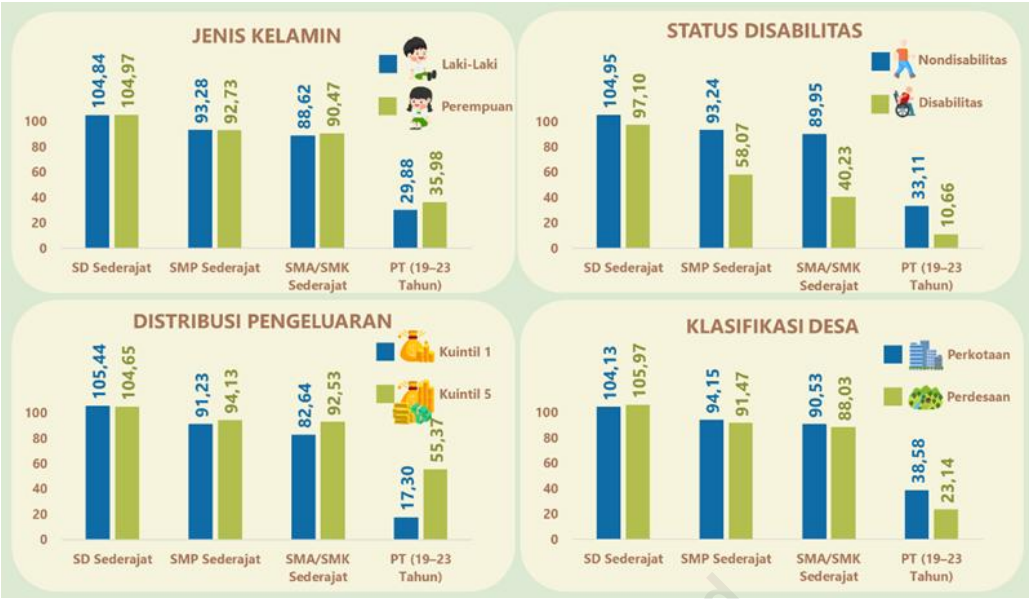

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.11 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Karakteristik Demografi dan Jenjang Pendidikan, 2025

APK setiap jenjang pendidikan tidak terlalu berbeda jauh antara laki-laki dan perempuan. Namun, terdapat perbedaan yang lebih besar pada jenjang PT dibandingkan jenjang pendidikan lain. Apabila dilihat berdasarkan status disabilitas, APK setiap jenjang pendidikan menunjukkan perbedaan yang cukup jauh. Perbedaan tersebut semakin terlihat pada jenjang pendidikan tinggi. Jika dilihat berdasarkan wilayah, perbedaan APK PT pada daerah perkotaan dan perdesaan juga memiliki perbedaan persentase yang lebih besar dibandingkan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 15,44 persen poin.

3.4 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan banyaknya penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah pada jenjang tertentu dan tepat waktu sesuai usia resmi yang ditetapkan di jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APM pada suatu jenjang pendidikan, semakin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang tersebut. Dengan demikian, apabila APM SD

https://www.bps.go.id

sederajat mencapai 100, artinya seluruh anak yang berada pada usia resmi jenjang SD sederajat, yaitu 7–12 tahun, sedang bersekolah pada jenjang SD sederajat yang sesuai.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.12 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, 2021–2025

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian APM SD sederajat dan SMP sederajat pada tahun 2025 mengalami penurunan. Namun, APM SMA/SMK sederajat dan PT (19–23 tahun) mengalami kenaikan.

Capaian APM pada jenjang pendidikan SD sederajat menunjukkan bahwa hampir tidak ada perbedaan dalam hal akses pendidikan, baik antarjenis kelamin, status ekonomi rumah tangga, maupun wilayah. Namun, terdapat perbedaan yang semakin lebar apabila dilihat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Capaian APM pada semua jenjang pendidikan menurut status disabilitas juga menunjukkan *gap* yang lebar antara kelompok disabilitas dan bukan penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk masih mengalami kendala mengakses pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

https://www.bps.go.id

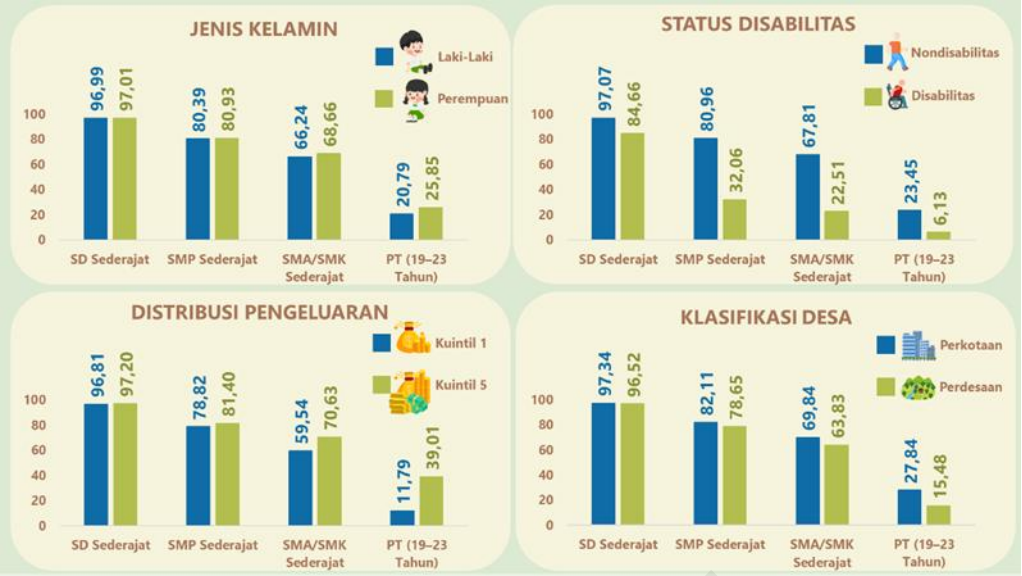

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.13 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Karakteristik Demografi dan Jenjang Pendidikan, 2025

3.5 Angka Anak Tidak Sekolah

Salah satu prioritas pembangunan di bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yaitu percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan layanan pendidikan tersebut adalah dengan penanganan bagi Anak Tidak Sekolah (ATS) agar bersedia untuk bersekolah kembali.

https://www.bps.go.id

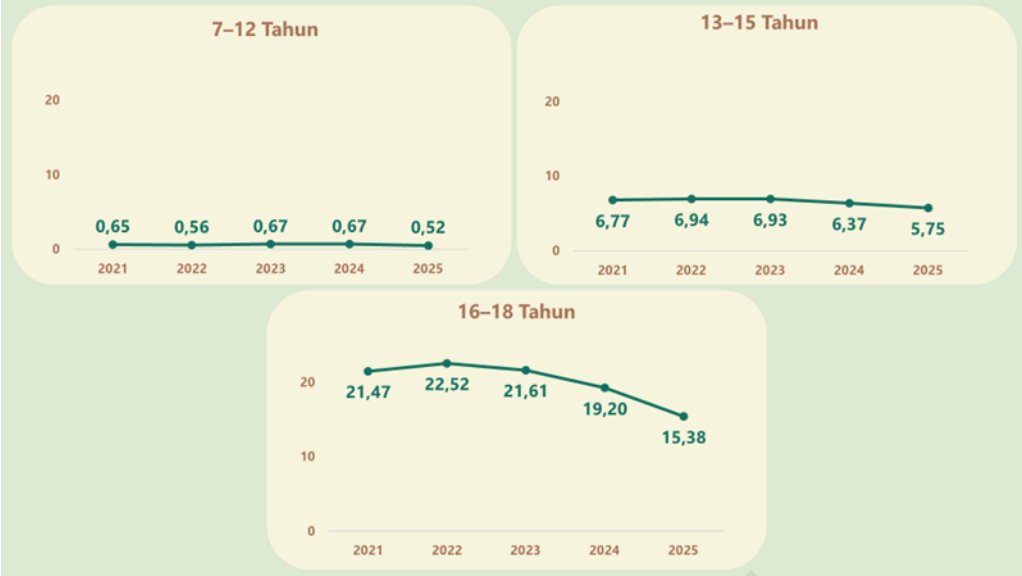

Catatan: Usia yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah usia sekolah (*school age*)
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.14 Anak Tidak Sekolah (ATS) Menurut Kelompok Umur, 2021–2025

Gambar 3.14 menunjukkan bahwa capaian ATS untuk seluruh kelompok umur pada tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan paling besar terjadi pada kelompok umur 16–18 tahun, yaitu menurun sebanyak 3,82 persen poin.

Angka Anak Tidak Sekolah kelompok umur 7–12 tahun tidak memiliki perbedaan yang signifikan jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, status ekonomi rumah tangga, dan wilayah. Namun, terdapat perbedaan yang cukup besar pada ATS kelompok umur 7–12 tahun berdasarkan status disabilitas. ATS kelompok umur 13–15 tahun antarjenis kelamin, status disabilitas, status ekonomi rumah tangga, dan wilayah memiliki perbedaan, tetapi perbedaan yang paling jauh berada pada status disabilitas. Sama seperti ATS kelompok umur 13–15 tahun, ATS kelompok umur 16–18 tahun juga memiliki perbedaan yang signifikan jika dilihat dari empat karakteristik demografi tersebut. Namun, perbedaan terbesar terlihat pada status disabilitas dan status ekonomi rumah tangga.

https://www.bps.go.id

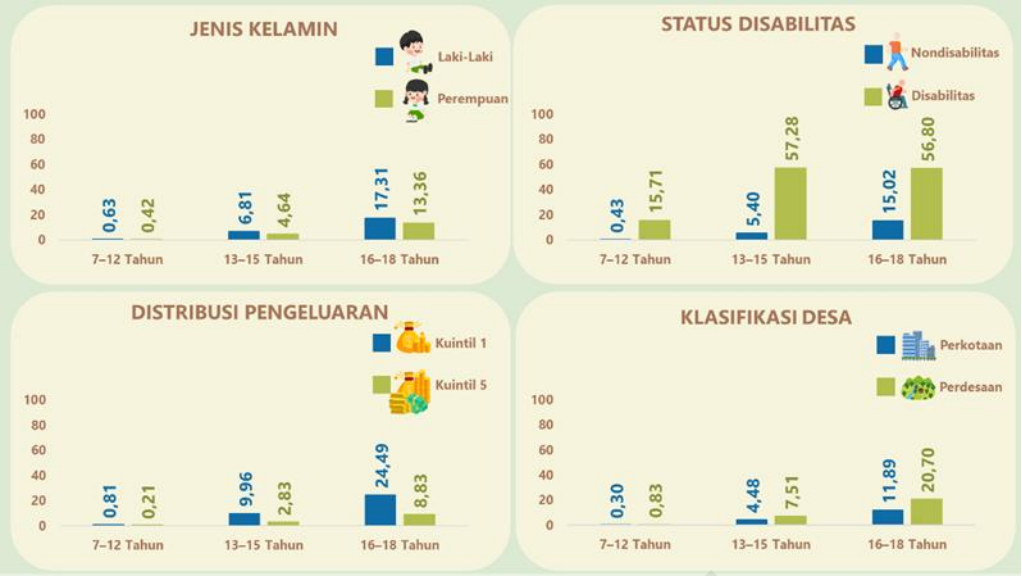

Catatan: Usia yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah usia sekolah (*school age*)
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.15 Anak Tidak Sekolah (ATS) Menurut Kelompok Umur dan Karakteristik Demografi, 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.1 Indikator Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Karakteristik Demografi, 2025

Karakteristik	Indikator		
	APK PAUD 3–6 Tahun	Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar)[1]	Angka Kesiapan Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	**36,19**	**97,70**	**80,29**
Jenis Kelamin			
Laki-laki	36,51	97,55	79,92
Perempuan	35,87	97,86	80,67
Distribusi Pengeluaran			
Kuintil 5	41,92	98,58	87,96
Kuintil 4	37,12	97,87	83,17
Kuintil 3	34,95	97,01	79,28
Kuintil 2	33,75	98,14	79,35
Kuintil 1	35,14	97,20	75,27
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	37,55	98,11	82,48
Perdesaan	34,25	97,15	77,36

Catatan: [1]Usia yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah usia sekolah (*school age*)
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Karakteristik Demografi, 2025

Karakteristik	Kelompok Umur			
	7–12 Tahun	13–15 Tahun	16–18 Tahun	19–23 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	**99,23**	**96,30**	**77,86**	**29,13**
Jenis Kelamin				
Laki-laki	99,04	95,43	76,21	27,25
Perempuan	99,42	97,22	79,56	31,07
Status Disabilitas				
Nondisabilitas	99,31	96,63	78,18	29,26
Disabilitas	84,81	46,17	40,54	16,35
Distribusi Pengeluaran				
Kuintil 5	99,52	98,71	85,11	43,69
Kuintil 4	99,29	97,53	79,88	30,70
Kuintil 3	99,35	97,09	78,68	25,82
Kuintil 2	99,17	95,85	77,16	22,66
Kuintil 1	98,95	93,53	69,20	19,60
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	99,42	97,35	80,91	33,23
Perdesaan	98,95	94,88	73,30	22,12

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.3 Persentase Penduduk 7–23 Tahun Menurut Kelompok Umur dan Alasan Utama Belum Pernah Bersekolah atau Tidak Bersekolah Lagi, 2025

Karakteristik	Kelompok Umur			
	7–12 Tahun	13–15 Tahun	16–18 Tahun	19–23 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah	42,26	NA	NA	NA
Tidak Ada Biaya Sekolah	10,93	24,54	18,68	13,54
Bekerja/Mencari Nafkah	1,30	11,24	22,02	39,73
Menikah	NA	0,84	3,07	6,24
Mengurus Rumah Tangga	1,94	1,92	1,95	3,46
Merasa Pendidikan Cukup	NA	13,17	28,82	27,59
Sekolah Jauh	3,45	3,50	1,46	0,50
Cacat/Disabilitas	11,23	9,23	1,98	0,82
Mengalami Perundungan/*Bullying*	NA	4,14	0,48	0,19
Belum Cukup Umur	2,04	NA	NA	NA
Lainnya	26,01	31,36	21,51	7,92

Catatan: NA: data tidak dapat ditampilkan
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2025

Karakteristik	Jenjang Pendidikan			
	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA/SMK Sederajat	PT (19–23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	**104,90**	**93,02**	**89,53**	**32,89**
Jenis Kelamin				
Laki-laki	104,84	93,28	88,62	29,88
Perempuan	104,97	92,73	90,47	35,98
Status Disabilitas				
Nondisabilitas	104,95	93,24	89,95	33,11
Disabilitas	97,10	58,07	40,23	10,66
Distribusi Pengeluaran				
Kuintil 5	104,65	94,13	92,53	55,37
Kuintil 4	104,35	94,74	91,17	34,60
Kuintil 3	104,70	93,27	91,02	28,53
Kuintil 2	105,10	92,50	90,35	23,66
Kuintil 1	105,44	91,23	82,64	17,30
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	104,13	94,15	90,53	38,58
Perdesaan	105,97	91,47	88,03	23,14

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.5 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2025

Karakteristik	Jenjang Pendidikan			
	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA/SMK Sederajat	PT (19–23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	**97,00**	**80,65**	**67,44**	**23,28**
Jenis Kelamin				
Laki-laki	96,99	80,39	66,24	20,79
Perempuan	97,01	80,93	68,66	25,85
Status Disabilitas				
Nondisabilitas	97,07	80,96	67,81	23,45
Disabilitas	84,66	32,06	22,51	6,13
Distribusi Pengeluaran				
Kuintil 5	97,20	81,40	70,63	39,01
Kuintil 4	96,63	80,88	69,89	25,50
Kuintil 3	97,19	81,34	69,17	20,09
Kuintil 2	97,18	81,22	67,98	16,35
Kuintil 1	96,81	78,82	59,54	11,79
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	97,34	82,11	69,84	27,84
Perdesaan	96,52	78,65	63,83	15,48

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.6 Angka Anak Tidak Sekolah (*Out of School Children*/OOSC) Menurut Kelompok Umur dan Karakteristik Demografi, 2025

Karakteristik	Kelompok Umur		
	7–12 Tahun	13–15 Tahun	16–18 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	**0,52**	**5,75**	**15,38**
Jenis Kelamin			
Laki-laki	0,63	6,81	17,31
Perempuan	0,42	4,64	13,36
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	0,43	5,40	15,02
Disabilitas	15,71	57,28	56,80
Distribusi Pengeluaran			
Kuintil 5	0,21	2,83	8,83
Kuintil 4	0,40	4,10	11,80
Kuintil 3	0,51	4,56	14,42
Kuintil 2	0,52	6,09	16,88
Kuintil 1	0,81	9,96	24,49
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	0,30	4,48	11,89
Perdesaan	0,83	7,51	20,70

Catatan: Usia yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah usia sekolah (*school age*)
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.7 Persentase Penduduk 0–6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	32,95	35,45	33,44	34,61	34,20
Sumatera Utara	26,31	27,49	25,80	28,19	26,89
Sumatera Barat	30,24	29,88	29,04	31,10	30,06
Riau	27,34	28,62	24,89	29,98	27,96
Jambi	35,51	36,72	36,60	35,85	36,10
Sumatera Selatan	29,19	29,58	26,36	31,14	29,38
Bengkulu	27,95	28,71	29,12	27,93	28,32
Lampung	31,36	32,13	31,49	31,89	31,75
Kep. Bangka Belitung	28,87	29,41	28,23	30,38	29,14
Kepulauan Riau	22,89	25,98	23,40	41,00	24,40
DKI Jakarta	30,70	29,73	30,22	–	30,22
Jawa Barat	30,81	31,81	30,54	34,67	31,31
Jawa Tengah	42,04	42,81	43,06	41,67	42,42
DI Yogyakarta	59,07	53,09	56,28	55,78	56,18
Jawa Timur	45,08	44,49	45,27	44,12	44,79
Banten	29,29	26,93	28,08	28,26	28,12
Bali	26,21	28,30	28,69	22,88	27,26
Nusa Tenggara Barat	46,06	43,52	43,05	46,81	44,83
Nusa Tenggara Timur	32,62	35,57	32,51	34,61	34,10
Kalimantan Barat	25,23	29,28	25,59	28,26	27,26
Kalimantan Tengah	32,69	33,14	29,43	35,62	32,91
Kalimantan Selatan	38,68	40,69	37,27	42,15	39,68
Kalimantan Timur	29,71	29,65	28,02	33,38	29,68
Kalimantan Utara	35,77	36,39	33,83	39,94	36,07
Sulawesi Utara	31,72	33,00	29,28	36,31	32,36
Sulawesi Tengah	34,63	35,44	32,14	36,49	35,03
Sulawesi Selatan	27,65	26,78	24,95	29,29	27,22
Sulawesi Tenggara	29,69	30,33	24,94	32,89	30,01
Gorontalo	41,46	46,13	40,55	46,55	43,81
Sulawesi Barat	36,94	39,29	34,72	38,91	38,10
Maluku	32,87	34,20	27,99	37,31	33,53
Maluku Utara	33,96	37,34	29,91	37,72	35,61
Papua Barat	23,80	29,39	28,20	25,83	26,60
Papua Barat Daya	17,33	18,47	16,14	20,02	17,91
Papua	19,13	25,22	19,05	26,57	22,10
Papua Selatan	18,51	17,36	25,04	14,09	17,94
Papua Tengah	12,45	10,29	14,86	8,80	11,43
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA	NA
Indonesia	**33,93**	**34,38**	**33,37**	**35,27**	**34,15**

Catatan: NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.8 Angka Partisipasi Kasar (APK) 3–6 Tahun Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	29,73	29,05	31,44	28,25	29,39
Sumatera Utara	23,36	22,69	25,43	20,25	23,03
Sumatera Barat	30,85	29,21	31,38	28,65	30,04
Riau	23,16	26,16	26,39	23,50	24,58
Jambi	33,07	30,79	34,38	30,70	31,93
Sumatera Selatan	24,77	24,88	28,01	22,90	24,82
Bengkulu	28,54	25,91	29,99	25,72	27,22
Lampung	32,10	32,65	33,17	31,94	32,37
Kep. Bangka Belitung	26,19	30,76	29,02	27,73	28,49
Kepulauan Riau	25,63	24,77	24,60	35,46	25,20
DKI Jakarta	40,07	34,43	37,19	–	37,19
Jawa Barat	33,89	31,75	32,60	33,81	32,82
Jawa Tengah	48,12	49,11	51,02	45,81	48,61
DI Yogyakarta	67,39	67,90	67,56	67,92	67,63
Jawa Timur	56,37	54,82	58,14	52,00	55,60
Banten	27,25	25,79	28,57	18,22	26,51
Bali	34,80	32,47	35,56	27,33	33,60
Nusa Tenggara Barat	40,81	40,93	43,12	38,37	40,86
Nusa Tenggara Timur	30,44	33,08	30,91	32,04	31,76
Kalimantan Barat	22,51	23,53	27,80	20,30	23,03
Kalimantan Tengah	37,86	37,74	34,67	40,22	37,80
Kalimantan Selatan	42,89	45,30	43,99	44,22	44,10
Kalimantan Timur	30,28	30,97	29,85	32,37	30,62
Kalimantan Utara	34,38	31,44	36,49	27,02	32,94
Sulawesi Utara	32,91	33,72	34,21	32,25	33,32
Sulawesi Tengah	34,64	38,42	36,13	36,65	36,48
Sulawesi Selatan	30,77	30,11	28,03	32,65	30,45
Sulawesi Tenggara	32,57	31,84	26,02	35,51	32,20
Gorontalo	47,69	49,72	46,54	50,62	48,72
Sulawesi Barat	40,32	38,11	34,63	40,40	39,22
Maluku	29,71	33,04	24,48	35,97	31,31
Maluku Utara	31,22	31,58	28,84	32,36	31,40
Papua Barat	24,52	25,95	29,59	23,27	25,27
Papua Barat Daya	19,72	19,93	18,01	21,99	19,83
Papua	21,41	22,00	16,83	28,30	21,71
Papua Selatan	16,14	19,69	27,02	13,18	17,85
Papua Tengah	11,67	10,41	15,97	NA	11,10
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA	NA
Indonesia	**36,51**	**35,87**	**37,55**	**34,25**	**36,19**

Catatan: NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.9 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	98,34	99,44	99,32	98,71	98,92
Sumatera Utara	97,51	97,98	97,34	98,17	97,74
Sumatera Barat	98,87	96,19	97,05	98,11	97,59
Riau	95,58	96,97	96,47	96,13	96,26
Jambi	99,67	98,39	99,91	98,66	99,05
Sumatera Selatan	97,81	97,87	98,48	97,50	97,84
Bengkulu	99,05	98,75	100,00	98,39	98,90
Lampung	99,35	98,98	99,83	98,88	99,16
Kep. Bangka Belitung	95,98	98,88	96,39	98,76	97,55
Kepulauan Riau	98,97	99,19	99,03	99,80	99,07
DKI Jakarta	92,41	96,53	94,63	–	94,63
Jawa Barat	97,30	98,94	98,44	96,55	98,09
Jawa Tengah	99,76	99,39	99,50	99,68	99,59
DI Yogyakarta	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jawa Timur	99,89	99,88	99,80	100,00	99,89
Banten	97,45	94,88	95,55	99,28	96,27
Bali	97,32	98,24	99,16	94,69	97,79
Nusa Tenggara Barat	99,20	99,30	98,80	99,67	99,26
Nusa Tenggara Timur	98,41	98,28	99,32	98,07	98,35
Kalimantan Barat	98,28	99,34	98,92	98,76	98,82
Kalimantan Tengah	98,38	99,48	99,04	98,81	98,90
Kalimantan Selatan	99,28	98,55	99,30	98,51	98,90
Kalimantan Timur	96,59	95,95	95,41	98,55	96,29
Kalimantan Utara	94,49	100,00	97,37	96,74	97,13
Sulawesi Utara	99,27	97,21	97,72	99,09	98,31
Sulawesi Tengah	96,15	96,60	98,20	95,53	96,37
Sulawesi Selatan	98,42	97,70	98,25	97,89	98,07
Sulawesi Tenggara	97,72	96,14	96,24	97,41	96,95
Gorontalo	97,22	96,09	96,98	96,53	96,74
Sulawesi Barat	95,05	100,00	100,00	96,94	97,52
Maluku	98,62	95,95	99,33	95,88	97,25
Maluku Utara	98,08	96,68	99,22	96,71	97,36
Papua Barat	95,69	93,07	96,90	93,25	94,30
Papua Barat Daya	95,72	86,22	95,99	84,78	90,48
Papua	84,30	94,27	94,52	82,88	89,45
Papua Selatan	72,02	78,14	84,54	68,45	74,43
Papua Tengah	43,34	47,44	67,59	34,33	45,08
Papua Pegunungan	48,13	43,53	NA	40,65	45,98
Indonesia	**97,55**	**97,86**	**98,11**	**97,15**	**97,70**

Catatan: Usia yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah usia sekolah (*school age*)
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.10 Angka Kesiapan Sekolah (AKS) Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	77,32	78,08	83,67	74,62	77,73
Sumatera Utara	72,73	76,35	79,61	69,27	74,53
Sumatera Barat	85,39	84,52	87,08	83,10	84,97
Riau	67,41	70,39	75,01	64,93	68,85
Jambi	80,34	81,68	85,04	79,06	80,99
Sumatera Selatan	66,12	70,50	68,63	68,00	68,21
Bengkulu	78,45	79,64	86,46	75,56	79,06
Lampung	80,53	88,66	79,24	87,06	84,68
Kep. Bangka Belitung	82,70	84,03	81,00	85,97	83,35
Kepulauan Riau	70,21	74,34	72,00	73,59	72,10
DKI Jakarta	77,42	86,35	82,14	–	82,14
Jawa Barat	80,78	78,62	80,55	76,11	79,75
Jawa Tengah	91,71	92,27	93,18	90,58	91,98
DI Yogyakarta	94,51	98,27	97,07	94,65	96,48
Jawa Timur	91,01	90,04	91,64	89,20	90,54
Banten	70,98	69,35	70,24	70,16	70,22
Bali	90,56	82,39	88,35	82,14	86,52
Nusa Tenggara Barat	78,05	86,00	87,35	77,43	82,12
Nusa Tenggara Timur	69,61	66,99	81,36	64,39	68,34
Kalimantan Barat	55,60	54,35	54,01	55,57	55,03
Kalimantan Tengah	86,05	84,87	89,83	81,83	85,51
Kalimantan Selatan	93,65	90,20	92,93	90,91	91,90
Kalimantan Timur	83,79	72,08	79,65	74,38	78,02
Kalimantan Utara	76,12	80,63	79,07	77,61	78,49
Sulawesi Utara	86,64	89,28	85,20	91,19	87,92
Sulawesi Tengah	78,05	83,86	81,02	80,56	80,70
Sulawesi Selatan	79,91	79,29	80,40	78,80	79,60
Sulawesi Tenggara	80,81	83,79	84,17	80,81	82,15
Gorontalo	90,52	88,95	90,50	89,20	89,79
Sulawesi Barat	75,61	83,52	87,87	77,94	79,67
Maluku	69,03	67,44	63,72	71,16	68,21
Maluku Utara	69,14	66,45	62,26	69,69	67,76
Papua Barat	54,68	61,25	80,72	50,58	57,64
Papua Barat Daya	45,96	50,06	58,50	39,76	47,97
Papua	53,31	59,01	62,26	47,36	55,91
Papua Selatan	34,52	38,23	62,76	23,59	36,21
Papua Tengah	NA	NA	NA	NA	39,28
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA	NA
Indonesia	**79,92**	**80,67**	**82,48**	**77,36**	**80,29**

Catatan: NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Perkotaan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	7–12 Tahun	13–15 Tahun	16–18 Tahun	19–23 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,36	98,90	85,60	44,11
Sumatera Utara	99,47	98,19	76,63	34,82
Sumatera Barat	99,71	98,47	88,59	44,98
Riau	99,69	97,27	82,13	42,59
Jambi	99,33	98,43	81,57	31,44
Sumatera Selatan	99,66	97,32	77,02	29,91
Bengkulu	99,73	99,28	90,38	52,24
Lampung	99,53	94,87	79,18	29,80
Kep. Bangka Belitung	99,27	95,27	80,76	27,63
Kepulauan Riau	99,71	98,95	88,66	27,09
DKI Jakarta	99,32	98,74	88,22	34,21
Jawa Barat	99,58	96,73	76,51	29,38
Jawa Tengah	99,47	97,34	80,95	32,12
DI Yogyakarta	99,64	99,83	93,94	57,58
Jawa Timur	99,20	97,38	85,86	32,35
Banten	99,51	98,20	77,01	26,65
Bali	99,59	99,40	91,93	36,94
Nusa Tenggara Barat	99,61	97,93	83,70	32,45
Nusa Tenggara Timur	99,69	98,34	81,30	44,55
Kalimantan Barat	99,22	94,75	74,64	37,35
Kalimantan Tengah	99,48	96,81	79,69	30,19
Kalimantan Selatan	98,96	95,02	75,96	33,38
Kalimantan Timur	99,61	97,70	85,45	37,90
Kalimantan Utara	99,11	97,83	85,97	33,88
Sulawesi Utara	99,03	95,77	73,42	29,79
Sulawesi Tengah	99,13	96,01	79,41	35,53
Sulawesi Selatan	99,20	95,70	79,07	38,79
Sulawesi Tenggara	98,78	96,23	84,34	42,73
Gorontalo	99,27	96,62	78,73	44,25
Sulawesi Barat	99,03	91,42	76,02	31,33
Maluku	99,56	99,16	78,77	36,37
Maluku Utara	99,21	98,31	84,55	38,26
Papua Barat	98,20	98,35	80,77	40,76
Papua Barat Daya	98,50	96,81	83,86	36,08
Papua	98,07	97,51	83,43	41,24
Papua Selatan	95,12	99,78	86,49	42,67
Papua Tengah	94,88	97,23	89,01	31,99
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA
Indonesia	**99,42**	**97,35**	**80,91**	**33,23**

Catatan: NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.12 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Perdesaan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	7–12 Tahun	13–15 Tahun	16–18 Tahun	19–23 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,39	96,96	78,22	29,53
Sumatera Utara	99,62	97,05	78,75	23,37
Sumatera Barat	99,55	95,46	80,64	30,30
Riau	99,77	94,25	74,22	25,62
Jambi	99,50	94,26	70,35	22,02
Sumatera Selatan	99,40	94,66	71,59	15,02
Bengkulu	99,07	95,68	75,11	22,00
Lampung	99,66	96,15	73,25	14,94
Kep. Bangka Belitung	99,79	89,41	69,63	12,65
Kepulauan Riau	99,68	94,81	83,07	17,72
DKI Jakarta	–	–	–	–
Jawa Barat	99,16	95,98	72,60	20,36
Jawa Tengah	99,62	96,69	74,44	21,12
DI Yogyakarta	99,53	98,71	89,79	39,76
Jawa Timur	99,40	96,83	73,92	23,68
Banten	99,57	93,31	60,05	12,62
Bali	99,53	97,57	87,05	24,38
Nusa Tenggara Barat	99,13	95,94	73,65	24,17
Nusa Tenggara Timur	98,60	94,45	74,77	24,70
Kalimantan Barat	98,79	94,11	68,61	19,73
Kalimantan Tengah	99,42	94,90	62,95	20,53
Kalimantan Selatan	99,33	92,55	74,33	28,12
Kalimantan Timur	99,70	96,72	80,80	21,70
Kalimantan Utara	99,19	93,37	74,07	20,00
Sulawesi Utara	99,59	96,58	68,58	19,00
Sulawesi Tengah	98,30	93,83	73,06	20,96
Sulawesi Selatan	99,23	92,90	72,59	27,90
Sulawesi Tenggara	99,20	96,71	76,20	25,75
Gorontalo	98,49	89,02	66,18	24,61
Sulawesi Barat	98,44	92,54	72,52	21,48
Maluku	99,56	96,70	75,94	21,89
Maluku Utara	98,98	96,64	77,56	18,56
Papua Barat	97,34	95,28	76,00	31,69
Papua Barat Daya	98,85	95,80	78,91	33,78
Papua	96,77	97,06	79,56	32,27
Papua Selatan	89,79	83,84	54,46	18,82
Papua Tengah	73,76	58,97	32,90	10,93
Papua Pegunungan	82,04	69,49	51,18	10,53
Indonesia	**98,95**	**94,88**	**73,30**	**22,12**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Laki-laki Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	7–12 Tahun	13–15 Tahun	16–18 Tahun	19–23 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,13	97,76	77,88	32,44
Sumatera Utara	99,55	97,23	76,99	27,67
Sumatera Barat	99,60	95,29	80,28	34,85
Riau	99,60	93,56	75,24	31,01
Jambi	99,25	94,89	70,24	24,49
Sumatera Selatan	99,35	95,26	71,23	20,08
Bengkulu	99,20	95,32	77,17	30,11
Lampung	99,63	94,11	74,45	17,69
Kep. Bangka Belitung	99,47	91,42	70,78	18,34
Kepulauan Riau	99,76	99,00	87,36	23,08
DKI Jakarta	99,55	98,57	87,42	30,56
Jawa Barat	99,35	95,47	73,51	27,03
Jawa Tengah	99,29	96,49	78,04	24,91
DI Yogyakarta	99,35	99,73	92,85	50,23
Jawa Timur	98,94	97,15	80,09	27,27
Banten	99,44	96,35	73,63	23,39
Bali	99,41	98,98	89,88	34,43
Nusa Tenggara Barat	99,34	95,77	76,84	28,50
Nusa Tenggara Timur	98,81	94,01	74,82	32,26
Kalimantan Barat	98,38	91,92	66,76	25,70
Kalimantan Tengah	99,21	93,09	66,59	23,36
Kalimantan Selatan	98,74	92,31	72,08	28,06
Kalimantan Timur	99,52	96,50	82,56	28,95
Kalimantan Utara	98,92	96,28	81,08	22,83
Sulawesi Utara	99,24	96,35	68,01	23,47
Sulawesi Tengah	98,27	93,34	70,21	23,87
Sulawesi Selatan	98,95	92,02	73,89	31,68
Sulawesi Tenggara	98,77	96,29	77,66	33,12
Gorontalo	98,38	88,62	67,66	29,83
Sulawesi Barat	97,86	89,41	64,83	23,76
Maluku	99,60	96,74	74,14	28,65
Maluku Utara	99,42	96,24	77,17	24,47
Papua Barat	97,47	95,83	78,57	33,66
Papua Barat Daya	99,42	97,37	81,53	32,26
Papua	96,70	95,75	80,46	36,50
Papua Selatan	89,55	92,64	67,57	32,25
Papua Tengah	78,88	67,01	43,79	15,50
Papua Pegunungan	81,67	68,87	51,17	13,94
Indonesia	**99,04**	**95,43**	**76,21**	**27,25**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.14 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Perempuan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	7–12 Tahun	13–15 Tahun	16–18 Tahun	19–23 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,63	97,54	83,86	37,62
Sumatera Utara	99,53	98,09	78,08	33,42
Sumatera Barat	99,65	98,68	89,87	42,95
Riau	99,87	97,54	79,79	35,18
Jambi	99,65	96,35	78,61	26,00
Sumatera Selatan	99,64	96,11	76,27	22,54
Bengkulu	99,38	98,59	84,04	38,30
Lampung	99,60	97,54	76,21	23,91
Kep. Bangka Belitung	99,50	94,44	80,98	24,11
Kepulauan Riau	99,65	98,19	89,17	30,25
DKI Jakarta	99,08	98,93	88,97	37,64
Jawa Barat	99,65	97,77	78,14	28,95
Jawa Tengah	99,80	97,68	77,90	29,95
DI Yogyakarta	99,87	99,47	93,21	59,15
Jawa Timur	99,64	97,14	81,86	30,58
Banten	99,60	97,92	74,03	25,51
Bali	99,76	98,77	91,55	34,21
Nusa Tenggara Barat	99,41	98,09	81,69	29,24
Nusa Tenggara Timur	98,97	96,81	78,51	30,53
Kalimantan Barat	99,57	97,01	75,13	27,95
Kalimantan Tengah	99,70	98,53	75,18	26,51
Kalimantan Selatan	99,57	95,32	78,41	34,01
Kalimantan Timur	99,75	98,28	85,80	37,44
Kalimantan Utara	99,38	95,64	82,73	36,74
Sulawesi Utara	99,33	95,86	75,10	28,00
Sulawesi Tengah	98,88	95,84	80,18	29,23
Sulawesi Selatan	99,49	96,46	77,97	35,90
Sulawesi Tenggara	99,34	96,80	81,44	34,26
Gorontalo	99,35	95,90	76,72	40,40
Sulawesi Barat	99,26	95,25	81,13	23,32
Maluku	99,52	98,86	80,46	30,72
Maluku Utara	98,66	97,92	82,19	26,40
Papua Barat	97,72	96,66	76,22	35,47
Papua Barat Daya	97,86	95,39	81,90	38,42
Papua	98,30	98,85	83,54	40,07
Papua Selatan	94,01	86,28	66,33	21,98
Papua Tengah	81,49	68,99	45,42	15,46
Papua Pegunungan	82,89	73,44	50,34	10,58
Indonesia	**99,42**	**97,22**	**79,56**	**31,07**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	7–12 Tahun	13–15 Tahun	16–18 Tahun	19–23 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,38	97,65	80,94	34,95
Sumatera Utara	99,54	97,67	77,51	30,48
Sumatera Barat	99,63	97,00	85,04	38,84
Riau	99,74	95,47	77,42	33,03
Jambi	99,45	95,59	74,39	25,23
Sumatera Selatan	99,50	95,68	73,78	21,24
Bengkulu	99,29	97,01	80,48	34,18
Lampung	99,62	95,72	75,35	20,68
Kep. Bangka Belitung	99,49	92,90	76,03	21,13
Kepulauan Riau	99,71	98,60	88,24	26,61
DKI Jakarta	99,32	98,74	88,22	34,21
Jawa Barat	99,50	96,58	75,80	27,98
Jawa Tengah	99,54	97,05	77,97	27,44
DI Yogyakarta	99,61	99,60	93,03	54,72
Jawa Timur	99,28	97,15	80,96	28,90
Banten	99,52	97,11	73,84	24,45
Bali	99,57	98,88	90,68	34,32
Nusa Tenggara Barat	99,38	96,92	79,21	28,88
Nusa Tenggara Timur	98,89	95,44	76,65	31,41
Kalimantan Barat	98,95	94,36	70,95	26,84
Kalimantan Tengah	99,45	95,74	70,76	24,91
Kalimantan Selatan	99,14	93,82	75,16	30,91
Kalimantan Timur	99,64	97,34	84,15	33,15
Kalimantan Utara	99,14	95,96	81,93	29,25
Sulawesi Utara	99,28	96,11	71,45	25,57
Sulawesi Tengah	98,56	94,58	75,36	26,50
Sulawesi Selatan	99,21	94,22	75,94	33,80
Sulawesi Tenggara	99,05	96,53	79,58	33,67
Gorontalo	98,85	92,35	72,00	35,02
Sulawesi Barat	98,56	92,30	73,22	23,55
Maluku	99,56	97,75	77,28	29,66
Maluku Utara	99,04	97,08	79,62	25,38
Papua Barat	97,59	96,22	77,53	34,53
Papua Barat Daya	98,67	96,38	81,70	35,19
Papua	97,51	97,32	81,78	38,16
Papua Selatan	91,65	89,29	66,97	27,57
Papua Tengah	80,13	67,86	44,61	15,48
Papua Pegunungan	82,24	71,08	50,79	12,48
Indonesia	**99,23**	**96,30**	**77,86**	**29,13**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.16 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Perkotaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025

Provinsi	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA/SMK Sederajat	PT (19–23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	106,94	96,03	98,27	56,36
Sumatera Utara	104,83	91,85	96,57	38,33
Sumatera Barat	104,32	96,47	97,69	50,58
Riau	105,33	92,86	95,48	44,01
Jambi	104,52	90,27	90,61	49,77
Sumatera Selatan	106,00	84,59	89,36	41,51
Bengkulu	106,57	92,92	109,16	61,65
Lampung	105,52	86,76	88,67	37,86
Kep. Bangka Belitung	106,16	92,18	92,08	26,98
Kepulauan Riau	109,71	96,15	90,36	30,26
DKI Jakarta	103,49	98,76	86,70	41,78
Jawa Barat	103,61	97,89	86,04	30,54
Jawa Tengah	103,70	90,35	93,78	35,79
DI Yogyakarta	102,23	95,43	98,05	78,76
Jawa Timur	102,38	93,41	92,63	36,63
Banten	103,76	94,35	85,82	37,85
Bali	103,93	97,41	91,05	44,92
Nusa Tenggara Barat	104,33	94,76	90,11	43,59
Nusa Tenggara Timur	109,92	93,24	96,46	53,77
Kalimantan Barat	104,72	87,83	97,26	35,56
Kalimantan Tengah	104,96	92,06	91,84	34,27
Kalimantan Selatan	105,09	92,29	84,28	33,18
Kalimantan Timur	102,35	96,00	98,47	45,98
Kalimantan Utara	104,76	97,08	96,51	35,18
Sulawesi Utara	105,42	90,67	86,66	38,68
Sulawesi Tengah	103,89	93,38	91,10	51,90
Sulawesi Selatan	105,63	92,94	87,96	49,12
Sulawesi Tenggara	108,20	83,59	92,44	51,83
Gorontalo	105,08	87,41	98,16	48,08
Sulawesi Barat	103,93	86,11	83,87	41,34
Maluku	106,94	88,43	88,96	52,82
Maluku Utara	109,71	83,94	97,37	58,81
Papua Barat	107,30	90,64	107,69	36,24
Papua Barat Daya	110,59	90,35	91,90	43,19
Papua	110,26	101,82	87,21	40,94
Papua Selatan	107,32	112,76	92,99	53,20
Papua Tengah	97,71	95,53	121,63	30,87
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA
Indonesia	**104,13**	**94,15**	**90,53**	**38,58**

Catatan: NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.17 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Perdesaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025

Provinsi	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA/SMK Sederajat	PT (19–23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	108,96	96,17	98,57	34,78
Sumatera Utara	107,51	89,39	100,79	24,39
Sumatera Barat	108,66	93,21	92,43	30,83
Riau	109,53	94,71	79,57	28,54
Jambi	108,70	93,86	88,53	25,22
Sumatera Selatan	108,65	88,88	88,59	17,31
Bengkulu	107,01	92,36	88,99	23,63
Lampung	105,03	90,43	87,12	15,90
Kep. Bangka Belitung	107,85	81,30	79,81	12,96
Kepulauan Riau	106,70	91,84	94,22	18,03
DKI Jakarta	–	–	–	–
Jawa Barat	103,73	94,41	88,10	16,57
Jawa Tengah	103,59	93,45	87,95	21,49
DI Yogyakarta	100,54	102,14	102,02	53,48
Jawa Timur	102,91	92,47	83,88	26,00
Banten	111,56	88,39	70,58	15,35
Bali	104,43	92,27	97,04	24,66
Nusa Tenggara Barat	108,08	91,23	92,62	27,13
Nusa Tenggara Timur	110,36	93,73	89,00	21,01
Kalimantan Barat	109,62	89,39	86,78	16,17
Kalimantan Tengah	108,19	88,60	83,22	18,21
Kalimantan Selatan	107,56	94,17	89,78	22,40
Kalimantan Timur	109,76	91,38	102,46	27,10
Kalimantan Utara	110,17	93,52	100,51	13,43
Sulawesi Utara	108,34	88,27	93,16	25,48
Sulawesi Tengah	102,11	92,12	91,96	29,71
Sulawesi Selatan	105,98	87,40	91,57	29,83
Sulawesi Tenggara	107,12	90,63	94,66	28,30
Gorontalo	106,01	81,09	84,04	26,10
Sulawesi Barat	105,72	86,83	88,21	24,74
Maluku	110,19	93,21	97,81	31,40
Maluku Utara	110,88	94,48	90,62	28,61
Papua Barat	109,92	94,17	89,62	24,24
Papua Barat Daya	111,89	102,73	82,87	30,36
Papua	111,98	103,82	85,07	20,93
Papua Selatan	113,30	74,67	67,79	NA
Papua Tengah	75,97	64,74	37,20	8,86
Papua Pegunungan	84,55	74,97	55,81	11,15
Indonesia	**105,97**	**91,47**	**88,03**	**23,14**

Catatan: NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.18 Angka Partisipasi Kasar (APK) Laki-laki Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025

Provinsi	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA/SMK Sederajat	PT (19–23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	107,24	98,12	98,22	38,41
Sumatera Utara	106,15	92,71	95,28	29,37
Sumatera Barat	107,25	94,49	92,10	35,81
Riau	109,78	89,96	87,45	32,38
Jambi	108,99	90,74	87,35	29,57
Sumatera Selatan	106,89	90,34	91,94	21,88
Bengkulu	107,10	90,98	96,99	30,50
Lampung	104,70	90,36	87,25	18,54
Kep. Bangka Belitung	109,62	86,60	82,12	16,72
Kepulauan Riau	109,26	96,39	91,95	25,94
DKI Jakarta	103,40	97,30	89,52	37,84
Jawa Barat	103,08	97,32	84,63	26,40
Jawa Tengah	103,38	92,20	91,57	26,70
DI Yogyakarta	101,91	97,01	96,12	71,88
Jawa Timur	102,41	94,24	89,04	29,37
Banten	106,63	90,85	83,02	34,75
Bali	102,50	98,41	91,26	39,59
Nusa Tenggara Barat	105,36	93,27	89,16	39,30
Nusa Tenggara Timur	110,13	95,04	88,86	30,19
Kalimantan Barat	107,65	86,47	83,97	22,47
Kalimantan Tengah	107,47	86,66	81,33	25,10
Kalimantan Selatan	105,57	95,57	84,88	22,51
Kalimantan Timur	105,36	96,10	95,59	39,74
Kalimantan Utara	107,48	96,68	105,75	16,06
Sulawesi Utara	107,34	89,66	87,67	26,69
Sulawesi Tengah	103,97	95,36	83,35	34,92
Sulawesi Selatan	105,79	88,78	90,46	35,32
Sulawesi Tenggara	108,46	87,43	95,09	35,56
Gorontalo	105,71	79,97	81,92	32,87
Sulawesi Barat	105,08	87,52	82,48	24,83
Maluku	110,76	90,82	91,49	38,16
Maluku Utara	111,64	91,22	92,94	38,45
Papua Barat	108,24	94,06	94,09	25,36
Papua Barat Daya	111,45	95,73	83,86	37,33
Papua	110,72	105,27	82,12	30,79
Papua Selatan	108,36	89,83	87,22	27,62
Papua Tengah	81,92	71,53	54,38	12,42
Papua Pegunungan	81,99	80,53	51,96	15,98
Indonesia	**104,84**	**93,28**	**88,62**	**29,88**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.19 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025

Provinsi	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA/SMK Sederajat	PT (19–23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	109,33	93,96	98,70	47,48
Sumatera Utara	105,92	88,90	101,66	36,89
Sumatera Barat	105,66	95,25	98,63	49,02
Riau	106,07	98,30	84,45	38,40
Jambi	105,77	94,90	91,24	37,73
Sumatera Selatan	108,48	83,98	85,95	33,67
Bengkulu	106,61	94,05	95,09	47,50
Lampung	105,71	87,86	88,07	30,69
Kep. Bangka Belitung	104,11	89,00	91,35	25,37
Kepulauan Riau	109,75	95,16	89,29	33,45
DKI Jakarta	103,58	100,36	84,05	45,49
Jawa Barat	104,23	97,08	88,22	30,38
Jawa Tengah	103,92	91,20	90,61	32,70
DI Yogyakarta	101,64	96,51	101,79	77,49
Jawa Timur	102,81	91,74	89,03	35,53
Banten	103,92	95,34	82,92	33,92
Bali	105,85	93,48	94,04	41,82
Nusa Tenggara Barat	106,92	92,68	93,40	33,85
Nusa Tenggara Timur	110,37	92,24	93,45	34,07
Kalimantan Barat	107,94	91,30	97,73	25,49
Kalimantan Tengah	106,06	93,77	93,52	25,89
Kalimantan Selatan	107,16	90,84	89,18	34,22
Kalimantan Timur	103,78	92,33	103,70	41,15
Kalimantan Utara	106,21	94,54	90,31	41,79
Sulawesi Utara	106,12	89,68	91,05	41,39
Sulawesi Tengah	101,28	89,67	99,40	41,50
Sulawesi Selatan	105,83	91,25	88,95	45,20
Sulawesi Tenggara	106,52	88,52	92,43	43,21
Gorontalo	105,45	87,55	100,02	42,81
Sulawesi Barat	105,62	85,81	91,92	31,98
Maluku	106,84	91,56	95,82	47,88
Maluku Utara	109,48	92,12	92,27	39,77
Papua Barat	110,21	91,99	97,09	30,87
Papua Barat Daya	110,96	95,39	93,06	39,21
Papua	111,25	100,13	91,87	37,87
Papua Selatan	114,42	85,79	67,56	20,01
Papua Tengah	83,18	72,37	55,25	15,15
Papua Pegunungan	86,98	75,54	57,60	9,91
Indonesia	**104,97**	**92,73**	**90,47**	**35,98**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.20 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025

Provinsi	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA/SMK Sederajat	PT (19–23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	108,27	96,12	98,46	42,81
Sumatera Utara	106,04	90,73	98,33	33,04
Sumatera Barat	106,47	94,87	95,34	42,32
Riau	107,92	93,96	86,01	35,30
Jambi	107,38	92,72	89,28	33,58
Sumatera Selatan	107,69	87,24	88,90	27,41
Bengkulu	106,86	92,57	96,07	38,94
Lampung	105,19	89,19	87,67	24,38
Kep. Bangka Belitung	106,87	87,77	86,87	20,89
Kepulauan Riau	109,49	95,78	90,65	29,64
DKI Jakarta	103,49	98,76	86,70	41,78
Jawa Barat	103,64	97,20	86,41	28,36
Jawa Tengah	103,65	91,73	91,11	29,70
DI Yogyakarta	101,78	96,77	98,92	74,70
Jawa Timur	102,61	93,01	89,03	32,40
Banten	105,29	93,01	82,97	34,33
Bali	104,07	95,94	92,58	40,69
Nusa Tenggara Barat	106,15	92,98	91,23	36,49
Nusa Tenggara Timur	110,24	93,60	91,14	32,09
Kalimantan Barat	107,79	88,78	90,85	23,99
Kalimantan Tengah	106,78	90,11	87,24	25,49
Kalimantan Selatan	106,34	93,20	86,97	28,12
Kalimantan Timur	104,57	94,32	99,59	40,44
Kalimantan Utara	106,86	95,59	97,87	27,93
Sulawesi Utara	106,75	89,67	89,31	33,51
Sulawesi Tengah	102,67	92,55	91,65	38,14
Sulawesi Selatan	105,81	90,01	89,71	40,28
Sulawesi Tenggara	107,51	87,94	93,74	39,27
Gorontalo	105,58	83,85	90,58	37,75
Sulawesi Barat	105,35	86,68	87,34	28,22
Maluku	108,83	91,17	93,64	42,89
Maluku Utara	110,57	91,67	92,62	39,08
Papua Barat	109,18	93,08	95,42	27,99
Papua Barat Daya	111,22	95,56	87,95	38,22
Papua	110,99	102,68	86,30	34,08
Papua Selatan	111,21	87,71	77,63	24,15
Papua Tengah	82,52	71,89	54,82	13,62
Papua Pegunungan	84,31	78,11	54,52	13,34
Indonesia	**104,90**	**93,02**	**89,53**	**32,89**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.21 Angka Partisipasi Murni (APM) di Perkotaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025

Provinsi	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA/SMK Sederajat	PT (19–23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	96,41	82,20	71,63	35,70
Sumatera Utara	95,67	77,54	68,74	27,10
Sumatera Barat	97,04	84,71	75,49	37,18
Riau	97,25	82,40	71,34	33,62
Jambi	95,87	77,22	67,73	29,68
Sumatera Selatan	94,99	71,53	63,26	27,41
Bengkulu	96,16	77,69	75,18	44,00
Lampung	97,74	77,95	70,41	27,24
Kep. Bangka Belitung	96,34	75,45	68,27	22,07
Kepulauan Riau	98,21	83,70	76,98	23,66
DKI Jakarta	98,47	87,55	69,90	31,30
Jawa Barat	98,06	83,86	67,70	23,46
Jawa Tengah	97,48	79,92	69,84	25,89
DI Yogyakarta	98,88	88,06	78,23	54,15
Jawa Timur	98,32	86,00	75,22	27,38
Banten	96,87	82,46	68,32	24,15
Bali	97,14	85,68	74,78	33,37
Nusa Tenggara Barat	97,67	83,46	73,80	29,45
Nusa Tenggara Timur	96,12	78,52	66,61	37,02
Kalimantan Barat	95,28	71,12	59,95	25,81
Kalimantan Tengah	97,87	82,29	70,83	21,70
Kalimantan Selatan	97,43	78,46	60,08	27,42
Kalimantan Timur	97,64	83,84	75,32	29,01
Kalimantan Utara	96,79	83,16	76,73	28,38
Sulawesi Utara	95,08	75,17	63,10	23,62
Sulawesi Tengah	96,16	82,43	70,33	31,29
Sulawesi Selatan	95,89	80,30	69,16	34,41
Sulawesi Tenggara	95,10	73,40	66,15	38,68
Gorontalo	95,20	74,71	69,10	37,94
Sulawesi Barat	95,94	67,95	55,28	26,36
Maluku	95,37	77,11	65,30	35,43
Maluku Utara	95,66	76,93	71,42	34,21
Papua Barat	94,19	70,88	70,55	25,40
Papua Barat Daya	94,95	77,08	64,06	26,04
Papua	92,38	80,68	59,18	32,52
Papua Selatan	89,18	79,99	66,80	34,95
Papua Tengah	85,25	69,45	78,68	22,24
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA
Indonesia	**97,34**	**82,11**	**69,84**	**27,84**

Catatan: NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.22 Angka Partisipasi Murni (APM) di Perdesaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025

Provinsi	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA/SMK Sederajat	PT (19–23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	96,28	80,92	69,62	20,22
Sumatera Utara	96,37	77,25	72,72	15,91
Sumatera Barat	97,08	80,59	66,72	19,56
Riau	97,71	80,72	61,06	18,69
Jambi	97,56	79,06	60,42	18,36
Sumatera Selatan	96,54	75,96	62,96	10,71
Bengkulu	96,09	79,50	66,14	14,64
Lampung	97,59	78,74	65,47	10,57
Kep. Bangka Belitung	97,91	72,03	62,79	8,55
Kepulauan Riau	98,07	81,98	71,03	12,62
DKI Jakarta	–	–	–	–
Jawa Barat	97,84	83,79	65,68	13,44
Jawa Tengah	96,91	80,76	65,42	15,29
DI Yogyakarta	98,46	91,14	79,06	32,24
Jawa Timur	98,08	82,46	64,07	18,72
Banten	98,02	77,18	52,07	10,26
Bali	96,83	82,65	79,78	19,85
Nusa Tenggara Barat	97,56	81,63	66,27	15,36
Nusa Tenggara Timur	95,21	76,85	61,38	13,88
Kalimantan Barat	95,88	73,34	56,12	10,56
Kalimantan Tengah	97,30	76,27	56,74	11,66
Kalimantan Selatan	98,14	78,62	59,44	19,09
Kalimantan Timur	97,77	78,79	70,46	14,08
Kalimantan Utara	97,46	79,17	66,15	10,40
Sulawesi Utara	97,10	74,88	58,61	10,89
Sulawesi Tengah	93,98	76,12	67,74	15,10
Sulawesi Selatan	96,98	76,81	66,96	21,78
Sulawesi Tenggara	96,34	75,63	61,29	17,65
Gorontalo	96,22	71,59	60,77	16,94
Sulawesi Barat	96,01	77,51	62,30	14,19
Maluku	95,24	76,96	67,16	16,56
Maluku Utara	95,98	79,27	58,51	8,22
Papua Barat	93,93	72,85	51,52	14,80
Papua Barat Daya	93,41	72,45	51,83	17,55
Papua	91,05	74,31	52,02	16,65
Papua Selatan	86,81	46,13	31,82	NA
Papua Tengah	67,07	49,76	24,22	7,43
Papua Pegunungan	74,84	53,71	41,03	7,21
Indonesia	**96,52**	**78,65**	**63,83**	**15,48**

Catatan: NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.23 Angka Partisipasi Murni (APM) Laki-laki Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025

Provinsi	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA/SMK Sederajat	PT (19–23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	96,42	82,52	67,57	23,32
Sumatera Utara	96,32	77,96	69,96	20,34
Sumatera Barat	97,02	79,57	66,25	24,13
Riau	97,93	77,75	63,60	21,35
Jambi	97,47	77,47	60,40	20,57
Sumatera Selatan	95,90	75,81	63,04	14,70
Bengkulu	95,49	72,56	65,84	19,59
Lampung	97,90	78,58	65,27	13,15
Kep. Bangka Belitung	97,88	74,26	61,29	11,65
Kepulauan Riau	97,89	82,69	75,70	18,97
DKI Jakarta	98,73	86,92	70,47	27,30
Jawa Barat	97,91	84,09	66,15	20,70
Jawa Tengah	96,79	80,40	67,86	18,75
DI Yogyakarta	98,86	88,62	78,67	46,23
Jawa Timur	98,03	84,85	70,72	21,44
Banten	97,90	80,49	63,38	20,39
Bali	96,66	85,93	75,87	30,09
Nusa Tenggara Barat	97,56	83,09	69,36	22,87
Nusa Tenggara Timur	95,76	77,32	60,60	20,72
Kalimantan Barat	96,49	71,42	52,46	14,90
Kalimantan Tengah	97,95	75,91	59,24	14,74
Kalimantan Selatan	97,69	78,89	57,33	18,44
Kalimantan Timur	97,45	82,00	71,14	21,27
Kalimantan Utara	97,52	81,84	74,98	13,63
Sulawesi Utara	96,78	75,98	60,23	16,26
Sulawesi Tengah	94,64	78,15	62,98	18,35
Sulawesi Selatan	96,40	75,73	67,97	25,39
Sulawesi Tenggara	95,85	73,97	60,86	24,91
Gorontalo	95,04	66,36	61,60	24,61
Sulawesi Barat	95,54	74,15	53,13	14,60
Maluku	95,99	78,18	64,10	25,30
Maluku Utara	96,27	77,39	61,08	14,33
Papua Barat	92,95	70,78	57,47	17,47
Papua Barat Daya	95,17	74,05	56,98	19,67
Papua	90,37	76,87	55,70	25,37
Papua Selatan	86,89	61,52	45,66	NA
Papua Tengah	70,50	52,70	32,77	10,33
Papua Pegunungan	72,86	54,39	39,28	11,29
Indonesia	**96,99**	**80,39**	**66,24**	**20,79**

Catatan: NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.24 Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025

Provinsi	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA/SMK Sederajat	PT (19–23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	96,23	80,13	73,02	28,81
Sumatera Utara	95,63	76,90	70,88	25,50
Sumatera Barat	97,11	85,78	76,98	35,67
Riau	97,14	85,35	66,98	29,32
Jambi	96,57	79,58	65,74	23,91
Sumatera Selatan	96,05	72,64	63,12	21,05
Bengkulu	96,78	84,66	73,07	33,43
Lampung	97,37	78,35	69,10	21,19
Kep. Bangka Belitung	96,12	73,85	70,33	21,08
Kepulauan Riau	98,54	84,42	77,41	27,36
DKI Jakarta	98,20	88,24	69,36	35,06
Jawa Barat	98,15	83,58	68,54	23,14
Jawa Tengah	97,64	80,17	67,76	24,00
DI Yogyakarta	98,67	88,73	78,16	54,98
Jawa Timur	98,41	84,13	70,57	26,51
Banten	96,26	82,12	67,10	23,54
Bali	97,50	83,70	76,27	31,02
Nusa Tenggara Barat	97,67	81,97	71,56	23,85
Nusa Tenggara Timur	95,12	77,25	65,20	22,74
Kalimantan Barat	94,75	73,63	62,74	18,49
Kalimantan Tengah	97,14	82,07	67,63	17,74
Kalimantan Selatan	97,90	78,18	62,34	29,02
Kalimantan Timur	97,92	82,01	76,87	28,06
Kalimantan Utara	96,54	81,15	71,36	32,61
Sulawesi Utara	95,17	74,09	62,36	21,39
Sulawesi Tengah	94,69	78,42	74,01	24,27
Sulawesi Selatan	96,52	81,22	68,23	31,82
Sulawesi Tenggara	95,93	75,69	65,68	30,17
Gorontalo	96,52	79,23	67,94	31,65
Sulawesi Barat	96,45	76,85	68,20	19,11
Maluku	94,57	75,76	68,51	28,13
Maluku Utara	95,52	79,89	63,62	20,45
Papua Barat	95,17	73,87	57,82	18,83
Papua Barat Daya	93,18	76,23	60,87	26,15
Papua	93,21	79,00	56,71	29,05
Papua Selatan	88,47	54,29	45,30	NA
Papua Tengah	74,78	56,48	38,34	11,01
Papua Pegunungan	77,14	58,06	40,57	NA
Indonesia	**97,01**	**80,93**	**68,66**	**25,85**

Catatan: NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.25 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025

Provinsi	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA/SMK Sederajat	PT (19–23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	96,32	81,37	70,36	25,98
Sumatera Utara	95,99	77,41	70,40	22,86
Sumatera Barat	97,06	82,70	71,57	29,81
Riau	97,54	81,40	65,22	25,21
Jambi	97,02	78,47	63,05	22,21
Sumatera Selatan	95,98	74,27	63,08	17,68
Bengkulu	96,12	78,83	69,32	26,47
Lampung	97,64	78,47	67,22	17,01
Kep. Bangka Belitung	97,00	74,06	65,94	16,20
Kepulauan Riau	98,20	83,55	76,54	23,10
DKI Jakarta	98,47	87,55	69,90	31,30
Jawa Barat	98,02	83,84	67,33	21,90
Jawa Tengah	97,21	80,29	67,81	21,38
DI Yogyakarta	98,77	88,67	78,42	50,63
Jawa Timur	98,22	84,49	70,64	23,94
Banten	97,09	81,28	65,28	21,98
Bali	97,05	84,81	76,06	30,55
Nusa Tenggara Barat	97,62	82,54	70,43	23,38
Nusa Tenggara Timur	95,45	77,28	62,88	21,71
Kalimantan Barat	95,65	72,48	57,60	16,71
Kalimantan Tengah	97,55	78,91	63,31	16,22
Kalimantan Selatan	97,79	78,54	59,77	23,51
Kalimantan Timur	97,68	82,01	73,96	24,63
Kalimantan Utara	97,05	81,49	73,13	22,38
Sulawesi Utara	96,00	75,05	61,26	18,64
Sulawesi Tengah	94,67	78,28	68,68	21,25
Sulawesi Selatan	96,46	78,45	68,10	28,62
Sulawesi Tenggara	95,89	74,78	63,31	27,46
Gorontalo	95,75	72,95	64,63	28,07
Sulawesi Barat	95,99	75,49	60,89	16,74
Maluku	95,29	77,02	66,29	26,68
Maluku Utara	95,90	78,65	62,32	17,23
Papua Barat	94,00	72,24	57,63	18,12
Papua Barat Daya	94,21	75,13	58,71	22,75
Papua	91,81	77,95	56,13	27,08
Papua Selatan	87,64	57,72	45,48	15,32
Papua Tengah	72,55	54,33	35,59	10,63
Papua Pegunungan	74,85	56,16	39,87	9,20
Indonesia	**97,00**	**80,65**	**67,44**	**23,28**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.26 Angka Anak Tidak Sekolah (*Out of School Children*/OOSC) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	7–12 Tahun	13–15 Tahun	16–18 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,69	3,58	9,09
Sumatera Utara	0,30	3,88	11,34
Sumatera Barat	NA	4,58	10,97
Riau	NA	6,25	17,90
Jambi	NA	5,37	17,37
Sumatera Selatan	NA	6,47	17,91
Bengkulu	NA	5,29	11,61
Lampung	NA	5,72	16,71
Kep. Bangka Belitung	NA	10,76	18,59
Kepulauan Riau	NA	NA	6,64
DKI Jakarta	NA	2,22	6,24
Jawa Barat	NA	6,52	17,35
Jawa Tengah	NA	4,65	15,15
DI Yogyakarta	NA	NA	NA
Jawa Timur	NA	4,43	15,52
Banten	NA	6,47	15,68
Bali	NA	NA	6,28
Nusa Tenggara Barat	NA	3,69	15,03
Nusa Tenggara Timur	0,98	6,43	18,13
Kalimantan Barat	1,10	8,53	22,69
Kalimantan Tengah	NA	8,46	17,61
Kalimantan Selatan	NA	9,59	17,82
Kalimantan Timur	NA	3,94	10,26
Kalimantan Utara	NA	5,30	13,99
Sulawesi Utara	NA	5,88	17,04
Sulawesi Tengah	1,28	7,63	18,71
Sulawesi Selatan	0,96	7,31	16,38
Sulawesi Tenggara	0,78	5,29	12,19
Gorontalo	NA	11,33	21,00
Sulawesi Barat	1,79	9,32	23,63
Maluku	NA	3,67	10,60
Maluku Utara	NA	4,16	10,74
Papua Barat	2,12	5,87	15,96
Papua Barat Daya	NA	4,59	10,34
Papua	2,00	2,97	13,24
Papua Selatan	4,64	16,28	29,73
Papua Tengah	18,02	35,14	53,37
Papua Pegunungan	16,67	30,44	51,33
Indonesia	**0,52**	**5,75**	**15,38**

Catatan: Usia yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah usia sekolah (*school age*)
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.27 *Sampling Error* Persentase Penduduk 0–6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	33,44	30,79	36,08	4,03	34,61	32,71	36,51	2,80	34,20	32,65	35,74	2,30
Sumatera Utara	25,80	23,73	27,87	4,09	28,19	26,54	29,84	2,98	26,89	25,53	28,24	2,57
Sumatera Barat	29,04	26,63	31,45	4,23	31,10	28,89	33,32	3,64	30,06	28,43	31,70	2,78
Riau	24,89	22,03	27,76	5,87	29,98	27,51	32,44	4,19	27,96	26,08	29,83	3,42
Jambi	36,60	32,46	40,73	5,76	35,85	33,08	38,63	3,94	36,10	33,79	38,40	3,26
Sumatera Selatan	26,36	23,56	29,16	5,42	31,14	29,06	33,21	3,40	29,38	27,71	31,05	2,90
Bengkulu	29,12	24,58	33,65	7,94	27,93	25,35	30,51	4,71	28,32	26,04	30,60	4,11
Lampung	31,49	28,37	34,60	5,04	31,89	29,44	34,33	3,92	31,75	29,82	33,68	3,11
Kepulauan Bangka Belitung	28,23	24,39	32,07	6,94	30,38	26,67	34,09	6,23	29,14	26,42	31,86	4,76
Kepulauan Riau	23,40	19,23	27,57	9,09	41,00	35,81	46,19	6,46	24,40	20,45	28,35	8,26
DKI Jakarta	30,22	27,27	33,16	4,98	–	–	–	–	30,22	27,27	33,16	4,98
Jawa Barat	30,54	29,06	32,02	2,47	34,67	31,75	37,59	4,30	31,31	29,98	32,63	2,16
Jawa Tengah	43,06	41,59	44,53	1,74	41,67	39,65	43,69	2,47	42,42	41,20	43,64	1,47
DI Yogyakarta	56,28	52,04	60,53	3,85	55,78	47,42	64,15	7,65	56,18	52,39	59,96	3,44
Jawa Timur	45,27	43,58	46,95	1,90	44,12	42,10	46,14	2,34	44,79	43,49	46,08	1,47
Banten	28,08	25,56	30,61	4,58	28,26	23,82	32,71	8,03	28,12	25,90	30,33	4,02
Bali	28,69	25,71	31,67	5,31	22,88	19,04	26,72	8,56	27,26	24,82	29,70	4,57
Nusa Tenggara Barat	43,05	40,18	45,92	3,40	46,81	43,15	50,46	3,99	44,83	42,54	47,13	2,61
Nusa Tenggara Timur	32,51	28,80	36,22	5,82	34,61	33,03	36,18	2,32	34,10	32,60	35,59	2,24
Kalimantan Barat	25,59	22,40	28,79	6,37	28,26	25,99	30,53	4,11	27,26	25,40	29,12	3,48
Kalimantan Tengah	29,43	26,08	32,77	5,80	35,62	32,79	38,45	4,06	32,91	30,75	35,08	3,36
Kalimantan Selatan	37,27	34,18	40,36	4,23	42,15	39,07	45,22	3,72	39,68	37,50	41,87	2,81
Kalimantan Timur	28,02	25,13	30,90	5,26	33,38	28,76	38,01	7,07	29,68	27,23	32,13	4,21
Kalimantan Utara	33,83	29,21	38,44	6,96	39,94	34,92	44,97	6,42	36,07	32,61	39,53	4,89
Sulawesi Utara	29,28	25,86	32,70	5,96	36,31	33,17	39,45	4,41	32,36	29,98	34,73	3,74
Sulawesi Tengah	32,14	28,15	36,13	6,33	36,49	34,02	38,96	3,45	35,03	32,91	37,15	3,09
Sulawesi Selatan	24,95	22,38	27,52	5,26	29,29	27,58	31,00	2,98	27,22	25,69	28,74	2,86
Sulawesi Tenggara	24,94	21,39	28,48	7,25	32,89	30,87	34,91	3,13	30,01	28,17	31,84	3,12
Gorontalo	40,55	35,25	45,84	6,66	46,55	42,33	50,77	4,62	43,81	40,50	47,12	3,85
Sulawesi Barat	34,72	28,58	40,85	9,02	38,91	35,84	41,99	4,03	38,10	35,34	40,86	3,69
Maluku	27,99	23,44	32,55	8,30	37,31	34,56	40,06	3,76	33,53	31,05	36,00	3,77
Maluku Utara	29,91	24,44	35,38	9,32	37,72	34,65	40,79	4,15	35,61	32,93	38,29	3,84
Papua Barat	28,20	23,84	32,55	7,89	25,83	21,19	30,46	9,17	26,60	23,16	30,03	6,59
Papua Barat Daya	16,14	11,19	21,08	15,62	20,02	16,91	23,12	7,91	17,91	14,84	20,98	8,74
Papua	19,05	14,89	23,22	11,16	26,57	22,03	31,11	8,72	22,10	18,98	25,22	7,20
Papua Selatan	25,04	17,88	32,21	14,60	14,09	11,06	17,12	10,98	17,94	14,77	21,11	9,01
Papua Tengah	14,86	9,70	20,02	17,72	8,80	5,39	12,20	19,77	11,43	8,47	14,40	13,24
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	48,78	NA	NA	NA	45,84	NA	NA	NA	42,67
Indonesia	**33,37**	**32,78**	**33,96**	**0,90**	**35,27**	**34,71**	**35,83**	**0,81**	**34,15**	**33,74**	**34,57**	**0,62**

Catatan: Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.28 *Sampling Error* Persentase Penduduk 0–6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025

Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	32,95	30,80	35,09	3,32	35,45	33,20	37,70	3,24	34,20	32,65	35,74	2,30
Sumatera Utara	26,31	24,36	28,26	3,78	27,49	25,48	29,50	3,73	26,89	25,53	28,24	2,57
Sumatera Barat	30,24	27,87	32,61	4,00	29,88	27,51	32,25	4,05	30,06	28,43	31,70	2,78
Riau	27,34	24,69	29,99	4,95	28,62	25,83	31,41	4,97	27,96	26,08	29,83	3,42
Jambi	35,51	32,13	38,88	4,85	36,72	33,36	40,09	4,67	36,10	33,79	38,40	3,26
Sumatera Selatan	29,19	26,79	31,59	4,20	29,58	27,09	32,06	4,29	29,38	27,71	31,05	2,90
Bengkulu	27,95	24,77	31,13	5,80	28,71	25,31	32,10	6,04	28,32	26,04	30,60	4,11
Lampung	31,36	28,56	34,16	4,56	32,13	29,31	34,96	4,48	31,75	29,82	33,68	3,11
Kepulauan Bangka Belitung	28,87	24,92	32,82	6,98	29,41	25,29	33,53	7,15	29,14	26,42	31,86	4,76
Kepulauan Riau	22,89	17,96	27,83	11,00	25,98	20,01	31,96	11,73	24,40	20,45	28,35	8,26
DKI Jakarta	30,70	26,47	34,93	7,03	29,73	25,52	33,95	7,23	30,22	27,27	33,16	4,98
Jawa Barat	30,81	28,95	32,68	3,09	31,81	29,87	33,74	3,10	31,31	29,98	32,63	2,16
Jawa Tengah	42,04	40,27	43,81	2,14	42,81	40,99	44,63	2,17	42,42	41,20	43,64	1,47
DI Yogyakarta	59,07	53,82	64,31	4,53	53,09	47,36	58,83	5,51	56,18	52,39	59,96	3,44
Jawa Timur	45,08	43,24	46,91	2,08	44,49	42,55	46,42	2,22	44,79	43,49	46,08	1,47
Banten	29,29	26,03	32,56	5,69	26,93	23,76	30,11	6,02	28,12	25,90	30,33	4,02
Bali	26,21	22,57	29,85	7,08	28,30	24,75	31,85	6,40	27,26	24,82	29,70	4,57
Nusa Tenggara Barat	46,06	42,92	49,21	3,49	43,52	40,06	46,98	4,06	44,83	42,54	47,13	2,61
Nusa Tenggara Timur	32,62	30,53	34,72	3,27	35,57	33,38	37,77	3,14	34,10	32,60	35,59	2,24
Kalimantan Barat	25,23	22,64	27,82	5,25	29,28	26,63	31,92	4,61	27,26	25,40	29,12	3,48
Kalimantan Tengah	32,69	29,52	35,85	4,94	33,14	29,97	36,31	4,88	32,91	30,75	35,08	3,36
Kalimantan Selatan	38,68	35,58	41,78	4,09	40,69	37,54	43,84	3,95	39,68	37,50	41,87	2,81
Kalimantan Timur	29,71	26,26	33,17	5,94	29,65	26,30	32,99	5,75	29,68	27,23	32,13	4,21
Kalimantan Utara	35,77	30,80	40,73	7,08	36,39	31,38	41,40	7,03	36,07	32,61	39,53	4,89
Sulawesi Utara	31,72	28,45	35,00	5,27	33,00	29,54	36,45	5,35	32,36	29,98	34,73	3,74
Sulawesi Tengah	34,63	31,52	37,74	4,58	35,44	32,36	38,52	4,43	35,03	32,91	37,15	3,09
Sulawesi Selatan	27,65	25,46	29,83	4,04	26,78	24,63	28,93	4,09	27,22	25,69	28,74	2,86
Sulawesi Tenggara	29,69	27,01	32,36	4,59	30,33	27,74	32,92	4,35	30,01	28,17	31,84	3,12
Gorontalo	41,46	36,73	46,18	5,81	46,13	41,42	50,84	5,21	43,81	40,50	47,12	3,85
Sulawesi Barat	36,94	33,04	40,83	5,37	39,29	35,22	43,36	5,28	38,10	35,34	40,86	3,69
Maluku	32,87	29,42	36,33	5,36	34,20	30,69	37,71	5,23	33,53	31,05	36,00	3,77
Maluku Utara	33,96	30,38	37,55	5,38	37,34	33,35	41,34	5,46	35,61	32,93	38,29	3,84
Papua Barat	23,80	19,24	28,36	9,78	29,39	24,38	34,40	8,69	26,60	23,16	30,03	6,59
Papua Barat Daya	17,33	13,18	21,48	12,22	18,47	13,99	22,96	12,39	17,91	14,84	20,98	8,74
Papua	19,13	15,22	23,05	10,43	25,22	20,63	29,81	9,29	22,10	18,98	25,22	7,20
Papua Selatan	18,51	13,89	23,13	12,73	17,36	12,85	21,88	13,26	17,94	14,77	21,11	9,01
Papua Tengah	12,45	8,16	16,74	17,58	10,29	6,54	14,03	18,57	11,43	8,47	14,40	13,24
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	59,83	NA	NA	NA	56,24	NA	NA	NA	42,67
Indonesia	**33,93**	**33,33**	**34,52**	**0,90**	**34,38**	**33,77**	**35,00**	**0,91**	**34,15**	**33,74**	**34,57**	**0,62**

Catatan: Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.29 *Sampling Error* Angka Partisipasi Kasar (APK) 3–6 Tahun Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	31,44	28,21	34,67	5,24	28,25	25,88	30,61	4,27	29,39	27,48	31,30	3,32
Sumatera Utara	25,43	22,74	28,13	5,41	20,25	18,32	22,18	4,86	23,03	21,33	24,73	3,77
Sumatera Barat	31,38	28,09	34,68	5,35	28,65	25,88	31,42	4,94	30,04	27,87	32,20	3,67
Riau	26,39	22,62	30,16	7,29	23,50	20,65	26,35	6,19	24,58	22,31	26,86	4,73
Jambi	34,38	29,06	39,71	7,91	30,70	27,05	34,35	6,06	31,93	28,92	34,94	4,81
Sumatera Selatan	28,01	24,18	31,84	6,98	22,90	20,49	25,32	5,39	24,82	22,73	26,91	4,30
Bengkulu	29,99	24,19	35,80	9,87	25,72	22,34	29,11	6,71	27,22	24,23	30,21	5,60
Lampung	33,17	29,22	37,12	6,08	31,94	28,83	35,06	4,97	32,37	29,92	34,82	3,86
Kepulauan Bangka Belitung	29,02	23,95	34,09	8,91	27,73	22,57	32,89	9,49	28,49	24,83	32,15	6,56
Kepulauan Riau	24,60	19,33	29,86	10,93	35,46	27,72	43,20	11,13	25,20	20,19	30,21	10,14
DKI Jakarta	37,19	33,24	41,14	5,42	–	–	–	–	37,19	33,24	41,14	5,42
Jawa Barat	32,60	30,69	34,51	2,99	33,81	30,15	37,48	5,53	32,82	31,12	34,52	2,64
Jawa Tengah	51,02	49,01	53,02	2,00	45,81	43,08	48,55	3,05	48,61	46,94	50,28	1,75
DI Yogyakarta	67,56	61,60	73,51	4,50	67,92	56,51	79,33	8,57	67,63	62,35	72,91	3,99
Jawa Timur	58,14	55,85	60,44	2,01	52,00	49,19	54,82	2,77	55,60	53,81	57,38	1,64
Banten	28,57	25,34	31,80	5,76	18,22	13,29	23,15	13,80	26,51	23,74	29,28	5,33
Bali	35,56	31,42	39,70	5,94	27,33	22,12	32,53	9,72	33,60	30,21	36,99	5,15
Nusa Tenggara Barat	43,12	39,42	46,82	4,38	38,37	33,82	42,93	6,06	40,86	37,94	43,79	3,65
Nusa Tenggara Timur	30,91	26,22	35,61	7,75	32,04	29,99	34,09	3,26	31,76	29,83	33,69	3,10
Kalimantan Barat	27,80	23,55	32,05	7,80	20,30	17,66	22,94	6,63	23,03	20,74	25,32	5,07
Kalimantan Tengah	34,67	30,09	39,24	6,73	40,22	36,28	44,17	5,00	37,80	34,81	40,79	4,04
Kalimantan Selatan	43,99	39,75	48,23	4,92	44,22	40,51	47,93	4,28	44,10	41,29	46,92	3,26
Kalimantan Timur	29,85	26,22	33,49	6,21	32,37	26,75	37,99	8,86	30,62	27,57	33,67	5,09
Kalimantan Utara	36,49	30,48	42,51	8,41	27,02	20,92	33,12	11,52	32,94	28,50	37,39	6,89
Sulawesi Utara	34,21	29,17	39,25	7,51	32,25	28,20	36,30	6,41	33,32	30,01	36,63	5,07
Sulawesi Tengah	36,13	30,99	41,27	7,26	36,65	33,40	39,89	4,52	36,48	33,72	39,23	3,86
Sulawesi Selatan	28,03	24,63	31,43	6,19	32,65	30,19	35,12	3,85	30,45	28,37	32,52	3,48
Sulawesi Tenggara	26,02	21,58	30,46	8,71	35,51	32,81	38,20	3,87	32,20	29,84	34,56	3,74
Gorontalo	46,54	39,22	53,86	8,02	50,62	45,05	56,19	5,61	48,72	44,20	53,23	4,73
Sulawesi Barat	34,63	27,36	41,89	10,70	40,40	36,17	44,63	5,34	39,22	35,54	42,91	4,79
Maluku	24,48	19,22	29,75	10,97	35,97	32,50	39,43	4,92	31,31	28,29	34,34	4,93
Maluku Utara	28,84	21,07	36,60	13,74	32,36	28,43	36,30	6,20	31,40	27,84	34,95	5,78
Papua Barat	29,59	23,57	35,60	10,37	23,27	17,73	28,81	12,15	25,27	21,03	29,52	8,57
Papua Barat Daya	18,01	11,74	24,28	17,76	21,99	17,90	26,07	9,47	19,83	15,92	23,73	10,05
Papua	16,83	11,19	22,48	17,10	28,30	22,18	34,41	11,03	21,71	17,45	25,96	10,00
Papua Selatan	27,02	17,95	36,09	17,12	13,18	9,56	16,80	14,01	17,85	13,86	21,85	11,42
Papua Tengah	15,97	9,59	22,36	20,38	NA	NA	NA	26,32	11,10	7,56	14,63	16,25
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	39,61	NA	NA	NA	62,58	NA	NA	NA	49,54
Indonesia	**37,55**	**36,75**	**38,35**	**1,09**	**34,25**	**33,50**	**34,99**	**1,11**	**36,19**	**35,63**	**36,75**	**0,79**

Catatan: Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.30 *Sampling Error* Angka Partisipasi Kasar (APK) 3–6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025

Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	29,73	27,11	32,34	4,49	29,05	26,32	31,79	4,80	29,39	27,48	31,30	3,32
Sumatera Utara	23,36	20,86	25,86	5,46	22,69	20,29	25,09	5,40	23,03	21,33	24,73	3,77
Sumatera Barat	30,85	27,74	33,96	5,14	29,21	26,15	32,27	5,34	30,04	27,87	32,20	3,67
Riau	23,16	20,07	26,24	6,80	26,16	22,72	29,59	6,70	24,58	22,31	26,86	4,73
Jambi	33,07	28,67	37,47	6,79	30,79	26,65	34,93	6,86	31,93	28,92	34,94	4,81
Sumatera Selatan	24,77	21,79	27,75	6,14	24,88	21,86	27,90	6,20	24,82	22,73	26,91	4,30
Bengkulu	28,54	24,33	32,75	7,53	25,91	21,65	30,17	8,38	27,22	24,23	30,21	5,60
Lampung	32,10	28,60	35,60	5,57	32,65	29,10	36,19	5,54	32,37	29,92	34,82	3,86
Kepulauan Bangka Belitung	26,19	21,19	31,19	9,74	30,76	25,41	36,11	8,87	28,49	24,83	32,15	6,56
Kepulauan Riau	25,63	19,02	32,25	13,17	24,77	17,50	32,04	14,98	25,20	20,19	30,21	10,14
DKI Jakarta	40,07	34,38	45,76	7,25	34,43	28,86	40,00	8,26	37,19	33,24	41,14	5,42
Jawa Barat	33,89	31,46	36,32	3,66	31,75	29,32	34,18	3,91	32,82	31,12	34,52	2,64
Jawa Tengah	48,12	45,79	50,45	2,47	49,11	46,72	51,51	2,49	48,61	46,94	50,28	1,75
DI Yogyakarta	67,39	60,15	74,64	5,48	67,90	59,90	75,89	6,01	67,63	62,35	72,91	3,99
Jawa Timur	56,37	53,90	58,84	2,24	54,82	52,22	57,42	2,42	55,60	53,81	57,38	1,64
Banten	27,25	23,30	31,19	7,39	25,79	22,00	29,58	7,50	26,51	23,74	29,28	5,33
Bali	34,80	29,83	39,76	7,27	32,47	27,67	37,27	7,54	33,60	30,21	36,99	5,15
Nusa Tenggara Barat	40,81	36,76	44,85	5,06	40,93	36,62	45,24	5,37	40,86	37,94	43,79	3,65
Nusa Tenggara Timur	30,44	27,81	33,08	4,42	33,08	30,22	35,94	4,42	31,76	29,83	33,69	3,10
Kalimantan Barat	22,51	19,31	25,71	7,25	23,53	20,31	26,75	6,98	23,03	20,74	25,32	5,07
Kalimantan Tengah	37,86	33,57	42,14	5,77	37,74	33,47	42,01	5,77	37,80	34,81	40,79	4,04
Kalimantan Selatan	42,89	38,97	46,81	4,66	45,30	41,22	49,38	4,59	44,10	41,29	46,92	3,26
Kalimantan Timur	30,28	26,04	34,53	7,15	30,97	26,55	35,40	7,29	30,62	27,57	33,67	5,09
Kalimantan Utara	34,38	27,86	40,90	9,68	31,44	25,29	37,59	9,98	32,94	28,50	37,39	6,89
Sulawesi Utara	32,91	28,31	37,50	7,12	33,72	29,10	38,34	7,00	33,32	30,01	36,63	5,07
Sulawesi Tengah	34,64	30,78	38,49	5,68	38,42	34,38	42,47	5,38	36,48	33,72	39,23	3,86
Sulawesi Selatan	30,77	27,77	33,77	4,97	30,11	27,20	33,01	4,92	30,45	28,37	32,52	3,48
Sulawesi Tenggara	32,57	29,09	36,05	5,45	31,84	28,46	35,21	5,40	32,20	29,84	34,56	3,74
Gorontalo	47,69	41,08	54,31	7,08	49,72	43,58	55,87	6,30	48,72	44,20	53,23	4,73
Sulawesi Barat	40,32	35,06	45,57	6,65	38,11	32,91	43,32	6,97	39,22	35,54	42,91	4,79
Maluku	29,71	25,67	33,75	6,94	33,04	28,62	37,46	6,83	31,31	28,29	34,34	4,93
Maluku Utara	31,22	26,50	35,94	7,72	31,58	26,42	36,75	8,35	31,40	27,84	34,95	5,78
Papua Barat	24,52	18,13	30,91	13,30	25,95	20,22	31,68	11,26	25,27	21,03	29,52	8,57
Papua Barat Daya	19,72	14,19	25,24	14,30	19,93	14,24	25,62	14,56	19,83	15,92	23,73	10,05
Papua	21,41	15,92	26,91	13,09	22,00	16,47	27,52	12,82	21,71	17,45	25,96	10,00
Papua Selatan	16,14	11,08	21,20	16,00	19,69	13,43	25,94	16,21	17,85	13,86	21,85	11,42
Papua Tengah	11,67	7,19	16,16	19,59	10,41	5,49	15,33	24,11	11,10	7,56	14,63	16,25
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	79,86	NA	NA	NA	60,12	NA	NA	NA	49,54
Indonesia	**36,51**	**35,72**	**37,30**	**1,10**	**35,87**	**35,06**	**36,67**	**1,15**	**36,19**	**35,63**	**36,75**	**0,79**

Catatan: Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.31 *Sampling Error* Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	99,32	98,46	100,00	0,44	98,71	97,68	99,74	0,53	98,92	98,19	99,66	0,38
Sumatera Utara	97,34	95,15	99,53	1,15	98,17	97,00	99,34	0,61	97,74	96,46	99,02	0,67
Sumatera Barat	97,05	94,74	99,36	1,22	98,11	96,83	99,39	0,66	97,59	96,28	98,90	0,68
Riau	96,47	93,94	99,01	1,34	96,13	93,25	99,00	1,52	96,26	94,26	98,27	1,06
Jambi	99,91	99,78	100,00	0,07	98,66	96,69	100,00	1,02	99,05	97,69	100,00	0,70
Sumatera Selatan	98,48	96,23	100,00	1,17	97,50	95,42	99,58	1,09	97,84	96,27	99,41	0,82
Bengkulu	100,00	100,00	100,00	0,00	98,39	96,79	99,98	0,83	98,90	97,81	99,99	0,56
Lampung	99,83	99,49	100,00	0,17	98,88	97,78	99,97	0,56	99,16	98,39	99,93	0,40
Kepulauan Bangka Belitung	96,39	91,19	100,00	2,75	98,76	96,43	100,00	1,20	97,55	94,65	100,00	1,52
Kepulauan Riau	99,03	97,99	100,00	0,54	99,80	99,41	100,00	0,20	99,07	98,09	100,00	0,51
DKI Jakarta	94,63	90,72	98,54	2,11	–	–	–	–	94,63	90,72	98,54	2,11
Jawa Barat	98,44	97,29	99,59	0,60	96,55	93,70	99,41	1,51	98,09	97,01	99,16	0,56
Jawa Tengah	99,50	99,07	99,93	0,22	99,68	99,26	100,00	0,22	99,59	99,28	99,89	0,16
DI Yogyakarta	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Jawa Timur	99,80	99,62	99,98	0,09	100,00	100,00	100,00	0,00	99,89	99,78	99,99	0,05
Banten	95,55	92,34	98,75	1,71	99,28	97,93	100,00	0,70	96,27	93,66	98,88	1,38
Bali	99,16	98,18	100,00	0,50	94,69	89,43	99,94	2,83	97,79	96,03	99,56	0,92
Nusa Tenggara Barat	98,80	97,34	100,00	0,75	99,67	99,24	100,00	0,22	99,26	98,54	99,98	0,37
Nusa Tenggara Timur	99,32	97,98	100,00	0,69	98,07	97,02	99,12	0,55	98,35	97,47	99,22	0,45
Kalimantan Barat	98,92	97,92	99,93	0,52	98,76	97,38	100,00	0,71	98,82	97,89	99,75	0,48
Kalimantan Tengah	99,04	97,54	100,00	0,77	98,81	97,72	99,91	0,57	98,90	98,01	99,80	0,46
Kalimantan Selatan	99,30	97,92	100,00	0,71	98,51	96,34	100,00	1,12	98,90	97,62	100,00	0,66
Kalimantan Timur	95,41	91,24	99,57	2,23	98,55	95,80	100,00	1,43	96,29	93,18	99,40	1,65
Kalimantan Utara	97,37	93,66	100,00	1,94	96,74	91,60	100,00	2,71	97,13	94,11	100,00	1,59
Sulawesi Utara	97,72	94,70	100,00	1,57	99,09	97,60	100,00	0,77	98,31	96,47	100,00	0,95
Sulawesi Tengah	98,20	95,89	100,00	1,20	95,53	93,15	97,91	1,27	96,37	94,59	98,16	0,95
Sulawesi Selatan	98,25	96,23	100,00	1,05	97,89	96,69	99,09	0,63	98,07	96,90	99,23	0,60
Sulawesi Tenggara	96,24	91,98	100,00	2,26	97,41	95,18	99,65	1,17	96,95	94,80	99,10	1,13
Gorontalo	96,98	93,43	100,00	1,87	96,53	92,57	100,00	2,10	96,74	94,05	99,43	1,42
Sulawesi Barat	100,00	100,00	100,00	0,00	96,94	93,33	100,00	1,90	97,52	94,59	100,00	1,53
Maluku	99,33	98,70	99,95	0,32	95,88	92,00	99,76	2,06	97,25	94,88	99,62	1,24
Maluku Utara	99,22	98,37	100,00	0,44	96,71	93,62	99,80	1,63	97,36	95,05	99,67	1,21
Papua Barat	96,90	91,94	100,00	2,61	93,25	89,46	97,05	2,08	94,30	91,25	97,35	1,65
Papua Barat Daya	95,99	88,26	100,00	4,11	84,78	77,40	92,17	4,45	90,48	85,06	95,89	3,05
Papua	94,52	88,96	100,00	3,00	82,88	75,75	90,02	4,39	89,45	84,96	93,94	2,56
Papua Selatan	84,54	68,13	100,00	9,90	68,45	59,34	77,57	6,79	74,43	66,16	82,70	5,67
Papua Tengah	67,59	50,73	84,45	12,73	34,33	23,65	45,02	15,88	45,08	35,89	54,26	10,39
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	0,00	40,65	32,60	48,70	10,10	45,98	38,66	53,29	8,12
Indonesia	**98,11**	**97,61**	**98,60**	**0,26**	**97,15**	**96,78**	**97,52**	**0,19**	**97,70**	**97,37**	**98,02**	**0,17**

Catatan: Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.32 *Sampling Error* Angka Kesiapan Sekolah Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	83,67	78,12	89,22	3,38	74,62	70,32	78,91	2,94	77,73	74,33	81,13	2,23
Sumatera Utara	79,61	74,49	84,73	3,28	69,27	65,28	73,27	2,94	74,53	71,27	77,79	2,23
Sumatera Barat	87,08	82,47	91,69	2,70	83,10	78,77	87,44	2,66	84,97	81,80	88,14	1,90
Riau	75,01	68,30	81,72	4,57	64,93	58,54	71,32	5,02	68,85	64,08	73,62	3,53
Jambi	85,04	76,61	93,47	5,06	79,06	73,06	85,07	3,88	80,99	76,10	85,89	3,08
Sumatera Selatan	68,63	60,11	77,14	6,33	68,00	63,02	72,98	3,74	68,21	63,84	72,59	3,27
Bengkulu	86,46	77,52	95,41	5,28	75,56	68,90	82,22	4,50	79,06	73,64	84,48	3,50
Lampung	79,24	72,31	86,17	4,46	87,06	83,23	90,88	2,24	84,68	81,24	88,11	2,07
Kepulauan Bangka Belitung	81,00	72,33	89,67	5,46	85,97	79,13	92,80	4,06	83,35	77,73	88,97	3,44
Kepulauan Riau	72,00	62,22	81,77	6,93	73,59	60,77	86,42	8,89	72,10	62,94	81,27	6,48
DKI Jakarta	82,14	76,08	88,19	3,76	–	–	–	–	82,14	76,08	88,19	3,76
Jawa Barat	80,55	77,13	83,97	2,17	76,11	69,17	83,05	4,65	79,75	76,68	82,83	1,97
Jawa Tengah	93,18	91,41	94,96	0,97	90,58	87,47	93,69	1,75	91,98	90,25	93,71	0,96
DI Yogyakarta	97,07	93,18	100,00	2,05	94,65	87,31	100,00	3,96	96,48	93,04	99,92	1,82
Jawa Timur	91,64	89,12	94,15	1,40	89,20	86,14	92,26	1,75	90,54	88,59	92,49	1,10
Banten	70,24	63,96	76,51	4,56	70,16	60,47	79,84	7,04	70,22	64,90	75,54	3,87
Bali	88,35	83,14	93,55	3,01	82,14	73,81	90,48	5,18	86,52	82,06	90,98	2,63
Nusa Tenggara Barat	87,35	82,70	91,99	2,72	77,43	69,89	84,97	4,97	82,12	77,57	86,68	2,83
Nusa Tenggara Timur	81,36	73,44	89,29	4,97	64,39	60,50	68,28	3,08	68,34	64,76	71,91	2,67
Kalimantan Barat	54,01	45,49	62,54	8,05	55,57	49,92	61,22	5,19	55,03	50,29	59,76	4,39
Kalimantan Tengah	89,83	84,28	95,38	3,15	81,83	76,45	87,20	3,35	85,51	81,65	89,37	2,30
Kalimantan Selatan	92,93	89,05	96,80	2,13	90,91	86,58	95,24	2,43	91,90	88,98	94,82	1,62
Kalimantan Timur	79,65	72,85	86,44	4,35	74,38	63,97	84,79	7,14	78,02	72,31	83,72	3,73
Kalimantan Utara	79,07	70,27	87,88	5,68	77,61	67,77	87,45	6,47	78,49	71,89	85,09	4,29
Sulawesi Utara	85,20	78,57	91,83	3,97	91,19	87,53	94,85	2,05	87,92	83,92	91,93	2,32
Sulawesi Tengah	81,02	72,71	89,33	5,23	80,56	74,84	86,27	3,62	80,70	75,99	85,41	2,98
Sulawesi Selatan	80,40	74,50	86,30	3,74	78,80	74,60	83,00	2,72	79,60	75,97	83,24	2,33
Sulawesi Tenggara	84,17	77,39	90,94	4,11	80,81	76,18	85,43	2,92	82,15	78,25	86,04	2,42
Gorontalo	90,50	82,37	98,62	4,58	89,20	82,23	96,17	3,99	89,79	84,49	95,10	3,01
Sulawesi Barat	87,87	77,45	98,28	6,05	77,94	71,29	84,59	4,35	79,67	73,84	85,49	3,73
Maluku	63,72	51,39	76,04	9,87	71,16	64,75	77,57	4,60	68,21	61,97	74,45	4,67
Maluku Utara	62,26	48,85	75,68	10,99	69,69	62,31	77,08	5,41	67,76	61,26	74,26	4,89
Papua Barat	80,72	70,74	90,71	6,31	50,58	40,13	61,04	10,54	57,64	48,95	66,34	7,70
Papua Barat Daya	58,50	41,75	75,25	14,61	39,76	31,34	48,18	10,80	47,97	38,81	57,12	9,74
Papua	62,26	49,24	75,29	10,67	47,36	37,16	57,56	10,99	55,91	47,17	64,65	7,97
Papua Selatan	62,76	45,12	80,40	14,34	23,59	15,82	31,35	16,80	36,21	27,65	44,77	12,06
Papua Tengah	NA	NA	NA	14,03	NA	NA	NA	26,94	39,28	27,11	51,45	15,81
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	51,26	NA	NA	NA	37,66	NA	NA	NA	35,08
Indonesia	**82,48**	**81,19**	**83,76**	**0,79**	**77,36**	**76,22**	**78,51**	**0,76**	**80,29**	**79,41**	**81,17**	**0,56**

Catatan: Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.33 *Sampling Error* Angka Kesiapan Sekolah Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025

Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	77,32	72,63	82,02	3,10	78,08	73,21	82,96	3,19	77,73	74,33	81,13	2,23
Sumatera Utara	72,73	67,66	77,80	3,56	76,35	72,37	80,34	2,66	74,53	71,27	77,79	2,23
Sumatera Barat	85,39	81,12	89,67	2,55	84,52	79,88	89,16	2,80	84,97	81,80	88,14	1,90
Riau	67,41	60,45	74,37	5,27	70,39	63,95	76,84	4,67	68,85	64,08	73,62	3,53
Jambi	80,34	73,98	86,70	4,04	81,68	74,38	88,98	4,56	80,99	76,10	85,89	3,08
Sumatera Selatan	66,12	59,77	72,47	4,90	70,50	64,57	76,42	4,29	68,21	63,84	72,59	3,27
Bengkulu	78,45	71,64	85,26	4,43	79,64	71,28	88,00	5,35	79,06	73,64	84,48	3,50
Lampung	80,53	74,88	86,18	3,58	88,66	84,76	92,56	2,24	84,68	81,24	88,11	2,07
Kepulauan Bangka Belitung	82,70	74,71	90,69	4,93	84,03	75,92	92,14	4,92	83,35	77,73	88,97	3,44
Kepulauan Riau	70,21	58,07	82,35	8,82	74,34	60,40	88,28	9,57	72,10	62,94	81,27	6,48
DKI Jakarta	77,42	68,16	86,69	6,10	86,35	78,48	94,22	4,65	82,14	76,08	88,19	3,76
Jawa Barat	80,78	76,63	84,93	2,62	78,62	74,07	83,17	2,96	79,75	76,68	82,83	1,97
Jawa Tengah	91,71	89,32	94,11	1,33	92,27	89,77	94,77	1,38	91,98	90,25	93,71	0,96
DI Yogyakarta	94,51	88,12	100,00	3,45	98,27	95,32	100,00	1,53	96,48	93,04	99,92	1,82
Jawa Timur	91,01	88,40	93,62	1,46	90,04	87,16	92,93	1,64	90,54	88,59	92,49	1,10
Banten	70,98	63,78	78,18	5,18	69,35	61,46	77,24	5,81	70,22	64,90	75,54	3,87
Bali	90,56	85,33	95,80	2,95	82,39	75,20	89,58	4,45	86,52	82,06	90,98	2,63
Nusa Tenggara Barat	78,05	71,01	85,09	4,60	86,00	80,33	91,66	3,36	82,12	77,57	86,68	2,83
Nusa Tenggara Timur	69,61	64,77	74,46	3,55	66,99	61,72	72,26	4,01	68,34	64,76	71,91	2,67
Kalimantan Barat	55,60	49,18	62,02	5,89	54,35	47,36	61,34	6,56	55,03	50,29	59,76	4,39
Kalimantan Tengah	86,05	80,62	91,48	3,22	84,87	79,25	90,50	3,38	85,51	81,65	89,37	2,30
Kalimantan Selatan	93,65	90,02	97,27	1,98	90,20	85,67	94,72	2,56	91,90	88,98	94,82	1,62
Kalimantan Timur	83,79	76,71	90,87	4,31	72,08	63,30	80,85	6,21	78,02	72,31	83,72	3,73
Kalimantan Utara	76,12	66,63	85,61	6,36	80,63	71,51	89,75	5,77	78,49	71,89	85,09	4,29
Sulawesi Utara	86,64	80,56	92,73	3,58	89,28	84,30	94,27	2,85	87,92	83,92	91,93	2,32
Sulawesi Tengah	78,05	71,21	84,88	4,47	83,86	77,61	90,11	3,80	80,70	75,99	85,41	2,98
Sulawesi Selatan	79,91	74,83	84,99	3,24	79,29	74,13	84,45	3,32	79,60	75,97	83,24	2,33
Sulawesi Tenggara	80,81	75,17	86,45	3,56	83,79	78,89	88,69	2,99	82,15	78,25	86,04	2,42
Gorontalo	90,52	83,64	97,40	3,88	88,95	81,96	95,93	4,01	89,79	84,49	95,10	3,01
Sulawesi Barat	75,61	66,08	85,13	6,43	83,52	76,95	90,09	4,01	79,67	73,84	85,49	3,73
Maluku	69,03	61,26	76,80	5,74	67,44	57,82	77,05	7,27	68,21	61,97	74,45	4,67
Maluku Utara	69,14	59,94	78,34	6,79	66,45	57,55	75,36	6,83	67,76	61,26	74,26	4,89
Papua Barat	54,68	42,56	66,80	11,31	61,25	49,43	73,07	9,84	57,64	48,95	66,34	7,70
Papua Barat Daya	45,96	33,42	58,50	13,92	50,06	36,82	63,31	13,50	47,97	38,81	57,12	9,74
Papua	53,31	41,27	65,36	11,53	59,01	46,42	71,60	10,88	55,91	47,17	64,65	7,97
Papua Selatan	34,52	23,24	45,79	16,67	38,23	25,29	51,18	17,28	36,21	27,65	44,77	12,06
Papua Tengah	NA	NA	NA	19,01	NA	NA	NA	26,43	39,28	27,11	51,45	15,81
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	46,30	NA	NA	NA	50,31	NA	NA	NA	35,08
Indonesia	**79,92**	**78,69**	**81,16**	**0,79**	**80,67**	**79,42**	**81,93**	**0,79**	**80,29**	**79,41**	**81,17**	**0,56**

Catatan: Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.34 *Sampling Error* Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7–12 Tahun Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	99,36	98,88	99,84	0,25	99,39	98,95	99,83	0,23	99,38	99,05	99,71	0,17
Sumatera Utara	99,47	99,16	99,78	0,16	99,62	99,43	99,82	0,10	99,54	99,35	99,73	0,10
Sumatera Barat	99,71	99,44	99,97	0,13	99,55	99,22	99,88	0,17	99,63	99,42	99,84	0,11
Riau	99,69	99,37	100,00	0,17	99,77	99,60	99,93	0,09	99,74	99,57	99,90	0,08
Jambi	99,33	98,83	99,84	0,26	99,50	99,10	99,90	0,20	99,45	99,13	99,76	0,16
Sumatera Selatan	99,66	99,29	100,00	0,19	99,40	99,02	99,78	0,19	99,50	99,22	99,77	0,14
Bengkulu	99,73	99,28	100,00	0,23	99,07	98,47	99,67	0,31	99,29	98,86	99,72	0,22
Lampung	99,53	99,16	99,91	0,19	99,66	99,43	99,90	0,12	99,62	99,42	99,82	0,10
Kepulauan Bangka Belitung	99,27	98,54	99,99	0,37	99,79	99,41	100,00	0,20	99,49	99,04	99,94	0,23
Kepulauan Riau	99,71	99,44	99,98	0,14	99,68	99,17	100,00	0,26	99,71	99,46	99,96	0,13
DKI Jakarta	99,32	98,89	99,74	0,22	–	–	–	–	99,32	98,89	99,74	0,22
Jawa Barat	99,58	99,37	99,79	0,11	99,16	98,47	99,84	0,35	99,50	99,28	99,71	0,11
Jawa Tengah	99,47	99,22	99,72	0,13	99,62	99,34	99,89	0,14	99,54	99,36	99,72	0,09
DI Yogyakarta	99,64	99,18	100,00	0,23	99,53	98,61	100,00	0,47	99,61	99,19	100,00	0,21
Jawa Timur	99,20	98,89	99,51	0,16	99,40	99,03	99,76	0,19	99,28	99,05	99,52	0,12
Banten	99,51	99,09	99,92	0,21	99,57	98,76	100,00	0,41	99,52	99,15	99,89	0,19
Bali	99,59	99,01	100,00	0,30	99,53	98,91	100,00	0,32	99,57	99,12	100,00	0,23
Nusa Tenggara Barat	99,61	99,27	99,95	0,18	99,13	98,37	99,89	0,39	99,38	98,97	99,78	0,21
Nusa Tenggara Timur	99,69	99,37	100,00	0,16	98,60	98,16	99,05	0,23	98,89	98,55	99,23	0,17
Kalimantan Barat	99,22	98,53	99,90	0,35	98,79	98,22	99,36	0,30	98,95	98,51	99,39	0,23
Kalimantan Tengah	99,48	99,00	99,95	0,24	99,42	99,05	99,80	0,19	99,45	99,15	99,74	0,15
Kalimantan Selatan	98,96	98,19	99,73	0,40	99,33	98,85	99,80	0,25	99,14	98,69	99,60	0,23
Kalimantan Timur	99,61	99,29	99,92	0,16	99,70	99,30	100,00	0,21	99,64	99,39	99,89	0,13
Kalimantan Utara	99,11	98,17	100,00	0,48	99,19	98,25	100,00	0,48	99,14	98,46	99,82	0,35
Sulawesi Utara	99,03	97,98	100,00	0,54	99,59	99,29	99,89	0,15	99,28	98,69	99,87	0,30
Sulawesi Tengah	99,13	98,32	99,94	0,42	98,30	97,69	98,92	0,32	98,56	98,07	99,06	0,25
Sulawesi Selatan	99,20	98,61	99,78	0,30	99,23	98,94	99,53	0,15	99,21	98,89	99,54	0,16
Sulawesi Tenggara	98,78	97,65	99,91	0,58	99,20	98,80	99,60	0,21	99,05	98,56	99,53	0,25
Gorontalo	99,27	98,55	99,99	0,37	98,49	97,49	99,49	0,52	98,85	98,21	99,48	0,33
Sulawesi Barat	99,03	98,03	100,00	0,52	98,44	97,54	99,35	0,47	98,56	97,82	99,31	0,39
Maluku	99,56	99,11	100,00	0,23	99,56	99,28	99,83	0,14	99,56	99,31	99,80	0,13
Maluku Utara	99,21	98,28	100,00	0,48	98,98	98,20	99,77	0,40	99,04	98,42	99,67	0,32
Papua Barat	98,20	96,34	100,00	0,97	97,34	95,82	98,86	0,80	97,59	96,38	98,80	0,63
Papua Barat Daya	98,50	96,33	100,00	1,12	98,85	98,04	99,66	0,42	98,67	97,47	99,86	0,62
Papua	98,07	96,13	100,00	1,01	96,77	95,40	98,14	0,72	97,51	96,26	98,77	0,66
Papua Selatan	95,12	90,97	99,27	2,23	89,79	87,01	92,58	1,58	91,65	89,34	93,97	1,29
Papua Tengah	94,88	92,01	97,76	1,55	73,76	70,02	77,50	2,59	80,13	77,29	82,96	1,81
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	10,91	82,04	79,57	84,50	1,53	82,24	79,69	84,78	1,58
Indonesia	**99,42**	**99,33**	**99,52**	**0,05**	**98,95**	**98,84**	**99,06**	**0,06**	**99,23**	**99,15**	**99,30**	**0,04**

Catatan: Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.35 *Sampling Error* Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13–15 Tahun Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	98,90	98,13	99,66	0,39	96,96	95,78	98,14	0,62	97,65	96,85	98,46	0,42
Sumatera Utara	98,19	97,43	98,94	0,39	97,05	96,05	98,05	0,52	97,67	97,06	98,29	0,32
Sumatera Barat	98,47	97,64	99,30	0,43	95,46	93,91	97,02	0,83	97,00	96,12	97,88	0,46
Riau	97,27	95,62	98,92	0,87	94,25	92,31	96,19	1,05	95,47	94,13	96,81	0,72
Jambi	98,43	96,91	99,95	0,79	94,26	92,04	96,48	1,20	95,59	93,99	97,18	0,85
Sumatera Selatan	97,32	95,83	98,82	0,78	94,66	92,95	96,38	0,92	95,68	94,47	96,89	0,64
Bengkulu	99,28	98,15	100,00	0,58	95,68	93,95	97,40	0,92	97,01	95,85	98,18	0,61
Lampung	94,87	92,33	97,41	1,36	96,15	94,74	97,57	0,75	95,72	94,44	96,99	0,68
Kepulauan Bangka Belitung	95,27	92,72	97,83	1,37	89,41	85,07	93,74	2,47	92,90	90,56	95,23	1,28
Kepulauan Riau	98,95	97,82	100,00	0,58	94,81	90,41	99,21	2,37	98,60	97,49	99,71	0,57
DKI Jakarta	98,74	97,84	99,65	0,47	–	–	–	–	98,74	97,84	99,65	0,47
Jawa Barat	96,73	95,72	97,74	0,53	95,98	94,20	97,76	0,95	96,58	95,70	97,46	0,47
Jawa Tengah	97,34	96,64	98,04	0,37	96,69	95,56	97,82	0,60	97,05	96,42	97,69	0,33
DI Yogyakarta	99,83	99,52	100,00	0,16	98,71	96,93	100,00	0,92	99,60	99,17	100,00	0,22
Jawa Timur	97,38	96,55	98,21	0,43	96,83	95,65	98,02	0,62	97,15	96,46	97,84	0,36
Banten	98,20	97,24	99,17	0,50	93,31	90,00	96,62	1,81	97,11	96,04	98,17	0,56
Bali	99,40	98,77	100,00	0,32	97,57	95,47	99,67	1,10	98,88	98,12	99,63	0,39
Nusa Tenggara Barat	97,93	96,63	99,23	0,68	95,94	93,25	98,62	1,43	96,92	95,42	98,43	0,79
Nusa Tenggara Timur	98,34	96,79	99,88	0,80	94,45	93,32	95,58	0,61	95,44	94,51	96,38	0,50
Kalimantan Barat	94,75	92,53	96,96	1,19	94,11	92,38	95,85	0,94	94,36	92,99	95,72	0,74
Kalimantan Tengah	96,81	94,78	98,84	1,07	94,90	92,83	96,97	1,11	95,74	94,27	97,20	0,78
Kalimantan Selatan	95,02	92,64	97,39	1,27	92,55	90,06	95,04	1,37	93,82	92,10	95,54	0,94
Kalimantan Timur	97,70	96,11	99,28	0,83	96,72	93,77	99,67	1,56	97,34	95,86	98,82	0,77
Kalimantan Utara	97,83	96,00	99,65	0,95	93,37	88,80	97,93	2,50	95,96	93,74	98,17	1,18
Sulawesi Utara	95,77	93,70	97,84	1,10	96,58	95,17	98,00	0,75	96,11	94,77	97,45	0,71
Sulawesi Tengah	96,01	93,17	98,84	1,51	93,83	91,93	95,73	1,03	94,58	92,99	96,16	0,85
Sulawesi Selatan	95,70	94,13	97,28	0,84	92,90	91,48	94,32	0,78	94,22	93,16	95,28	0,57
Sulawesi Tenggara	96,23	94,18	98,28	1,08	96,71	95,69	97,73	0,54	96,53	95,52	97,53	0,53
Gorontalo	96,62	93,63	99,61	1,58	89,02	84,42	93,63	2,64	92,35	89,40	95,30	1,63
Sulawesi Barat	91,42	86,55	96,29	2,72	92,54	89,92	95,16	1,44	92,30	89,99	94,61	1,28
Maluku	99,16	98,44	99,89	0,37	96,70	95,30	98,10	0,74	97,75	96,89	98,62	0,45
Maluku Utara	98,31	96,14	100,00	1,12	96,64	94,91	98,37	0,91	97,08	95,69	98,48	0,73
Papua Barat	98,35	95,74	100,00	1,35	95,28	93,04	97,51	1,20	96,22	94,50	97,95	0,92
Papua Barat Daya	96,81	93,20	100,00	1,90	95,80	93,05	98,55	1,46	96,38	94,00	98,77	1,26
Papua	97,51	94,80	100,00	1,42	97,06	95,66	98,45	0,73	97,32	95,66	98,98	0,87
Papua Selatan	99,78	99,45	100,00	0,17	83,84	78,28	89,41	3,39	89,29	85,45	93,14	2,19
Papua Tengah	97,23	93,37	100,00	2,03	58,97	53,85	64,10	4,44	67,86	63,57	72,16	3,23
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	1,40	69,49	65,41	73,56	2,99	71,08	67,10	75,05	2,85
Indonesia	**97,35**	**97,03**	**97,67**	**0,17**	**94,88**	**94,51**	**95,24**	**0,20**	**96,30**	**96,06**	**96,54**	**0,13**

Catatan: Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.36 *Sampling Error* Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16–18 Tahun Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	85,60	82,56	88,65	1,81	78,22	75,44	81,00	1,82	80,94	78,84	83,03	1,32
Sumatera Utara	76,63	73,46	79,79	2,11	78,75	76,38	81,12	1,54	77,51	75,42	79,61	1,38
Sumatera Barat	88,59	85,85	91,32	1,58	80,64	77,70	83,58	1,86	85,04	83,01	87,06	1,22
Riau	82,13	77,98	86,29	2,58	74,22	70,74	77,69	2,39	77,42	74,75	80,09	1,76
Jambi	81,57	76,61	86,52	3,10	70,35	66,26	74,44	2,96	74,39	71,20	77,58	2,19
Sumatera Selatan	77,02	72,63	81,41	2,91	71,59	68,40	74,78	2,27	73,78	71,18	76,39	1,80
Bengkulu	90,38	86,34	94,42	2,28	75,11	70,94	79,29	2,84	80,48	77,33	83,63	2,00
Lampung	79,18	75,42	82,95	2,42	73,25	69,64	76,85	2,51	75,35	72,66	78,04	1,82
Kepulauan Bangka Belitung	80,76	75,82	85,71	3,12	69,63	63,13	76,13	4,76	76,03	72,03	80,03	2,68
Kepulauan Riau	88,66	83,23	94,10	3,13	83,07	77,39	88,75	3,49	88,24	83,21	93,28	2,91
DKI Jakarta	88,22	85,27	91,17	1,71	–	–	–	–	88,22	85,27	91,17	1,71
Jawa Barat	76,51	74,29	78,72	1,48	72,60	68,13	77,06	3,14	75,80	73,82	77,79	1,33
Jawa Tengah	80,95	79,18	82,73	1,12	74,44	71,54	77,34	1,99	77,97	76,33	79,62	1,08
DI Yogyakarta	93,94	91,17	96,72	1,51	89,79	82,71	96,88	4,02	93,03	90,37	95,69	1,46
Jawa Timur	85,86	84,00	87,72	1,11	73,92	70,90	76,95	2,09	80,96	79,28	82,63	1,06
Banten	77,01	73,34	80,67	2,43	60,05	52,56	67,55	6,37	73,84	70,52	77,16	2,29
Bali	91,93	89,25	94,61	1,49	87,05	82,63	91,47	2,59	90,68	88,38	92,98	1,29
Nusa Tenggara Barat	83,70	79,97	87,43	2,27	73,65	67,63	79,67	4,17	79,21	75,77	82,65	2,22
Nusa Tenggara Timur	81,30	76,69	85,91	2,89	74,77	72,34	77,21	1,66	76,65	74,46	78,84	1,46
Kalimantan Barat	74,64	69,81	79,48	3,31	68,61	64,96	72,26	2,71	70,95	68,03	73,88	2,10
Kalimantan Tengah	79,69	75,25	84,13	2,84	62,95	58,13	67,78	3,91	70,76	67,35	74,17	2,46
Kalimantan Selatan	75,96	71,87	80,04	2,74	74,33	70,19	78,46	2,84	75,16	72,25	78,07	1,97
Kalimantan Timur	85,45	81,74	89,17	2,22	80,80	75,32	86,29	3,46	84,15	81,07	87,24	1,87
Kalimantan Utara	85,97	81,37	90,57	2,73	74,07	65,16	82,98	6,14	81,93	77,44	86,41	2,79
Sulawesi Utara	73,42	68,91	77,93	3,13	68,58	63,83	73,34	3,54	71,45	68,14	74,75	2,36
Sulawesi Tengah	79,41	73,71	85,11	3,66	73,06	69,62	76,51	2,41	75,36	72,35	78,38	2,04
Sulawesi Selatan	79,07	75,69	82,45	2,18	72,59	69,87	75,31	1,91	75,94	73,75	78,13	1,47
Sulawesi Tenggara	84,34	80,17	88,50	2,52	76,20	73,16	79,24	2,04	79,58	77,08	82,08	1,60
Gorontalo	78,73	72,59	84,87	3,98	66,18	60,31	72,05	4,52	72,00	67,72	76,27	3,03
Sulawesi Barat	76,02	67,62	84,43	5,64	72,52	67,74	77,30	3,36	73,22	69,05	77,40	2,91
Maluku	78,77	73,15	84,39	3,64	75,94	72,32	79,57	2,44	77,28	74,01	80,54	2,16
Maluku Utara	84,55	78,59	90,51	3,59	77,56	73,75	81,37	2,51	79,62	76,40	82,85	2,07
Papua Barat	80,77	73,35	88,19	4,69	76,00	70,28	81,72	3,84	77,53	72,99	82,07	2,99
Papua Barat Daya	83,86	75,90	91,82	4,84	78,91	73,26	84,56	3,65	81,70	76,57	86,82	3,20
Papua	83,43	77,86	89,00	3,41	79,56	75,07	84,04	2,88	81,78	78,06	85,51	2,32
Papua Selatan	86,49	78,31	94,67	4,83	54,46	46,58	62,34	7,38	66,97	60,87	73,07	4,65
Papua Tengah	89,01	80,22	97,81	5,04	32,90	27,75	38,06	8,00	44,61	39,61	49,62	5,73
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	37,53	51,18	46,64	55,72	4,52	50,79	45,96	55,63	4,86
Indonesia	**80,91**	**80,11**	**81,70**	**0,50**	**73,30**	**72,46**	**74,15**	**0,59**	**77,86**	**77,28**	**78,45**	**0,38**

Catatan: Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.37 *Sampling Error* Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19–23 Tahun Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	44,11	40,37	47,85	4,32	29,53	26,70	32,35	4,88	34,95	32,68	37,23	3,31
Sumatera Utara	34,82	31,50	38,14	4,86	23,37	21,07	25,66	5,01	30,48	28,20	32,75	3,81
Sumatera Barat	44,98	40,69	49,26	4,86	30,30	27,05	33,55	5,47	38,84	35,94	41,73	3,80
Riau	42,59	38,12	47,06	5,35	25,62	22,45	28,80	6,32	33,03	30,34	35,72	4,15
Jambi	31,44	26,22	36,66	8,47	22,02	18,68	25,37	7,75	25,23	22,40	28,07	5,73
Sumatera Selatan	29,91	25,27	34,55	7,92	15,02	12,91	17,14	7,19	21,24	18,90	23,57	5,62
Bengkulu	52,24	45,76	58,72	6,33	22,00	18,61	25,39	7,87	34,18	30,73	37,62	5,15
Lampung	29,80	25,50	34,09	7,36	14,94	12,25	17,63	9,18	20,68	18,27	23,09	5,95
Kepulauan Bangka Belitung	27,63	22,44	32,82	9,58	12,65	8,76	16,55	15,69	21,13	17,62	24,63	8,46
Kepulauan Riau	27,09	21,28	32,90	10,95	17,72	11,34	24,10	18,37	26,61	21,08	32,14	10,60
DKI Jakarta	34,21	30,85	37,57	5,01	–	–	–	–	34,21	30,85	37,57	5,01
Jawa Barat	29,38	27,55	31,22	3,19	20,36	16,78	23,95	8,99	27,98	26,33	29,63	3,01
Jawa Tengah	32,12	30,21	34,03	3,03	21,12	18,79	23,45	5,63	27,44	25,93	28,94	2,79
DI Yogyakarta	57,58	53,11	62,04	3,95	39,76	30,03	49,49	12,49	54,72	50,65	58,79	3,79
Jawa Timur	32,35	30,37	34,33	3,13	23,68	21,29	26,06	5,13	28,90	27,37	30,43	2,71
Banten	26,65	23,63	29,67	5,78	12,62	8,04	17,19	18,51	24,45	21,80	27,10	5,53
Bali	36,94	32,65	41,23	5,93	24,38	18,79	29,98	11,71	34,32	30,71	37,93	5,36
Nusa Tenggara Barat	32,45	28,39	36,52	6,39	24,17	18,81	29,53	11,31	28,88	25,61	32,15	5,78
Nusa Tenggara Timur	44,55	39,68	49,42	5,58	24,70	22,48	26,91	4,58	31,41	29,14	33,68	3,68
Kalimantan Barat	37,35	32,77	41,93	6,26	19,73	17,16	22,31	6,67	26,84	24,35	29,32	4,72
Kalimantan Tengah	30,19	25,77	34,62	7,48	20,53	16,89	24,18	9,06	24,91	22,07	27,76	5,83
Kalimantan Selatan	33,38	29,55	37,21	5,86	28,12	24,51	31,74	6,56	30,91	28,26	33,56	4,38
Kalimantan Timur	37,90	33,50	42,30	5,92	21,70	16,19	27,21	12,95	33,15	29,61	36,68	5,45
Kalimantan Utara	33,88	27,45	40,31	9,69	20,00	13,59	26,41	16,35	29,25	24,42	34,09	8,43
Sulawesi Utara	29,79	25,28	34,30	7,72	19,00	15,58	22,42	9,18	25,57	22,48	28,66	6,17
Sulawesi Tengah	35,53	30,33	40,72	7,46	20,96	18,06	23,87	7,08	26,50	23,77	29,23	5,26
Sulawesi Selatan	38,79	35,07	42,51	4,89	27,90	25,46	30,33	4,45	33,80	31,48	36,12	3,50
Sulawesi Tenggara	42,73	37,52	47,95	6,23	25,75	22,75	28,76	5,96	33,67	30,71	36,63	4,49
Gorontalo	44,25	37,85	50,65	7,38	24,61	19,79	29,42	9,98	35,02	30,78	39,27	6,18
Sulawesi Barat	31,33	24,02	38,63	11,90	21,48	17,81	25,16	8,72	23,55	20,26	26,84	7,13
Maluku	36,37	30,80	41,95	7,82	21,89	18,71	25,07	7,41	29,66	26,28	33,03	5,81
Maluku Utara	38,26	31,06	45,45	9,59	18,56	15,35	21,77	8,82	25,38	22,08	28,69	6,65
Papua Barat	40,76	34,00	47,51	8,45	31,69	25,18	38,19	10,47	34,53	29,61	39,44	7,26
Papua Barat Daya	36,08	27,91	44,24	11,55	33,78	27,93	39,64	8,85	35,19	29,70	40,67	7,95
Papua	41,24	34,64	47,84	8,17	32,27	27,23	37,30	7,96	38,16	33,48	42,84	6,26
Papua Selatan	42,67	30,63	54,72	14,40	18,82	13,87	23,78	13,43	27,57	21,65	33,48	10,94
Papua Tengah	31,99	23,73	40,24	13,17	10,93	8,25	13,61	12,51	15,48	12,63	18,33	9,39
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	34,70	10,53	7,79	13,26	13,25	12,48	9,33	15,64	12,90
Indonesia	**33,23**	**32,49**	**33,98**	**1,15**	**22,12**	**21,43**	**22,81**	**1,59**	**29,13**	**28,59**	**29,67**	**0,94**

Catatan: Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.38 *Sampling Error* Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	106,94	104,65	109,23	1,09	108,96	107,12	110,79	0,86	108,27	106,83	109,71	0,68
Sumatera Utara	104,83	102,98	106,67	0,90	107,51	106,08	108,95	0,68	106,04	104,84	107,25	0,58
Sumatera Barat	104,32	102,48	106,16	0,90	108,66	106,74	110,58	0,90	106,47	105,14	107,80	0,64
Riau	105,33	103,18	107,47	1,04	109,53	107,52	111,55	0,94	107,92	106,43	109,41	0,70
Jambi	104,52	101,61	107,43	1,42	108,70	106,39	111,02	1,09	107,38	105,55	109,21	0,87
Sumatera Selatan	106,00	103,02	108,98	1,43	108,65	106,86	110,44	0,84	107,69	106,12	109,26	0,74
Bengkulu	106,57	102,28	110,85	2,05	107,01	104,71	109,31	1,10	106,86	104,77	108,96	1,00
Lampung	105,52	103,22	107,82	1,11	105,03	103,26	106,80	0,86	105,19	103,79	106,60	0,68
Kepulauan Bangka Belitung	106,16	103,00	109,33	1,52	107,85	104,71	110,98	1,48	106,87	104,61	109,13	1,08
Kepulauan Riau	109,71	105,86	113,57	1,79	106,70	102,88	110,52	1,83	109,49	105,92	113,07	1,67
DKI Jakarta	103,49	101,95	105,03	0,76	–	–	–	–	103,49	101,95	105,03	0,76
Jawa Barat	103,61	102,67	104,56	0,47	103,73	101,92	105,53	0,89	103,64	102,80	104,47	0,41
Jawa Tengah	103,70	102,77	104,63	0,46	103,59	102,20	104,99	0,69	103,65	102,83	104,47	0,40
DI Yogyakarta	102,23	100,46	104,00	0,88	100,54	97,83	103,26	1,38	101,78	100,29	103,27	0,75
Jawa Timur	102,38	101,52	103,24	0,43	102,91	101,80	104,02	0,55	102,61	101,92	103,29	0,34
Banten	103,76	101,85	105,67	0,94	111,56	107,16	115,96	2,01	105,29	103,52	107,06	0,86
Bali	103,93	101,74	106,12	1,07	104,43	100,77	108,09	1,79	104,07	102,19	105,95	0,92
Nusa Tenggara Barat	104,33	102,57	106,09	0,86	108,08	104,60	111,57	1,64	106,15	104,24	108,06	0,92
Nusa Tenggara Timur	109,92	106,54	113,31	1,57	110,36	108,80	111,92	0,72	110,24	108,79	111,70	0,67
Kalimantan Barat	104,72	101,65	107,78	1,49	109,62	107,39	111,86	1,04	107,79	105,97	109,61	0,86
Kalimantan Tengah	104,96	102,69	107,23	1,10	108,19	105,86	110,52	1,10	106,78	105,14	108,42	0,78
Kalimantan Selatan	105,09	102,96	107,22	1,03	107,56	105,56	109,57	0,95	106,34	104,88	107,80	0,70
Kalimantan Timur	102,35	100,65	104,05	0,85	109,76	105,40	114,12	2,03	104,57	102,81	106,34	0,86
Kalimantan Utara	104,76	101,38	108,14	1,65	110,17	106,11	114,23	1,88	106,86	104,26	109,47	1,24
Sulawesi Utara	105,42	102,15	108,69	1,58	108,34	105,76	110,92	1,22	106,75	104,61	108,89	1,02
Sulawesi Tengah	103,89	101,02	106,77	1,41	102,11	100,28	103,94	0,91	102,67	101,12	104,22	0,77
Sulawesi Selatan	105,63	103,20	108,06	1,17	105,98	104,64	107,32	0,64	105,81	104,46	107,17	0,65
Sulawesi Tenggara	108,20	104,53	111,86	1,73	107,12	105,36	108,88	0,84	107,51	105,77	109,25	0,82
Gorontalo	105,08	100,77	109,39	2,09	106,01	102,81	109,20	1,54	105,58	102,95	108,21	1,27
Sulawesi Barat	103,93	99,76	108,09	2,05	105,72	103,20	108,24	1,22	105,35	103,17	107,52	1,05
Maluku	106,94	102,63	111,26	2,06	110,19	107,66	112,71	1,17	108,83	106,50	111,17	1,09
Maluku Utara	109,71	104,96	114,45	2,21	110,88	107,98	113,78	1,33	110,57	108,10	113,05	1,14
Papua Barat	107,30	102,64	111,97	2,22	109,92	105,03	114,81	2,27	109,18	105,44	112,91	1,75
Papua Barat Daya	110,59	102,91	118,28	3,55	111,89	108,20	115,57	1,68	111,22	106,84	115,59	2,01
Papua	110,26	104,59	115,93	2,63	111,98	107,25	116,71	2,16	110,99	107,15	114,83	1,77
Papua Selatan	107,32	97,23	117,42	4,80	113,30	107,34	119,26	2,68	111,21	105,94	116,49	2,42
Papua Tengah	97,71	90,05	105,38	4,00	75,97	71,00	80,93	3,34	82,52	78,34	86,71	2,59
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	14,71	84,55	81,04	88,06	2,12	84,31	80,75	87,87	2,15
Indonesia	**104,13**	**103,74**	**104,52**	**0,19**	**105,97**	**105,56**	**106,38**	**0,20**	**104,90**	**104,62**	**105,19**	**0,14**

Catatan: Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.39 *Sampling Error* Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	96,03	91,35	100,71	2,48	96,17	92,07	100,27	2,18	96,12	93,00	99,24	1,66
Sumatera Utara	91,85	87,31	96,39	2,52	89,39	86,32	92,46	1,75	90,73	87,89	93,58	1,60
Sumatera Barat	96,47	92,44	100,49	2,13	93,21	89,52	96,89	2,02	94,87	92,14	97,61	1,47
Riau	92,86	88,03	97,68	2,65	94,71	90,29	99,13	2,38	93,96	90,69	97,24	1,78
Jambi	90,27	83,06	97,48	4,07	93,86	88,34	99,38	3,00	92,72	88,31	97,12	2,42
Sumatera Selatan	84,59	78,64	90,54	3,59	88,88	84,99	92,76	2,23	87,24	83,93	90,55	1,94
Bengkulu	92,92	84,36	101,49	4,70	92,36	87,69	97,04	2,58	92,57	88,25	96,90	2,38
Lampung	86,76	81,50	92,03	3,10	90,43	86,03	94,83	2,48	89,19	85,77	92,61	1,95
Kepulauan Bangka Belitung	92,18	84,51	99,85	4,25	81,30	73,39	89,21	4,96	87,77	82,21	93,34	3,24
Kepulauan Riau	96,15	88,51	103,78	4,05	91,84	84,05	99,63	4,33	95,78	88,78	102,78	3,73
DKI Jakarta	98,76	94,54	102,97	2,18	–	–	–	–	98,76	94,54	102,97	2,18
Jawa Barat	97,89	95,10	100,69	1,45	94,41	89,63	99,20	2,58	97,20	94,77	99,63	1,27
Jawa Tengah	90,35	87,87	92,84	1,40	93,45	89,78	97,12	2,00	91,73	89,59	93,86	1,19
DI Yogyakarta	95,43	90,64	100,22	2,56	102,14	91,44	112,84	5,35	96,77	92,38	101,17	2,32
Jawa Timur	93,41	91,11	95,70	1,26	92,47	89,02	95,92	1,90	93,01	91,04	94,98	1,08
Banten	94,35	89,68	99,01	2,52	88,39	79,99	96,79	4,85	93,01	88,94	97,09	2,24
Bali	97,41	92,51	102,32	2,57	92,27	85,64	98,90	3,66	95,94	91,95	99,93	2,12
Nusa Tenggara Barat	94,76	89,93	99,60	2,60	91,23	85,08	97,37	3,44	92,98	89,05	96,90	2,15
Nusa Tenggara Timur	93,24	87,06	99,43	3,39	93,73	90,78	96,68	1,60	93,60	90,90	96,31	1,47
Kalimantan Barat	87,83	80,46	95,21	4,29	89,39	84,88	93,89	2,57	88,78	84,81	92,76	2,29
Kalimantan Tengah	92,06	86,03	98,09	3,34	88,60	83,19	94,01	3,11	90,11	86,08	94,14	2,28
Kalimantan Selatan	92,29	86,91	97,66	2,97	94,17	88,63	99,71	3,00	93,20	89,34	97,06	2,11
Kalimantan Timur	96,00	90,14	101,86	3,11	91,38	82,88	99,89	4,75	94,32	89,46	99,18	2,63
Kalimantan Utara	97,08	88,57	105,59	4,47	93,52	84,43	102,61	4,96	95,59	89,35	101,83	3,33
Sulawesi Utara	90,67	84,42	96,92	3,52	88,27	82,79	93,75	3,17	89,67	85,38	93,96	2,44
Sulawesi Tengah	93,38	86,66	100,10	3,67	92,12	87,47	96,76	2,57	92,55	88,73	96,37	2,11
Sulawesi Selatan	92,94	88,16	97,72	2,62	87,40	84,45	90,35	1,72	90,01	87,28	92,73	1,55
Sulawesi Tenggara	83,59	77,37	89,81	3,80	90,63	86,66	94,59	2,23	87,94	84,52	91,37	1,99
Gorontalo	87,41	78,16	96,66	5,40	81,09	74,05	88,13	4,43	83,85	78,17	89,54	3,46
Sulawesi Barat	86,11	73,71	98,50	7,35	86,83	81,87	91,78	2,91	86,68	81,97	91,38	2,77
Maluku	88,43	81,08	95,79	4,24	93,21	88,08	98,34	2,81	91,17	86,85	95,48	2,41
Maluku Utara	83,94	75,68	92,21	5,02	94,48	89,26	99,69	2,82	91,67	87,24	96,10	2,46
Papua Barat	90,64	80,15	101,13	5,91	94,17	84,40	103,94	5,29	93,08	85,60	100,57	4,10
Papua Barat Daya	90,35	78,60	102,10	6,64	102,73	94,31	111,14	4,18	95,56	87,73	103,39	4,18
Papua	101,82	92,54	111,10	4,65	103,82	95,52	112,12	4,08	102,68	96,29	109,07	3,17
Papua Selatan	112,76	92,34	133,17	9,24	74,67	62,61	86,74	8,24	87,71	76,79	98,62	6,35
Papua Tengah	95,53	80,42	110,64	8,07	64,74	58,07	71,41	5,26	71,89	65,68	78,11	4,41
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	12,99	74,97	68,63	81,30	4,31	78,11	71,66	84,56	4,21
Indonesia	**94,15**	**93,13**	**95,16**	**0,55**	**91,47**	**90,48**	**92,46**	**0,55**	**93,02**	**92,30**	**93,73**	**0,39**

Catatan: Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.40 *Sampling Error* Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	98,27	91,90	104,65	3,31	98,57	93,31	103,83	2,72	98,46	94,39	102,53	2,11
Sumatera Utara	96,57	90,97	102,17	2,96	100,79	96,51	105,08	2,17	98,33	94,59	102,07	1,94
Sumatera Barat	97,69	92,34	103,04	2,79	92,43	86,96	97,90	3,02	95,34	91,50	99,18	2,05
Riau	95,48	88,12	102,85	3,94	79,57	74,31	84,82	3,37	86,01	81,68	90,34	2,57
Jambi	90,61	81,82	99,40	4,95	88,53	81,68	95,38	3,95	89,28	83,87	94,68	3,09
Sumatera Selatan	89,36	82,18	96,54	4,10	88,59	83,34	93,84	3,02	88,90	84,64	93,17	2,45
Bengkulu	109,16	97,21	121,10	5,58	88,99	82,30	95,67	3,83	96,07	90,02	102,13	3,21
Lampung	88,67	82,54	94,79	3,53	87,12	81,25	92,99	3,44	87,67	83,30	92,04	2,54
Kepulauan Bangka Belitung	92,08	82,62	101,55	5,24	79,81	70,79	88,84	5,77	86,87	80,22	93,52	3,91
Kepulauan Riau	90,36	82,04	98,68	4,70	94,22	82,61	105,84	6,29	90,65	82,89	98,40	4,36
DKI Jakarta	86,70	81,19	92,21	3,24	–	–	–	–	86,70	81,19	92,21	3,24
Jawa Barat	86,04	82,67	89,40	1,99	88,10	80,97	95,22	4,12	86,41	83,37	89,45	1,80
Jawa Tengah	93,78	90,47	97,09	1,80	87,95	83,23	92,67	2,74	91,11	88,29	93,93	1,58
DI Yogyakarta	98,05	91,02	105,07	3,66	102,02	85,77	118,26	8,12	98,92	92,38	105,46	3,37
Jawa Timur	92,63	89,39	95,86	1,78	83,88	79,25	88,50	2,81	89,03	86,33	91,74	1,55
Banten	85,82	80,14	91,49	3,37	70,58	59,86	81,30	7,75	82,97	77,92	88,02	3,10
Bali	91,05	84,90	97,20	3,45	97,04	88,79	105,29	4,34	92,58	87,53	97,64	2,78
Nusa Tenggara Barat	90,11	84,23	95,98	3,33	92,62	82,82	102,42	5,40	91,23	85,79	96,67	3,04
Nusa Tenggara Timur	96,46	87,40	105,51	4,79	89,00	84,81	93,19	2,40	91,14	87,21	95,07	2,20
Kalimantan Barat	97,26	88,03	106,50	4,84	86,78	80,39	93,16	3,75	90,85	85,54	96,16	2,98
Kalimantan Tengah	91,84	84,58	99,10	4,03	83,22	75,64	90,80	4,65	87,24	81,94	92,54	3,10
Kalimantan Selatan	84,28	77,32	91,24	4,21	89,78	82,34	97,22	4,23	86,97	81,89	92,06	2,98
Kalimantan Timur	98,47	91,63	105,31	3,55	102,46	91,07	113,86	5,67	99,59	93,71	105,46	3,01
Kalimantan Utara	96,51	87,09	105,94	4,98	100,51	85,00	116,01	7,87	97,87	89,73	106,00	4,24
Sulawesi Utara	86,66	79,32	94,00	4,32	93,16	84,88	101,44	4,53	89,31	83,80	94,83	3,15
Sulawesi Tengah	91,10	82,22	99,99	4,98	91,96	86,16	97,76	3,22	91,65	86,74	96,56	2,73
Sulawesi Selatan	87,96	82,50	93,43	3,17	91,57	87,10	96,04	2,49	89,71	86,14	93,27	2,03
Sulawesi Tenggara	92,44	84,17	100,70	4,56	94,66	88,84	100,48	3,14	93,74	88,90	98,58	2,63
Gorontalo	98,16	86,85	109,48	5,88	84,04	75,18	92,90	5,38	90,58	83,52	97,65	3,98
Sulawesi Barat	83,87	70,09	97,65	8,38	88,21	80,48	95,95	4,47	87,34	80,58	94,10	3,95
Maluku	88,96	80,15	97,76	5,05	97,81	90,99	104,62	3,56	93,64	88,09	99,18	3,02
Maluku Utara	97,37	84,85	109,89	6,56	90,62	83,21	98,03	4,17	92,62	86,20	99,03	3,53
Papua Barat	107,69	94,97	120,42	6,03	89,62	75,66	103,58	7,95	95,42	84,99	105,85	5,58
Papua Barat Daya	91,90	76,59	107,20	8,50	82,87	72,59	93,14	6,33	87,95	78,38	97,51	5,55
Papua	87,21	76,02	98,41	6,55	85,07	75,37	94,78	5,82	86,30	78,67	93,94	4,51
Papua Selatan	92,99	75,68	110,30	9,50	67,79	55,86	79,72	8,98	77,63	67,66	87,60	6,55
Papua Tengah	121,63	98,93	144,33	9,52	37,20	31,00	43,39	8,49	54,82	47,90	61,73	6,44
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	43,20	55,81	49,88	61,75	5,43	54,52	48,46	60,59	5,67
Indonesia	**90,53**	**89,24**	**91,82**	**0,73**	**88,03**	**86,66**	**89,39**	**0,79**	**89,53**	**88,58**	**90,48**	**0,54**

Catatan: Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.41 *Sampling Error* Angka Partisipasi Kasar (APK) PT (19–23 Tahun) Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	56,36	50,83	61,89	5,01	34,78	31,25	38,32	5,18	42,81	39,75	45,87	3,65
Sumatera Utara	38,33	34,30	42,36	5,36	24,39	21,57	27,20	5,89	33,04	30,30	35,78	4,23
Sumatera Barat	50,58	45,29	55,86	5,33	30,83	27,10	34,55	6,16	42,32	38,80	45,83	4,24
Riau	44,01	38,57	49,45	6,30	28,54	24,59	32,49	7,06	35,30	32,03	38,56	4,72
Jambi	49,77	41,91	57,63	8,05	25,22	21,40	29,04	7,73	33,58	29,91	37,25	5,58
Sumatera Selatan	41,51	35,64	47,37	7,21	17,31	14,74	19,88	7,57	27,41	24,52	30,30	5,38
Bengkulu	61,65	52,53	70,78	7,55	23,63	19,77	27,49	8,34	38,94	34,52	43,37	5,79
Lampung	37,86	32,65	43,06	7,02	15,90	12,97	18,82	9,38	24,38	21,58	27,17	5,85
Kepulauan Bangka Belitung	26,98	22,00	31,96	9,42	12,96	8,85	17,08	16,20	20,89	17,49	24,29	8,30
Kepulauan Riau	30,26	24,07	36,45	10,44	18,03	11,27	24,78	19,12	29,64	23,76	35,51	10,12
DKI Jakarta	41,78	37,53	46,03	5,19	–	–	–	–	41,78	37,53	46,03	5,19
Jawa Barat	30,54	28,38	32,69	3,60	16,57	13,13	20,02	10,61	28,36	26,46	30,26	3,42
Jawa Tengah	35,79	33,56	38,02	3,18	21,49	18,95	24,04	6,04	29,70	28,00	31,41	2,93
DI Yogyakarta	78,76	71,63	85,89	4,62	53,48	38,39	68,56	14,39	74,70	68,22	81,18	4,42
Jawa Timur	36,63	34,25	39,00	3,31	26,00	23,35	28,65	5,20	32,40	30,62	34,18	2,81
Banten	37,85	33,55	42,15	5,80	15,35	9,97	20,74	17,88	34,33	30,61	38,05	5,52
Bali	44,92	39,57	50,26	6,07	24,66	18,47	30,86	12,82	40,69	36,24	45,15	5,59
Nusa Tenggara Barat	43,59	38,36	48,82	6,12	27,13	20,94	33,31	11,63	36,49	32,45	40,53	5,64
Nusa Tenggara Timur	53,77	47,09	60,45	6,34	21,01	18,65	23,38	5,74	32,09	29,27	34,91	4,49
Kalimantan Barat	35,56	30,46	40,67	7,33	16,17	13,54	18,81	8,32	23,99	21,36	26,62	5,60
Kalimantan Tengah	34,27	28,83	39,71	8,10	18,21	14,60	21,81	10,10	25,49	22,32	28,66	6,34
Kalimantan Selatan	33,18	29,05	37,30	6,34	22,40	18,99	25,82	7,78	28,12	25,40	30,84	4,94
Kalimantan Timur	45,98	40,04	51,91	6,59	27,10	19,83	34,37	13,69	40,44	35,73	45,15	5,94
Kalimantan Utara	35,18	27,72	42,65	10,83	13,43	7,65	19,22	21,99	27,93	22,54	33,32	9,84
Sulawesi Utara	38,68	33,09	44,27	7,37	25,48	20,51	30,44	9,94	33,51	29,57	37,45	6,00
Sulawesi Tengah	51,90	44,51	59,29	7,27	29,71	25,67	33,75	6,94	38,14	34,34	41,95	5,09
Sulawesi Selatan	49,12	44,30	53,95	5,01	29,83	26,98	32,69	4,88	40,28	37,37	43,19	3,69
Sulawesi Tenggara	51,83	45,68	57,98	6,05	28,30	24,83	31,76	6,25	39,27	35,81	42,74	4,50
Gorontalo	48,08	40,99	55,17	7,52	26,10	20,57	31,64	10,82	37,75	33,10	42,41	6,29
Sulawesi Barat	41,34	31,55	51,14	12,09	24,74	20,08	29,40	9,62	28,22	23,97	32,48	7,69
Maluku	52,82	45,57	60,07	7,00	31,40	26,85	35,96	7,40	42,89	38,56	47,21	5,14
Maluku Utara	58,81	48,35	69,28	9,08	28,61	23,82	33,41	8,54	39,08	34,29	43,87	6,25
Papua Barat	36,24	27,86	44,61	11,79	24,24	17,45	31,03	14,28	27,99	22,64	33,35	9,77
Papua Barat Daya	43,19	32,36	54,02	12,79	30,36	23,22	37,51	12,01	38,22	31,17	45,27	9,41
Papua	40,94	33,60	48,28	9,15	20,93	16,22	25,65	11,49	34,08	28,97	39,19	7,65
Papua Selatan	53,20	37,13	69,27	15,41	NA	NA	NA	28,82	24,15	16,84	31,47	15,46
Papua Tengah	30,87	21,70	40,05	15,17	8,86	6,39	11,34	14,25	13,62	10,79	16,46	10,62
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	39,71	11,15	8,25	14,04	13,23	13,34	9,73	16,94	13,79
Indonesia	**38,58**	**37,66**	**39,50**	**1,22**	**23,14**	**22,37**	**23,91**	**1,69**	**32,89**	**32,24**	**33,53**	**1,00**

Catatan: Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.42 *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	96,41	95,38	97,43	0,54	96,28	95,42	97,15	0,46	96,32	95,66	96,99	0,35
Sumatera Utara	95,67	94,68	96,65	0,53	96,37	95,74	97,01	0,34	95,99	95,37	96,60	0,33
Sumatera Barat	97,04	96,10	97,99	0,50	97,08	96,24	97,92	0,44	97,06	96,43	97,69	0,33
Riau	97,25	96,22	98,28	0,54	97,71	97,07	98,36	0,34	97,54	96,97	98,10	0,29
Jambi	95,87	94,23	97,51	0,87	97,56	96,63	98,48	0,48	97,02	96,20	97,84	0,43
Sumatera Selatan	94,99	93,46	96,53	0,82	96,54	95,75	97,32	0,42	95,98	95,23	96,73	0,40
Bengkulu	96,16	94,25	98,07	1,01	96,09	95,00	97,19	0,58	96,12	95,15	97,08	0,51
Lampung	97,74	96,86	98,63	0,46	97,59	96,78	98,40	0,42	97,64	97,03	98,25	0,32
Kepulauan Bangka Belitung	96,34	94,99	97,70	0,72	97,91	96,69	99,13	0,63	97,00	96,06	97,94	0,49
Kepulauan Riau	98,21	97,07	99,35	0,59	98,07	96,74	99,40	0,69	98,20	97,14	99,26	0,55
DKI Jakarta	98,47	97,82	99,11	0,33	–	–	–	–	98,47	97,82	99,11	0,33
Jawa Barat	98,06	97,60	98,53	0,24	97,84	96,88	98,81	0,50	98,02	97,60	98,44	0,22
Jawa Tengah	97,48	96,98	97,98	0,26	96,91	96,10	97,73	0,43	97,21	96,75	97,68	0,24
DI Yogyakarta	98,88	98,17	99,58	0,36	98,46	96,72	100,19	0,90	98,77	98,07	99,46	0,36
Jawa Timur	98,32	97,92	98,72	0,21	98,08	97,43	98,72	0,34	98,22	97,86	98,58	0,19
Banten	96,87	95,81	97,93	0,56	98,02	96,44	99,60	0,82	97,09	96,19	98,00	0,48
Bali	97,14	95,90	98,38	0,65	96,83	95,02	98,63	0,95	97,05	96,03	98,08	0,54
Nusa Tenggara Barat	97,67	96,72	98,61	0,49	97,56	96,40	98,73	0,61	97,62	96,87	98,36	0,39
Nusa Tenggara Timur	96,12	94,71	97,53	0,75	95,21	94,49	95,93	0,38	95,45	94,80	96,09	0,35
Kalimantan Barat	95,28	93,50	97,07	0,96	95,88	94,86	96,89	0,54	95,65	94,73	96,58	0,49
Kalimantan Tengah	97,87	96,91	98,83	0,50	97,30	96,39	98,22	0,48	97,55	96,89	98,22	0,35
Kalimantan Selatan	97,43	96,41	98,45	0,54	98,14	97,36	98,93	0,41	97,79	97,15	98,43	0,34
Kalimantan Timur	97,64	96,55	98,73	0,57	97,77	96,60	98,95	0,61	97,68	96,84	98,52	0,44
Kalimantan Utara	96,79	95,15	98,42	0,86	97,46	95,90	99,02	0,82	97,05	95,88	98,22	0,62
Sulawesi Utara	95,08	93,35	96,82	0,93	97,10	95,98	98,21	0,59	96,00	94,93	97,08	0,57
Sulawesi Tengah	96,16	94,55	97,77	0,85	93,98	92,91	95,05	0,58	94,67	93,77	95,56	0,48
Sulawesi Selatan	95,89	94,64	97,14	0,66	96,98	96,35	97,61	0,33	96,46	95,78	97,14	0,36
Sulawesi Tenggara	95,10	93,23	96,96	1,00	96,34	95,49	97,19	0,45	95,89	95,02	96,76	0,46
Gorontalo	95,20	92,79	97,60	1,29	96,22	94,65	97,79	0,83	95,75	94,36	97,15	0,74
Sulawesi Barat	95,94	93,54	98,33	1,27	96,01	94,60	97,42	0,75	95,99	94,77	97,22	0,65
Maluku	95,37	93,55	97,20	0,98	95,24	94,02	96,46	0,65	95,29	94,25	96,34	0,56
Maluku Utara	95,66	93,44	97,87	1,18	95,98	94,78	97,18	0,64	95,90	94,84	96,96	0,56
Papua Barat	94,19	91,47	96,91	1,47	93,93	91,38	96,48	1,39	94,00	92,02	95,99	1,08
Papua Barat Daya	94,95	91,66	98,23	1,76	93,41	91,49	95,34	1,05	94,21	92,27	96,15	1,05
Papua	92,38	89,39	95,37	1,65	91,05	88,89	93,22	1,21	91,81	89,87	93,76	1,08
Papua Selatan	89,18	83,50	94,87	3,25	86,81	83,72	89,90	1,82	87,64	84,81	90,46	1,64
Papua Tengah	85,25	80,33	90,16	2,94	67,07	62,96	71,18	3,13	72,55	69,29	75,81	2,29
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	14,12	74,84	72,08	77,61	1,89	74,85	72,00	77,71	1,95
Indonesia	**97,34**	**97,15**	**97,54**	**0,10**	**96,52**	**96,32**	**96,73**	**0,11**	**97,00**	**96,85**	**97,14**	**0,07**

Catatan: Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.43 *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	82,20	78,78	85,61	2,12	80,92	78,32	83,51	1,63	81,37	79,31	83,44	1,29
Sumatera Utara	77,54	74,45	80,64	2,04	77,25	74,92	79,57	1,54	77,41	75,42	79,40	1,31
Sumatera Barat	84,71	81,84	87,59	1,73	80,59	77,87	83,32	1,73	82,70	80,71	84,69	1,23
Riau	82,40	78,74	86,06	2,27	80,72	77,55	83,89	2,00	81,40	79,00	83,80	1,50
Jambi	77,22	71,79	82,65	3,59	79,06	75,00	83,12	2,62	78,47	75,21	81,74	2,12
Sumatera Selatan	71,53	67,08	75,98	3,17	75,96	73,02	78,89	1,97	74,27	71,79	76,75	1,71
Bengkulu	77,69	71,38	84,01	4,14	79,50	75,97	83,03	2,27	78,83	75,60	82,06	2,09
Lampung	77,95	73,69	82,21	2,79	78,74	75,58	81,89	2,05	78,47	75,93	81,01	1,65
Kepulauan Bangka Belitung	75,45	70,26	80,63	3,51	72,03	65,81	78,25	4,41	74,06	70,07	78,05	2,75
Kepulauan Riau	83,70	78,81	88,58	2,98	81,98	75,58	88,39	3,99	83,55	79,05	88,05	2,75
DKI Jakarta	87,55	84,80	90,30	1,60	–	–	–	–	87,55	84,80	90,30	1,60
Jawa Barat	83,86	82,00	85,71	1,13	83,79	80,28	87,30	2,14	83,84	82,20	85,49	1,00
Jawa Tengah	79,92	78,01	81,82	1,22	80,76	78,18	83,34	1,63	80,29	78,73	81,85	0,99
DI Yogyakarta	88,06	84,35	91,76	2,15	91,14	84,92	97,37	3,49	88,67	85,45	91,90	1,85
Jawa Timur	86,00	84,26	87,73	1,03	82,46	79,88	85,03	1,59	84,49	83,01	85,98	0,90
Banten	82,46	79,02	85,90	2,13	77,18	71,06	83,30	4,05	81,28	78,27	84,29	1,89
Bali	85,68	82,25	89,12	2,04	82,65	77,55	87,74	3,15	84,81	81,95	87,68	1,72
Nusa Tenggara Barat	83,46	79,97	86,96	2,14	81,63	76,92	86,34	2,94	82,54	79,60	85,48	1,82
Nusa Tenggara Timur	78,52	73,94	83,10	2,97	76,85	74,77	78,94	1,38	77,28	75,34	79,22	1,28
Kalimantan Barat	71,12	66,27	75,98	3,48	73,34	70,12	76,55	2,24	72,48	69,75	75,20	1,92
Kalimantan Tengah	82,29	77,66	86,93	2,87	76,27	72,12	80,42	2,78	78,91	75,80	82,01	2,01
Kalimantan Selatan	78,46	74,47	82,45	2,59	78,62	74,70	82,54	2,54	78,54	75,74	81,34	1,82
Kalimantan Timur	83,84	80,02	87,66	2,32	78,79	72,39	85,19	4,15	82,01	78,63	85,39	2,10
Kalimantan Utara	83,16	77,34	88,98	3,57	79,17	72,68	85,67	4,19	81,49	77,15	85,83	2,72
Sulawesi Utara	75,17	70,67	79,68	3,06	74,88	70,91	78,85	2,70	75,05	71,95	78,16	2,11
Sulawesi Tengah	82,43	77,45	87,42	3,09	76,12	72,72	79,52	2,28	78,28	75,46	81,11	1,84
Sulawesi Selatan	80,30	76,90	83,70	2,16	76,81	74,40	79,21	1,60	78,45	76,40	80,50	1,33
Sulawesi Tenggara	73,40	68,36	78,44	3,50	75,63	72,82	78,44	1,90	74,78	72,19	77,37	1,77
Gorontalo	74,71	68,10	81,31	4,51	71,59	65,74	77,44	4,17	72,95	68,56	77,35	3,07
Sulawesi Barat	67,95	59,68	76,21	6,20	77,51	73,45	81,57	2,67	75,49	71,82	79,16	2,48
Maluku	77,11	71,46	82,76	3,74	76,96	73,47	80,45	2,32	77,02	73,89	80,16	2,08
Maluku Utara	76,93	69,89	83,97	4,67	79,27	75,71	82,84	2,30	78,65	75,42	81,87	2,09
Papua Barat	70,88	63,92	77,85	5,01	72,85	66,60	79,09	4,38	72,24	67,40	77,08	3,42
Papua Barat Daya	77,08	67,77	86,38	6,16	72,45	67,68	77,21	3,36	75,13	69,39	80,86	3,89
Papua	80,68	74,86	86,50	3,68	74,31	69,54	79,09	3,28	77,95	74,03	81,86	2,56
Papua Selatan	79,99	69,89	90,10	6,44	46,13	38,69	53,57	8,23	57,72	50,99	64,45	5,95
Papua Tengah	69,45	59,64	79,26	7,20	49,76	44,72	54,79	5,16	54,33	49,79	58,88	4,27
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	1,40	53,71	49,41	58,01	4,08	56,16	51,83	60,50	3,94
Indonesia	**82,11**	**81,40**	**82,83**	**0,44**	**78,65**	**77,93**	**79,38**	**0,47**	**80,65**	**80,14**	**81,16**	**0,32**

Catatan: Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.44 *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK Sederajat Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	71,63	67,64	75,62	2,84	69,62	66,44	72,79	2,33	70,36	67,87	72,84	1,80
Sumatera Utara	68,74	65,30	72,17	2,55	72,72	70,09	75,36	1,85	70,40	68,10	72,69	1,66
Sumatera Barat	75,49	71,76	79,22	2,52	66,72	63,30	70,15	2,62	71,57	68,98	74,16	1,85
Riau	71,34	66,80	75,89	3,25	61,06	57,20	64,91	3,22	65,22	62,27	68,17	2,31
Jambi	67,73	61,59	73,87	4,63	60,42	56,02	64,81	3,71	63,05	59,47	66,63	2,89
Sumatera Selatan	63,26	58,27	68,24	4,02	62,96	59,56	66,37	2,76	63,08	60,22	65,94	2,31
Bengkulu	75,18	69,03	81,33	4,17	66,14	61,74	70,53	3,39	69,32	65,70	72,93	2,66
Lampung	70,41	66,00	74,82	3,19	65,47	61,60	69,35	3,02	67,22	64,27	70,18	2,24
Kepulauan Bangka Belitung	68,27	62,21	74,32	4,52	62,79	55,90	69,69	5,60	65,94	61,39	70,49	3,52
Kepulauan Riau	76,98	70,49	83,47	4,30	71,03	63,74	78,32	5,24	76,54	70,52	82,55	4,01
DKI Jakarta	69,90	65,87	73,93	2,94	–	–	–	–	69,90	65,87	73,93	2,94
Jawa Barat	67,70	65,29	70,10	1,81	65,68	60,93	70,43	3,69	67,33	65,19	69,48	1,63
Jawa Tengah	69,84	67,75	71,93	1,53	65,42	62,28	68,56	2,45	67,81	65,98	69,64	1,38
DI Yogyakarta	78,23	73,69	82,77	2,96	79,06	69,72	88,40	6,03	78,42	74,32	82,51	2,66
Jawa Timur	75,22	72,97	77,47	1,53	64,07	60,82	67,32	2,58	70,64	68,75	72,54	1,37
Banten	68,32	64,36	72,27	2,95	52,07	43,95	60,19	7,96	65,28	61,69	68,88	2,81
Bali	74,78	70,43	79,13	2,97	79,78	74,57	84,99	3,33	76,06	72,55	79,57	2,35
Nusa Tenggara Barat	73,80	69,51	78,08	2,96	66,27	60,00	72,55	4,83	70,43	66,74	74,13	2,68
Nusa Tenggara Timur	66,61	61,26	71,96	4,10	61,38	58,72	64,03	2,21	62,88	60,45	65,31	1,98
Kalimantan Barat	59,95	54,52	65,37	4,61	56,12	52,18	60,05	3,58	57,60	54,40	60,81	2,84
Kalimantan Tengah	70,83	65,96	75,69	3,50	56,74	51,75	61,72	4,48	63,31	59,75	66,87	2,87
Kalimantan Selatan	60,08	55,46	64,70	3,92	59,44	54,77	64,10	4,00	59,77	56,48	63,05	2,80
Kalimantan Timur	75,32	70,99	79,64	2,93	70,46	63,83	77,09	4,80	73,96	70,34	77,58	2,50
Kalimantan Utara	76,73	70,56	82,89	4,10	66,15	57,15	75,15	6,94	73,13	67,94	78,33	3,62
Sulawesi Utara	63,10	58,13	68,06	4,01	58,61	53,53	63,68	4,42	61,26	57,66	64,87	3,00
Sulawesi Tengah	70,33	64,03	76,63	4,57	67,74	64,09	71,39	2,75	68,68	65,42	71,94	2,42
Sulawesi Selatan	69,16	65,31	73,01	2,84	66,96	64,13	69,80	2,16	68,10	65,68	70,52	1,81
Sulawesi Tenggara	66,15	60,63	71,66	4,25	61,29	57,84	64,74	2,87	63,31	60,25	66,37	2,47
Gorontalo	69,10	62,46	75,75	4,91	60,77	54,69	66,86	5,11	64,63	60,13	69,14	3,55
Sulawesi Barat	55,28	45,90	64,67	8,66	62,30	57,28	67,31	4,11	60,89	56,45	65,33	3,72
Maluku	65,30	59,00	71,60	4,92	67,16	63,02	71,31	3,15	66,29	62,60	69,97	2,84
Maluku Utara	71,42	64,11	78,73	5,22	58,51	53,96	63,06	3,97	62,32	58,42	66,23	3,20
Papua Barat	70,55	62,85	78,25	5,57	51,52	44,51	58,52	6,94	57,63	52,25	63,00	4,76
Papua Barat Daya	64,06	55,07	73,04	7,16	51,83	45,35	58,31	6,38	58,71	52,91	64,51	5,04
Papua	59,18	51,99	66,36	6,20	52,02	46,13	57,91	5,78	56,13	51,29	60,97	4,40
Papua Selatan	66,80	55,84	77,76	8,37	31,82	23,99	39,65	12,56	45,48	38,69	52,28	7,62
Papua Tengah	78,68	68,55	88,81	6,57	24,22	19,53	28,92	9,89	35,59	30,79	40,39	6,88
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	45,31	41,03	36,43	45,62	5,71	39,87	35,26	44,47	5,89
Indonesia	**69,84**	**68,95**	**70,73**	**0,65**	**63,83**	**62,91**	**64,74**	**0,73**	**67,44**	**66,79**	**68,08**	**0,49**

Catatan: Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.45 *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni (APM) PT (19–23 Tahun) Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	35,70	32,12	39,27	5,11	20,22	17,79	22,66	6,15	25,98	23,93	28,04	4,04
Sumatera Utara	27,10	24,11	30,10	5,64	15,91	13,88	17,94	6,51	22,86	20,81	24,90	4,57
Sumatera Barat	37,18	32,90	41,47	5,88	19,56	16,68	22,44	7,51	29,81	26,95	32,67	4,89
Riau	33,62	29,15	38,10	6,79	18,69	15,84	21,55	7,80	25,21	22,67	27,75	5,14
Jambi	29,68	24,53	34,84	8,86	18,36	15,17	21,54	8,84	22,21	19,47	24,95	6,29
Sumatera Selatan	27,41	22,81	32,01	8,56	10,71	8,87	12,55	8,76	17,68	15,42	19,94	6,52
Bengkulu	44,00	37,55	50,44	7,48	14,64	11,80	17,48	9,89	26,47	23,25	29,68	6,20
Lampung	27,24	23,01	31,47	7,92	10,57	8,30	12,85	10,96	17,01	14,77	19,25	6,71
Kepulauan Bangka Belitung	22,07	17,54	26,59	10,47	8,55	5,21	11,90	19,96	16,20	13,17	19,23	9,54
Kepulauan Riau	23,66	18,52	28,81	11,08	12,62	6,99	18,25	22,75	23,10	18,22	27,99	10,79
DKI Jakarta	31,30	27,95	34,66	5,47	–	–	–	–	31,30	27,95	34,66	5,47
Jawa Barat	23,46	21,75	25,18	3,73	13,44	10,42	16,46	11,45	21,90	20,38	23,43	3,56
Jawa Tengah	25,89	24,09	27,69	3,54	15,29	13,27	17,30	6,73	21,38	20,01	22,74	3,26
DI Yogyakarta	54,15	49,65	58,65	4,24	32,24	22,93	41,56	14,74	50,63	46,53	54,73	4,13
Jawa Timur	27,38	25,50	29,27	3,51	18,72	16,54	20,91	5,95	23,94	22,50	25,37	3,06
Banten	24,15	21,23	27,06	6,16	10,26	5,92	14,61	21,60	21,98	19,41	24,54	5,95
Bali	33,37	29,11	37,62	6,50	19,85	14,21	25,49	14,49	30,55	26,95	34,15	6,01
Nusa Tenggara Barat	29,45	25,47	33,43	6,90	15,36	10,97	19,76	14,61	23,38	20,38	26,37	6,54
Nusa Tenggara Timur	37,02	32,14	41,90	6,72	13,88	12,02	15,74	6,84	21,71	19,56	23,86	5,06
Kalimantan Barat	25,81	21,81	29,81	7,91	10,56	8,53	12,59	9,82	16,71	14,63	18,78	6,34
Kalimantan Tengah	21,70	17,66	25,74	9,49	11,66	8,73	14,60	12,83	16,22	13,76	18,67	7,72
Kalimantan Selatan	27,42	23,79	31,06	6,76	19,09	15,97	22,22	8,35	23,51	21,08	25,95	5,29
Kalimantan Timur	29,01	24,89	33,14	7,25	14,08	9,32	18,84	17,26	24,63	21,37	27,89	6,76
Kalimantan Utara	28,38	22,01	34,75	11,46	10,40	5,47	15,34	24,20	22,38	17,73	27,04	10,60
Sulawesi Utara	23,62	19,52	27,72	8,85	10,89	8,29	13,48	12,16	18,64	15,89	21,39	7,53
Sulawesi Tengah	31,29	26,40	36,18	7,97	15,10	12,61	17,58	8,40	21,25	18,78	23,73	5,94
Sulawesi Selatan	34,41	30,75	38,06	5,42	21,78	19,50	24,05	5,33	28,62	26,36	30,88	4,03
Sulawesi Tenggara	38,68	33,47	43,90	6,88	17,65	14,95	20,35	7,80	27,46	24,55	30,38	5,41
Gorontalo	37,94	32,00	43,87	7,99	16,94	12,68	21,20	12,83	28,07	24,18	31,97	7,08
Sulawesi Barat	26,36	19,02	33,69	14,20	14,19	10,90	17,48	11,83	16,74	13,71	19,78	9,26
Maluku	35,43	29,85	41,00	8,03	16,56	13,58	19,53	9,16	26,68	23,30	30,05	6,45
Maluku Utara	34,21	27,51	40,91	9,99	8,22	5,85	10,60	14,73	17,23	14,34	20,11	8,55
Papua Barat	25,40	19,00	31,81	12,87	14,80	9,97	19,64	16,66	18,12	14,26	21,98	10,87
Papua Barat Daya	26,04	18,60	33,47	14,57	17,55	12,40	22,71	14,98	22,75	17,77	27,73	11,17
Papua	32,52	26,20	38,83	9,91	16,65	12,43	20,87	12,94	27,08	22,62	31,54	8,40
Papua Selatan	34,95	23,39	46,51	16,87	NA	NA	NA	37,46	15,32	9,94	20,70	17,92
Papua Tengah	22,24	14,80	29,68	17,06	7,43	5,21	9,65	15,26	10,63	8,24	13,03	11,50
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	36,82	7,21	4,74	9,69	17,52	9,20	6,23	12,17	16,49
Indonesia	**27,84**	**27,13**	**28,55**	**1,30**	**15,48**	**14,87**	**16,08**	**2,00**	**23,28**	**22,78**	**23,79**	**1,10**

Catatan: Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.46 *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni (APM) PT (19–23 Tahun) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025

Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	23,32	20,56	26,07	6,03	28,81	25,80	31,82	5,33	25,98	23,93	28,04	4,04
Sumatera Utara	20,34	17,66	23,02	6,73	25,50	22,40	28,60	6,20	22,86	20,81	24,90	4,57
Sumatera Barat	24,13	20,28	27,97	8,13	35,67	31,51	39,82	5,94	29,81	26,95	32,67	4,89
Riau	21,35	18,06	24,64	7,86	29,32	25,65	32,98	6,38	25,21	22,67	27,75	5,14
Jambi	20,57	16,82	24,32	9,31	23,91	19,92	27,90	8,52	22,21	19,47	24,95	6,29
Sumatera Selatan	14,70	11,75	17,66	10,25	21,05	17,87	24,23	7,71	17,68	15,42	19,94	6,52
Bengkulu	19,59	15,70	23,48	10,13	33,43	28,45	38,42	7,61	26,47	23,25	29,68	6,20
Lampung	13,15	10,56	15,75	10,06	21,19	17,74	24,64	8,30	17,01	14,77	19,25	6,71
Kepulauan Bangka Belitung	11,65	7,79	15,50	16,91	21,08	16,28	25,88	11,62	16,20	13,17	19,23	9,54
Kepulauan Riau	18,97	12,48	25,47	17,46	27,36	19,37	35,35	14,89	23,10	18,22	27,99	10,79
DKI Jakarta	27,30	22,80	31,81	8,41	35,06	30,21	39,92	7,06	31,30	27,95	34,66	5,47
Jawa Barat	20,70	18,56	22,83	5,26	23,14	20,97	25,31	4,78	21,90	20,38	23,43	3,56
Jawa Tengah	18,75	16,83	20,67	5,21	24,00	22,06	25,93	4,11	21,38	20,01	22,74	3,26
DI Yogyakarta	46,23	40,38	52,09	6,46	54,98	49,55	60,40	5,04	50,63	46,53	54,73	4,13
Jawa Timur	21,44	19,59	23,29	4,40	26,51	24,35	28,68	4,17	23,94	22,50	25,37	3,06
Banten	20,39	16,85	23,92	8,85	23,54	19,81	27,28	8,10	21,98	19,41	24,54	5,95
Bali	30,09	25,43	34,74	7,89	31,02	26,08	35,95	8,11	30,55	26,95	34,15	6,01
Nusa Tenggara Barat	22,87	18,73	27,02	9,24	23,85	19,55	28,15	9,20	23,38	20,38	26,37	6,54
Nusa Tenggara Timur	20,72	17,65	23,79	7,56	22,74	19,88	25,59	6,40	21,71	19,56	23,86	5,06
Kalimantan Barat	14,90	12,17	17,63	9,35	18,49	15,40	21,58	8,53	16,71	14,63	18,78	6,34
Kalimantan Tengah	14,74	11,48	18,00	11,28	17,74	14,14	21,33	10,34	16,22	13,76	18,67	7,72
Kalimantan Selatan	18,44	15,42	21,46	8,35	29,02	25,22	32,83	6,68	23,51	21,08	25,95	5,29
Kalimantan Timur	21,27	17,26	25,28	9,63	28,06	23,25	32,87	8,74	24,63	21,37	27,89	6,76
Kalimantan Utara	13,63	8,81	18,45	18,04	32,61	24,79	40,42	12,23	22,38	17,73	27,04	10,60
Sulawesi Utara	16,26	12,63	19,89	11,39	21,39	17,34	25,44	9,66	18,64	15,89	21,39	7,53
Sulawesi Tengah	18,35	14,89	21,82	9,62	24,27	20,61	27,92	7,69	21,25	18,78	23,73	5,94
Sulawesi Selatan	25,39	22,18	28,61	6,46	31,82	28,61	35,02	5,14	28,62	26,36	30,88	4,03
Sulawesi Tenggara	24,91	20,98	28,84	8,05	30,17	26,30	34,03	6,53	27,46	24,55	30,38	5,41
Gorontalo	24,61	19,60	29,62	10,38	31,65	25,67	37,64	9,65	28,07	24,18	31,97	7,08
Sulawesi Barat	14,60	10,55	18,65	14,15	19,11	14,48	23,74	12,36	16,74	13,71	19,78	9,26
Maluku	25,30	20,69	29,90	9,29	28,13	23,61	32,65	8,20	26,68	23,30	30,05	6,45
Maluku Utara	14,33	10,70	17,96	12,93	20,45	15,83	25,07	11,52	17,23	14,34	20,11	8,55
Papua Barat	17,47	11,88	23,07	16,34	18,83	13,83	23,83	13,54	18,12	14,26	21,98	10,87
Papua Barat Daya	19,67	13,04	26,30	17,20	26,15	18,24	34,05	15,43	22,75	17,77	27,73	11,17
Papua	25,37	19,31	31,42	12,19	29,05	23,34	34,75	10,02	27,08	22,62	31,54	8,40
Papua Selatan	NA	NA	NA	25,26	NA	NA	NA	25,32	15,32	9,94	20,70	17,92
Papua Tengah	10,33	7,09	13,57	16,00	11,01	7,33	14,69	17,05	10,63	8,24	13,03	11,50
Papua Pegunungan	11,29	7,00	15,58	19,38	NA	NA	NA	25,83	9,20	6,23	12,17	16,49
Indonesia	**20,79**	**20,11**	**21,47**	**1,67**	**25,85**	**25,12**	**26,59**	**1,45**	**23,28**	**22,78**	**23,79**	**1,10**

Catatan: Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 3.47 *Sampling Error* Angka Anak Tidak Sekolah (ATS/OOSC) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	7-12 Tahun				13-15 Tahun				16-18 Tahun			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	0,69	0,34	1,03	25,66	3,58	2,61	4,56	13,89	9,09	7,55	10,63	8,63
Sumatera Utara	0,30	0,16	0,43	23,71	3,88	3,10	4,66	10,27	11,34	9,57	13,11	7,97
Sumatera Barat	NA	NA	NA	37,55	4,58	3,51	5,65	11,93	10,97	9,19	12,75	8,27
Riau	NA	NA	NA	35,61	6,25	4,76	7,74	12,16	17,90	15,18	20,62	7,76
Jambi	NA	NA	NA	29,44	5,37	3,57	7,18	17,12	17,37	14,50	20,24	8,43
Sumatera Selatan	NA	NA	NA	33,42	6,47	5,00	7,94	11,62	17,91	15,56	20,26	6,68
Bengkulu	NA	NA	NA	35,14	5,29	3,70	6,89	15,37	11,61	9,04	14,19	11,32
Lampung	NA	NA	NA	40,15	5,72	4,31	7,13	12,57	16,71	14,32	19,09	7,28
Kepulauan Bangka Belitung	NA	NA	NA	43,10	10,76	8,00	13,53	13,12	18,59	14,79	22,38	10,41
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	64,25	NA	NA	NA	41,59	6,64	3,19	10,10	26,55
DKI Jakarta	NA	NA	NA	72,85	2,22	0,91	3,52	30,10	6,24	3,73	8,75	20,53
Jawa Barat	NA	NA	NA	31,71	6,52	5,23	7,81	10,07	17,35	15,60	19,11	5,16
Jawa Tengah	NA	NA	NA	26,69	4,65	3,80	5,50	9,33	15,15	13,70	16,59	4,86
DI Yogyakarta	NA	NA	NA	83,89	NA	NA	NA	49,40	NA	NA	NA	26,98
Jawa Timur	NA	NA	NA	30,70	4,43	3,60	5,26	9,55	15,52	13,87	17,17	5,43
Banten	NA	NA	NA	40,74	6,47	4,77	8,17	13,43	15,68	12,84	18,51	9,23
Bali	NA	NA	NA	70,39	NA	NA	NA	26,63	6,28	3,81	8,76	20,09
Nusa Tenggara Barat	NA	NA	NA	41,81	3,69	2,24	5,14	20,09	15,03	11,95	18,11	10,46
Nusa Tenggara Timur	0,98	0,71	1,25	14,21	6,43	5,22	7,65	9,62	18,13	16,24	20,01	5,31
Kalimantan Barat	1,10	0,63	1,56	21,51	8,53	6,83	10,23	10,18	22,69	19,91	25,47	6,26
Kalimantan Tengah	NA	NA	NA	32,01	8,46	6,22	10,70	13,51	17,61	14,62	20,59	8,64
Kalimantan Selatan	NA	NA	NA	27,47	9,59	7,43	11,75	11,50	17,82	15,05	20,59	7,94
Kalimantan Timur	NA	NA	NA	67,71	3,94	2,33	5,54	20,77	10,26	7,32	13,20	14,61
Kalimantan Utara	NA	NA	NA	51,39	5,30	2,87	7,73	23,39	13,99	9,62	18,36	15,93
Sulawesi Utara	NA	NA	NA	32,77	5,88	4,25	7,52	14,19	17,04	14,28	19,81	8,27
Sulawesi Tengah	1,28	0,81	1,75	18,74	7,63	5,75	9,51	12,57	18,71	15,91	21,51	7,64
Sulawesi Selatan	0,96	0,60	1,32	19,35	7,31	6,10	8,51	8,43	16,38	14,43	18,33	6,07
Sulawesi Tenggara	0,78	0,40	1,15	24,78	5,29	4,02	6,56	12,25	12,19	10,04	14,34	8,99
Gorontalo	NA	NA	NA	29,93	11,33	8,02	14,64	14,89	21,00	17,12	24,88	9,42
Sulawesi Barat	1,79	0,99	2,59	22,80	9,32	6,69	11,95	14,39	23,63	19,61	27,65	8,68
Maluku	NA	NA	NA	31,84	3,67	2,35	4,99	18,33	10,60	8,35	12,86	10,85
Maluku Utara	NA	NA	NA	66,73	4,16	2,50	5,82	20,38	10,74	8,27	13,21	11,72
Papua Barat	2,12	0,95	3,30	28,25	5,87	3,24	8,50	22,86	15,96	12,26	19,66	11,82
Papua Barat Daya	NA	NA	NA	42,24	4,59	1,98	7,20	28,97	10,34	6,28	14,40	20,01
Papua	2,00	0,73	3,27	32,39	2,97	1,60	4,35	23,66	13,24	9,30	17,18	15,20
Papua Selatan	4,64	3,03	6,26	17,76	16,28	11,97	20,58	13,49	29,73	24,29	35,17	9,34
Papua Tengah	18,02	15,36	20,68	7,53	35,14	30,91	39,36	6,13	53,37	48,95	57,79	4,23
Papua Pegunungan	16,67	14,22	19,12	7,50	30,44	26,76	34,13	6,17	51,33	46,61	56,06	4,70
Indonesia	**0,52**	**0,48**	**0,57**	**4,59**	**5,75**	**5,42**	**6,08**	**2,93**	**15,38**	**14,86**	**15,90**	**1,73**

Catatan: Usia yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah usia sekolah (*school age*)
Warna kuning ( ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

BAB 4

KEGIATAN PESERTA DIDIK

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

BAB 4
KEGIATAN PESERTA DIDIK

Kegiatan peserta didik yang dicakup dalam publikasi ini adalah gambaran akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh peserta didik dan kegiatan peserta didik selain bersekolah. Dua bahasan tersebut tidak secara langsung mengarah ke pendidikan luar sekolah. Namun demikian, informasi yang akan disajikan dapat memberikan gambaran seberapa besar peserta didik yang terpapar TIK, termasuk di dalamnya internet dan tujuan peserta didik menggunakan internet. Selain itu, pada bab ini juga akan disampaikan informasi kegiatan yang dilakukan peserta didik selain bersekolah, seperti kegiatan bekerja dan mengurus rumah tangga.

https://www.bps.go.id

4.1 Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Akses TIK yang dicakup dalam Susenas terbatas pada penggunaan telepon seluler, komputer/laptop, dan internet. Informasi akses TIK ini tidak menggambarkan indikator kemampuan TIK (*IT skills*), melainkan hanya besaran proporsi penduduk yang menggunakan telepon seluler, komputer/laptop, dan internet dalam tiga bulan terakhir. Gambar 4.1 menggambarkan hasil Susenas Maret 2025 terkait persentase peserta didik umur 5–23 tahun yang menggunakan telepon seluler, komputer/laptop, dan internet pada tahun 2025. Terdapat sebanyak 85,78 persen peserta didik umur 5–23 tahun yang menggunakan telepon seluler serta 83,80 persen yang menggunakan internet. Namun, hanya sebanyak 19,80 persen yang menggunakan komputer/laptop.

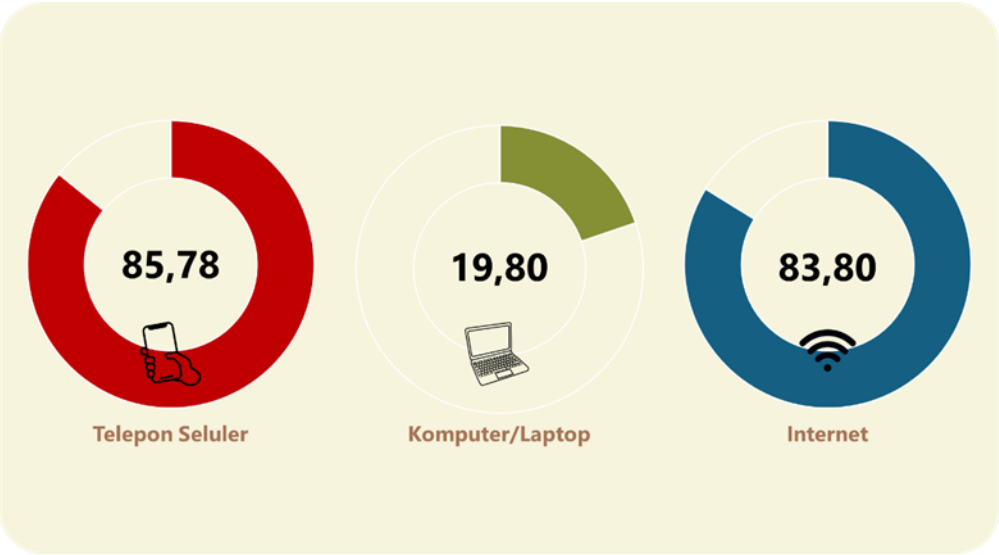

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.1 Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler, Komputer/Laptop, dan Internet, 2025

Penggunaan telepon seluler, komputer/laptop, dan internet menunjukkan pola yang sejalan dengan jenjang pendidikan yang ditempuh (Gambar 4.2). Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar persentase peserta didik yang menggunakan telepon seluler, komputer/laptop, dan internet. Penggunaan telepon seluler dan internet pada jenjang SMP sederajat, SMA/SMK sederajat, dan PT sudah mencapai lebih dari 90 persen, bahkan pada jenjang PT hampir mencapai 100 persen. Namun, angka tersebut jauh di atas persentase peserta didik jenjang SD sederajat yang menggunakan telepon seluler (75,49 persen) dan internet (72,26 persen). Persentase penggunaan komputer/laptop oleh peserta didik pada semua jenjang pendidikan tidak setinggi penggunaan telepon seluler dan internet. Penggunaan komputer/laptop peserta didik jenjang PT mencapai dua belas kalinya penggunaan komputer/laptop peserta didik SD sederajat.

https://www.bps.go.id

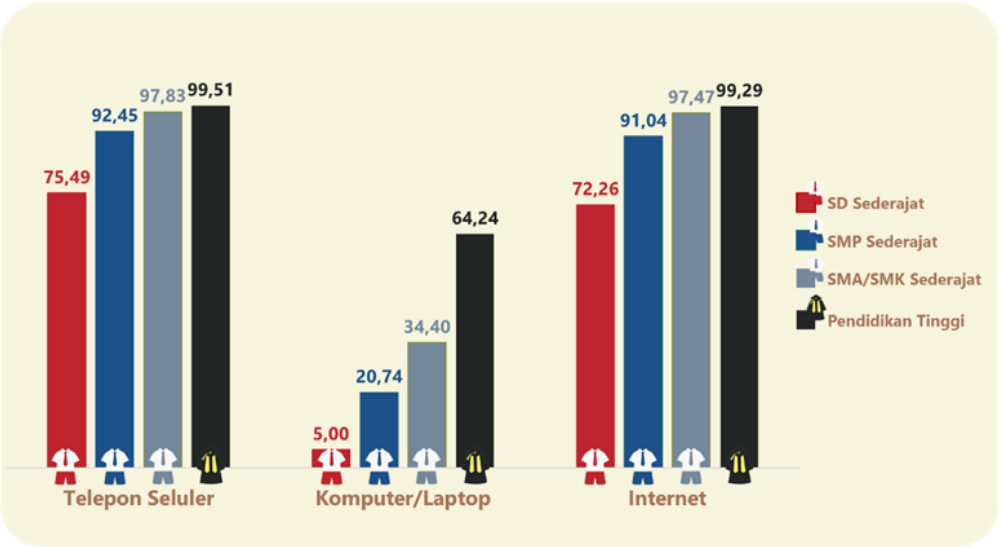

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.2 Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler, Komputer/Laptop, dan Internet Menurut Jenjang Pendidikan, 2025

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, perbedaan persentase yang menggunakan telepon seluler dan internet tidak terlalu berbeda jauh antara laki-laki dan perempuan, tetapi penggunaan komputer/laptop pada perempuan sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Berdasarkan status disabilitas, persentase penggunaan telepon seluler, komputer/laptop, dan internet pada nondisabilitas lebih tinggi dibandingkan kelompok disabilitas. Berdasarkan status ekonomi rumah tangga, persentase penggunaan telepon seluler, komputer/laptop, dan internet pada rumah tangga pengeluaran teratas (kuintil 5) lebih tinggi daripada rumah tangga pengeluaran terendah (kuintil 1). Berdasarkan wilayah, persentase penggunaan telepon seluler, komputer/laptop, dan internet di perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan.

https://www.bps.go.id

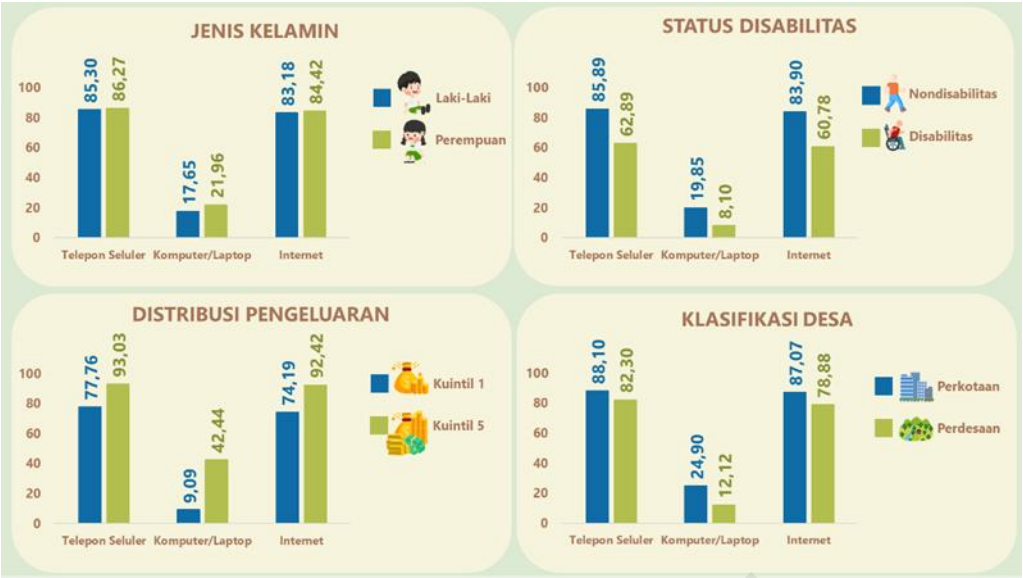

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.3 Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler, Komputer/Laptop, dan Internet Menurut Karakteristik Demografi, 2025

Di antara 83,80 persen peserta didik umur 5–23 tahun yang menggunakan internet pada tahun 2025, mayoritas (92,19 persen) menggunakan internet untuk hiburan (Gambar 4.4). Tujuan penggunaan internet terbesar selanjutnya adalah untuk media sosial/jejaring sosial (68,88 persen) dan mendapatkan informasi (68,22 persen). Selain itu, sekitar 33,40 persen peserta didik menggunakan internet untuk pembelajaran *online*. Temuan menarik lainnya adalah adanya peserta didik umur 5–23 tahun yang menggunakan internet untuk keperluan pekerjaan seperti penjualan barang/jasa (1,15 persen). Di samping itu, terdapat pula yang menggunakan internet untuk pembuatan konten digital (13,35 persen) dan tujuan finansial (4,87 persen).

https://www.bps.go.id

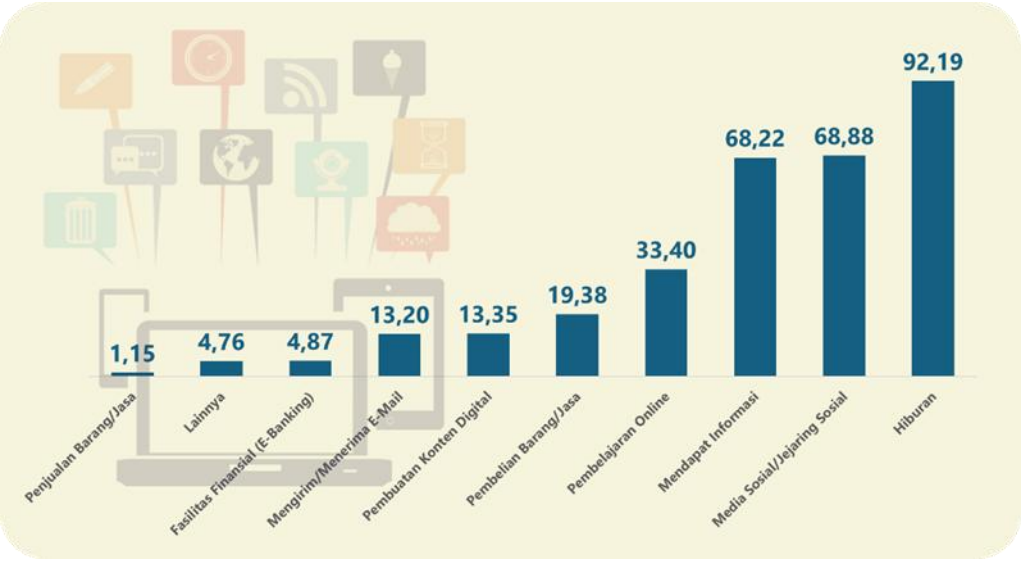

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.4 Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Menggunakan Internet Menurut Tujuan Penggunaan Internet, 2025

4.2 Aktivitas Peserta Didik selain Bersekolah

Selain bersekolah, terdapat peserta didik yang melakukan kegiatan mengurus rumah tangga dan membantu menambah penghasilan atau bekerja dalam kegiatan sehari-harinya. Gambar 4.5 menunjukkan perkembangan persentase peserta didik berumur 10–23 tahun yang bekerja dan mengurus rumah tangga dalam seminggu terakhir dari tahun 2021 sampai 2025. Dalam lima tahun terakhir, lebih banyak peserta didik berumur 10–23 tahun yang bekerja daripada mengurus rumah tangga. Pada tahun 2021, terdapat sebanyak 39,03 persen peserta didik umur 10–23 tahun yang bekerja. Angka ini mengalami penurunan persentase sebanyak 8,77 persen poin pada tahun 2022, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2023 sampai tahun 2025 (40,76 persen). Sementara itu, persentase peserta didik umur 10–23 tahun yang mengurus rumah tangga mengalami perubahan yang fluktuatif selama lima tahun terakhir dan mencapai 7,27 persen pada tahun 2025.

https://www.bps.go.id

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.5 Persentase Peserta Didik Umur 10–23 Tahun yang Bekerja dan Mengurus Rumah Tangga, 2021–2025

Dilihat dari jenjang pendidikan, pola peserta didik yang bekerja dan mengurus rumah tangga sejalan dengan kenaikan jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar persentase peserta didik umur 10–23 tahun yang bekerja maupun mengurus rumah tangga (Gambar 4.6).

Selisih persentase peserta didik yang bekerja antara jenjang pendidikan PT dengan jenjang di bawahnya tampak lebih jauh dibandingkan selisih peserta didik yang mengurus rumah tangga. Terdapat sebanyak 30,55 persen peserta didik pada jenjang PT yang bekerja, sementara peserta didik pada jenjang SMA/SMK sederajat, SMP sederajat, dan SD sederajat yang bekerja masing-masing sebesar 7,56 persen, 3,37 persen, dan 1,25 persen. Di sisi lain, terdapat 52,65 persen peserta didik jenjang PT yang mengurus rumah tangga. Selanjutnya diikuti oleh 46,31 persen peserta didik pada jenjang SMA/SMK sederajat, 40,34 persen pada jenjang SMP sederajat, dan 31,76 persen pada jenjang SD sederajat yang melakukan kegiatan mengurus rumah tangga.

https://www.bps.go.id

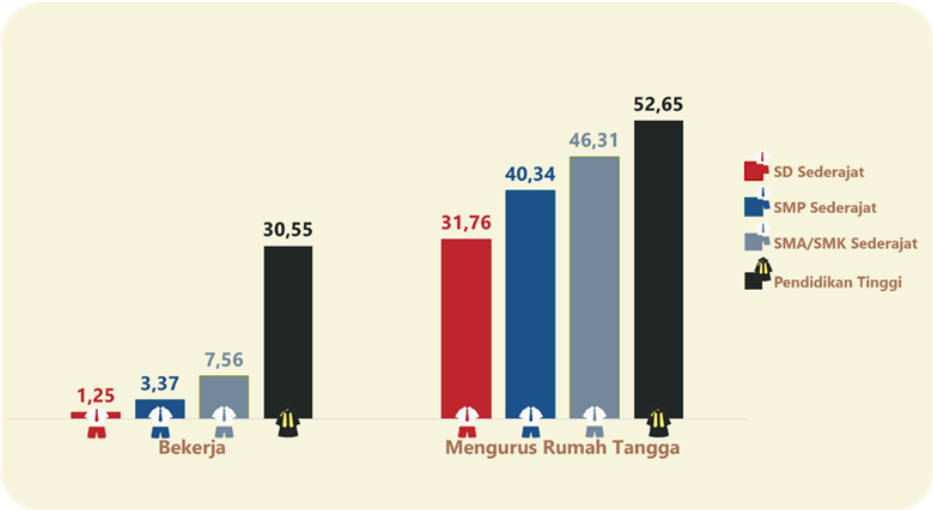

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.6 Persentase Peserta Didik Umur 10–23 Tahun yang Bekerja dan Mengurus Rumah Tangga Menurut Jenjang Pendidikan, 2025

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, hanya sedikit perbedaan peserta didik umur 10–23 tahun laki-laki dan perempuan yang bekerja (Gambar 4.7). Namun, terdapat perbedaan persentase sebesar 12,04 persen poin antara peserta didik laki-laki dan perempuan yang mengurus rumah tangga, yaitu sebanyak 34,76 persen peserta didik laki-laki-laki dan 46,80 persen peserta didik perempuan. Berdasarkan wilayah, perbedaan peserta didik yang bekerja dan mengurus rumah tangga pada wilayah perkotaan dan perdesaan tidak terlalu besar.

https://www.bps.go.id

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.7 Persentase Peserta Didik Umur 10–23 Tahun yang Bekerja dan Mengurus Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Desa, 2025

Tabel 4.1 Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Menurut Media Mengakses TIK dan Karakteristik Demografi, 2025

Karakteristik	Media Mengakses TIK		
	Menggunakan Telepon Seluler	Menggunakan Komputer/Laptop	Menggunakan Internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	**85,78**	**19,80**	**83,80**
Jenis Kelamin			
Laki-laki	85,30	17,65	83,18
Perempuan	86,27	21,96	84,42
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	85,89	19,85	83,90
Disabilitas	62,89	8,10	60,78
Jenjang Pendidikan			
Pendidikan Tinggi	99,51	64,24	99,29
SMA/SMK Sederajat	97,83	34,40	97,47
SMP Sederajat	92,45	20,74	91,04
SD Sederajat	75,49	5,00	72,26
Distribusi Pengeluaran			
Kuintil 5	93,03	42,44	92,42
Kuintil 4	89,46	23,10	88,22
Kuintil 3	86,62	16,57	84,70
Kuintil 2	83,96	12,32	81,72
Kuintil 1	77,76	9,09	74,19
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	88,10	24,90	87,07
Perdesaan	82,30	12,12	78,88

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 4.2 Persentase Peserta Didik Umur 10–23 Tahun Menurut Kegiatan Selain Bersekolah dan Karakteristik Demografi, 2025

Karakteristik	Kegiatan	
	Bekerja	Mengurus Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)
Total	**7,27**	**40,76**
Jenis Kelamin		
Laki-laki	8,10	34,76
Perempuan	6,43	46,80
Status Disabilitas		
Nondisabilitas	7,28	40,83
Disabilitas	5,66	24,69
Jenjang Pendidikan		
Pendidikan Tinggi	30,55	52,65
SMA/SMK Sederajat	7,56	46,31
SMP Sederajat	3,37	40,34
SD Sederajat	1,25	31,76
Distribusi Pengeluaran		
Kuintil 5	7,88	42,90
Kuintil 4	8,30	42,27
Kuintil 3	7,78	41,67
Kuintil 2	6,39	40,22
Kuintil 1	6,14	37,09
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	6,60	41,11
Perdesaan	8,31	40,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 4.3 Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	71,08	73,64	78,16	69,00	72,36
Sumatera Utara	83,78	85,85	87,38	81,44	84,81
Sumatera Barat	89,80	90,37	92,73	86,99	90,09
Riau	84,94	87,35	91,65	82,25	86,14
Jambi	84,41	84,91	88,38	82,75	84,66
Sumatera Selatan	83,05	84,06	84,90	82,69	83,56
Bengkulu	86,15	88,80	95,25	82,63	87,49
Lampung	89,39	88,85	90,62	88,29	89,12
Kep. Bangka Belitung	92,49	91,88	93,06	90,84	92,18
Kepulauan Riau	89,50	89,45	89,60	87,86	89,47
DKI Jakarta	90,93	91,43	91,18	–	91,18
Jawa Barat	86,42	88,02	87,40	86,34	87,21
Jawa Tengah	89,18	89,61	90,37	88,18	89,39
DI Yogyakarta	92,14	93,61	92,95	92,62	92,88
Jawa Timur	87,62	87,18	88,55	85,73	87,40
Banten	84,50	84,16	85,12	80,92	84,33
Bali	92,51	91,52	93,20	88,60	92,03
Nusa Tenggara Barat	90,46	91,91	92,66	89,53	91,20
Nusa Tenggara Timur	77,07	78,01	84,77	74,58	77,54
Kalimantan Barat	78,06	80,62	86,20	74,83	79,35
Kalimantan Tengah	81,47	82,22	85,26	78,91	81,84
Kalimantan Selatan	89,40	90,10	89,45	90,06	89,75
Kalimantan Timur	86,43	87,93	89,33	82,09	87,18
Kalimantan Utara	78,89	79,29	80,14	77,28	79,09
Sulawesi Utara	80,39	82,89	83,08	79,61	81,62
Sulawesi Tengah	78,32	79,81	79,80	78,67	79,07
Sulawesi Selatan	84,96	87,02	85,17	86,84	85,99
Sulawesi Tenggara	88,25	87,43	90,81	85,81	87,85
Gorontalo	88,01	88,54	90,41	86,18	88,28
Sulawesi Barat	84,38	86,55	88,52	84,68	85,50
Maluku	75,64	77,58	86,05	68,76	76,60
Maluku Utara	69,58	71,68	83,34	65,27	70,63
Papua Barat	66,79	68,34	77,75	62,95	67,52
Papua Barat Daya	68,56	67,45	68,14	67,86	68,02
Papua	60,64	60,24	65,33	53,15	60,44
Papua Selatan	50,76	51,68	70,89	37,29	51,20
Papua Tengah	48,62	52,95	81,91	32,29	50,66
Papua Pegunungan	16,56	16,22	63,68	12,73	16,40
Indonesia	**85,30**	**86,27**	**88,10**	**82,30**	**85,78**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 4.4 Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Menggunakan Komputer/Laptop Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	10,18	12,87	18,78	7,33	11,53
Sumatera Utara	11,31	16,15	18,51	7,44	13,72
Sumatera Barat	16,32	23,69	25,65	13,53	20,07
Riau	12,19	16,16	22,09	8,56	14,17
Jambi	11,37	16,08	23,46	8,73	13,73
Sumatera Selatan	13,65	17,16	25,77	8,69	15,42
Bengkulu	14,16	19,43	30,01	8,56	16,82
Lampung	14,31	19,86	23,54	13,49	17,08
Kep. Bangka Belitung	16,61	21,66	23,77	12,20	19,18
Kepulauan Riau	22,87	24,37	24,57	10,81	23,61
DKI Jakarta	28,53	33,45	31,02	–	31,02
Jawa Barat	20,88	24,90	24,12	17,14	22,86
Jawa Tengah	21,18	27,44	28,30	19,24	24,27
DI Yogyakarta	39,25	43,45	45,65	25,44	41,36
Jawa Timur	21,20	25,42	27,67	16,93	23,31
Banten	19,49	20,73	22,95	7,70	20,11
Bali	23,47	29,41	30,35	14,61	26,35
Nusa Tenggara Barat	12,29	16,91	18,72	9,98	14,63
Nusa Tenggara Timur	11,12	13,80	23,44	7,96	12,46
Kalimantan Barat	10,87	13,71	20,64	6,80	12,29
Kalimantan Tengah	10,77	13,30	19,79	5,39	12,04
Kalimantan Selatan	13,00	16,92	18,70	11,10	14,97
Kalimantan Timur	17,48	23,70	24,46	11,45	20,59
Kalimantan Utara	14,62	19,73	20,86	10,82	17,19
Sulawesi Utara	11,41	15,66	17,66	7,82	13,51
Sulawesi Tengah	8,86	12,35	17,47	6,88	10,61
Sulawesi Selatan	16,00	21,35	23,33	13,91	18,69
Sulawesi Tenggara	11,08	14,80	20,16	7,94	12,92
Gorontalo	14,25	18,43	23,95	8,90	16,39
Sulawesi Barat	11,59	14,31	21,70	10,64	12,99
Maluku	11,85	14,25	22,77	4,95	13,03
Maluku Utara	4,67	8,95	14,73	3,46	6,80
Papua Barat	6,39	8,45	12,48	5,08	7,37
Papua Barat Daya	6,61	9,52	8,89	6,94	8,02
Papua	11,63	12,82	16,27	6,18	12,22
Papua Selatan	8,22	8,37	14,64	3,81	8,29
Papua Tengah	4,06	7,85	13,65	NA	5,85
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA	NA
Indonesia	**17,65**	**21,96**	**24,90**	**12,12**	**19,80**

Catatan: NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 4.5 Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Menggunakan Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	67,07	68,45	75,00	63,56	67,76
Sumatera Utara	79,60	81,50	83,66	76,46	80,55
Sumatera Barat	86,14	87,08	88,96	83,87	86,62
Riau	80,07	82,27	86,84	77,14	81,16
Jambi	81,88	82,89	87,68	79,67	82,39
Sumatera Selatan	79,84	81,70	84,45	78,39	80,78
Bengkulu	84,15	85,83	90,84	81,34	85,00
Lampung	87,10	86,03	87,76	85,90	86,56
Kep. Bangka Belitung	90,34	91,00	91,14	89,98	90,68
Kepulauan Riau	90,03	89,76	90,59	80,64	89,89
DKI Jakarta	86,50	87,98	87,25	–	87,25
Jawa Barat	85,64	88,01	86,96	86,12	86,81
Jawa Tengah	90,63	91,16	91,14	90,58	90,89
DI Yogyakarta	93,54	93,47	93,78	92,51	93,51
Jawa Timur	86,71	86,46	88,65	83,57	86,58
Banten	83,92	84,85	85,10	81,25	84,38
Bali	88,86	89,58	90,63	85,05	89,21
Nusa Tenggara Barat	85,78	87,41	88,63	84,30	86,61
Nusa Tenggara Timur	63,65	65,02	81,02	57,51	64,33
Kalimantan Barat	77,33	79,57	87,46	72,52	78,45
Kalimantan Tengah	81,72	82,52	86,36	78,49	82,12
Kalimantan Selatan	86,62	87,56	86,49	87,72	87,09
Kalimantan Timur	85,18	87,35	89,36	78,97	86,27
Kalimantan Utara	78,62	80,16	81,64	75,48	79,40
Sulawesi Utara	77,20	80,32	81,58	74,86	78,74
Sulawesi Tengah	73,93	77,06	79,91	73,10	75,50
Sulawesi Selatan	83,73	85,42	86,66	82,43	84,58
Sulawesi Tenggara	79,28	79,94	86,59	74,80	79,60
Gorontalo	87,64	86,40	90,00	84,04	87,01
Sulawesi Barat	78,77	80,60	87,82	77,52	79,71
Maluku	67,99	66,40	81,73	55,15	67,20
Maluku Utara	59,89	63,91	77,83	55,17	61,89
Papua Barat	65,13	66,27	73,85	62,01	65,67
Papua Barat Daya	63,30	63,75	68,55	57,24	63,52
Papua	58,90	58,23	67,32	45,51	58,57
Papua Selatan	44,28	45,52	65,60	30,23	44,87
Papua Tengah	41,88	44,09	73,67	24,84	42,92
Papua Pegunungan	9,04	9,65	58,36	5,52	9,33
Indonesia	**83,18**	**84,42**	**87,07**	**78,88**	**83,80**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 4.6 Persentase Peserta Didik Umur 10–23 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	8,31	3,91	5,92	6,19	6,09
Sumatera Utara	13,87	10,25	8,57	16,87	12,07
Sumatera Barat	9,99	7,21	7,29	10,17	8,57
Riau	8,39	4,82	7,18	6,21	6,62
Jambi	8,37	3,90	5,49	6,49	6,14
Sumatera Selatan	5,29	3,81	4,33	4,70	4,55
Bengkulu	9,11	6,55	9,38	6,74	7,81
Lampung	8,04	4,82	5,98	6,67	6,42
Kep. Bangka Belitung	4,87	6,62	6,16	5,16	5,78
Kepulauan Riau	7,66	7,76	7,94	4,71	7,71
DKI Jakarta	4,01	5,62	4,83	–	4,83
Jawa Barat	5,88	5,53	5,64	6,00	5,71
Jawa Tengah	7,66	7,97	7,98	7,59	7,81
DI Yogyakarta	10,64	10,97	11,11	9,60	10,81
Jawa Timur	8,98	6,49	8,01	7,32	7,74
Banten	4,21	3,75	4,17	NA	3,98
Bali	5,85	7,46	5,74	9,35	6,63
Nusa Tenggara Barat	11,41	7,99	9,43	10,00	9,69
Nusa Tenggara Timur	13,74	11,59	4,38	16,32	12,66
Kalimantan Barat	8,72	5,98	6,89	7,65	7,34
Kalimantan Tengah	7,31	5,71	6,57	6,44	6,50
Kalimantan Selatan	8,06	6,10	6,22	7,98	7,07
Kalimantan Timur	6,49	4,78	6,55	3,35	5,63
Kalimantan Utara	7,20	7,27	7,64	6,48	7,23
Sulawesi Utara	4,69	3,73	4,04	4,47	4,21
Sulawesi Tengah	10,12	4,97	6,03	8,34	7,49
Sulawesi Selatan	10,65	5,80	6,81	9,66	8,20
Sulawesi Tenggara	11,39	7,76	7,67	10,97	9,59
Gorontalo	9,03	8,16	8,45	8,71	8,58
Sulawesi Barat	15,01	6,22	9,36	10,76	10,45
Maluku	8,76	5,32	7,68	6,49	7,05
Maluku Utara	7,02	4,35	5,46	5,79	5,69
Papua Barat	7,49	5,48	5,14	7,21	6,55
Papua Barat Daya	4,21	4,96	NA	5,21	4,58
Papua	5,72	2,34	3,74	4,58	4,08
Papua Selatan	4,84	3,36	NA	6,03	4,15
Papua Tengah	11,89	8,86	NA	14,34	10,46
Papua Pegunungan	18,49	13,01	NA	15,32	15,84
Indonesia	**8,10**	**6,43**	**6,60**	**8,31**	**7,27**

Catatan: NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 4.7 Persentase Peserta Didik Umur 10–23 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	27,40	41,81	41,96	30,25	34,69
Sumatera Utara	43,81	55,84	49,80	49,81	49,81
Sumatera Barat	42,56	59,65	56,86	44,40	51,32
Riau	28,14	39,98	37,21	31,60	34,00
Jambi	25,84	44,43	40,00	32,45	35,12
Sumatera Selatan	26,04	38,48	33,06	31,70	32,26
Bengkulu	38,01	52,48	50,99	41,50	45,36
Lampung	39,19	52,93	44,67	46,89	46,09
Kep. Bangka Belitung	48,07	65,60	58,48	54,99	57,14
Kepulauan Riau	46,14	51,08	50,32	25,72	48,60
DKI Jakarta	27,08	36,01	31,63	–	31,63
Jawa Barat	31,43	43,23	35,43	45,51	37,25
Jawa Tengah	37,38	51,85	46,67	41,69	44,51
DI Yogyakarta	56,73	64,50	64,31	45,98	60,63
Jawa Timur	33,22	44,35	41,95	33,99	38,76
Banten	20,63	29,72	24,78	27,01	25,18
Bali	67,92	75,08	71,86	69,99	71,40
Nusa Tenggara Barat	44,40	64,45	57,48	50,82	54,48
Nusa Tenggara Timur	43,10	54,24	49,69	48,24	48,69
Kalimantan Barat	23,51	35,48	33,67	26,69	29,56
Kalimantan Tengah	30,29	39,70	42,34	28,49	35,04
Kalimantan Selatan	48,72	57,11	44,67	61,77	52,95
Kalimantan Timur	31,73	43,49	42,34	26,02	37,64
Kalimantan Utara	20,59	34,48	30,69	21,89	27,64
Sulawesi Utara	28,24	37,64	32,79	33,07	32,91
Sulawesi Tengah	31,19	44,61	39,46	37,22	38,04
Sulawesi Selatan	34,69	45,90	38,45	42,37	40,35
Sulawesi Tenggara	44,51	56,99	51,97	49,79	50,70
Gorontalo	54,33	62,26	59,18	57,68	58,45
Sulawesi Barat	36,67	50,86	55,34	40,90	44,03
Maluku	38,26	51,14	53,24	37,06	44,66
Maluku Utara	26,04	37,80	35,15	30,46	31,91
Papua Barat	24,52	33,23	40,13	23,22	28,60
Papua Barat Daya	32,70	44,17	30,52	48,19	38,24
Papua	32,06	37,76	35,55	33,78	34,83
Papua Selatan	14,58	23,93	13,15	23,39	18,98
Papua Tengah	24,16	36,51	20,30	35,80	30,01
Papua Pegunungan	33,46	38,75	NA	38,67	36,02
Indonesia	**34,76**	**46,80**	**41,11**	**40,21**	**40,76**

Catatan: NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 4.8 *Sampling Error* Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Menggunakan Komputer/Laptop Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	18,78	16,96	20,60	4,94	7,33	6,41	8,25	6,39	11,53	10,63	12,44	3,99
Sumatera Utara	18,51	16,65	20,36	5,10	7,44	6,65	8,23	5,41	13,72	12,59	14,84	4,19
Sumatera Barat	25,65	23,49	27,82	4,31	13,53	12,25	14,80	4,80	20,07	18,74	21,40	3,38
Riau	22,09	19,82	24,37	5,26	8,56	7,28	9,83	7,61	14,17	12,95	15,38	4,38
Jambi	23,46	20,40	26,52	6,66	8,73	7,47	9,98	7,31	13,73	12,38	15,08	5,03
Sumatera Selatan	25,77	23,05	28,49	5,38	8,69	7,66	9,73	6,06	15,42	14,14	16,70	4,23
Bengkulu	30,01	26,36	33,65	6,20	8,56	7,32	9,81	7,42	16,82	15,15	18,50	5,08
Lampung	23,54	21,13	25,96	5,23	13,49	11,94	15,05	5,87	17,08	15,75	18,41	3,96
Kepulauan Bangka Belitung	23,77	21,04	26,51	5,88	12,20	9,77	14,63	10,15	19,18	17,25	21,12	5,14
Kepulauan Riau	24,57	21,36	27,79	6,67	10,81	7,74	13,88	14,49	23,61	20,62	26,59	6,46
DKI Jakarta	31,02	28,82	33,22	3,61	–	–	–	–	31,02	28,82	33,22	3,61
Jawa Barat	24,12	23,00	25,24	2,36	17,14	15,23	19,06	5,69	22,86	21,88	23,84	2,18
Jawa Tengah	28,30	27,21	29,39	1,97	19,24	17,98	20,51	3,36	24,27	23,44	25,10	1,75
DI Yogyakarta	45,65	42,85	48,45	3,13	25,44	20,46	30,42	9,99	41,36	38,89	43,82	3,04
Jawa Timur	27,67	26,43	28,90	2,27	16,93	15,67	18,20	3,81	23,31	22,41	24,21	1,97
Banten	22,95	21,11	24,80	4,10	7,70	5,71	9,68	13,14	20,11	18,55	21,66	3,95
Bali	30,35	27,81	32,90	4,28	14,61	12,05	17,17	8,93	26,35	24,32	28,38	3,92
Nusa Tenggara Barat	18,72	16,77	20,66	5,31	9,98	7,89	12,07	10,68	14,63	13,20	16,06	4,98
Nusa Tenggara Timur	23,44	20,54	26,33	6,31	7,96	7,17	8,76	5,10	12,46	11,41	13,50	4,27
Kalimantan Barat	20,64	18,25	23,03	5,91	6,80	5,79	7,80	7,55	12,29	11,15	13,44	4,77
Kalimantan Tengah	19,79	17,36	22,22	6,26	5,39	4,20	6,58	11,28	12,04	10,73	13,35	5,56
Kalimantan Selatan	18,70	16,74	20,65	5,33	11,10	9,66	12,53	6,59	14,97	13,75	16,19	4,16
Kalimantan Timur	24,46	22,28	26,64	4,55	11,45	8,83	14,07	11,68	20,59	18,86	22,33	4,30
Kalimantan Utara	20,86	17,07	24,64	9,26	10,82	8,17	13,47	12,48	17,19	14,58	19,81	7,77
Sulawesi Utara	17,66	15,32	20,00	6,76	7,82	6,36	9,29	9,54	13,51	12,01	15,01	5,66
Sulawesi Tengah	17,47	14,68	20,25	8,14	6,88	5,87	7,89	7,49	10,61	9,42	11,80	5,73
Sulawesi Selatan	23,33	21,15	25,51	4,77	13,91	12,81	15,02	4,05	18,69	17,45	19,93	3,38
Sulawesi Tenggara	20,16	17,36	22,96	7,08	7,94	6,90	8,97	6,63	12,92	11,60	14,23	5,21
Gorontalo	23,95	20,27	27,63	7,83	8,90	6,98	10,82	11,02	16,39	14,30	18,48	6,49
Sulawesi Barat	21,70	17,28	26,13	10,41	10,64	8,75	12,53	9,06	12,99	11,23	14,75	6,92
Maluku	22,77	19,28	26,26	7,82	4,95	3,87	6,03	11,11	13,03	11,31	14,76	6,77
Maluku Utara	14,73	11,42	18,04	11,47	3,46	2,61	4,30	12,43	6,80	5,62	7,98	8,82
Papua Barat	12,48	9,54	15,42	12,03	5,08	3,39	6,78	17,02	7,37	5,86	8,87	10,42
Papua Barat Daya	8,89	5,75	12,03	18,02	6,94	5,07	8,81	13,77	8,02	6,10	9,95	12,23
Papua	16,27	13,15	19,39	9,77	6,18	4,17	8,19	16,58	12,22	10,19	14,25	8,46
Papua Selatan	14,64	8,99	20,28	19,68	3,81	1,81	5,82	26,85	8,29	5,60	10,98	16,53
Papua Tengah	13,65	9,04	18,27	17,25	NA	NA	NA	31,79	5,85	4,00	7,71	16,15
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	48,10	NA	NA	NA	44,84	NA	NA	NA	36,43
Indonesia	**24,90**	**24,47**	**25,34**	**0,90**	**12,12**	**11,79**	**12,46**	**1,41**	**19,80**	**19,50**	**20,09**	**0,77**

Catatan: Warna kuning ( ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 4.9 *Sampling Error* Persentase Peserta Didik Umur 5–23 Tahun yang Menggunakan Komputer/Laptop Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025

Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	10,18	9,02	11,33	5,79	12,87	11,63	14,12	4,94	11,53	10,63	12,44	3,99
Sumatera Utara	11,31	10,00	12,61	5,89	16,15	14,57	17,74	5,01	13,72	12,59	14,84	4,19
Sumatera Barat	16,32	14,68	17,96	5,13	23,69	21,81	25,57	4,04	20,07	18,74	21,40	3,38
Riau	12,19	10,59	13,80	6,71	16,16	14,46	17,85	5,36	14,17	12,95	15,38	4,38
Jambi	11,37	9,74	12,99	7,31	16,08	14,07	18,10	6,39	13,73	12,38	15,08	5,03
Sumatera Selatan	13,65	12,07	15,23	5,91	17,16	15,40	18,91	5,22	15,42	14,14	16,70	4,23
Bengkulu	14,16	12,12	16,20	7,34	19,43	16,99	21,86	6,41	16,82	15,15	18,50	5,08
Lampung	14,31	12,71	15,91	5,71	19,86	17,95	21,78	4,92	17,08	15,75	18,41	3,96
Kepulauan Bangka Belitung	16,61	14,02	19,19	7,94	21,66	18,89	24,44	6,54	19,18	17,25	21,12	5,14
Kepulauan Riau	22,87	19,06	26,67	8,49	24,37	20,38	28,36	8,36	23,61	20,62	26,59	6,46
DKI Jakarta	28,53	25,67	31,39	5,11	33,45	30,42	36,47	4,61	31,02	28,82	33,22	3,61
Jawa Barat	20,88	19,57	22,18	3,19	24,90	23,55	26,25	2,77	22,86	21,88	23,84	2,18
Jawa Tengah	21,18	20,10	22,25	2,58	27,44	26,25	28,63	2,22	24,27	23,44	25,10	1,75
DI Yogyakarta	39,25	35,82	42,67	4,45	43,45	40,07	46,82	3,96	41,36	38,89	43,82	3,04
Jawa Timur	21,20	20,04	22,36	2,79	25,42	24,14	26,69	2,55	23,31	22,41	24,21	1,97
Banten	19,49	17,40	21,57	5,46	20,73	18,55	22,91	5,36	20,11	18,55	21,66	3,95
Bali	23,47	21,00	25,94	5,37	29,41	26,42	32,40	5,18	26,35	24,32	28,38	3,92
Nusa Tenggara Barat	12,29	10,59	13,98	7,04	16,91	14,74	19,08	6,54	14,63	13,20	16,06	4,98
Nusa Tenggara Timur	11,12	9,88	12,36	5,70	13,80	12,34	15,25	5,38	12,46	11,41	13,50	4,27
Kalimantan Barat	10,87	9,39	12,34	6,92	13,71	12,12	15,31	5,93	12,29	11,15	13,44	4,77
Kalimantan Tengah	10,77	9,02	12,52	8,29	13,30	11,48	15,12	6,97	12,04	10,73	13,35	5,56
Kalimantan Selatan	13,00	11,40	14,59	6,26	16,92	15,16	18,68	5,30	14,97	13,75	16,19	4,16
Kalimantan Timur	17,48	15,36	19,61	6,20	23,70	21,18	26,21	5,41	20,59	18,86	22,33	4,30
Kalimantan Utara	14,62	11,53	17,70	10,77	19,73	16,06	23,39	9,48	17,19	14,58	19,81	7,77
Sulawesi Utara	11,41	9,57	13,25	8,23	15,66	13,42	17,90	7,30	13,51	12,01	15,01	5,66
Sulawesi Tengah	8,86	7,39	10,32	8,42	12,35	10,64	14,05	7,06	10,61	9,42	11,80	5,73
Sulawesi Selatan	16,00	14,38	17,62	5,18	21,35	19,62	23,07	4,12	18,69	17,45	19,93	3,38
Sulawesi Tenggara	11,08	9,44	12,71	7,53	14,80	13,00	16,60	6,21	12,92	11,60	14,23	5,21
Gorontalo	14,25	11,73	16,78	9,03	18,43	15,57	21,29	7,91	16,39	14,30	18,48	6,49
Sulawesi Barat	11,59	9,46	13,71	9,36	14,31	11,86	16,77	8,75	12,99	11,23	14,75	6,92
Maluku	11,85	9,72	13,97	9,17	14,25	11,95	16,54	8,22	13,03	11,31	14,76	6,77
Maluku Utara	4,67	3,38	5,95	14,06	8,95	7,14	10,76	10,30	6,80	5,62	7,98	8,82
Papua Barat	6,39	4,55	8,24	14,73	8,45	6,38	10,52	12,49	7,37	5,86	8,87	10,42
Papua Barat Daya	6,61	4,52	8,71	16,12	9,52	6,65	12,39	15,38	8,02	6,10	9,95	12,23
Papua	11,63	9,08	14,18	11,20	12,82	10,26	15,38	10,18	12,22	10,19	14,25	8,46
Papua Selatan	8,22	5,16	11,28	18,99	8,37	4,52	12,22	23,46	8,29	5,60	10,98	16,53
Papua Tengah	4,06	1,78	6,35	28,70	7,85	5,10	10,60	17,85	5,85	4,00	7,71	16,15
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	50,16	NA	NA	NA	46,92	NA	NA	NA	36,43
Indonesia	**17,65**	**17,26**	**18,03**	**1,12**	**21,96**	**21,54**	**22,38**	**0,97**	**19,80**	**19,50**	**20,09**	**0,77**

Catatan: Warna kuning ( ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 4.10 *Sampling Error* Persentase Peserta Didik Umur 10–23 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	5,92	4,84	7,00	9,29	6,19	5,25	7,13	7,75	6,09	5,37	6,80	5,97
Sumatera Utara	8,57	7,38	9,76	7,07	16,87	15,68	18,06	3,60	12,07	11,22	12,92	3,60
Sumatera Barat	7,29	5,80	8,77	10,41	10,17	8,82	11,51	6,76	8,57	7,55	9,59	6,08
Riau	7,18	5,65	8,70	10,83	6,21	5,06	7,36	9,44	6,62	5,70	7,55	7,14
Jambi	5,49	3,78	7,20	15,90	6,49	5,20	7,79	10,18	6,14	5,10	7,17	8,59
Sumatera Selatan	4,33	3,10	5,57	14,56	4,70	3,81	5,59	9,64	4,55	3,82	5,28	8,17
Bengkulu	9,38	6,33	12,43	16,59	6,74	5,31	8,18	10,87	7,81	6,30	9,33	9,88
Lampung	5,98	4,63	7,33	11,53	6,67	5,47	7,88	9,24	6,42	5,51	7,34	7,26
Kepulauan Bangka Belitung	6,16	4,37	7,94	14,78	5,16	3,16	7,17	19,85	5,78	4,43	7,12	11,87
Kepulauan Riau	7,94	5,26	10,61	17,18	4,71	2,64	6,77	22,39	7,71	5,22	10,21	16,51
DKI Jakarta	4,83	3,74	5,92	11,56	–	–	–	–	4,83	3,74	5,92	11,56
Jawa Barat	5,64	4,98	6,31	6,04	6,00	4,67	7,34	11,32	5,71	5,11	6,31	5,34
Jawa Tengah	7,98	7,24	8,73	4,76	7,59	6,55	8,62	6,96	7,81	7,19	8,43	4,03
DI Yogyakarta	11,11	9,21	13,02	8,74	9,60	5,87	13,32	19,82	10,81	9,11	12,51	8,01
Jawa Timur	8,01	7,18	8,84	5,29	7,32	6,32	8,32	6,98	7,74	7,10	8,37	4,22
Banten	4,17	3,20	5,14	11,86	NA	NA	NA	25,94	3,98	3,13	4,82	10,84
Bali	5,74	4,35	7,12	12,30	9,35	7,05	11,65	12,56	6,63	5,44	7,82	9,14
Nusa Tenggara Barat	9,43	7,76	11,10	9,02	10,00	8,00	12,01	10,22	9,69	8,40	10,98	6,77
Nusa Tenggara Timur	4,38	2,81	5,96	18,30	16,32	14,95	17,69	4,28	12,66	11,58	13,74	4,36
Kalimantan Barat	6,89	5,06	8,71	13,50	7,65	6,41	8,90	8,28	7,34	6,29	8,38	7,28
Kalimantan Tengah	6,57	5,00	8,13	12,17	6,44	4,99	7,89	11,50	6,50	5,44	7,57	8,36
Kalimantan Selatan	6,22	4,86	7,58	11,19	7,98	6,57	9,39	9,02	7,07	6,09	8,05	7,08
Kalimantan Timur	6,55	5,10	8,00	11,29	3,35	1,93	4,76	21,56	5,63	4,52	6,74	10,09
Kalimantan Utara	7,64	5,18	10,10	16,43	6,48	3,68	9,27	22,02	7,23	5,36	9,11	13,23
Sulawesi Utara	4,04	2,74	5,33	16,39	4,47	3,19	5,75	14,61	4,21	3,28	5,14	11,24
Sulawesi Tengah	6,03	4,23	7,83	15,25	8,34	7,09	9,59	7,63	7,49	6,46	8,52	7,01
Sulawesi Selatan	6,81	5,58	8,04	9,19	9,66	8,64	10,68	5,38	8,20	7,39	9,00	5,00
Sulawesi Tenggara	7,67	5,88	9,46	11,92	10,97	9,59	12,34	6,41	9,59	8,49	10,69	5,83
Gorontalo	8,45	5,79	11,11	16,05	8,71	6,70	10,73	11,79	8,58	6,90	10,26	9,97
Sulawesi Barat	9,36	5,46	13,25	21,24	10,76	8,74	12,77	9,56	10,45	8,66	12,24	8,73
Maluku	7,68	5,07	10,30	17,38	6,49	5,00	7,98	11,71	7,05	5,59	8,51	10,59
Maluku Utara	5,46	2,92	8,00	23,69	5,79	4,53	7,05	11,08	5,69	4,52	6,86	10,49
Papua Barat	5,14	3,29	6,98	18,32	7,21	5,04	9,37	15,34	6,55	4,96	8,14	12,40
Papua Barat Daya	NA	NA	NA	31,39	5,21	3,85	6,58	13,37	4,58	3,04	6,11	17,12
Papua	3,74	1,16	6,32	35,16	4,58	3,04	6,12	17,17	4,08	2,43	5,73	20,65
Papua Selatan	NA	NA	NA	52,50	6,03	3,74	8,32	19,34	4,15	2,64	5,66	18,58
Papua Tengah	NA	NA	NA	27,25	14,34	11,24	17,44	11,03	10,46	8,33	12,59	10,40
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	40,09	15,32	12,65	17,98	8,89	15,84	13,09	18,58	8,84
Indonesia	**6,60**	**6,33**	**6,87**	**2,07**	**8,31**	**8,02**	**8,60**	**1,78**	**7,27**	**7,07**	**7,47**	**1,39**

Catatan: Warna kuning ( ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 4.11 *Sampling Error* Persentase Peserta Didik Umur 10-23 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025

Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	8,31	7,18	9,45	6,97	3,91	3,13	4,70	10,23	6,09	5,37	6,80	5,97
Sumatera Utara	13,87	12,62	15,12	4,59	10,25	9,18	11,33	5,36	12,07	11,22	12,92	3,60
Sumatera Barat	9,99	8,51	11,46	7,53	7,21	5,93	8,49	9,05	8,57	7,55	9,59	6,08
Riau	8,39	6,93	9,85	8,87	4,82	3,73	5,91	11,56	6,62	5,70	7,55	7,14
Jambi	8,37	6,69	10,04	10,21	3,90	2,69	5,10	15,75	6,14	5,10	7,17	8,59
Sumatera Selatan	5,29	4,25	6,34	10,08	3,81	2,85	4,77	12,81	4,55	3,82	5,28	8,17
Bengkulu	9,11	7,25	10,98	10,44	6,55	4,26	8,85	17,86	7,81	6,30	9,33	9,88
Lampung	8,04	6,57	9,51	9,30	4,82	3,72	5,92	11,66	6,42	5,51	7,34	7,26
Kepulauan Bangka Belitung	4,87	3,11	6,63	18,42	6,62	4,56	8,68	15,89	5,78	4,43	7,12	11,87
Kepulauan Riau	7,66	3,87	11,46	25,25	7,76	4,45	11,07	21,75	7,71	5,22	10,21	16,51
DKI Jakarta	4,01	2,71	5,31	16,57	5,62	3,88	7,35	15,78	4,83	3,74	5,92	11,56
Jawa Barat	5,88	5,07	6,70	7,08	5,53	4,68	6,38	7,85	5,71	5,11	6,31	5,34
Jawa Tengah	7,66	6,79	8,53	5,79	7,97	7,09	8,84	5,59	7,81	7,19	8,43	4,03
DI Yogyakarta	10,64	8,31	12,97	11,16	10,97	8,51	13,43	11,44	10,81	9,11	12,51	8,01
Jawa Timur	8,98	8,03	9,92	5,39	6,49	5,67	7,30	6,39	7,74	7,10	8,37	4,22
Banten	4,21	2,94	5,48	15,40	3,75	2,62	4,87	15,32	3,98	3,13	4,82	10,84
Bali	5,85	4,48	7,23	11,98	7,46	5,64	9,27	12,45	6,63	5,44	7,82	9,14
Nusa Tenggara Barat	11,41	9,54	13,29	8,39	7,99	6,40	9,57	10,15	9,69	8,40	10,98	6,77
Nusa Tenggara Timur	13,74	12,33	15,15	5,23	11,59	10,19	12,99	6,16	12,66	11,58	13,74	4,36
Kalimantan Barat	8,72	7,16	10,29	9,16	5,98	4,67	7,30	11,24	7,34	6,29	8,38	7,28
Kalimantan Tengah	7,31	5,73	8,89	11,03	5,71	4,34	7,08	12,24	6,50	5,44	7,57	8,36
Kalimantan Selatan	8,06	6,55	9,57	9,54	6,10	4,81	7,39	10,80	7,07	6,09	8,05	7,08
Kalimantan Timur	6,49	4,88	8,09	12,60	4,78	3,32	6,24	15,59	5,63	4,52	6,74	10,09
Kalimantan Utara	7,20	4,73	9,68	17,54	7,27	4,59	9,95	18,81	7,23	5,36	9,11	13,23
Sulawesi Utara	4,69	3,40	5,99	14,07	3,73	2,45	5,01	17,54	4,21	3,28	5,14	11,24
Sulawesi Tengah	10,12	8,41	11,82	8,61	4,97	3,84	6,09	11,56	7,49	6,46	8,52	7,01
Sulawesi Selatan	10,65	9,38	11,92	6,09	5,80	4,88	6,71	8,02	8,20	7,39	9,00	5,00
Sulawesi Tenggara	11,39	9,82	12,96	7,04	7,76	6,32	9,20	9,49	9,59	8,49	10,69	5,83
Gorontalo	9,03	6,90	11,16	12,05	8,16	5,62	10,70	15,88	8,58	6,90	10,26	9,97
Sulawesi Barat	15,01	12,20	17,83	9,56	6,22	4,10	8,33	17,37	10,45	8,66	12,24	8,73
Maluku	8,76	6,73	10,78	11,81	5,32	3,56	7,09	16,92	7,05	5,59	8,51	10,59
Maluku Utara	7,02	5,37	8,66	11,98	4,35	2,75	5,96	18,80	5,69	4,52	6,86	10,49
Papua Barat	7,49	5,07	9,91	16,46	5,48	3,49	7,47	18,54	6,55	4,96	8,14	12,40
Papua Barat Daya	4,21	2,59	5,83	19,62	4,96	2,58	7,35	24,54	4,58	3,04	6,11	17,12
Papua	5,72	2,71	8,74	26,90	2,34	1,20	3,48	24,80	4,08	2,43	5,73	20,65
Papua Selatan	4,84	2,51	7,17	24,55	3,36	1,73	5,00	24,86	4,15	2,64	5,66	18,58
Papua Tengah	11,89	8,80	14,98	13,25	8,86	6,22	11,50	15,20	10,46	8,33	12,59	10,40
Papua Pegunungan	18,49	14,80	22,18	10,18	13,01	9,38	16,65	14,25	15,84	13,09	18,58	8,84
Indonesia	8,10	7,81	8,38	1,79	6,43	6,17	6,70	2,13	7,27	7,07	7,47	1,39

Catatan: Warna kuning ( ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 4.12 *Sampling Error* Persentase Peserta Didik Umur 10–23 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	41,96	39,14	44,78	3,43	30,25	28,27	32,23	3,34	34,69	33,04	36,33	2,42
Sumatera Utara	49,80	47,19	52,42	2,68	49,81	47,95	51,68	1,91	49,81	48,10	51,51	1,75
Sumatera Barat	56,86	53,81	59,92	2,74	44,40	42,04	46,75	2,70	51,32	49,31	53,32	2,00
Riau	37,21	34,09	40,34	4,28	31,60	29,19	34,01	3,90	34,00	32,07	35,92	2,89
Jambi	40,00	36,02	43,99	5,08	32,45	29,62	35,27	4,44	35,12	32,82	37,42	3,34
Sumatera Selatan	33,06	29,81	36,31	5,02	31,70	29,69	33,71	3,23	32,26	30,47	34,04	2,82
Bengkulu	50,99	46,22	55,75	4,77	41,50	38,83	44,18	3,29	45,36	42,83	47,89	2,85
Lampung	44,67	41,48	47,86	3,64	46,89	44,41	49,37	2,70	46,09	44,13	48,05	2,17
Kepulauan Bangka Belitung	58,48	54,40	62,56	3,56	54,99	50,62	59,37	4,06	57,14	54,12	60,16	2,69
Kepulauan Riau	50,32	45,54	55,09	4,84	25,72	20,86	30,58	9,65	48,60	44,16	53,05	4,67
DKI Jakarta	31,63	29,03	34,24	4,20	–	–	–	–	31,63	29,03	34,24	4,20
Jawa Barat	35,43	33,97	36,89	2,10	45,51	42,53	48,48	3,34	37,25	35,93	38,57	1,80
Jawa Tengah	46,67	45,24	48,10	1,56	41,69	39,73	43,65	2,40	44,51	43,33	45,68	1,35
DI Yogyakarta	64,31	61,11	67,50	2,54	45,98	39,03	52,92	7,71	60,63	57,70	63,56	2,47
Jawa Timur	41,95	40,39	43,52	1,91	33,99	32,12	35,86	2,81	38,76	37,56	39,97	1,59
Banten	24,78	22,41	27,15	4,87	27,01	22,55	31,48	8,43	25,18	23,07	27,28	4,26
Bali	71,86	68,90	74,83	2,10	69,99	66,09	73,88	2,84	71,40	68,97	73,83	1,74
Nusa Tenggara Barat	57,48	54,58	60,39	2,58	50,82	47,01	54,63	3,82	54,48	52,13	56,82	2,20
Nusa Tenggara Timur	49,69	45,74	53,64	4,05	48,24	46,43	50,06	1,92	48,69	46,94	50,43	1,83
Kalimantan Barat	33,67	30,12	37,23	5,39	26,69	24,49	28,89	4,20	29,56	27,60	31,52	3,38
Kalimantan Tengah	42,34	38,62	46,06	4,48	28,49	25,95	31,02	4,55	35,04	32,81	37,28	3,26
Kalimantan Selatan	44,67	41,45	47,89	3,68	61,77	59,03	64,51	2,26	52,95	50,77	55,14	2,11
Kalimantan Timur	42,34	39,31	45,38	3,66	26,02	21,53	30,50	8,80	37,64	35,11	40,17	3,43
Kalimantan Utara	30,69	25,85	35,53	8,05	21,89	17,41	26,37	10,45	27,64	24,12	31,17	6,51
Sulawesi Utara	32,79	29,28	36,30	5,46	33,07	30,29	35,86	4,30	32,91	30,54	35,27	3,67
Sulawesi Tengah	39,46	35,13	43,78	5,59	37,22	34,72	39,72	3,43	38,04	35,80	40,29	3,01
Sulawesi Selatan	38,45	35,87	41,04	3,43	42,37	40,52	44,22	2,23	40,35	38,74	41,96	2,04
Sulawesi Tenggara	51,97	47,92	56,03	3,98	49,79	47,51	52,07	2,33	50,70	48,55	52,85	2,16
Gorontalo	59,18	54,05	64,31	4,42	57,68	53,72	61,64	3,50	58,45	55,19	61,70	2,84
Sulawesi Barat	55,34	49,22	61,47	5,65	40,90	37,25	44,55	4,55	44,03	40,85	47,20	3,68
Maluku	53,24	48,65	57,82	4,39	37,06	34,07	40,04	4,11	44,66	41,93	47,38	3,12
Maluku Utara	35,15	29,88	40,42	7,65	30,46	27,48	33,44	4,99	31,91	29,28	34,54	4,20
Papua Barat	40,13	34,66	45,60	6,95	23,22	19,68	26,76	7,77	28,60	25,53	31,66	5,47
Papua Barat Daya	30,52	24,07	36,98	10,80	48,19	44,16	52,22	4,27	38,24	34,20	42,28	5,39
Papua	35,55	30,61	40,49	7,09	33,78	30,08	37,47	5,59	34,83	31,53	38,14	4,84
Papua Selatan	13,15	5,74	20,56	28,76	23,39	18,70	28,09	10,24	18,98	14,83	23,14	11,17
Papua Tengah	20,30	14,82	25,78	13,78	35,80	30,96	40,64	6,89	30,01	26,28	33,74	6,35
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA	38,67	35,14	42,20	4,66	36,02	32,61	39,43	4,83
Indonesia	**41,11**	**40,53**	**41,69**	**0,72**	**40,21**	**39,65**	**40,78**	**0,72**	**40,76**	**40,35**	**41,18**	**0,52**

Catatan: Warna kuning ( ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

BAB 5

PROSES DAN CAPAIAN PENDIDIKAN

https://www.s.go.id

https://www.bps.go.id

BAB 5
PROSES DAN CAPAIAN PENDIDIKAN

Pembangunan pendidikan di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan. Oleh karena itu, pendidikan termasuk dalam transformasi sosial yang menjadi salah satu fokus agenda pembangunan tahun 2025–2029. Sasaran pembangunan transformasi sosial dalam bidang pendidikan adalah mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dengan beberapa target capaian pendidikan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2024b).

Bab ini menyajikan proses dan capaian pendidikan melalui beberapa indikator utama yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan, yaitu angka putus sekolah, tingkat penyelesaian pendidikan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, angka melek huruf, serta rata-rata lama sekolah.

5.1 Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan persentase peserta didik yang pada tahun ajaran sekarang tidak melanjutkan sekolah lagi sebelum lulus dari jenjang pendidikan tertentu, terhadap peserta didik yang pada tahun ajaran lalu masih bersekolah di jenjang pendidikan yang sama. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan melihat keterjangkauan maupun pemerataan pendidikan (UNESCO, 2009). Angka putus

sekolah sering dikaitkan dengan konsep ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, di mana peserta didik dari latar belakang rumah tangga miskin cenderung memiliki peluang lebih tinggi untuk meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan (UNESCO, 2012).

Berdasarkan data Susenas 2025, secara umum terdapat satu dari 1.000 penduduk yang putus sekolah di jenjang SD sederajat. Persentase ini lebih kecil dibandingkan angka putus sekolah di SMP sederajat dan SMA/SMK sederajat. Pada jenjang SMP sederajat, dari 1.000 penduduk terdapat lima di antaranya yang putus sekolah. Selanjutnya, terdapat delapan dari 1.000 penduduk yang putus sekolah di jenjang SMA/SMK sederajat. Hal ini menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan, angka putus sekolah juga semakin meningkat.

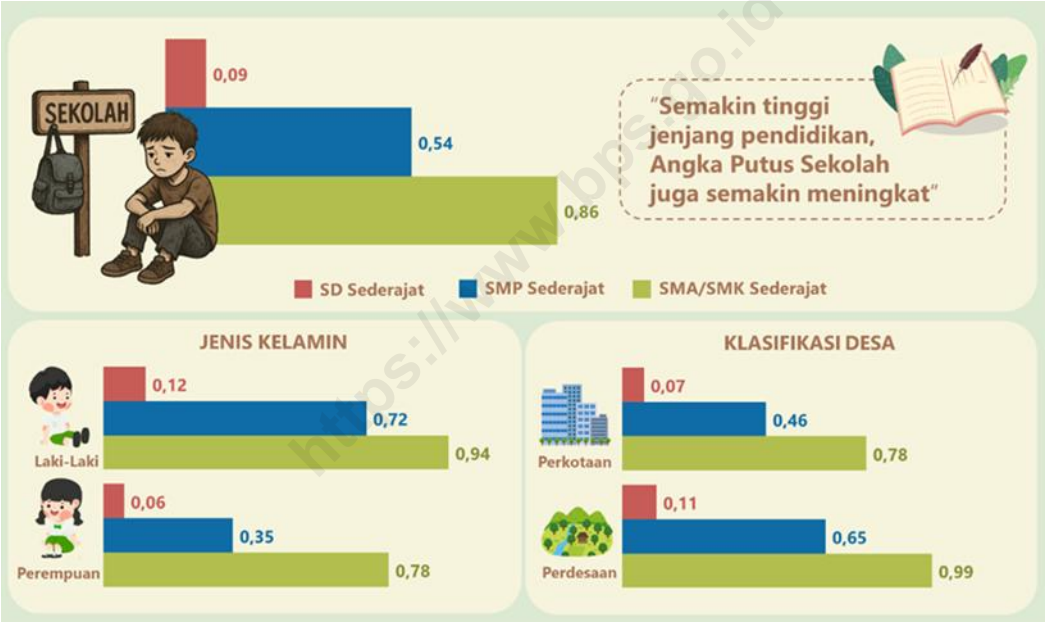

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 5.1 Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik, 2025

Sementara itu, terdapat kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan jika ditinjau berdasarkan wilayah tempat tinggal. Pada setiap jenjang pendidikan, angka putus sekolah di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Selanjutnya ketika diamati dari karakteristik jenis kelamin, pada semua jenjang

pendidikan, angka putus sekolah penduduk laki-laki lebih tinggi daripada penduduk perempuan.

5.2 Tingkat Penyelesaian Pendidikan

Tingkat penyelesaian pendidikan merupakan indikator yang mengukur persentase penduduk yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang umurnya. Tingkat penyelesaian yang mencapai atau mendekati 100 persen menunjukkan bahwa hampir seluruh anak-anak dan remaja telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya atau sesuai umur mereka, tanpa keterlambatan yang signifikan atau berarti (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2024a).

Terdapat tiga indikator capaian tingkat penyelesaian pendidikan di Indonesia, yaitu tingkat penyelesaian SD sederajat, tingkat penyelesaian SMP sederajat, dan tingkat penyelesaian SMA/SMK sederajat. Adapun referensi rentang umur untuk penghitungan tingkat penyelesaian SD sederajat adalah umur 13–15 tahun, tingkat penyelesaian SMP sederajat adalah umur 16–18 tahun, dan umur 19–21 tahun untuk tingkat penyelesaian SMA/SMK sederajat. Umur yang digunakan dalam penghitungan tingkat penyelesaian pendidikan adalah umur pada saat awal tahun pembelajaran (*school age*).

Semakin tinggi jenjang pendidikan, tingkat penyelesaian pendidikan justru semakin rendah. Gambar 5.2 menunjukkan tingkat penyelesaian pendidikan untuk SD sederajat sebesar 97,65 persen. Angka ini menggambarkan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 13–15 tahun, sebanyak 97 hingga 98 orang di antaranya telah menyelesaikan pendidikan SD sederajat. Sementara itu, hanya terdapat sekitar 73 hingga 74 dari 100 penduduk kelompok umur 19–21 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMA/SMK sederajat.

https://www.bps.go.id

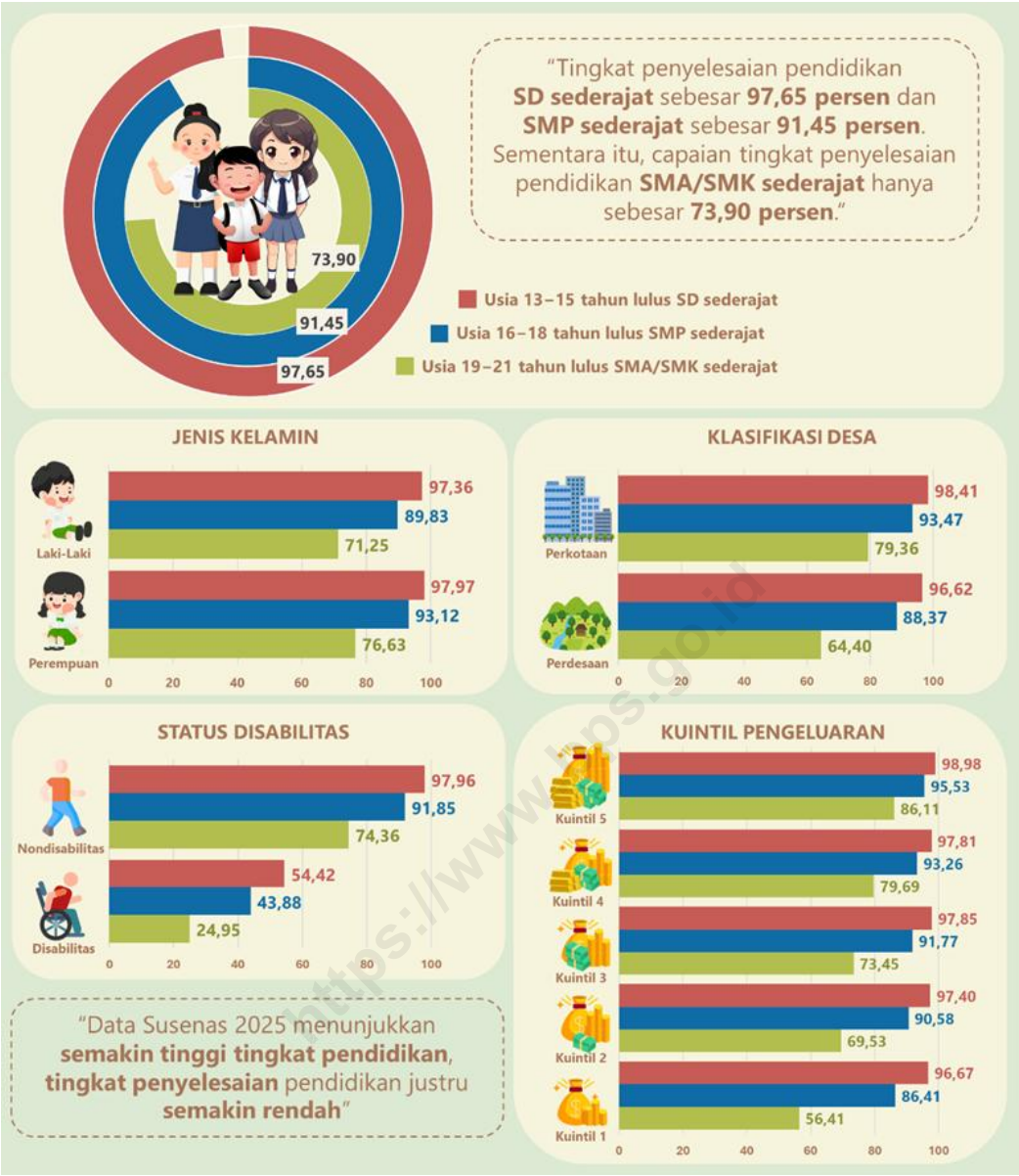

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 5.2 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Karakteristik, 2025

Gambar 5.2 juga menunjukkan adanya kesenjangan capaian yang cukup lebar antara tingkat penyelesaian pendidikan pada jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat dengan jenjang pendidikan lainnya. Terdapat *gap* sebesar 23,75 persen poin antara tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/SMK sederajat dengan SD sederajat. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada angka nasional, tetapi juga pada capaian menurut karakteristik demografi lainnya.

Tingkat penyelesaian pendidikan penyandang disabilitas masih tertinggal dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas, dan kesenjangan ini terlihat konsisten di setiap jenjang pendidikan. Kesenjangan tersebut semakin melebar pada jenjang menengah pertama dan menengah atas, di mana tingkat penyelesaian pendidikan penyandang disabilitas hanya sekitar 43,88 persen untuk SMP sederajat dan 24,95 persen untuk SMA/SMK sederajat.

Latar belakang sosial ekonomi juga menyebabkan terjadinya kesenjangan penyelesaian pendidikan di semua jenjang pendidikan, terutama antara rumah tangga pada kuintil teratas dengan kuintil terbawah. Kesenjangan paling lebar terdapat pada jenjang SMA/SMK sederajat, di mana pada kuintil teratas 86,11 persen sedangkan kuintil terbawah hanya 56,41 persen. Selain itu, perbedaan wilayah tempat tinggal juga menyebabkan kesenjangan dalam hal penyelesaian pendidikan. Tingkat penyelesaian pendidikan penduduk di perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan penduduk di perdesaan. Kesenjangan paling lebar antara perkotaan dan perdesaan terlihat pada jenjang SMA/SMK sederajat.

Gambar 5.3 menunjukkan capaian tingkat penyelesaian pendidikan pada level provinsi, di mana terlihat semua provinsi di pulau Papua memiliki capaian di bawah capaian nasional pada semua jenjang pendidikan. Provinsi Jawa Barat memiliki capaian tertinggi untuk jenjang pendidikan SD sederajat (99,02 persen). Sementara itu, capaian tertinggi untuk jenjang pendidikan SMP sederajat dan SMA/SMK sederajat terdapat pada Provinsi D.I. Yogyakarta, dengan capaian masing-masing sebesar 97,06 persen dan 92,55 persen. Di sisi lain, Papua Tengah tercatat sebagai provinsi dengan capaian tingkat penyelesaian pendidikan terendah pada jenjang pendidikan SMP sederajat (55,49 persen). Untuk capaian terendah pada jenjang pendidikan SD sederajat dan SMA/SMK sederajat terdapat pada Provinsi Papua Pegunungan dengan capaian masing-masing sebesar 72,10 persen dan 28,30 persen.

https://www.bps.go.id

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 5.3 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Indikator tingkat penyelesaian pendidikan dapat menggambarkan proporsi individu dalam kelompok usia tertentu yang tepat waktu atau terlambat (*delay*) dalam pendaftaran hingga penyelesaian pada suatu jenjang pendidikan. Namun demikian, indikator ini belum dapat melihat pada jenjang mana peserta didik keluar dari sistem pendidikan sebelum menyelesaikan pendidikan menengah atas. Analisis alur pendidikan menyediakan informasi tersebut dengan memetakan proporsi individu yang masuk dan bertransisi ke dan serta menyelesaikan semua tingkat pendidikan hingga pendidikan menengah atas. Analisis ini memungkinkan identifikasi hambatan dalam sistem pendidikan di mana sebagian besar peserta didik meninggalkan sekolah.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 5.4 Analisis Alur Pendidikan Penduduk Usia 19–21 Tahun, 2025

Analisis alur berdasarkan data Susenas 2025 didasarkan pada penduduk yang pada saat pendataan berumur 19 hingga 21 tahun (1–3 tahun di atas usia kelulusan SMA/SMK sederajat yang resmi, yaitu 18 tahun). Di antara penduduk kelompok umur 19–21 tahun tersebut, ditemukan bahwa 99,35 persen pernah mengenyam pendidikan di SD sederajat dan sisanya sekitar 0,65 persen penduduk yang belum pernah bersekolah. Dari seluruh penduduk yang mengenyam pendidikan di SD sederajat, sekitar 98,21 persen di antaranya tamat SD sederajat, sedangkan sisanya putus sekolah dan masih bersekolah di SD.

Selanjutnya, terdapat sekitar 94,40 persen yang melanjutkan ke SMP sederajat, tetapi hanya 91,66 persen yang tamat SMP sederajat. Kemudian, sekitar 80,10 persen yang melanjutkan ke SMA/SMK sederajat dan hanya sebesar 71,01 persen saja yang tamat SMA/SMK sederajat. Di sisi lain, di antara penduduk yang dianalisis, ditemukan sekitar 3,81 persen yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP sederajat dan 11,55 persen yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat.

Hal menarik yang dapat dilihat dari analisis ini adalah masih ditemukan penduduk usia 19–21 tahun yang masih bersekolah di jenjang pendidikan yang jauh dari seharusnya. Sekitar 0,06 persen penduduk masih bersekolah pada jenjang SD sederajat, sebesar 1,59 persen yang masih bersekolah pada jenjang SMP sederajat, serta sekitar 1,66 persen yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat.

5.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang telah diselesaikan oleh seseorang setelah mengikuti kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah, ditandai dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah (UNESCO, 2012). Pada Susenas, pendidikan tertinggi yang ditamatkan digambarkan dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dimiliki.

Tingkat pendidikan penduduk Indonesia didominasi oleh pendidikan menengah. Sebanyak 64,74 persen penduduk 15 tahun ke atas merupakan tamatan SMP sederajat ke atas, yaitu dengan rincian 22,48 persen tamat SMP sederajat, 31,25 persen tamat SMA/SMK sederajat, dan 11,00 persen tamat pendidikan tinggi (Gambar 5.5). Akan tetapi, di sisi lain masih terdapat penduduk yang belum pernah sekolah dan tidak tamat SD. Data Susenas 2025 menunjukkan bahwa dari 100 penduduk umur 15 tahun ke atas, 8 orang di antaranya tidak tamat SD dan 3 orang tidak/belum pernah sekolah.

https://www.bps.go.id

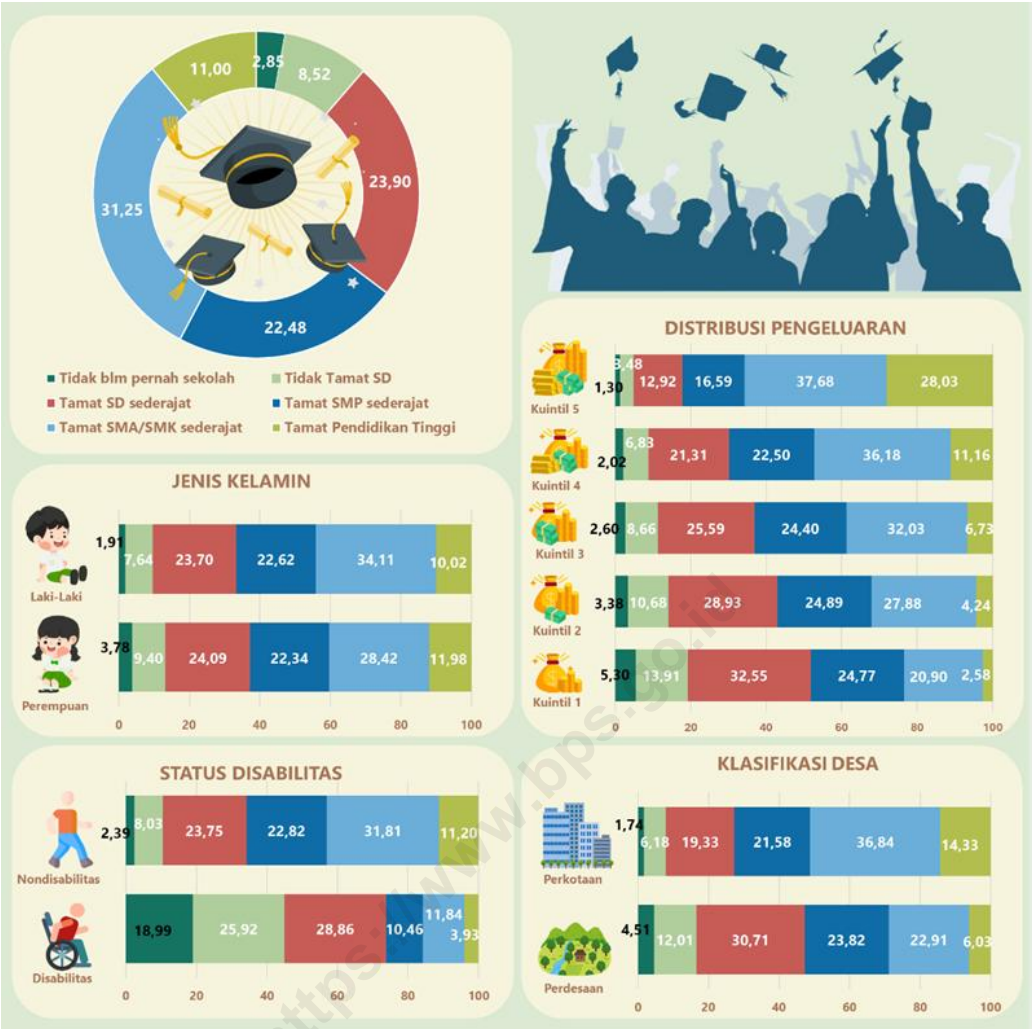

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 5.5 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik, 2025

Secara umum, tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk laki-laki dan perempuan 15 tahun ke atas tidak berbeda secara signifikan (Gambar 5.5). Hanya saja persentase penduduk laki-laki 15 tahun ke atas yang tamat SMA/SMK sederajat jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan (34,11 persen berbanding 28,42 persen). Kesenjangan terlihat pada tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas. Terlihat bahwa mayoritas penyandang disabilitas masih berpendidikan rendah, yaitu SD sederajat ke bawah (73,77 persen). Di lain sisi, persentase penduduk bukan penyandang disabilitas yang berpendidikan SD

sederajat ke bawah hanya sebesar 34,17 persen. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan capaian pendidikan yang tinggi antara keduanya.

Dilihat dari status ekonomi rumah tangga, semakin baik kondisi ekonomi maka tingkat pendidikan yang ditamatkan cenderung semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, persentase penduduk tamatan SD sederajat ke bawah terlihat semakin besar seiring dengan semakin rendahnya status ekonomi rumah tangga. Hal ini berarti penduduk pada status ekonomi tertinggi (kuintil 5) didominasi oleh tamatan SMA/SMK sederajat ke atas, sedangkan pada kuintil 1 didominasi oleh penduduk yang tamat SD sederajat ke bawah.

Ketimpangan capaian pendidikan tertinggi yang ditamatkan juga terlihat pada karakteristik wilayah tempat tinggal. Penduduk 15 tahun ke atas di wilayah perkotaan yang tamat SMA/SMK sederajat ke atas sekitar 51,17 persen. Persentase penduduk di perkotaan yang tamat pendidikan tinggi bahkan mencapai dua kali lipat penduduk di perdesaan (14,33 persen berbanding 6,03 persen). Sementara itu, penduduk di perdesaan didominasi oleh tamatan SD sederajat ke bawah (47,23 persen).

https://www.bps.go.id

5.4 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar dalam mengakses informasi, yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pada akhirnya, hal ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup individu, keluarga, serta negara di berbagai aspek kehidupan. AMH merupakan salah satu indikator dalam pencapaian target SDGs pilar sosial, khususnya indikator 4.6.1 (a), yang bertujuan memastikan bahwa pada tahun 2030, semua remaja dan sebagian kelompok dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2024a).

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 5.6 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, 2025

Perbandingan capaian AMH setiap kelompok umur dapat dilihat pada Gambar 5.6. Pada tahun 2025, AMH penduduk umur 15 tahun ke atas sebesar 97,10 persen, lebih rendah dibandingkan AMH penduduk umur 15–59 tahun (99,08 persen) dan AMH penduduk umur 15–24 tahun (99,83 persen). Hal tersebut dapat terjadi karena kelompok umur 15 tahun ke atas juga mencakup penduduk lanjut usia yang kemampuan keaksaraannya kurang atau banyak yang sudah lupa bahkan bisa jadi ada yang tidak bisa baca tulis.

Pada Gambar 5.7 terlihat bahwa capaian AMH penduduk 15 tahun ke atas masih terdapat kesenjangan untuk setiap karakteristik. Dilihat dari jenis kelamin, capaian AMH penduduk perempuan sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki (96,03 persen berbanding 98,18 persen). Kesenjangan yang cukup besar terlihat pada status disabilitas, di mana capaian penduduk bukan penyandang disabilitas sebesar 97,56 persen, sedangkan capaian AMH penduduk penyandang disabilitas hanya sekitar 80,94 persen. Capaian AMH penduduk yang tinggal di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan, yaitu 98,35 persen berbanding 95,23 persen). Selanjutnya, jika ditinjau dari status ekonomi rumah tangga, semakin tinggi status ekonomi maka capaian AMH juga semakin besar. Terlihat capaian AMH penduduk pada kuintil 1 sebesar 93,98 persen, sementara AMH penduduk pada kuintil 5 sebesar 99,04 persen.

https://www.bps.go.id

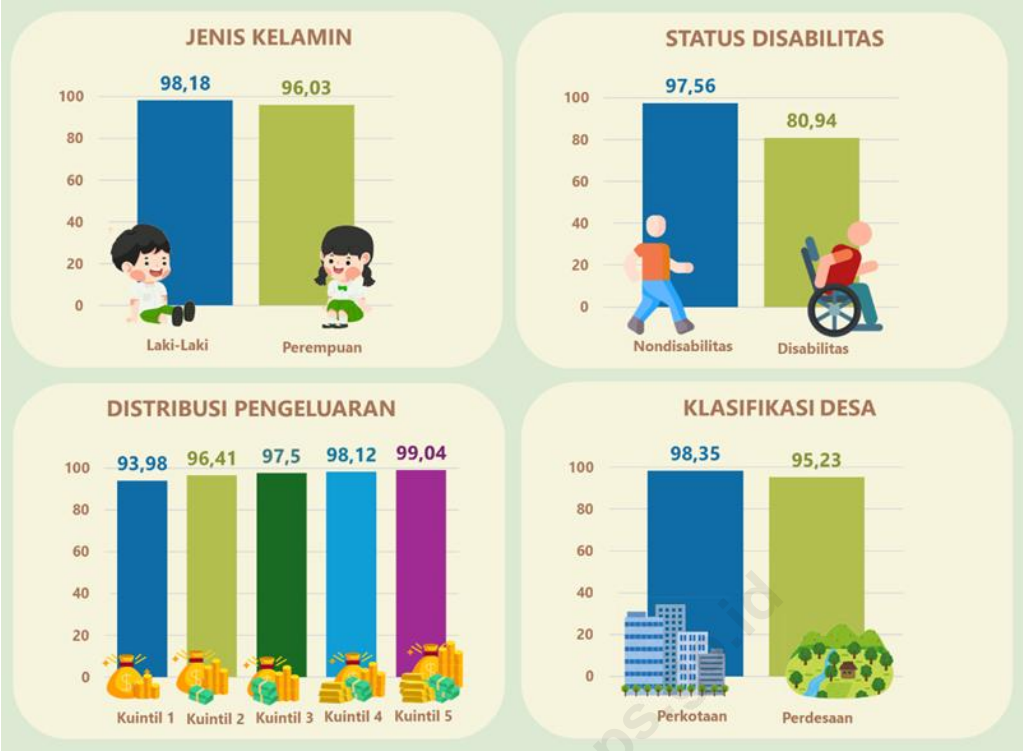

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 5.7 Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik, 2025

5.5 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (Badan Pusat Statistik, 2024b). Pengukuran rata-rata lama sekolah tidak memperhitungkan tahun yang dihabiskan penduduk untuk mengulang karena tidak naik kelas. Secara umum, nilai indikator ini menunjukkan tingkat keterampilan dan kompetensi penduduk suatu wilayah, yang dapat dilihat sebagai proksi dari aspek kuantitatif dan kualitatif dari stok sumber daya manusia. Nilai yang relatif tinggi menunjukkan semakin tinggi capaian jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk di suatu wilayah. Selain itu, capaian RLS yang semakin tinggi juga mencerminkan sistem pendidikan yang berkinerja baik (UNESCO, 2024).

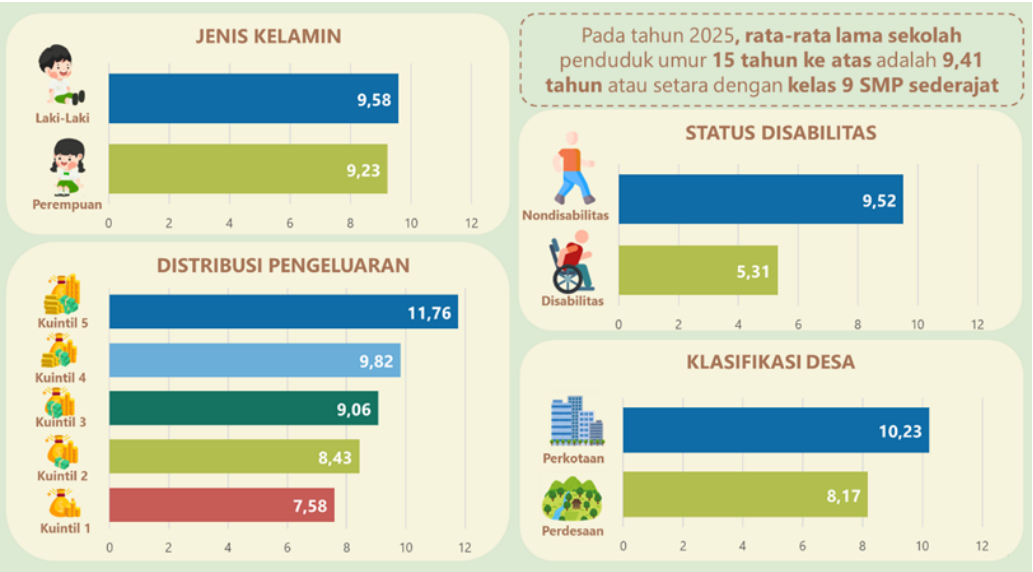

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 5.8 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik, 2025

Data Susenas 2025 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia mencapai 9,41 tahun atau setara kelas 9 SMP sederajat. Hal tersebut berarti secara rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,41 tahun atau telah menamatkan jenjang pendidikan kelas 9 SMP sederajat. Capaian tersebut telah melampaui capaian tahun 2024 yang sebesar 9,22 persen sekaligus melampaui target RPJMN tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 9,33 tahun (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025).

Dari karakteristik jenis kelamin, pada tahun 2025 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki dan perempuan. Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki umur 15 tahun ke atas sebesar 9,58 tahun atau setara kelas 9 SMP sederajat. Sementara itu, capaian rata-rata lama sekolah penduduk perempuan pada kelompok umur yang sama sedikit lebih rendah, yakni sebesar 9,23 tahun.

Di sisi lain, lama sekolah penduduk penyandang disabilitas jauh lebih rendah dibandingkan penduduk bukan penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari capaian rata-rata lama sekolah penduduk penyandang disabilitas yang

https://www.bps.go.id

hanya setara kelas 5 SD sederajat, sedangkan penduduk yang tidak mengalami disabilitas berhasil menamatkan jenjang pendidikan sampai 9,52 tahun atau setara kelas 9 SMP sederajat.

Data Susenas 2025 juga menunjukkan pola bahwa semakin tinggi status ekonomi rumah tangga maka semakin tinggi pula capaian rata-rata lama sekolah. Penduduk pada tingkat pengeluaran tertinggi (kuintil 5) berhasil menamatkan jenjang pendidikan kelas 11 SMA/SMK sederajat. Sementara itu, capaian yang cukup jauh terjadi pada penduduk dengan tingkat pengeluaran terendah (kuintil 1), di mana hanya berhasil menamatkan jenjang pendidikan kelas 7 SMP sederajat. Jika dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggal, terdapat kesenjangan lama sekolah sebesar 2 tahun antara penduduk di perdesaan dan perkotaan. Penduduk di perkotaan berhasil mencapai 10,23 tahun atau menamatkan jenjang pendidikan setara kelas 10 SMA/SMK sederajat, sedangkan di perdesaan hanya 8,17 tahun atau setara kelas 8 SMP sederajat.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

Gambar 5.9 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, 2025

Jika dilihat dari sebarannya (Gambar 5.9), terdapat ketimpangan capaian lama sekolah antarprovinsi di Indonesia. Provinsi dengan nilai RLS tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan capaian sebesar 11,55 tahun atau setara dengan kelas 11 SMA/SMK sederajat. Capaian ini menggambarkan tingkat

pendidikan penduduk di Jakarta sudah mendekati target wajib belajar 12 tahun. Di sisi lain, provinsi dengan nilai RLS terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan dengan capaiannya sebesar 4,76 tahun atau setara dengan kelas 5 SD sederajat. Namun demikian, jika dilihat secara keseluruhan dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, 20 provinsi di antaranya sudah memiliki capaian di atas capaian nasional.

https://www.bps.go.id

Tabel 5.1 Angka Putus Sekolah Menurut Karakteristik dan Jenjang Pendidikan, 2025

Karakteristik	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA/SMK Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	0,09	0,54	0,86
Jenis Kelamin			
Laki-laki	0,12	0,72	0,94
Perempuan	0,06	0,35	0,78
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	0,07	0,46	0,78
Perdesaan	0,11	0,65	0,99

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.2 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur/Jenjang Pendidikan, 2025

Karakteristik	Umur 13–15 Tahun Lulus SD Sederajat	Umur 16–18 Tahun Lulus SMP Sederajat	Umur 19–21 Tahun Lulus SMA/SMK Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	97,65	91,45	73,90
Jenis Kelamin			
Laki-laki	97,36	89,83	71,25
Perempuan	97,97	93,12	76,63
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	97,96	91,85	74,36
Disabilitas	54,42	43,88	24,95
Kuintil Pengeluaran			
Kuintil 5	98,98	95,53	86,11
Kuintil 4	97,81	93,26	79,69
Kuintil 3	97,85	91,77	73,45
Kuintil 2	97,40	90,58	69,53
Kuintil 1	96,67	86,41	56,41
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	98,41	93,47	79,36
Perdesaan	96,62	88,37	64,40

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.3 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025

Karakteristik	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD Sederajat	Tamat SMP Sederajat	Tamat SMA/SMK Sederajat	Tamat Pendidikan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total	2,85	8,52	23,90	22,48	31,25	11,00
Jenis Kelamin						
Laki-laki	1,91	7,64	23,70	22,62	34,11	10,02
Perempuan	3,78	9,40	24,09	22,34	28,42	11,98
Status Disabilitas						
Nondisabilitas	2,39	8,03	23,75	22,82	31,81	11,20
Disabilitas	18,99	25,92	28,86	10,46	11,84	3,93
Kuintil Pengeluaran						
Kuintil 5	1,30	3,48	12,92	16,59	37,68	28,03
Kuintil 4	2,02	6,83	21,31	22,50	36,18	11,16
Kuintil 3	2,60	8,66	25,59	24,40	32,03	6,73
Kuintil 2	3,38	10,68	28,93	24,89	27,88	4,24
Kuintil 1	5,30	13,91	32,55	24,77	20,90	2,58
Klasifikasi Desa						
Perkotaan	1,74	6,18	19,33	21,58	36,84	14,33
Perdesaan	4,51	12,01	30,71	23,82	22,91	6,03

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.4 Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2025

Karakteristik	15–24 Tahun	15–59 Tahun	15 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	99,83	99,08	97,10
Jenis Kelamin			
Laki-laki	99,82	99,30	98,18
Perempuan	99,83	98,87	96,03
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	99,89	99,21	97,56
Disabilitas	92,79	88,99	80,94
Kuintil Pengeluaran			
Kuintil 5	99,93	99,63	99,04
Kuintil 4	99,86	99,35	98,12
Kuintil 3	99,81	99,16	97,50
Kuintil 2	99,82	98,95	96,41
Kuintil 1	99,69	98,16	93,98
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	99,93	99,71	98,35
Perdesaan	99,65	98,12	95,23

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.5 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik, 2025

Karakteristik	Rata-Rata Lama Sekolah
(1)	(2)
Total	9,41
Jenis Kelamin	
Laki-laki	9,58
Perempuan	9,23
Status Disabilitas	
Nondisabilitas	9,52
Disabilitas	5,31
Kuintil Pengeluaran	
Kuintil 5	11,76
Kuintil 4	9,82
Kuintil 3	9,06
Kuintil 2	8,43
Kuintil 1	7,58
Klasifikasi Desa	
Perkotaan	10,23
Perdesaan	8,17

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.6 Tingkat Penyelesaian Pendidikan di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025

Provinsi	Umur 13–15 Tahun Lulus SD Sederajat	Umur 16–18 Tahun Lulus SMP Sederajat	Umur 19–21 Tahun Lulus SMA/SMK Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,37	96,34	81,74
Sumatera Utara	98,66	94,19	79,15
Sumatera Barat	98,11	93,67	81,84
Riau	96,92	90,22	79,48
Jambi	97,63	95,43	81,04
Sumatera Selatan	97,63	93,42	81,31
Bengkulu	97,97	93,47	83,28
Lampung	97,15	92,80	79,97
Kep. Bangka Belitung	96,10	86,17	79,57
Kepulauan Riau	97,38	94,36	86,06
DKI Jakarta	97,94	94,26	91,20
Jawa Barat	99,17	92,29	75,24
Jawa Tengah	98,50	93,64	75,53
DI Yogyakarta	98,35	96,74	92,40
Jawa Timur	98,71	95,46	78,87
Banten	98,88	94,39	80,97
Bali	98,85	94,75	88,59
Nusa Tenggara Barat	98,03	95,82	79,59
Nusa Tenggara Timur	93,82	90,57	79,00
Kalimantan Barat	96,32	91,18	74,09
Kalimantan Tengah	97,68	93,14	77,42
Kalimantan Selatan	97,87	89,41	78,69
Kalimantan Timur	98,53	95,02	78,98
Kalimantan Utara	97,15	95,37	78,55
Sulawesi Utara	97,90	93,16	75,26
Sulawesi Tengah	98,81	92,69	80,87
Sulawesi Selatan	98,61	92,85	79,82
Sulawesi Tenggara	95,79	94,11	83,66
Gorontalo	96,30	89,28	78,87
Sulawesi Barat	97,59	82,98	68,66
Maluku	98,60	96,78	86,97
Maluku Utara	97,51	97,77	89,97
Papua Barat	91,55	86,63	67,15
Papua Barat Daya	93,77	93,04	77,10
Papua	93,37	84,17	80,94
Papua Selatan	96,55	86,52	89,44
Papua Tengah	98,18	89,61	77,03
Papua Pegunungan	NA	NA	NA
Indonesia	**98,41**	**93,47**	**79,36**

Catatan: NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.7 Tingkat Penyelesaian Pendidikan di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025

Provinsi	Umur 13–15 Tahun Lulus SD Sederajat	Umur 16–18 Tahun Lulus SMP Sederajat	Umur 19–21 Tahun Lulus SMA/SMK Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	98,65	92,20	70,95
Sumatera Utara	98,93	92,55	76,66
Sumatera Barat	94,61	88,70	59,08
Riau	95,33	86,80	68,49
Jambi	95,84	86,94	68,16
Sumatera Selatan	96,64	86,49	61,89
Bengkulu	96,66	90,87	69,42
Lampung	98,52	90,43	66,81
Kep. Bangka Belitung	92,57	81,87	68,81
Kepulauan Riau	98,36	91,98	61,31
DKI Jakarta	–	–	–
Jawa Barat	98,44	90,34	59,96
Jawa Tengah	97,47	92,29	65,21
DI Yogyakarta	100,00	98,16	93,46
Jawa Timur	98,32	90,82	68,90
Banten	98,83	82,99	50,44
Bali	99,06	96,32	75,74
Nusa Tenggara Barat	98,09	91,17	69,84
Nusa Tenggara Timur	94,70	82,31	51,23
Kalimantan Barat	94,89	84,31	54,27
Kalimantan Tengah	96,89	87,85	60,98
Kalimantan Selatan	97,00	87,05	67,60
Kalimantan Timur	96,18	89,99	75,42
Kalimantan Utara	96,56	78,59	64,68
Sulawesi Utara	97,68	90,81	68,11
Sulawesi Tengah	96,45	87,05	61,85
Sulawesi Selatan	97,73	88,72	66,66
Sulawesi Tenggara	97,56	90,17	67,14
Gorontalo	92,68	77,31	54,24
Sulawesi Barat	96,29	83,36	61,66
Maluku	97,04	89,69	70,85
Maluku Utara	95,34	86,72	67,99
Papua Barat	90,52	80,07	50,25
Papua Barat Daya	89,07	75,22	54,56
Papua	85,94	74,60	53,47
Papua Selatan	73,83	57,08	25,42
Papua Tengah	74,17	47,09	22,71
Papua Pegunungan	70,72	56,35	28,12
Indonesia	**96,62**	**88,37**	**64,40**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.8 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Penduduk Laki-Laki Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025

Provinsi	Umur 13–15 Tahun Lulus SD Sederajat	Umur 16–18 Tahun Lulus SMP Sederajat	Umur 19–21 Tahun Lulus SMA/SMK Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	98,69	92,14	71,43
Sumatera Utara	98,40	93,26	76,16
Sumatera Barat	94,98	87,59	65,96
Riau	94,64	85,44	71,68
Jambi	95,62	89,32	68,62
Sumatera Selatan	97,11	86,87	64,10
Bengkulu	95,79	89,89	69,91
Lampung	97,42	89,43	69,23
Kep. Bangka Belitung	93,53	80,81	71,51
Kepulauan Riau	97,84	92,35	84,86
DKI Jakarta	97,83	95,33	88,27
Jawa Barat	98,93	90,55	71,08
Jawa Tengah	98,25	91,75	67,20
DI Yogyakarta	98,59	95,98	90,16
Jawa Timur	98,58	92,21	73,49
Banten	98,56	89,49	75,55
Bali	98,45	94,53	84,57
Nusa Tenggara Barat	98,41	92,50	76,88
Nusa Tenggara Timur	93,86	82,38	55,78
Kalimantan Barat	93,51	80,93	57,57
Kalimantan Tengah	96,46	89,29	61,97
Kalimantan Selatan	97,42	88,27	69,89
Kalimantan Timur	98,37	91,34	76,88
Kalimantan Utara	97,09	88,70	68,53
Sulawesi Utara	97,24	89,16	71,76
Sulawesi Tengah	96,70	84,84	65,91
Sulawesi Selatan	97,91	89,37	69,44
Sulawesi Tenggara	95,73	90,40	69,82
Gorontalo	90,67	79,33	62,79
Sulawesi Barat	96,19	78,56	61,86
Maluku	97,96	90,53	79,04
Maluku Utara	94,49	89,12	74,83
Papua Barat	90,10	77,91	51,89
Papua Barat Daya	90,15	83,47	62,10
Papua	89,34	79,48	71,99
Papua Selatan	83,02	69,35	44,56
Papua Tengah	77,70	53,15	35,23
Papua Pegunungan	70,06	57,54	31,78
Indonesia	**97,36**	**89,83**	**71,25**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.9 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Penduduk Perempuan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025

Provinsi	Umur 13–15 Tahun Lulus SD Sederajat	Umur 16–18 Tahun Lulus SMP Sederajat	Umur 19–21 Tahun Lulus SMA/SMK Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,15	95,28	78,51
Sumatera Utara	99,13	93,80	80,30
Sumatera Barat	97,95	95,45	79,07
Riau	97,38	91,23	74,96
Jambi	97,30	90,41	76,75
Sumatera Selatan	96,93	91,56	77,18
Bengkulu	98,44	93,80	80,39
Lampung	98,77	93,30	75,20
Kep. Bangka Belitung	95,71	88,15	78,76
Kepulauan Riau	97,10	96,26	84,91
DKI Jakarta	98,06	93,26	94,12
Jawa Barat	99,11	93,42	74,75
Jawa Tengah	97,81	94,36	75,35
DI Yogyakarta	98,82	98,12	94,70
Jawa Timur	98,51	94,89	76,59
Banten	99,22	95,04	76,33
Bali	99,35	95,85	87,44
Nusa Tenggara Barat	97,71	94,98	74,34
Nusa Tenggara Timur	95,09	87,32	65,12
Kalimantan Barat	97,53	93,33	66,12
Kalimantan Tengah	98,00	91,51	74,86
Kalimantan Selatan	97,48	88,24	77,04
Kalimantan Timur	96,97	95,77	79,11
Kalimantan Utara	96,75	90,12	80,47
Sulawesi Utara	98,37	95,54	73,33
Sulawesi Tengah	97,84	93,26	72,99
Sulawesi Selatan	98,40	92,39	77,97
Sulawesi Tenggara	98,03	93,29	80,50
Gorontalo	97,90	87,50	71,31
Sulawesi Barat	96,93	88,10	64,62
Maluku	97,48	95,39	79,66
Maluku Utara	97,31	90,89	77,53
Papua Barat	91,71	87,02	59,46
Papua Barat Daya	93,57	87,18	75,59
Papua	90,73	81,11	70,98
Papua Selatan	78,85	70,24	48,13
Papua Tengah	82,14	57,82	33,35
Papua Pegunungan	74,25	55,01	23,57
Indonesia	**97,97**	**93,12**	**76,63**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.10 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2025

Provinsi	Umur 13–15 Tahun Lulus SD Sederajat	Umur 16–18 Tahun Lulus SMP Sederajat	Umur 19–21 Tahun Lulus SMA/SMK Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	98,91	93,72	74,85
Sumatera Utara	98,78	93,51	78,21
Sumatera Barat	96,47	91,45	72,36
Riau	95,95	88,21	73,25
Jambi	96,42	89,87	72,48
Sumatera Selatan	97,02	89,23	70,22
Bengkulu	97,16	91,78	75,09
Lampung	98,07	91,32	71,96
Kep. Bangka Belitung	94,66	84,40	75,01
Kepulauan Riau	97,47	94,19	84,88
DKI Jakarta	97,94	94,26	91,20
Jawa Barat	99,02	91,96	72,92
Jawa Tengah	98,04	93,03	71,26
DI Yogyakarta	98,70	97,06	92,55
Jawa Timur	98,54	93,53	75,03
Banten	98,87	92,34	75,94
Bali	98,91	95,16	85,90
Nusa Tenggara Barat	98,06	93,68	75,56
Nusa Tenggara Timur	94,48	84,83	60,32
Kalimantan Barat	95,44	87,01	61,99
Kalimantan Tengah	97,23	90,36	68,22
Kalimantan Selatan	97,45	88,26	73,24
Kalimantan Timur	97,71	93,61	77,94
Kalimantan Utara	96,91	89,39	74,17
Sulawesi Utara	97,81	92,18	72,47
Sulawesi Tengah	97,27	89,09	69,39
Sulawesi Selatan	98,15	90,86	73,71
Sulawesi Tenggara	96,86	91,83	74,91
Gorontalo	94,28	83,38	66,85
Sulawesi Barat	96,57	83,29	63,12
Maluku	97,73	92,99	79,34
Maluku Utara	95,95	89,93	76,07
Papua Barat	90,83	82,14	55,50
Papua Barat Daya	91,78	85,15	68,64
Papua	90,03	80,22	71,53
Papua Selatan	81,01	69,79	46,28
Papua Tengah	79,63	55,49	34,37
Papua Pegunungan	72,10	56,39	28,30
Indonesia	**97,65**	**91,45**	**73,90**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.11 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025

Provinsi	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD Sederajat	Tamat SMP Sederajat	Tamat SMA/SMK Sederajat	Tamat Pendidikan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,59	2,40	12,81	21,77	40,78	21,65
Sumatera Utara	0,57	3,74	14,40	22,04	45,57	13,69
Sumatera Barat	0,71	6,86	14,80	21,68	38,43	17,53
Riau	0,75	4,11	14,67	20,93	41,85	17,69
Jambi	1,18	4,95	16,47	21,02	38,09	18,30
Sumatera Selatan	0,77	5,65	16,68	19,50	39,15	18,26
Bengkulu	0,91	4,42	13,29	18,74	38,24	24,40
Lampung	1,04	8,15	18,04	22,77	36,48	13,52
Kep. Bangka Belitung	0,94	8,72	20,01	19,28	37,20	13,84
Kepulauan Riau	0,85	3,81	13,44	18,93	47,73	15,24
DKI Jakarta	0,63	2,09	11,92	18,70	45,85	20,82
Jawa Barat	1,36	6,21	23,12	22,39	35,42	11,50
Jawa Tengah	2,92	9,11	23,40	23,23	30,11	11,23
DI Yogyakarta	1,65	5,51	11,91	18,78	41,66	20,48
Jawa Timur	2,84	7,60	22,15	21,27	33,54	12,61
Banten	1,55	4,33	19,08	23,48	38,56	13,01
Bali	3,05	4,29	15,89	19,90	37,82	19,04
Nusa Tenggara Barat	4,99	9,95	19,34	21,19	30,88	13,65
Nusa Tenggara Timur	0,74	6,88	15,83	21,30	34,42	20,83
Kalimantan Barat	3,18	9,37	17,98	20,49	34,56	14,41
Kalimantan Tengah	0,87	4,75	19,87	23,63	33,15	17,73
Kalimantan Selatan	0,74	8,03	20,69	20,60	33,60	16,34
Kalimantan Timur	0,95	5,02	13,91	20,41	44,01	15,69
Kalimantan Utara	1,28	7,12	18,97	20,68	37,34	14,62
Sulawesi Utara	0,31	6,47	13,87	21,26	44,20	13,89
Sulawesi Tengah	0,94	3,57	18,65	24,21	35,23	17,41
Sulawesi Selatan	2,40	7,28	16,54	19,22	34,92	19,64
Sulawesi Tenggara	1,32	4,49	12,30	25,72	33,37	22,79
Gorontalo	NA	14,25	18,06	20,05	30,75	16,20
Sulawesi Barat	2,58	8,33	21,68	17,46	28,75	21,20
Maluku	0,56	2,20	11,61	17,30	45,50	22,84
Maluku Utara	0,66	4,13	10,67	20,36	44,32	19,86
Papua Barat	NA	3,84	13,49	21,49	40,38	19,78
Papua Barat Daya	NA	2,75	12,87	19,29	46,80	17,90
Papua	1,70	3,09	10,76	18,07	45,22	21,16
Papua Selatan	3,01	4,36	10,97	18,67	41,91	21,09
Papua Tengah	1,73	5,86	9,99	15,75	49,51	17,15
Papua Pegunungan	NA	NA	16,05	15,98	34,31	NA
Indonesia	**1,74**	**6,18**	**19,33**	**21,58**	**36,84**	**14,33**

Catatan: NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.12 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025

Provinsi	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD Sederajat	Tamat SMP Sederajat	Tamat SMA/SMK Sederajat	Tamat Pendidikan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1,22	4,70	23,25	26,70	34,43	9,71
Sumatera Utara	2,22	8,70	20,54	25,44	35,62	7,48
Sumatera Barat	0,92	13,57	22,78	24,40	28,55	9,78
Riau	2,76	7,77	29,30	24,86	28,13	7,18
Jambi	2,96	11,91	28,60	23,78	26,02	6,73
Sumatera Selatan	1,98	12,99	31,63	23,39	24,71	5,29
Bengkulu	2,17	13,60	25,31	23,95	26,70	8,26
Lampung	1,58	12,76	28,46	28,26	24,21	4,74
Kep. Bangka Belitung	3,65	17,29	33,34	18,35	21,34	6,02
Kepulauan Riau	5,71	18,00	28,60	18,78	21,67	7,24
DKI Jakarta	–	–	–	–	–	–
Jawa Barat	1,89	10,48	43,62	24,86	15,94	3,21
Jawa Tengah	4,37	13,09	32,77	25,82	19,67	4,27
DI Yogyakarta	5,46	10,76	20,71	26,88	30,08	6,11
Jawa Timur	6,82	13,48	31,90	22,42	20,53	4,84
Banten	2,98	9,98	44,84	23,14	16,11	2,95
Bali	7,06	8,88	27,21	21,77	26,84	8,24
Nusa Tenggara Barat	7,33	14,29	26,45	21,10	21,62	9,21
Nusa Tenggara Timur	4,83	14,58	32,36	20,68	18,42	9,13
Kalimantan Barat	5,23	15,96	29,95	23,10	20,86	4,90
Kalimantan Tengah	1,18	10,01	36,17	24,81	22,53	5,29
Kalimantan Selatan	1,68	16,69	31,34	22,24	22,50	5,55
Kalimantan Timur	1,58	9,56	28,32	23,01	31,01	6,53
Kalimantan Utara	4,02	12,82	27,81	20,72	24,73	9,91
Sulawesi Utara	0,68	11,81	24,30	24,62	30,94	7,65
Sulawesi Tengah	3,01	7,55	34,08	25,43	22,29	7,64
Sulawesi Selatan	6,31	13,93	27,48	20,18	22,82	9,29
Sulawesi Tenggara	3,86	9,86	24,88	26,00	24,51	10,89
Gorontalo	1,08	25,10	29,33	18,36	18,27	7,86
Sulawesi Barat	3,91	13,67	28,59	20,73	22,74	10,36
Maluku	2,33	6,00	25,27	23,78	32,90	9,72
Maluku Utara	1,74	12,49	26,40	23,86	26,05	9,47
Papua Barat	5,95	10,37	21,46	20,85	31,44	9,93
Papua Barat Daya	4,03	9,58	23,83	19,81	27,54	15,21
Papua	7,78	6,36	21,89	23,00	32,25	8,71
Papua Selatan	11,52	16,67	26,99	21,07	20,22	3,53
Papua Tengah	38,72	10,06	21,64	13,73	13,65	2,20
Papua Pegunungan	49,11	5,29	16,46	15,02	11,46	2,66
Indonesia	**4,51**	**12,01**	**30,71**	**23,82**	**22,91**	**6,03**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.13 Persentase Penduduk Laki-Laki Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025

Provinsi	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD Sederajat	Tamat SMP Sederajat	Tamat SMA/SMK Sederajat	Tamat Pendidikan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,74	2,94	19,05	25,72	40,39	11,17
Sumatera Utara	0,83	4,88	16,37	24,29	44,05	9,57
Sumatera Barat	0,64	9,78	20,40	23,93	34,82	10,43
Riau	1,50	5,58	23,37	23,91	36,66	8,98
Jambi	1,43	8,58	24,70	22,92	33,54	8,84
Sumatera Selatan	1,02	8,82	26,20	22,21	33,22	8,53
Bengkulu	0,93	9,53	21,62	23,27	32,93	11,73
Lampung	0,81	10,28	25,10	26,55	30,32	6,94
Kep. Bangka Belitung	1,53	12,14	26,02	18,66	32,43	9,23
Kepulauan Riau	0,69	4,38	14,45	18,18	49,21	13,10
DKI Jakarta	0,48	1,39	10,30	18,59	48,59	20,66
Jawa Barat	0,84	6,26	26,37	22,14	34,69	9,69
Jawa Tengah	2,00	9,86	28,21	25,29	27,48	7,15
DI Yogyakarta	1,03	5,77	14,60	21,28	41,93	15,38
Jawa Timur	2,88	8,73	26,17	21,95	31,72	8,55
Banten	1,07	4,47	22,72	23,09	38,09	10,56
Bali	2,24	4,67	16,86	20,65	38,15	17,43
Nusa Tenggara Barat	4,13	10,57	21,90	20,77	30,60	12,01
Nusa Tenggara Timur	3,16	12,34	27,33	21,42	24,70	11,04
Kalimantan Barat	2,75	12,94	26,15	21,69	28,70	7,76
Kalimantan Tengah	0,75	6,94	28,25	24,68	29,71	9,67
Kalimantan Selatan	0,78	10,27	25,87	21,66	31,58	9,84
Kalimantan Timur	0,81	5,25	16,88	21,23	44,06	11,76
Kalimantan Utara	1,75	8,53	22,77	21,02	34,00	11,93
Sulawesi Utara	0,40	8,97	18,98	22,82	39,71	9,11
Sulawesi Tengah	1,71	6,12	29,81	24,41	28,60	9,35
Sulawesi Selatan	3,72	10,57	22,51	19,85	30,82	12,52
Sulawesi Tenggara	2,03	6,85	19,88	26,71	30,82	13,71
Gorontalo	0,90	23,21	23,93	19,08	24,69	8,20
Sulawesi Barat	2,46	12,84	27,70	19,76	26,37	10,87
Maluku	0,98	3,87	18,85	21,34	41,79	13,17
Maluku Utara	1,33	8,72	20,95	23,20	34,82	10,99
Papua Barat	3,46	7,39	18,50	20,94	36,60	13,10
Papua Barat Daya	1,81	5,00	15,44	20,56	40,92	16,27
Papua	3,00	3,77	13,41	20,87	43,62	15,33
Papua Selatan	6,63	10,32	19,37	22,14	32,64	8,90
Papua Tengah	28,69	8,85	19,25	14,18	23,39	5,64
Papua Pegunungan	41,37	5,95	16,80	15,89	16,11	3,88
Indonesia	**1,91**	**7,64**	**23,70**	**22,62**	**34,11**	**10,02**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.14 Persentase Penduduk Perempuan Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025

Provinsi	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD Sederajat	Tamat SMP Sederajat	Tamat SMA/SMK Sederajat	Tamat Pendidikan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1,25	4,78	19,93	24,14	33,12	16,79
Sumatera Utara	1,66	6,64	17,45	22,59	38,97	12,69
Sumatera Barat	0,97	10,25	16,73	22,00	32,78	17,26
Riau	2,40	7,00	23,32	22,59	30,68	14,02
Jambi	3,30	10,54	24,27	22,76	26,62	12,50
Sumatera Selatan	2,02	11,52	25,50	21,56	27,29	12,11
Bengkulu	2,59	11,45	20,80	21,05	28,26	15,85
Lampung	2,00	12,07	24,58	26,16	26,54	8,65
Kep. Bangka Belitung	2,59	12,29	24,82	19,17	28,96	12,17
Kepulauan Riau	1,74	5,37	14,67	19,68	42,29	16,25
DKI Jakarta	0,77	2,77	13,49	18,80	43,20	20,97
Jawa Barat	2,09	7,80	27,71	23,60	28,66	10,15
Jawa Tengah	5,13	11,98	27,20	23,56	23,23	8,90
DI Yogyakarta	4,05	7,75	13,50	20,21	35,92	18,58
Jawa Timur	6,13	11,44	26,44	21,58	24,41	10,01
Banten	2,55	6,17	24,44	23,76	31,11	11,96
Bali	6,00	6,34	20,92	20,14	31,67	14,93
Nusa Tenggara Barat	7,96	13,32	23,37	21,52	22,67	11,17
Nusa Tenggara Timur	4,20	12,53	28,15	20,31	21,13	13,68
Kalimantan Barat	6,14	13,85	24,42	22,48	23,64	9,47
Kalimantan Tengah	1,35	8,43	29,58	23,87	24,69	12,10
Kalimantan Selatan	1,63	14,29	25,95	21,15	24,72	12,27
Kalimantan Timur	1,49	7,59	19,67	21,15	35,93	14,17
Kalimantan Utara	2,85	9,93	21,57	20,34	31,36	13,96
Sulawesi Utara	0,54	8,53	17,66	22,57	37,30	13,39
Sulawesi Tengah	2,90	6,25	27,77	25,62	24,80	12,65
Sulawesi Selatan	5,07	10,85	21,89	19,59	26,65	15,95
Sulawesi Tenggara	3,67	8,62	19,96	25,09	25,26	17,40
Gorontalo	0,87	16,71	24,04	19,25	23,70	15,43
Sulawesi Barat	4,81	12,32	26,66	20,37	21,58	14,27
Maluku	2,01	4,54	18,80	20,09	35,91	18,66
Maluku Utara	1,49	11,22	22,32	22,38	28,29	14,28
Papua Barat	5,43	9,33	19,43	21,17	31,67	12,97
Papua Barat Daya	2,05	6,31	19,69	18,37	36,28	17,30
Papua	5,18	4,98	16,85	19,04	36,54	17,40
Papua Selatan	10,12	13,88	22,65	18,06	23,83	11,46
Papua Tengah	32,41	9,43	18,78	14,19	19,74	5,45
Papua Pegunungan	51,66	5,66	16,01	14,21	10,01	2,46
Indonesia	**3,78**	**9,40**	**24,09**	**22,34**	**28,42**	**11,98**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.15 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025

Provinsi	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD Sederajat	Tamat SMP Sederajat	Tamat SMA/SMK Sederajat	Tamat Pendidikan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1,00	3,87	19,49	24,92	36,71	14,01
Sumatera Utara	1,24	5,77	16,91	23,43	41,49	11,14
Sumatera Barat	0,81	10,02	18,55	22,96	33,79	13,89
Riau	1,94	6,28	23,34	23,26	33,72	11,46
Jambi	2,35	9,55	24,48	22,84	30,11	10,66
Sumatera Selatan	1,51	10,16	25,85	21,89	30,29	10,30
Bengkulu	1,74	10,47	21,22	22,18	30,63	13,76
Lampung	1,39	11,16	24,85	26,35	28,47	7,78
Kep. Bangka Belitung	2,04	12,21	25,44	18,90	30,75	10,66
Kepulauan Riau	1,21	4,86	14,56	18,92	45,80	14,65
DKI Jakarta	0,63	2,09	11,92	18,70	45,85	20,82
Jawa Barat	1,46	7,02	27,03	22,86	31,70	9,92
Jawa Tengah	3,59	10,94	27,70	24,42	25,33	8,04
DI Yogyakarta	2,57	6,78	14,04	20,74	38,86	17,01
Jawa Timur	4,54	10,11	26,31	21,76	27,99	9,29
Banten	1,80	5,31	23,57	23,42	34,64	11,25
Bali	4,11	5,50	18,88	20,40	34,92	16,19
Nusa Tenggara Barat	6,08	11,97	22,65	21,15	26,57	11,59
Nusa Tenggara Timur	3,69	12,44	27,75	20,85	22,88	12,39
Kalimantan Barat	4,43	13,39	25,29	22,08	26,20	8,61
Kalimantan Tengah	1,04	7,66	28,89	24,28	27,28	10,85
Kalimantan Selatan	1,20	12,28	25,91	21,40	28,16	11,05
Kalimantan Timur	1,14	6,39	18,24	21,19	40,10	12,94
Kalimantan Utara	2,28	9,20	22,19	20,69	32,74	12,90
Sulawesi Utara	0,47	8,76	18,33	22,70	38,52	11,22
Sulawesi Tengah	2,30	6,19	28,80	25,01	26,72	10,98
Sulawesi Selatan	4,42	10,71	22,19	19,71	28,66	14,29
Sulawesi Tenggara	2,86	7,75	19,92	25,89	28,00	15,58
Gorontalo	0,89	19,95	23,98	19,16	24,19	11,82
Sulawesi Barat	3,64	12,58	27,18	20,07	23,97	12,57
Maluku	1,49	4,21	18,82	20,72	38,85	15,91
Maluku Utara	1,41	9,96	21,63	22,80	31,58	12,62
Papua Barat	4,39	8,31	18,95	21,05	34,26	13,04
Papua Barat Daya	1,93	5,63	17,48	19,51	38,69	16,77
Papua	4,06	4,36	15,07	19,98	40,19	16,33
Papua Selatan	8,32	12,04	20,96	20,17	28,38	10,14
Papua Tengah	30,42	9,12	19,03	14,19	21,69	5,55
Papua Pegunungan	46,25	5,81	16,43	15,09	13,21	3,21
Indonesia	**2,85**	**8,52**	**23,90**	**22,48**	**31,25**	**11,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.16 Angka Melek Huruf (AMH) di Perkotaan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	15–24 Tahun	15–59 Tahun	15 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,87	99,92	99,59
Sumatera Utara	99,91	99,79	99,52
Sumatera Barat	99,94	99,88	99,43
Riau	99,93	99,94	99,54
Jambi	99,83	99,73	98,66
Sumatera Selatan	99,92	99,93	99,50
Bengkulu	99,97	99,74	99,08
Lampung	99,63	99,69	98,89
Kep. Bangka Belitung	NA	99,48	98,89
Kepulauan Riau	99,96	99,93	99,76
DKI Jakarta	99,95	99,92	99,71
Jawa Barat	99,98	99,83	99,03
Jawa Tengah	99,95	99,44	96,40
DI Yogyakarta	99,93	99,52	97,16
Jawa Timur	99,98	99,85	97,18
Banten	99,94	99,95	99,23
Bali	99,95	99,94	97,64
Nusa Tenggara Barat	99,83	96,78	92,84
Nusa Tenggara Timur	99,92	99,72	98,49
Kalimantan Barat	99,93	99,33	97,34
Kalimantan Tengah	99,79	99,92	99,40
Kalimantan Selatan	99,94	99,93	98,92
Kalimantan Timur	99,89	99,77	99,08
Kalimantan Utara	99,80	99,67	99,00
Sulawesi Utara	99,85	99,96	99,83
Sulawesi Tengah	99,53	99,85	99,55
Sulawesi Selatan	99,92	99,00	97,48
Sulawesi Tenggara	99,79	99,83	98,73
Gorontalo	99,67	99,60	99,45
Sulawesi Barat	99,67	98,90	97,54
Maluku	99,91	99,89	99,85
Maluku Utara	99,66	99,86	99,65
Papua Barat	99,69	99,78	99,70
Papua Barat Daya	99,62	99,71	99,60
Papua	NA	99,86	99,32
Papua Selatan	99,82	99,77	99,27
Papua Tengah	99,39	99,57	99,20
Papua Pegunungan	NA	92,14	90,79
Indonesia	**99,93**	**99,71**	**98,35**

Catatan: NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.17 Angka Melek Huruf (AMH) di Perdesaan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	15–24 Tahun	15–59 Tahun	15 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,94	99,49	98,54
Sumatera Utara	99,96	99,31	98,27
Sumatera Barat	99,89	99,58	98,69
Riau	99,96	99,46	98,62
Jambi	99,87	98,95	97,05
Sumatera Selatan	99,95	99,44	98,50
Bengkulu	99,79	99,12	97,15
Lampung	99,94	99,28	97,27
Kep. Bangka Belitung	99,84	98,79	97,20
Kepulauan Riau	99,74	97,85	95,70
DKI Jakarta	–	–	–
Jawa Barat	99,94	99,74	98,33
Jawa Tengah	99,92	98,48	93,79
DI Yogyakarta	99,81	98,59	92,08
Jawa Timur	99,89	97,57	91,71
Banten	100,00	99,59	97,89
Bali	99,82	98,03	93,04
Nusa Tenggara Barat	99,87	94,37	89,03
Nusa Tenggara Timur	99,52	97,27	94,93
Kalimantan Barat	99,90	98,53	95,29
Kalimantan Tengah	99,88	99,60	99,00
Kalimantan Selatan	99,90	99,18	96,67
Kalimantan Timur	100,00	99,73	98,69
Kalimantan Utara	99,61	98,68	96,63
Sulawesi Utara	99,94	99,84	99,75
Sulawesi Tengah	99,90	98,80	97,79
Sulawesi Selatan	99,78	96,73	92,78
Sulawesi Tenggara	99,91	98,71	96,24
Gorontalo	99,91	98,53	97,72
Sulawesi Barat	99,60	97,67	95,13
Maluku	99,91	99,36	98,90
Maluku Utara	99,95	99,43	98,52
Papua Barat	99,76	97,74	97,16
Papua Barat Daya	99,81	98,66	97,17
Papua	99,50	98,12	96,93
Papua Selatan	97,31	94,70	92,86
Papua Tengah	88,10	83,03	81,96
Papua Pegunungan	89,85	67,48	66,46
Indonesia	**99,65**	**98,12**	**95,23**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.18 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Laki-Laki Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	15–24 Tahun	15–59 Tahun	15 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,90	99,75	99,44
Sumatera Utara	99,97	99,71	99,40
Sumatera Barat	99,86	99,81	99,44
Riau	99,97	99,83	99,47
Jambi	99,88	99,33	98,72
Sumatera Selatan	99,91	99,71	99,35
Bengkulu	99,76	99,55	98,81
Lampung	99,88	99,51	98,65
Kep. Bangka Belitung	100,00	99,52	98,96
Kepulauan Riau	99,92	99,85	99,74
DKI Jakarta	99,90	99,94	99,81
Jawa Barat	99,97	99,88	99,43
Jawa Tengah	99,88	99,30	97,10
DI Yogyakarta	99,92	99,39	97,84
Jawa Timur	99,93	99,32	96,96
Banten	100,00	99,93	99,49
Bali	99,92	99,85	98,25
Nusa Tenggara Barat	100,00	96,81	94,18
Nusa Tenggara Timur	99,58	97,96	96,52
Kalimantan Barat	99,94	99,37	97,58
Kalimantan Tengah	99,77	99,76	99,48
Kalimantan Selatan	99,95	99,77	98,79
Kalimantan Timur	99,85	99,85	99,38
Kalimantan Utara	99,66	99,59	98,67
Sulawesi Utara	99,87	99,90	99,80
Sulawesi Tengah	99,85	99,35	98,87
Sulawesi Selatan	99,83	97,94	95,98
Sulawesi Tenggara	99,90	99,36	98,45
Gorontalo	99,59	98,46	98,09
Sulawesi Barat	99,83	98,66	97,14
Maluku	100,00	99,71	99,60
Maluku Utara	99,93	99,57	99,26
Papua Barat	100,00	99,04	98,67
Papua Barat Daya	99,50	99,36	98,90
Papua	99,86	99,47	98,99
Papua Selatan	98,74	98,22	97,11
Papua Tengah	90,08	87,49	86,48
Papua Pegunungan	91,03	73,06	71,88
Indonesia	**99,82**	**99,30**	**98,18**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.19 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Perempuan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	15–24 Tahun	15–59 Tahun	15 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,92	99,54	98,41
Sumatera Utara	99,89	99,48	98,62
Sumatera Barat	99,98	99,68	98,72
Riau	99,92	99,47	98,51
Jambi	99,83	99,10	96,44
Sumatera Selatan	99,97	99,54	98,41
Bengkulu	99,95	99,12	96,76
Lampung	99,78	99,33	96,99
Kep. Bangka Belitung	99,86	98,85	97,40
Kepulauan Riau	99,97	99,73	99,18
DKI Jakarta	100,00	99,89	99,61
Jawa Barat	99,97	99,75	98,35
Jawa Tengah	99,99	98,71	93,36
DI Yogyakarta	99,90	99,24	94,11
Jawa Timur	99,96	98,48	92,82
Banten	99,89	99,84	98,50
Bali	99,92	99,06	94,58
Nusa Tenggara Barat	99,70	94,52	88,06
Nusa Tenggara Timur	99,70	97,98	95,34
Kalimantan Barat	99,88	98,30	94,57
Kalimantan Tengah	99,92	99,73	98,86
Kalimantan Selatan	99,89	99,35	96,85
Kalimantan Timur	100,00	99,66	98,52
Kalimantan Utara	99,82	99,02	97,56
Sulawesi Utara	99,89	99,92	99,80
Sulawesi Tengah	99,67	98,99	97,90
Sulawesi Selatan	99,88	97,76	94,19
Sulawesi Tenggara	99,81	98,97	96,04
Gorontalo	100,00	99,64	98,99
Sulawesi Barat	99,40	97,17	94,11
Maluku	99,81	99,51	99,10
Maluku Utara	99,77	99,55	98,46
Papua Barat	99,43	97,66	97,17
Papua Barat Daya	99,92	99,19	98,23
Papua	99,75	98,88	97,76
Papua Selatan	97,63	94,94	93,31
Papua Tengah	91,05	85,75	85,07
Papua Pegunungan	89,85	65,27	64,38
Indonesia	**99,83**	**98,87**	**96,03**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.20 Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	15–24 Tahun	15–59 Tahun	15 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,91	99,65	98,92
Sumatera Utara	99,93	99,60	99,01
Sumatera Barat	99,92	99,74	99,08
Riau	99,95	99,66	99,00
Jambi	99,86	99,22	97,59
Sumatera Selatan	99,94	99,63	98,89
Bengkulu	99,86	99,34	97,80
Lampung	99,83	99,42	97,83
Kep. Bangka Belitung	99,93	99,20	98,20
Kepulauan Riau	99,95	99,79	99,46
DKI Jakarta	99,95	99,92	99,71
Jawa Barat	99,97	99,81	98,90
Jawa Tengah	99,94	99,00	95,20
DI Yogyakarta	99,91	99,32	95,93
Jawa Timur	99,94	98,90	94,85
Banten	99,95	99,89	99,00
Bali	99,92	99,46	96,42
Nusa Tenggara Barat	99,85	95,66	91,07
Nusa Tenggara Timur	99,64	97,97	95,92
Kalimantan Barat	99,91	98,84	96,09
Kalimantan Tengah	99,84	99,74	99,18
Kalimantan Selatan	99,92	99,56	97,82
Kalimantan Timur	99,93	99,76	98,96
Kalimantan Utara	99,74	99,32	98,14
Sulawesi Utara	99,88	99,91	99,80
Sulawesi Tengah	99,76	99,17	98,39
Sulawesi Selatan	99,85	97,85	95,05
Sulawesi Tenggara	99,86	99,16	97,22
Gorontalo	99,79	99,04	98,54
Sulawesi Barat	99,61	97,92	95,62
Maluku	99,91	99,61	99,35
Maluku Utara	99,85	99,56	98,86
Papua Barat	99,74	98,38	97,96
Papua Barat Daya	99,70	99,27	98,58
Papua	99,81	99,19	98,39
Papua Selatan	98,21	96,63	95,27
Papua Tengah	90,52	86,68	85,82
Papua Pegunungan	90,48	69,32	68,32
Indonesia	**99,83**	**99,08**	**97,10**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.21 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	11,51	9,81	10,44	10,40	10,42
Sumatera Utara	10,89	9,43	10,37	10,21	10,29
Sumatera Barat	10,80	9,17	9,78	10,28	10,03
Riau	11,06	8,93	9,80	9,80	9,80
Jambi	10,84	8,54	9,45	9,19	9,32
Sumatera Selatan	10,82	8,30	9,37	9,18	9,28
Bengkulu	11,55	8,76	9,76	9,65	9,71
Lampung	10,15	8,39	9,11	8,88	9,00
Kep. Bangka Belitung	10,06	7,67	9,08	9,09	9,09
Kepulauan Riau	11,02	7,77	10,87	10,70	10,78
DKI Jakarta	11,58	–	11,78	11,39	11,58
Jawa Barat	9,88	7,69	9,68	9,25	9,46
Jawa Tengah	9,33	7,77	8,84	8,40	8,62
DI Yogyakarta	11,20	8,63	10,76	10,40	10,58
Jawa Timur	9,70	7,61	9,13	8,50	8,81
Banten	10,31	7,53	10,05	9,60	9,82
Bali	10,65	8,46	10,55	9,58	10,07
Nusa Tenggara Barat	9,50	8,15	9,35	8,41	8,87
Nusa Tenggara Timur	10,91	8,09	8,92	8,84	8,88
Kalimantan Barat	9,86	7,69	8,73	8,35	8,54
Kalimantan Tengah	10,56	8,40	9,45	9,28	9,36
Kalimantan Selatan	10,22	8,07	9,36	8,97	9,17
Kalimantan Timur	10,87	8,97	10,47	10,12	10,30
Kalimantan Utara	10,31	8,61	9,72	9,66	9,69
Sulawesi Utara	10,77	9,20	9,93	10,27	10,10
Sulawesi Tengah	10,80	8,64	9,34	9,42	9,38
Sulawesi Selatan	10,62	8,21	9,39	9,37	9,38
Sulawesi Tenggara	11,26	9,01	9,99	9,81	9,90
Gorontalo	9,93	7,74	8,26	9,30	8,78
Sulawesi Barat	10,32	8,55	8,97	8,86	8,91
Maluku	11,83	9,56	10,58	10,69	10,63
Maluku Utara	11,50	9,03	9,88	9,68	9,78
Papua Barat	11,30	9,26	10,12	9,67	9,90
Papua Barat Daya	11,40	9,51	10,74	10,45	10,60
Papua	11,60	9,15	10,86	10,42	10,65
Papua Selatan	11,36	7,37	9,19	8,52	8,87
Papua Tengah	11,15	4,86	6,49	6,02	6,27
Papua Pegunungan	8,71	4,43	5,31	4,14	4,76
Indonesia	**10,23**	**8,17**	**9,58**	**9,23**	**9,41**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.22 *Sampling Error* Tingkat Penyelesaian Pendidikan Penduduk Umur 13–15 Tahun Lulus SD Sederajat Menurut Provinsi, Jenjang Pendidikan, dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	99,37	98,86	99,88	0,26	98,65	97,85	99,46	0,42	98,91	98,36	99,46	0,28
Sumatera Utara	98,66	97,66	99,67	0,52	98,93	98,51	99,36	0,22	98,78	98,19	99,37	0,31
Sumatera Barat	98,11	97,21	99,01	0,47	94,61	92,87	96,35	0,94	96,47	95,52	97,42	0,50
Riau	96,92	95,10	98,73	0,95	95,33	93,61	97,05	0,92	95,95	94,68	97,22	0,68
Jambi	97,63	95,65	99,60	1,03	95,84	93,55	98,13	1,22	96,42	94,74	98,10	0,89
Sumatera Selatan	97,63	95,95	99,31	0,88	96,64	95,48	97,80	0,61	97,02	96,06	97,99	0,51
Bengkulu	97,97	96,10	99,83	0,97	96,66	95,07	98,24	0,84	97,16	95,95	98,37	0,64
Lampung	97,15	95,06	99,23	1,10	98,52	97,57	99,47	0,49	98,07	97,14	99,01	0,49
Kepulauan Bangka Belitung	96,10	93,67	98,54	1,29	92,57	89,15	95,98	1,88	94,66	92,66	96,66	1,08
Kepulauan Riau	97,38	95,23	99,53	1,13	98,36	96,64	100,00	0,89	97,47	95,50	99,43	1,03
DKI Jakarta	97,94	96,78	99,09	0,60	–	–	–	–	97,94	96,78	99,09	0,60
Jawa Barat	99,17	98,76	99,57	0,21	98,44	97,38	99,49	0,55	99,02	98,63	99,40	0,20
Jawa Tengah	98,50	97,97	99,04	0,28	97,47	96,44	98,50	0,54	98,04	97,50	98,59	0,28
DI Yogyakarta	98,35	96,86	99,84	0,77	100,00	100,00	100,00	0,00	98,70	97,53	99,87	0,61
Jawa Timur	98,71	98,12	99,30	0,30	98,32	97,42	99,22	0,47	98,54	98,03	99,05	0,26
Banten	98,88	98,03	99,73	0,44	98,83	97,62	100,00	0,63	98,87	98,16	99,58	0,37
Bali	98,85	98,02	99,68	0,43	99,06	98,00	100,00	0,55	98,91	98,24	99,58	0,35
Nusa Tenggara Barat	98,03	96,63	99,43	0,73	98,09	96,63	99,54	0,76	98,06	97,05	99,07	0,53
Nusa Tenggara Timur	93,82	90,34	97,29	1,89	94,70	93,61	95,79	0,59	94,48	93,29	95,67	0,64
Kalimantan Barat	96,32	94,40	98,25	1,02	94,89	93,17	96,60	0,92	95,44	94,15	96,73	0,69
Kalimantan Tengah	97,68	95,56	99,79	1,10	96,89	95,18	98,59	0,90	97,23	95,90	98,57	0,70
Kalimantan Selatan	97,87	96,63	99,11	0,65	97,00	95,47	98,54	0,81	97,45	96,47	98,43	0,51
Kalimantan Timur	98,53	97,23	99,82	0,67	96,18	93,02	99,34	1,67	97,71	96,32	99,10	0,73
Kalimantan Utara	97,15	94,84	99,45	1,21	96,56	94,14	98,97	1,27	96,91	95,23	98,60	0,89
Sulawesi Utara	97,90	96,22	99,58	0,88	97,68	96,57	98,79	0,58	97,81	96,72	98,90	0,57
Sulawesi Tengah	98,81	97,61	100,00	0,62	96,45	95,16	97,73	0,68	97,27	96,34	98,21	0,49
Sulawesi Selatan	98,61	97,61	99,61	0,52	97,73	96,97	98,48	0,39	98,15	97,53	98,77	0,32
Sulawesi Tenggara	95,79	93,57	98,01	1,18	97,56	96,48	98,63	0,56	96,86	95,76	97,95	0,58
Gorontalo	96,30	93,36	99,24	1,56	92,68	89,55	95,81	1,72	94,28	92,10	96,46	1,18
Sulawesi Barat	97,59	95,43	99,75	1,13	96,29	94,59	97,99	0,90	96,57	95,15	97,98	0,75
Maluku	98,60	97,58	99,61	0,53	97,04	95,85	98,23	0,62	97,73	96,93	98,53	0,42
Maluku Utara	97,51	94,68	100,00	1,48	95,34	93,39	97,28	1,04	95,95	94,34	97,56	0,86
Papua Barat	91,55	86,33	96,77	2,91	90,52	86,88	94,15	2,05	90,83	87,85	93,82	1,68
Papua Barat Daya	93,77	87,25	100,00	3,55	89,07	86,27	91,86	1,60	91,78	87,86	95,69	2,18
Papua	93,37	89,67	97,08	2,02	85,94	81,53	90,35	2,62	90,03	87,16	92,90	1,63
Papua Selatan	96,55	92,21	100,00	2,29	73,83	67,88	79,78	4,11	81,01	76,51	85,51	2,83
Papua Tengah	98,18	94,63	100,00	1,84	74,17	70,48	77,85	2,53	79,63	76,63	82,63	1,92
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	0,00	70,72	66,96	74,48	2,71	72,10	68,52	75,68	2,54
Indonesia	**98,41**	**98,20**	**98,62**	**0,11**	**96,62**	**96,34**	**96,89**	**0,15**	**97,65**	**97,49**	**97,82**	**0,09**

Catatan: Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.23 *Sampling Error* Tingkat Penyelesaian Pendidikan Penduduk Umur 16–18 Tahun Lulus SMP Sederajat Menurut Provinsi, Jenjang Pendidikan, dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	96,34	94,70	97,98	0,87	92,20	90,10	94,31	1,17	93,72	92,26	95,19	0,80
Sumatera Utara	94,19	92,38	96,01	0,98	92,55	90,85	94,25	0,94	93,51	92,24	94,78	0,69
Sumatera Barat	93,67	91,77	95,58	1,04	88,70	86,32	91,09	1,37	91,45	89,94	92,95	0,84
Riau	90,22	85,85	94,58	2,47	86,80	83,86	89,75	1,73	88,21	85,73	90,70	1,44
Jambi	95,43	92,93	97,93	1,34	86,94	83,82	90,07	1,83	89,87	87,65	92,09	1,26
Sumatera Selatan	93,42	90,70	96,14	1,48	86,49	83,85	89,12	1,56	89,23	87,31	91,16	1,10
Bengkulu	93,47	89,99	96,94	1,90	90,87	87,99	93,75	1,62	91,78	89,55	94,01	1,24
Lampung	92,80	90,09	95,52	1,49	90,43	87,93	92,94	1,41	91,32	89,45	93,18	1,04
Kepulauan Bangka Belitung	86,17	81,18	91,16	2,95	81,87	76,21	87,54	3,53	84,40	80,65	88,15	2,27
Kepulauan Riau	94,36	90,97	97,74	1,83	91,98	87,78	96,17	2,32	94,19	91,03	97,35	1,71
DKI Jakarta	94,26	91,81	96,70	1,32	–	–	–	–	94,26	91,81	96,70	1,32
Jawa Barat	92,29	90,93	93,65	0,75	90,34	87,19	93,49	1,78	91,96	90,71	93,21	0,69
Jawa Tengah	93,64	92,48	94,80	0,63	92,29	90,57	94,02	0,95	93,03	92,02	94,03	0,55
DI Yogyakarta	96,74	94,99	98,49	0,92	98,16	94,57	101,75	1,86	97,06	95,48	98,63	0,83
Jawa Timur	95,46	94,47	96,45	0,53	90,82	88,80	92,84	1,14	93,53	92,51	94,55	0,56
Banten	94,39	92,56	96,21	0,98	82,99	76,83	89,14	3,78	92,34	90,45	94,23	1,05
Bali	94,75	92,61	96,88	1,15	96,32	94,36	98,27	1,04	95,16	93,49	96,82	0,89
Nusa Tenggara Barat	95,82	94,05	97,58	0,94	91,17	87,81	94,53	1,88	93,68	91,87	95,50	0,99
Nusa Tenggara Timur	90,57	86,95	94,20	2,04	82,31	80,22	84,41	1,30	84,83	83,00	86,67	1,10
Kalimantan Barat	91,18	87,75	94,61	1,92	84,31	81,42	87,20	1,75	87,01	84,79	89,23	1,30
Kalimantan Tengah	93,14	90,15	96,12	1,64	87,85	84,29	91,42	2,07	90,36	88,01	92,71	1,33
Kalimantan Selatan	89,41	86,43	92,38	1,70	87,05	83,74	90,36	1,94	88,26	86,03	90,48	1,29
Kalimantan Timur	95,02	92,50	97,54	1,35	89,99	85,55	94,42	2,52	93,61	91,42	95,80	1,19
Kalimantan Utara	95,37	92,59	98,15	1,49	78,59	69,52	87,67	5,89	89,39	85,39	93,38	2,28
Sulawesi Utara	93,16	90,52	95,80	1,45	90,81	88,02	93,59	1,57	92,18	90,25	94,11	1,07
Sulawesi Tengah	92,69	88,95	96,43	2,06	87,05	84,42	89,68	1,54	89,09	86,93	91,24	1,24
Sulawesi Selatan	92,85	90,75	94,94	1,15	88,72	86,78	90,65	1,11	90,86	89,42	92,30	0,81
Sulawesi Tenggara	94,11	91,12	97,10	1,62	90,17	87,94	92,39	1,26	91,83	90,02	93,64	1,00
Gorontalo	89,28	84,31	94,24	2,84	77,31	72,17	82,44	3,39	83,38	79,83	86,94	2,17
Sulawesi Barat	82,98	76,43	89,54	4,03	83,36	79,31	87,41	2,48	83,29	79,79	86,79	2,14
Maluku	96,78	94,48	99,07	1,21	89,69	87,16	92,22	1,44	92,99	91,25	94,72	0,95
Maluku Utara	97,77	95,05	100,00	1,42	86,72	83,29	90,15	2,02	89,93	87,34	92,51	1,47
Papua Barat	86,63	79,42	93,85	4,25	80,07	74,77	85,37	3,38	82,14	77,90	86,38	2,63
Papua Barat Daya	93,04	87,85	98,23	2,85	75,22	70,01	80,44	3,54	85,15	81,22	89,08	2,36
Papua	84,17	78,82	89,52	3,24	74,60	68,96	80,23	3,86	80,22	76,27	84,17	2,51
Papua Selatan	86,52	78,48	94,56	4,74	57,08	49,73	64,44	6,58	69,79	64,07	75,50	4,18
Papua Tengah	89,61	82,79	96,43	3,88	47,09	42,11	52,07	5,40	55,49	51,10	59,88	4,04
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	22,35	56,35	51,80	60,91	4,12	56,39	51,82	60,96	4,13
Indonesia	**93,47**	**92,97**	**93,96**	**0,27**	**88,37**	**87,78**	**88,95**	**0,34**	**91,45**	**91,07**	**91,82**	**0,21**

Catatan: Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.24 *Sampling Error* Tingkat Penyelesaian Pendidikan Penduduk Umur 19–21 Tahun Lulus SMA/SMK Sederajat Menurut Provinsi, Jenjang Pendidikan, dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	81,74	78,03	85,45	2,31	70,95	67,53	74,38	2,46	74,85	72,28	77,42	1,75
Sumatera Utara	79,15	75,79	82,51	2,17	76,66	73,59	79,72	2,04	78,21	75,82	80,60	1,56
Sumatera Barat	81,84	78,33	85,35	2,19	59,08	54,48	63,69	3,98	72,36	69,43	75,29	2,07
Riau	79,48	74,92	84,03	2,92	68,49	63,95	73,03	3,38	73,25	69,99	76,50	2,27
Jambi	81,04	75,29	86,79	3,62	68,16	63,49	72,83	3,50	72,48	68,81	76,14	2,58
Sumatera Selatan	81,31	77,11	85,50	2,63	61,89	58,05	65,74	3,17	70,22	67,34	73,10	2,09
Bengkulu	83,28	76,65	89,90	4,06	69,42	63,76	75,08	4,16	75,09	70,79	79,39	2,92
Lampung	79,97	75,51	84,42	2,84	66,81	62,15	71,48	3,56	71,96	68,61	75,32	2,38
Kepulauan Bangka Belitung	79,57	73,90	85,25	3,64	68,81	61,56	76,05	5,37	75,01	70,51	79,51	3,06
Kepulauan Riau	86,06	80,55	91,57	3,27	61,31	50,86	71,75	8,69	84,88	79,62	90,15	3,17
DKI Jakarta	91,20	88,34	94,06	1,60	–	–	–	–	91,20	88,34	94,06	1,60
Jawa Barat	75,24	72,91	77,57	1,58	59,96	54,36	65,55	4,76	72,92	70,77	75,08	1,51
Jawa Tengah	75,53	73,28	77,77	1,52	65,21	61,63	68,80	2,80	71,26	69,27	73,24	1,42
DI Yogyakarta	92,40	89,12	95,67	1,81	93,46	86,03	100,89	4,06	92,55	89,54	95,55	1,66
Jawa Timur	78,87	76,56	81,18	1,49	68,90	65,46	72,34	2,54	75,03	73,08	76,97	1,32
Banten	80,97	77,05	84,89	2,47	50,44	41,78	59,10	8,76	75,94	72,34	79,54	2,42
Bali	88,59	85,16	92,02	1,98	75,74	68,56	82,92	4,84	85,90	82,77	89,02	1,86
Nusa Tenggara Barat	79,59	75,35	83,84	2,72	69,84	63,31	76,37	4,77	75,56	71,91	79,21	2,46
Nusa Tenggara Timur	79,00	73,99	84,01	3,23	51,23	47,80	54,67	3,42	60,32	57,37	63,27	2,50
Kalimantan Barat	74,09	68,79	79,39	3,65	54,27	49,86	58,68	4,15	61,99	58,58	65,39	2,80
Kalimantan Tengah	77,42	72,25	82,59	3,41	60,98	55,45	66,51	4,63	68,22	64,34	72,09	2,90
Kalimantan Selatan	78,69	74,16	83,22	2,94	67,60	62,65	72,56	3,74	73,24	69,88	76,60	2,34
Kalimantan Timur	78,98	74,43	83,53	2,94	75,42	68,28	82,56	4,83	77,94	74,10	81,78	2,51
Kalimantan Utara	78,55	70,04	87,05	5,52	64,68	55,34	74,03	7,37	74,17	67,65	80,69	4,48
Sulawesi Utara	75,26	69,89	80,64	3,64	68,11	63,04	73,18	3,80	72,47	68,66	76,27	2,68
Sulawesi Tengah	80,87	75,86	85,88	3,16	61,85	57,30	66,39	3,75	69,39	65,89	72,90	2,58
Sulawesi Selatan	79,82	76,13	83,51	2,36	66,66	63,45	69,88	2,46	73,71	71,22	76,20	1,72
Sulawesi Tenggara	83,66	78,84	88,48	2,94	67,14	63,10	71,18	3,07	74,91	71,75	78,07	2,15
Gorontalo	78,87	72,44	85,30	4,16	54,24	46,81	61,67	6,99	66,85	61,68	72,02	3,94
Sulawesi Barat	68,66	59,41	77,91	6,87	61,66	56,01	67,31	4,67	63,12	58,25	67,99	3,94
Maluku	86,97	81,99	91,94	2,92	70,85	66,53	75,16	3,11	79,34	75,98	82,69	2,16
Maluku Utara	89,97	84,89	95,05	2,88	67,99	62,97	73,01	3,77	76,07	72,38	79,76	2,48
Papua Barat	67,15	58,19	76,11	6,81	50,25	42,19	58,31	8,18	55,50	49,27	61,73	5,73
Papua Barat Daya	77,10	68,50	85,70	5,69	54,56	47,04	62,07	7,03	68,64	62,46	74,82	4,59
Papua	80,94	74,36	87,51	4,15	53,47	46,94	60,00	6,23	71,53	66,58	76,47	3,53
Papua Selatan	89,44	80,62	98,25	5,03	25,42	18,19	32,65	14,51	46,28	39,63	52,93	7,33
Papua Tengah	77,03	66,87	87,19	6,73	22,71	18,48	26,94	9,51	34,37	30,09	38,66	6,36
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	57,15	28,12	23,68	32,57	8,07	28,30	23,62	32,98	8,44
Indonesia	**79,36**	**78,50**	**80,23**	**0,55**	**64,40**	**63,38**	**65,42**	**0,81**	**73,90**	**73,23**	**74,56**	**0,46**

Catatan: Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.25 *Sampling Error* Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025

Provinsi	Tidak/belum pernah sekolah				Tidak tamat SD				SD sederajat			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	0,59	0,38	0,81	18,51	2,40	1,97	2,83	9,16	12,81	11,92	13,70	3,54
Sumatera Utara	0,57	0,39	0,74	15,49	3,74	3,31	4,17	5,91	14,40	13,57	15,23	2,93
Sumatera Barat	0,71	0,51	0,90	14,11	6,86	6,12	7,60	5,50	14,80	13,91	15,69	3,07
Riau	0,75	0,48	1,02	18,41	4,11	3,26	4,95	10,48	14,67	13,58	15,76	3,79
Jambi	1,18	0,81	1,55	16,05	4,95	4,10	5,79	8,73	16,47	14,86	18,08	4,99
Sumatera Selatan	0,77	0,49	1,04	18,15	5,65	4,87	6,43	7,08	16,68	15,39	17,97	3,95
Bengkulu	0,91	0,45	1,37	25,70	4,42	3,54	5,30	10,16	13,29	11,63	14,94	6,35
Lampung	1,04	0,74	1,35	14,80	8,15	7,29	9,01	5,38	18,04	16,86	19,21	3,32
Kepulauan Bangka Belitung	0,94	0,63	1,25	16,83	8,72	7,57	9,86	6,69	20,01	18,56	21,47	3,71
Kepulauan Riau	0,85	0,53	1,17	19,09	3,81	3,06	4,57	10,10	13,44	11,96	14,91	5,61
DKI Jakarta	0,63	0,42	0,83	16,62	2,09	1,69	2,48	9,68	11,92	11,11	12,74	3,48
Jawa Barat	1,36	1,16	1,56	7,58	6,21	5,84	6,57	3,01	23,12	22,51	23,73	1,35
Jawa Tengah	2,92	2,70	3,15	3,94	9,11	8,74	9,47	2,05	23,40	22,87	23,93	1,15
DI Yogyakarta	1,65	1,26	2,04	12,10	5,51	4,83	6,20	6,35	11,91	10,94	12,89	4,16
Jawa Timur	2,84	2,60	3,08	4,31	7,60	7,24	7,96	2,40	22,15	21,60	22,70	1,27
Banten	1,55	1,20	1,91	11,68	4,33	3,74	4,92	6,94	19,08	17,98	20,18	2,93
Bali	3,05	2,66	3,45	6,56	4,29	3,79	4,78	5,94	15,89	14,98	16,80	2,91
Nusa Tenggara Barat	4,99	4,31	5,66	6,92	9,95	9,11	10,79	4,29	19,34	18,27	20,41	2,82
Nusa Tenggara Timur	0,74	0,50	0,98	16,74	6,88	5,88	7,89	7,45	15,83	14,46	17,19	4,41
Kalimantan Barat	3,18	2,64	3,73	8,74	9,37	8,17	10,57	6,54	17,98	16,69	19,27	3,66
Kalimantan Tengah	0,87	0,53	1,20	19,75	4,75	4,00	5,51	8,08	19,87	18,40	21,33	3,76
Kalimantan Selatan	0,74	0,47	1,02	18,75	8,03	7,15	8,91	5,60	20,69	19,48	21,90	2,99
Kalimantan Timur	0,95	0,64	1,25	16,39	5,02	4,33	5,71	7,01	13,91	12,87	14,94	3,80
Kalimantan Utara	1,28	0,80	1,75	19,13	7,12	5,86	8,38	9,03	18,97	17,10	20,84	5,03
Sulawesi Utara	0,31	0,16	0,46	24,25	6,47	5,71	7,23	5,98	13,87	12,77	14,96	4,03
Sulawesi Tengah	0,94	0,56	1,31	20,33	3,57	2,79	4,34	11,07	18,65	17,01	20,29	4,48
Sulawesi Selatan	2,40	1,91	2,90	10,47	7,28	6,57	7,99	4,95	16,54	15,51	17,57	3,18
Sulawesi Tenggara	1,32	0,92	1,72	15,41	4,49	3,70	5,29	9,03	12,30	11,00	13,60	5,39
Gorontalo	NA	NA	NA	29,11	14,25	12,30	16,21	7,00	18,06	16,15	19,97	5,40
Sulawesi Barat	2,58	1,56	3,59	20,11	8,33	6,67	10,00	10,21	21,68	19,02	24,34	6,26
Maluku	0,56	0,25	0,86	28,06	2,20	1,62	2,77	13,32	11,61	10,04	13,18	6,90
Maluku Utara	0,66	0,22	1,10	34,16	4,13	3,10	5,16	12,70	10,67	9,29	12,04	6,57
Papua Barat	NA	NA	NA	25,96	3,84	2,53	5,14	17,34	13,49	11,23	15,75	8,55
Papua Barat Daya	NA	NA	NA	49,65	2,75	1,51	3,99	22,96	12,87	10,44	15,29	9,62
Papua	1,70	1,05	2,36	19,64	3,09	2,36	3,83	12,13	10,76	9,26	12,25	7,09
Papua Selatan	3,01	1,68	4,34	22,48	4,36	2,75	5,97	18,81	10,97	8,22	13,71	12,77
Papua Tengah	1,73	0,85	2,61	25,88	5,86	4,30	7,41	13,51	9,99	8,00	11,99	10,18
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	34,80	11,73	3,73	19,73	29,24	16,05	9,57	22,53	20,59
Indonesia	**1,74**	**1,66**	**1,81**	**2,28**	**6,18**	**6,05**	**6,32**	**1,12**	**19,33**	**19,11**	**19,56**	**0,59**

https://www.bps.go.id

Lanjutan Tabel 5.25

Provinsi	SMP sederajat				SMA/SMK sederajat				PT			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Aceh	21,77	20,69	22,85	2,53	40,78	39,38	42,18	1,75	21,65	20,37	22,92	3,00
Sumatera Utara	22,04	21,14	22,94	2,09	45,57	44,34	46,80	1,38	13,69	12,75	14,62	3,50
Sumatera Barat	21,68	20,63	22,73	2,47	38,43	37,15	39,70	1,69	17,53	16,31	18,75	3,55
Riau	20,93	19,74	22,12	2,90	41,85	40,32	43,38	1,87	17,69	16,18	19,21	4,37
Jambi	21,02	19,61	22,43	3,42	38,09	36,15	40,03	2,60	18,30	16,51	20,09	4,99
Sumatera Selatan	19,50	18,29	20,71	3,17	39,15	37,56	40,73	2,07	18,26	16,64	19,88	4,52
Bengkulu	18,74	17,18	20,30	4,25	38,24	36,03	40,44	2,95	24,40	22,17	26,64	4,67
Lampung	22,77	21,63	23,91	2,56	36,48	35,03	37,93	2,03	13,52	12,25	14,79	4,79
Kepulauan Bangka Belitung	19,28	17,98	20,59	3,46	37,20	35,33	39,08	2,58	13,84	12,39	15,30	5,36
Kepulauan Riau	18,93	17,36	20,50	4,23	47,73	45,48	49,98	2,41	15,24	13,35	17,13	6,32
DKI Jakarta	18,70	17,70	19,69	2,71	45,85	44,53	47,16	1,47	20,82	19,45	22,19	3,36
Jawa Barat	22,39	21,83	22,96	1,29	35,42	34,69	36,14	1,04	11,50	10,95	12,05	2,44
Jawa Tengah	23,23	22,72	23,74	1,11	30,11	29,53	30,68	0,97	11,23	10,74	11,72	2,24
DI Yogyakarta	18,78	17,65	19,91	3,07	41,66	40,13	43,19	1,88	20,48	18,93	22,03	3,86
Jawa Timur	21,27	20,74	21,80	1,27	33,54	32,88	34,19	0,99	12,61	12,06	13,16	2,22
Banten	23,48	22,42	24,53	2,29	38,56	37,25	39,86	1,72	13,01	11,98	14,04	4,04
Bali	19,90	18,85	20,96	2,70	37,82	36,53	39,11	1,74	19,04	17,75	20,33	3,47
Nusa Tenggara Barat	21,19	20,07	22,31	2,70	30,88	29,62	32,13	2,08	13,65	12,51	14,80	4,27
Nusa Tenggara Timur	21,30	19,87	22,74	3,44	34,42	32,56	36,27	2,75	20,83	19,06	22,61	4,35
Kalimantan Barat	20,49	19,20	21,77	3,20	34,56	33,02	36,11	2,28	14,41	13,02	15,81	4,93
Kalimantan Tengah	23,63	22,29	24,98	2,91	33,15	31,51	34,80	2,53	17,73	16,17	19,29	4,49
Kalimantan Selatan	20,60	19,50	21,70	2,72	33,60	32,24	34,95	2,06	16,34	15,10	17,59	3,89
Kalimantan Timur	20,41	19,26	21,57	2,90	44,01	42,56	45,47	1,69	15,69	14,45	16,94	4,05
Kalimantan Utara	20,68	18,82	22,54	4,59	37,34	35,06	39,63	3,12	14,62	12,86	16,37	6,12
Sulawesi Utara	21,26	20,07	22,45	2,86	44,20	42,61	45,79	1,84	13,89	12,65	15,13	4,57
Sulawesi Tengah	24,21	22,64	25,79	3,32	35,23	33,44	37,02	2,59	17,41	15,64	19,17	5,16
Sulawesi Selatan	19,22	18,26	20,18	2,55	34,92	33,63	36,20	1,88	19,64	18,27	21,00	3,55
Sulawesi Tenggara	25,72	24,05	27,40	3,33	33,37	31,63	35,11	2,66	22,79	20,96	24,61	4,08
Gorontalo	20,05	18,35	21,75	4,32	30,75	28,55	32,96	3,66	16,20	14,29	18,12	6,03
Sulawesi Barat	17,46	15,15	19,78	6,76	28,75	25,97	31,54	4,94	21,20	18,41	23,99	6,72
Maluku	17,30	15,75	18,84	4,55	45,50	43,17	47,82	2,61	22,84	20,40	25,29	5,46
Maluku Utara	20,36	18,59	22,13	4,44	44,32	41,87	46,77	2,82	19,86	17,42	22,31	6,28
Papua Barat	21,49	19,47	23,50	4,78	40,38	37,72	43,04	3,36	19,78	17,53	22,04	5,82
Papua Barat Daya	19,29	16,75	21,83	6,72	46,80	43,45	50,16	3,66	17,90	14,82	20,97	8,78
Papua	18,07	16,42	19,72	4,66	45,22	42,91	47,53	2,61	21,16	18,98	23,35	5,27
Papua Selatan	18,67	15,74	21,59	7,99	41,91	37,89	45,92	4,89	21,09	17,14	25,05	9,56
Papua Tengah	15,75	13,73	17,77	6,54	49,51	46,12	52,91	3,50	17,15	14,36	19,94	8,31
Papua Pegunungan	15,98	8,98	22,99	22,35	34,31	24,32	44,30	14,86	NA	NA	NA	28,03
Indonesia	**21,58**	**21,36**	**21,80**	**0,51**	**36,84**	**36,56**	**37,11**	**0,38**	**14,33**	**14,10**	**14,56**	**0,83**

Catatan: Warna kuning ( ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.26 *Sampling Error* Persentase Penduduk Laki-Laki 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025

Provinsi	Tidak/belum pernah sekolah				Tidak tamat SD				SD sederajat			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	0,74	0,55	0,92	12,68	2,94	2,61	3,28	5,75	19,05	18,21	19,88	2,25
Sumatera Utara	0,83	0,68	0,97	8,94	4,88	4,47	5,30	4,36	16,37	15,65	17,10	2,26
Sumatera Barat	0,64	0,48	0,79	12,51	9,78	9,04	10,51	3,83	20,40	19,50	21,31	2,27
Riau	1,50	1,19	1,81	10,47	5,58	4,99	6,17	5,40	23,37	22,29	24,45	2,36
Jambi	1,43	1,07	1,78	12,87	8,58	7,76	9,40	4,88	24,70	23,48	25,91	2,51
Sumatera Selatan	1,02	0,80	1,24	11,07	8,82	8,20	9,45	3,62	26,20	25,18	27,22	1,98
Bengkulu	0,93	0,66	1,19	14,45	9,53	8,66	10,39	4,62	21,62	20,39	22,85	2,90
Lampung	0,81	0,61	1,01	12,85	10,28	9,58	10,99	3,51	25,10	24,08	26,12	2,07
Kepulauan Bangka Belitung	1,53	1,12	1,94	13,76	12,14	10,87	13,40	5,30	26,02	24,50	27,54	2,97
Kepulauan Riau	0,69	0,49	0,89	14,72	4,38	3,59	5,16	9,13	14,45	12,82	16,08	5,75
DKI Jakarta	0,48	0,23	0,74	27,16	1,39	1,01	1,77	13,94	10,30	9,36	11,24	4,65
Jawa Barat	0,84	0,68	1,01	9,75	6,26	5,86	6,65	3,23	26,37	25,67	27,07	1,36
Jawa Tengah	2,00	1,81	2,19	4,85	9,86	9,47	10,26	2,04	28,21	27,61	28,80	1,08
DI Yogyakarta	1,03	0,72	1,35	15,67	5,77	5,03	6,51	6,53	14,60	13,36	15,85	4,35
Jawa Timur	2,88	2,64	3,11	4,13	8,73	8,36	9,09	2,14	26,17	25,61	26,74	1,11
Banten	1,07	0,77	1,36	14,18	4,47	3,82	5,13	7,47	22,72	21,50	23,94	2,74
Bali	2,24	1,88	2,60	8,15	4,67	4,15	5,19	5,64	16,86	15,89	17,82	2,93
Nusa Tenggara Barat	4,13	3,47	4,80	8,18	10,57	9,64	11,50	4,48	21,90	20,70	23,11	2,82
Nusa Tenggara Timur	3,16	2,82	3,49	5,42	12,34	11,69	12,99	2,67	27,33	26,43	28,24	1,70
Kalimantan Barat	2,75	2,36	3,15	7,38	12,94	12,01	13,88	3,70	26,15	25,08	27,21	2,08
Kalimantan Tengah	0,75	0,53	0,98	15,25	6,94	6,20	7,68	5,43	28,25	26,99	29,50	2,26
Kalimantan Selatan	0,78	0,56	1,00	14,40	10,27	9,43	11,12	4,19	25,87	24,75	26,99	2,21
Kalimantan Timur	0,81	0,53	1,08	17,50	5,25	4,57	5,93	6,63	16,88	15,64	18,12	3,75
Kalimantan Utara	1,75	1,23	2,27	15,16	8,53	7,18	9,87	8,04	22,77	20,86	24,67	4,27
Sulawesi Utara	0,40	0,25	0,55	18,94	8,97	8,23	9,72	4,21	18,98	17,92	20,04	2,86
Sulawesi Tengah	1,71	1,38	2,04	9,79	6,12	5,47	6,78	5,46	29,81	28,59	31,02	2,08
Sulawesi Selatan	3,72	3,34	4,11	5,31	10,57	9,98	11,17	2,88	22,51	21,63	23,40	2,01
Sulawesi Tenggara	2,03	1,67	2,38	8,91	6,85	6,21	7,49	4,73	19,88	18,86	20,90	2,62
Gorontalo	0,90	0,54	1,27	20,64	23,21	21,50	24,92	3,76	23,93	22,29	25,56	3,49
Sulawesi Barat	2,46	1,84	3,08	12,88	12,84	11,50	14,19	5,34	27,70	26,04	29,35	3,05
Maluku	0,98	0,73	1,23	13,08	3,87	3,33	4,41	7,17	18,85	17,62	20,08	3,33
Maluku Utara	1,33	0,92	1,74	15,73	8,72	7,82	9,62	5,27	20,95	19,69	22,20	3,05
Papua Barat	3,46	2,73	4,20	10,82	7,39	6,09	8,69	8,99	18,50	16,62	20,39	5,20
Papua Barat Daya	1,81	1,25	2,37	15,75	5,00	3,96	6,03	10,60	15,44	13,67	17,21	5,85
Papua	3,00	2,37	3,64	10,73	3,77	3,03	4,52	10,04	13,41	12,10	14,72	4,99
Papua Selatan	6,63	5,25	8,00	10,61	10,32	8,72	11,91	7,88	19,37	17,04	21,71	6,16
Papua Tengah	28,69	26,98	30,40	3,04	8,85	7,87	9,83	5,66	19,25	17,80	20,69	3,82
Papua Pegunungan	41,37	39,38	43,36	2,46	5,95	4,94	6,97	8,69	16,80	15,36	18,24	4,37
Indonesia	**1,91**	**1,85**	**1,97**	**1,69**	**7,64**	**7,51**	**7,76**	**0,86**	**23,70**	**23,49**	**23,91**	**0,46**

Catatan: Warna kuning ( ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

Tabel 5.27 *Sampling Error* Angka Melek Huruf (AMH) 15-24 Tahun di Perkotaan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*	Estimasi	Selang Kepercayaan		*Relative Standard Error*
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	99,87	99,71	100,00	0,08	99,94	99,85	100,00	0,05	99,91	99,83	100,00	0,04
Sumatera Utara	99,91	99,83	99,99	0,04	99,96	99,91	100,00	0,03	99,93	99,88	99,98	0,03
Sumatera Barat	99,94	99,88	100,00	0,03	99,89	99,77	100,00	0,06	99,92	99,86	99,99	0,03
Riau	99,93	99,86	100,00	0,04	99,96	99,87	100,00	0,04	99,95	99,89	100,00	0,03
Jambi	99,83	99,56	100,00	0,14	99,87	99,63	100,00	0,13	99,86	99,67	100,00	0,09
Sumatera Selatan	99,92	99,77	100,00	0,08	99,95	99,89	100,00	0,03	99,94	99,87	100,00	0,04
Bengkulu	99,97	99,92	100,00	0,03	99,79	99,53	100,00	0,13	99,86	99,69	100,00	0,08
Lampung	99,63	99,24	100,00	0,20	99,94	99,85	100,00	0,05	99,83	99,67	99,98	0,08
Kepulauan Bangka Belitung	100,00	100,00	100,00	–	99,84	99,53	100,00	0,16	99,93	99,80	100,00	0,07
Kepulauan Riau	99,96	99,91	100,00	0,03	99,74	99,40	100,00	0,17	99,95	99,90	100,00	0,03
DKI Jakarta	99,95	99,88	100,00	0,04	–	–	–	–	99,95	99,88	100,00	0,04
Jawa Barat	99,98	99,95	100,00	0,02	99,94	99,81	100,00	0,06	99,97	99,94	100,00	0,02
Jawa Tengah	99,95	99,89	100,00	0,03	99,92	99,78	100,00	0,07	99,94	99,87	100,00	0,03
DI Yogyakarta	99,93	99,82	100,00	0,05	99,81	99,45	100,00	0,19	99,91	99,80	100,00	0,06
Jawa Timur	99,98	99,95	100,00	0,01	99,89	99,76	100,00	0,07	99,94	99,89	100,00	0,03
Banten	99,94	99,81	100,00	0,06	100,00	100,00	100,00	0,00	99,95	99,84	100,00	0,05
Bali	99,95	99,86	100,00	0,05	99,82	99,52	100,00	0,15	99,92	99,82	100,00	0,05
Nusa Tenggara Barat	99,83	99,66	100,00	0,09	99,87	99,60	100,00	0,13	99,85	99,70	100,00	0,08
Nusa Tenggara Timur	99,92	99,81	100,00	0,06	99,52	99,30	99,74	0,11	99,64	99,49	99,80	0,08
Kalimantan Barat	99,93	99,86	100,00	0,04	99,90	99,78	100,00	0,06	99,91	99,83	99,99	0,04
Kalimantan Tengah	99,79	99,38	100,00	0,21	99,88	99,76	100,00	0,06	99,84	99,64	100,00	0,10
Kalimantan Selatan	99,94	99,86	100,00	0,04	99,90	99,75	100,00	0,07	99,92	99,84	100,00	0,04
Kalimantan Timur	99,89	99,69	100,00	0,11	100,00	100,00	100,00	0,00	99,93	99,78	100,00	0,07
Kalimantan Utara	99,80	99,51	100,00	0,15	99,61	99,17	100,00	0,23	99,74	99,49	99,98	0,12
Sulawesi Utara	99,85	99,69	100,00	0,08	99,94	99,86	100,00	0,04	99,88	99,78	99,98	0,05
Sulawesi Tengah	99,53	98,84	100,00	0,36	99,90	99,78	100,00	0,06	99,76	99,49	100,00	0,14
Sulawesi Selatan	99,92	99,82	100,00	0,05	99,78	99,59	99,97	0,10	99,85	99,75	99,96	0,05
Sulawesi Tenggara	99,79	99,59	99,98	0,10	99,91	99,73	100,00	0,09	99,86	99,72	99,99	0,07
Gorontalo	99,67	99,15	100,00	0,27	99,91	99,78	100,00	0,07	99,79	99,53	100,00	0,14
Sulawesi Barat	99,67	99,03	100,00	0,33	99,60	99,20	99,99	0,20	99,61	99,27	99,95	0,17
Maluku	99,91	99,72	100,00	0,09	99,91	99,74	100,00	0,08	99,91	99,78	100,00	0,06
Maluku Utara	99,66	98,98	100,00	0,34	99,95	99,85	100,00	0,05	99,85	99,63	100,00	0,12
Papua Barat	99,69	99,08	100,00	0,31	99,76	99,44	100,00	0,16	99,74	99,45	100,00	0,15
Papua Barat Daya	99,62	98,96	100,00	0,34	99,81	99,51	100,00	0,16	99,70	99,28	100,00	0,21
Papua	NA	NA	NA	–	99,50	99,03	99,97	0,24	99,81	99,63	99,99	0,09
Papua Selatan	99,82	99,54	100,00	0,14	97,31	95,85	98,77	0,77	98,21	97,27	99,16	0,49
Papua Tengah	99,39	98,19	100,00	0,61	88,10	86,02	90,18	1,20	90,52	88,86	92,19	0,94
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	–	89,85	88,13	91,56	0,97	90,48	88,87	92,10	0,91
Indonesia	**99,93**	**99,91**	**99,95**	**0,01**	**99,65**	**99,61**	**99,70**	**0,02**	**99,83**	**99,80**	**99,85**	**0,01**

Catatan: Warna merah ( ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat
NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

https://www.kpps.go.id

https://www.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2021. Laporan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Bappenas. Diakses dari https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/laporan-pembangunan-infrastruktur-pendidikan/.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2024a. Metadata Indikator Tahun 2024 Pilar Pembangunan Sosial. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2024b. Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Badan Pusat Statistik. 2024a. Statistik Pendidikan 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2024b. Indeks Pembangunan Manusia 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2025. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025 Volume 40, 2025. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Barrett, Peter, Alberto Treves, Tigran Shmis, Diego Ambasz, and Maria Ustinova. *The Impact of School Infrastructure on Learning: A Synthesis of the Evidence*. Washington, D.C.: World Bank Group, 2019. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/514381552619427155/the-impact-of-school-infrastructure-on-learning-a-synthesis-of-the-evidence.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2022. Kurikulum Merdeka: Pembelajaran yang Fleksibel dan Adaptif. Jakarta: Kemendikbud. Diakses dari https://kurikulum.kemdikbud.go.id/kurikulum-merdeka/.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 2024. Kemendikdasmen Tak Bedakan Sekolah Negeri dan Swasta. 19 Desember 2024. Diakses pada 15 September 2025 melalui https://puslapdik.kemendikdasmen.go.id/kemendikdasmen-tak-bedakan-sekolah-negeri-dan-swasta/.

https://www.bps.go.id

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 2025a. Statistik Persekolahan SD 2024/2025. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 2025b. Statistik Persekolahan SMA 2024/2025. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 2025cc. Statistik Persekolahan SMK 2024/2025. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 2025d. Statistik Persekolahan SMP 2024/2025. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2022a. Visi dan Misi Pendidikan. Diakses dari https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/02/visi-dan-misi-pendidikan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2022b. Kurikulum Merdeka. Diakses dari https://kurikulum.kemdikbud.go.id/.

Kementerian Keuangan. 2023. Program Indonesia Pintar: Kebijakan Bantuan Pendidikan untuk Siswa Kurang Mampu. Jakarta: Kemenkeu. Diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/program-indonesia-pintar/.

Maharani, Chika, dkk. 2024. "Dampak Kemiskinan terhadap Kualitas Pendidikan Anak di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan yang Efektif". *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1 (3), 1–10. https://economics.pubmedia.id/index.php/jmsd.

Oktarina, S., dkk. 2025. "Kesadaran Orang Tua Tentang Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini di Komunitas Rentan". *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4 (2), 349–351. https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i2.4082.

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

https://www.bps.go.id

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 2024. Kemendikdasmen Tak Bedakan Sekolah Negeri dan Swasta. 19 Desember 2024. Diakses pada 15 September 2025 melalui https://puslapdik.kemendikdasmen.go.id/kemendikdasmen-tak-bedakan-sekolah-negeri-dan-swasta/).

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UNESCO. 2009. *Education Indicators Technical Guidelines*. Montreal: UNESCO Institute for Statistics.

UNESCO. 2012. *International Standard Classification of Education* ISCED 2011. Montreal : UNESCO Institute for Statistics.

UNESCO. 2024. *Mean years of schooling*. Diakses pada 19 September 2024 pada https://uis.unesco.org/en/glossary-term/mean-years-schooling.

World Bank. *Guidelines for School Location Planning*. World Bank Staff Working Paper No. 308. Washington, D.C.: World Bank, 1983. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/765091468762296654/guidelines-for-school-location-planning.

World Bank. 2021. *Harnessing Digital Learning to Improve Education in Indonesia*. Washington, DC: World Bank. Diakses dari https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/04/19/harnessing-digital-learning-to-improve-education-in-indonesia.

https://www.bps.go.id

LAMPIRAN

https://www.ppss.go.id

https://www.bps.go.id

LAMPIRAN 1

KUESIONER SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL MARET 2025

VSEN25.K
Dibuat 1 set untuk BPS Kab/Kota

REPUBLIK INDONESIA

SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL 2025

KETERANGAN POKOK ANGGOTA RUMAH TANGGA

RAHASIA **MARET**

SELAMAT PAGI/SIANG/SORE/MALAM. KAMI/SAYA DARI BPS SEDANG MENGUMPULKAN DATA/INFORMASI KEADAAN SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEKERJAAN, PERUMAHAN, DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA. UNTUK ITU, KAMI/SAYA AKAN MEWAWANCARAI BAPAK/IBU BESERTA ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART) LAINNYA. SELURUH DATA YANG BAPAK/IBU BERIKAN KEPADA KAMI, AKAN DIRAHASIAKAN DAN HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. BOLEH SAYA MULAI WAWANCARA SEKARANG?

- ☐ *Ya bersedia → Mulai wawancara*
- ☐ *Bersedia dengan perjanjian di lain waktu → **Blok XXII. Catatan***
- ☐ *Tidak bersedia → Lengkapi isian Blok I, Blok II, dan Blok XXII Catatan. Lampirkan Berita Acara Nonrespon. Selesai dan segera laporkan ke pemeriksa.*

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT

101	Provinsi		☐☐
102	Kabupaten/Kota*)		☐☐
103	Kecamatan		☐☐☐
104	Desa/Kelurahan*)		☐☐☐
105	Klasifikasi Desa/Kelurahan	1. Perkotaan 2. Perdesaan	☐
106	Nomor Blok Sensus		
107	Nomor Kode Sampel		☐ ☐☐☐☐☐
108	Nomor Urut Bangunan Tempat Tinggal		
109	Nomor Urut Sampel Rumah Tangga		☐☐
110	Nama Kepala Rumah Tangga		
111	Alamat (Nama Jalan/Gang, RT/RW/Dusun)	....	
112	Koordinat Lokasi Rumah Tangga	*Latitude* (lintang) : ☐ ☐☐°☐☐'☐☐" *Longitude* (bujur) : T ☐☐☐°☐☐'☐☐"	

*) *Coret yang tidak perlu*

BLOK II. KETERANGAN PENDATAAN

Uraian	Nama dan Kode/NIP	Jabatan	Waktu	Tanda Tangan
201. Pendata	..... ☐☐☐☐☐	Staf BPS Provinsi.....1 Staf BPS Kab/Kota.....2 Mitra 3	Tgl ☐☐ Bln ☐☐	
202. Pemeriksa	..... ☐☐☐☐☐	Staf BPS Provinsi.....1 Staf BPS Kab/Kota.....2 Mitra 3	Tgl ☐☐ Bln ☐☐	
203. Hasil pendataan rumah tangga		Terisi lengkap .....1 Terisi tidak lengkap.....2 Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pendataan .....3 Responden menolak.....4 Rumah tangga pindah/bangunan tempat tinggal sudah tidak ada.....5	☐ ***Blok XXII. Catatan***	

BLOK III. RINGKASAN

301	Banyaknya anggota rumah tangga	☐☐
302	Banyaknya anggota rumah tangga umur 0-4 tahun	☐
303	Banyaknya anggota rumah tangga umur 5 tahun ke atas	☐☐
304	Banyaknya anggota rumah tangga umur 10 tahun ke atas	☐☐
305	Banyaknya perempuan umur 10-54 tahun berstatus pernah kawin	☐

1

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 1

PETUNJUK PENGISIAN

Dalam pengisian kuesioner, perlu diperhatikan tata tertib sebagai berikut:

1. Kuasai konsep, definisi, maksud, dan tujuan survei.
2. Tulis isian sejelas-jelasnya dengan pensil hitam pada tempat yang disediakan, agar mudah dibaca.
3. Gunakan blok catatan untuk mencatat hal-hal penting yang perlu diketahui oleh pemeriksa dan pengolah. Bagian kosong dari kuesioner juga dapat digunakan untuk mencatat hal-hal yang ditemui saat wawancara berlangsung.
4. Pendata harus meneliti/memeriksa seluruh isian kuesioner dan memperbaiki setiap kesalahan, sebelum kuesioner diserahkan ke pemeriksa.
5. Perhatikan dan patuhi tanda-tanda atau alur pertanyaan yang tertera pada kuesioner.
6. Pertanyaan atau pilihan jawaban yang dicetak dengan huruf kapital harus dibacakan, sedangkan pertanyaan atau pilihan jawaban yang dicetak menggunakan huruf kecil tidak perlu dibacakan.
7. Kode pilihan jawaban yang menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya, boleh dilingkari lebih dari satu pilihan jawaban. Kode pilihan jawaban yang menggunakan angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya, hanya boleh dilingkari salah satu.
8. **Blok I** tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**.
9. Isikan Blok IV terlebih dahulu sampai selesai sebagai panduan untuk mengisi pertanyaan dalam format *roster*. Lipat bagian kertas yang ada tanda **garis putus-putus dan tulisan "Lipat disini"** pada Blok IV halaman 2 sebagai panduan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada halaman genap. Sementara itu, untuk panduan mengisi pada halaman ganjil, kertas pada halaman 2 tidak perlu dilipat (dilebarkan saja).
10. Pertanyaan dalam format *roster* (nama anggota rumah tangga (ART) per baris) seperti pada Blok IV sampai dengan Blok XII diselesaikan dahulu dalam satu *roster* kemudian lanjut ke *roster* berikutnya.
11. Tanda garis tebal pada pertanyaan *roster* menunjukkan batas pertanyaan untuk ART, isikan jawaban pertanyaan di dalam tanda garis tebal untuk seluruh ART, lalu berpindah ke pertanyaan selanjutnya.
12. Tanda garis dua pada pertanyaan *roster* menunjukkan perbedaan tema pertanyaan dari setiap blok.
13. Contoh cara penulisan informasi penerimaan bantuan/bantuan sosial/subsidi dari pemerintah daerah adalah menggunakan format rata kanan:

Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir	
(i) Bantuan rutin untuk pangan	Rp. __.300.000,-
(ii) Bantuan rutin untuk anak	Rp. __1.500.000,-

14. Tabulasi umur responden yang sudah berulang tahun pada bulan **Februari 2025**:

Tahun lahir	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Umur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Tahun lahir	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995
Umur	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Tahun lahir	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980
Umur	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

Tahun lahir	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965
Umur	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

Lipat di sini

Waktu mulai wawancara: ☐☐ : ☐☐

BLOK IV. KETERANGAN DEMOGRAFI

No. urut ART	Nama Anggota Rumah Tangga (ART), sebutkan siapa saja yang biasa tinggal di rumah tangga ini dan kepengurusan makannya dikelola dari satu dapur, mulai dari kepala rumah tangga, pasangannya, anak yang belum menikah, anak yang sudah menikah, menantu, cucu, orang tua/mertua, pembantu/sopir, famili lain, dan lainnya.	Apakah hubungan (nama) dengan kepala rumah tangga? (Kode)	Apakah status perkawinan (nama)? 1. Belum kawin 2. Kawin 3. Cerai hidup 4. Cerai mati	Apakah (nama) laki-laki atau perempuan? 1. Laki-laki 2. Perempuan	Kapan (nama) dilahirkan? Tgl/Bln/Thn (DD/MM/YYYY)	Berapakah umur (nama)? Umur harus diisi. Jika≥97 tahun, tulis '97' (Dalam tahun)	Jika berstatus kawin (404=2) Apakah pasangan (nama) biasanya tinggal di rumah tangga ini? 1. Ya 5. Tidak	Jika berstatus pernah kawin (404=2,3, atau 4) Pada umur berapa (nama) melangsungkan perkawinan pertama?	No. urut ART pemberi informasi
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
1		1	☐	☐	__/__/____	☐☐	☐	☐☐	___
2		☐	☐	☐	__/__/____	☐☐	☐	☐☐	___
3		☐	☐	☐	__/__/____	☐☐	☐	☐☐	___
4		☐	☐	☐	__/__/____	☐☐	☐	☐☐	___
5		☐	☐	☐	__/__/____	☐☐	☐	☐☐	___
6		☐	☐	☐	__/__/____	☐☐	☐	☐☐	___
7		☐	☐	☐	__/__/____	☐☐	☐	☐☐	___
8		☐	☐	☐	__/__/____	☐☐	☐	☐☐	___
9		☐	☐	☐	__/__/____	☐☐	☐	☐☐	___
10		☐	☐	☐	__/__/____	☐☐	☐	☐☐	___

Pastikan seluruh anggota rumah tangga tercatat dan tidak ada yang terlewat.
Cek sekali lagi, apakah kepengurusan makan seluruh anggota rumah tangga di kolom 402 dikelola dari satu dapur.
Jika terdapat ART yang kepengurusan makannya tidak dari satu dapur, maka keluarkan dari daftar.

Kode 403: Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT)

1. KRT
2. Istri/suami
3. Anak kandung/tiri
4. Anak angkat
5. Menantu
6. Cucu
7. Orang tua/mertua
8. Pembantu/sopir
9. Lainnya (famili lain, orang yang tidak ada hubungan famili dengan KRT)

https://www.bps.go.id

KONSEP DAN DEFINISI

- **Pertanyaan 203: Hasil Pendataan Rumah Tangga**
  - **Terisi lengkap**, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih dan memperoleh informasi secara lengkap.
  - **Terisi tidak lengkap**, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, tetapi tidak dapat memperoleh informasi secara lengkap. Misalnya sampai batas akhir waktu pendataan, informasi mengenai rumah tangga tersebut tidak diperoleh secara lengkap karena responden pergi keluar kota.
  - **Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pendataan**, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, namun tidak ada ART/responden yang dapat memberikan informasi mengenai rumah tangga sampai akhir masa pendataan.
  - **Responden menolak**, apabila responden menolak untuk diwawancarai.
  - **Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada**, apabila petugas tidak berhasil menemukan rumah tangga/bangunan sensus terpilih sampai batas akhir masa pendataan. Misalnya: rumah tangga pindah keluar blok sensus, bangunan digusur, dan bangunan terbakar/runtuh karena gempa/banjir/bencana lain.
- **Pertanyaan 403: Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga**
  Kepala rumah tangga (KRT) adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Pada kasus tertentu, misalnya beberapa anak sekolah mengontrak/menyewa rumah bersama-sama, maka KRT adalah seseorang yang ditunjuk di antara anak sekolah tersebut sebagai KRT.
- **Pertanyaan 408: Apakah Pasangan Biasanya Tinggal di Rumah Tangga Ini?**
  Yang dimaksud dengan pasangan biasanya tinggal di rumah tangga ini adalah jika dalam 1 tahun terakhir pasangan dari responden, tinggal di rumah lebih dari 6 bulan, meskipun tidak berturut-turut.
- **Pertanyaan 605: Apakah Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah?**
  Pendidikan prasekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.
- **Pertanyaan 611: Apakah Sedang/Pernah Bersekolah (Termasuk Mengikuti Program Paket A/B/C)?**
  Bersekolah: apabila seseorang terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal, khususnya program kesetaraan (Paket A/B/C) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) maupun kementerian lainnya.
- **Pertanyaan 613: Apa Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Sedang/Pernah Diikuti?**
  Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diduduki: jenjang pendidikan tertinggi yang **sedang** diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah atau yang **pernah** diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi, baik jenjang pendidikan formal maupun nonformal kesetaraan (Paket A/B/C).
- **Pertanyaan 614: Apa Tingkat/Kelas Tertinggi yang Sedang/Pernah Diduduki?**
  Tingkat/kelas tertinggi adalah tingkatan/kelas terakhir atau paling tinggi yang dilalui seseorang pada suatu jenjang pendidikan baik formal maupun nonformal (Paket A/B/C) di sekolah negeri maupun swasta. **Tamat sekolah/satuan pendidikan** adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang baik pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C) di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. **Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi, tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan lulus, dianggap tamat sekolah/satuan pendidikan.**

KONSEP DAN DEFINISI

- **Pertanyaan 615: Apa Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki?**
  Ijazah/STTB adalah lembaran atau tanda bukti kelulusan yang diberikan kepada seseorang yang sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik pada suatu jenjang pendidikan tertentu.
- **Pertanyaan 813: Dalam 3 Bulan Terakhir, Seberapa Sering Menggunakan Internet?**
  Minimal satu kali dalam sehari, yaitu setiap hari menggunakan internet, artinya orang tersebut tergolong pengakses internet yang tinggi.
  Minimal satu kali dalam seminggu, tetapi tidak setiap hari, yaitu tidak setiap hari menggunakan internet, tetapi dalam 1 minggu pernah mengakses minimal 1 kali, artinya orang tersebut tergolong jarang mengakses internet.
  Tidak mengakses lebih dari seminggu, yaitu dalam 3 bulan terakhir, pernah lebih dari 1 minggu tidak mengakses internet, artinya orang tersebut tergolong orang yang sangat jarang mengakses internet.
- **Pertanyaan 905: Sejak 1 Januari – 31 Desember 2024, Apakah Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian, Penganiayaan, Pencurian dengan Kekerasan, Pelecehan Seksual, atau Lainnya?**
  Korban kejahatan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.
- **Pertanyaan 1304: Jenis Imunisasi**

Jenis Imunisasi	Cara Pemberian	Umur
Hepatitis B (<24 jam)	Disuntikkan di paha.	Diberikan sesaat setelah bayi lahir sampai bayi berumur 7 hari.
BCG	Disuntikkan di pangkal lengan kanan atas dan biasanya menimbulkan bekas luka.	Diberikan segera setelah lahir atau segera mungkin sebelum berumur 1 bulan.
Polio Tetes 1-4	Diteteskan ke dalam mulut.	Diberikan 4 kali pada umur 1, 2, 3, dan 4 bulan.
DPT-HB-Hib 1-3	Disuntikkan di paha, biasa diberikan bersama dengan vaksin polio.	Diberikan 3 kali pada umur 2, 3, dan 4 bulan.
Rota Virus (RV) 1-3	Diteteskan ke dalam mulut.	Diberikan 3 kali pada umur 2, 3, dan 4 bulan.
PCV 1-3	Disuntikkan di paha kiri, biasanya diberikan bersama vaksin DPT-HB-Hib dan Polio.	Diberikan 3 kali pada umur 2, 3, dan 12 bulan.
Polio suntik (IPV) 1-2	Disuntikkan di paha kiri.	Diberikan mulai umur 2 atau 3 bulan.
Campak-Rubella (MR)	Disuntikkan di paha atau lengan kiri atas.	Diberikan satu kali mulai umur 9 bulan.
Japanese Encephalitis (JE)	Disuntikkan di lengan atas.	Diberikan mulai umur 9 bulan di wilayah tertentu sesuai peraturan Kementerian Kesehatan (Bali, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta).
DPT- Hib-HB lanjutan	Disuntikkan di paha atau lengan kanan.	Diberikan pada umur 18 bulan.
Campak-Rubella (MR) Lanjutan	Disuntikkan di paha atau lengan kiri atas.	Diberikan pada umur 18-24 bulan.

3

Lanjutan Lampiran 1

BLOK V. KETERANGAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

No. Urut ART	***Jika berstatus pernah kawin (404 = 2, 3, atau 4)*** APAKAH (*nama*) MEMILIKI/PERNAH MEMILIKI **BUKU/AKTA NIKAH** DARI KUA/ KANTOR CATATAN SIPIL? BOLEH SAYA MELIHATNYA? (*untuk perkawinan yang terakhir*) ***(Kode)***	No. Urut Keluarga	No. Urut Ibu Kandung ***Lihat Blok IV*** (*Isikan **00** bila ibu kandung tidak tinggal di rumah tangga ini*)	No. Urut Ayah Kandung ***Lihat Blok IV*** (*Isikan **00** bila ayah kandung tidak tinggal di rumah tangga ini*)	APAKAH (*nama*) MEMPUNYAI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)? 1. Ya 5. Tidak → ***509***	Nomor Induk Kependudukan ***(Tuliskan Nomor Induk Kependudukan setiap ART)*** 1. *Jika ART **mempunyai NIK, tetapi tidak sesuai format** → pada empat digit terakhir 506 tuliskan 9998, pada 507 tuliskan kode 9, dan pada 508 tuliskan sumber data NIK sesuai dengan dokumen yang ditunjukkan oleh ART, dan pada 510 tuliskan kode 9, kemudian tulis catatan di Blok XXII. Catatan.* 2. *Jika ART **mempunyai NIK, tetapi tidak ingat/tidak memiliki catatan** → pada empat digit terakhir 506 tuliskan 9998 dan pada 507, 508, dan 510 tuliskan kode 9, kemudian tulis catatan di Blok XXII. Catatan.*	Kode Jenis Kelamin ART berdasarkan NIK ***(Cek digit ke-7 NIK pada 506)*** ***(Kode)***	Sumber Data Nomor Induk Kependudukan ***(Kode)***	APAKAH (*nama*) MEMILIKI **AKTA KELAHIRAN** DARI KANTOR CATATAN SIPIL? BOLEH SAYA MELIHATNYA? ***(Kode)***	***(Diisi oleh pemeriksa)*** Apakah isian 507 sama dengan isian 405? ***(Cek isian 405)*** 1. Sama 2. Berbeda 7. Tidak relevan
401	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU Nomor 52 Tahun 2009). Penentuan keluarga didasarkan pada ikatan perkawinan.

Kode 501: Kepemilikan Buku/ Akta Nikah

1. Ya, dapat ditunjukkan
2. Ya, tidak dapat ditunjukkan
5. Tidak memiliki
8. Tidak tahu

Kode 507: Kode Jenis Kelamin ART berdasarkan NIK

1. Laki-laki
   Jika angka pada digit ke-7 NIK adalah 0, 1, 2, atau 3
2. Perempuan
   Jika angka pada digit ke-7 NIK adalah 4, 5, 6, atau 7
5. Tidak dapat ditentukan
   Jika tidak termasuk kode 1 atau 2

Kode 508: Sumber Data NIK

1. KK
2. KTP
3. Lainnya

Kode 509: Kepemilikan Akta Kelahiran

1. Ya, dapat ditunjukkan
2. Ya, tidak dapat ditunjukkan
5. Tidak memiliki
8. Tidak tahu

BLOK VI. KETERANGAN MIGRASI DAN PENDIDIKAN

No. Urut ART	*Untuk ART Semua Umur*		*Untuk ART Umur 5 Tahun ke Atas*		*Untuk ART Umur 0-10 Tahun*			*Untuk ART Umur 5 Tahun ke Atas*		
	DI MANAKAH TEMPAT LAHIR (*nama*)? Tempat lahir adalah tempat tinggal ibu (*nama*) ketika melahirkan (*nama*). ***Tuliskan nama tempat (Kode tempat diisi oleh pemeriksa)***		DI MANAKAH TEMPAT TINGGAL (*nama*) **5 TAHUN YANG LALU (FEBRUARI 2020)**? ***Tuliskan nama tempat (Kode tempat diisi oleh pemeriksa)***		APAKAH (*nama*) SEDANG/ PERNAH MENGIKUTI PENDIDIKAN **PRA-SEKOLAH**?	***Jika pernah/ masih (605= 1,2, atau 3)***, APA JENIS PENDIDIKAN **PRASEKOLAH-NYA**?	***Jika tidak/ belum pernah (605=4)***, APAKAH SEDANG/PERNAH MENGIKUTI KEGIATAN KURSUS SEPERTI BIMBA, SENI, DLL.?	APAKAH (*nama*) DAPAT MEMBACA DAN MENULIS KALIMAT SEDERHANA DALAM BAHASA SEHARI-HARI DENGAN MENGGUNAKAN:		
	PROVINSI/NEGARA	KABUPATEN/KOTA ***Jika lahir di Kota, tuliskan "Kota" sebelum nama kota***	PROVINSI/NEGARA	KABUPATEN/KOTA ***Jika di Kota, tuliskan "Kota" sebelum nama kota***	***(Kode)***	***(Kode)***	***(Kode)***	HURUF LATIN/ ALFABET? 1.Ya 5.Tidak	HURUF ARAB/ HIJAIYAH? 1.Ya 5.Tidak	HURUF LAINNYA? (CONTOH: JAWA, KANJI, CINA, DLL.) 1.Ya 5.Tidak
401	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
1	..... ☐☐	..... ☐☐	..... ☐☐	..... ☐☐	☐	☐	A B X	☐	☐	☐
2	..... ☐☐	..... ☐☐	..... ☐☐	..... ☐☐	☐	☐	A B X	☐	☐	☐
3	..... ☐☐	..... ☐☐	..... ☐☐	..... ☐☐	☐	☐	A B X	☐	☐	☐
4	..... ☐☐	..... ☐☐	..... ☐☐	..... ☐☐	☐	☐	A B X	☐	☐	☐
5	..... ☐☐	..... ☐☐	..... ☐☐	..... ☐☐	☐	☐	A B X	☐	☐	☐
6	..... ☐☐	..... ☐☐	..... ☐☐	..... ☐☐	☐	☐	A B X	☐	☐	☐
7	..... ☐☐	..... ☐☐	..... ☐☐	..... ☐☐	☐	☐	A B X	☐	☐	☐
8	..... ☐☐	..... ☐☐	..... ☐☐	..... ☐☐	☐	☐	A B X	☐	☐	☐
9	..... ☐☐	..... ☐☐	..... ☐☐	..... ☐☐	☐	☐	A B X	☐	☐	☐
10	..... ☐☐	..... ☐☐	..... ☐☐	..... ☐☐	☐	☐	A B X	☐	☐	☐

Kode 605: Partisipasi Prasekolah

1. Masih mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran ini (2024/2025)
2. Pernah mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran ini (2024/2025)
3. Pernah mengikuti pendidikan prasekolah sebelum tahun ajaran 2024/2025
4. Tidak/belum pernah mengikuti pendidikan prasekolah

Kode 606: Jenis Prasekolah

1. Taman Kanak-kanak
2. Bustanul Athfal
3. Raudatul Athfal
4. Satuan PAUD Sejenis (PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA,TKQ, dll.)
5. Kelompok Bermain
6. Taman Penitipan Anak

Kode 607: Kegiatan Kursus

A. Ya, kursus pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung
B. Ya, kursus bukan pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung
X. Tidak sedang/pernah mengikuti kegiatan kursus

5

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 1

BLOK VI. KETERANGAN MIGRASI DAN PENDIDIKAN

No. Urut ART	*Untuk ART Umur 5 tahun ke Atas*					*Untuk ART Umur 5-24 Tahun*								
						Untuk ART yang masih bersekolah (611=2)			*Untuk ART yang masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi (611=2 atau 3)*					*Untuk ART yang belum pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi (611 =1 atau 3)*
	APAKAH (*nama*) SEDANG/ PERNAH BERSEKOLAH? *(termasuk mengikuti program paket A/B/C)* ***(Kode)*** ***Kode=1→624 Kode=3→613***	APAKAH (*nama*) BERSEKOLAH DI SEKOLAH NEGERI ATAU SWASTA? 1.Negeri 2.Swasta	APA JENJANG PENDIDIKAN TERTINGGI YANG SEDANG/ PERNAH DIIKUTI (*nama*)? ***(Kode)***	APA TINGKAT/ KELAS TERTINGGI YANG SEDANG/ PERNAH DIDUDUKI (*nama*)? ***(Kode)***	APA IJAZAH/ STTB TERTINGGI YANG DIMILIKI (*nama*)? ***(Kode)***	**DALAM SEMINGGU,** SEBERAPA SERING BIASANYA (*nama*) SARAPAN/MAKAN PAGI? 1.Setiap hari 2.Kadang-kadang 5.Tidak pernah	**DALAM SEBULAN TERAKHIR,** APAKAH (*nama*) MENDAPATKAN UANG SAKU KETIKA BERSEKOLAH? 1.Setiap hari 2.Kadang-kadang 5.Tidak pernah	**DALAM SETAHUN TERAKHIR,** APAKAH (*nama*) PERNAH MENDAPATKAN PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN DI SEKOLAH? ***(Kode)***	**DALAM SETAHUN TERAKHIR,** APAKAH (*nama*) MEMPEROLEH PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)? 1. Ya 5. Tidak	**DALAM SETAHUN TERAKHIR,** APAKAH (*nama*) MEMILIKI KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)? 1.Ya, dapat ditunjukkan 2.Ya, tidak dapat ditunjukkan 5.Tidak	APAKAH (*nama*) BERSEKOLAH PADA TAHUN AJARAN SEBELUMNYA (2023/2024)? ***(Kode)*** ***Kode=1 atau 3 →624***	APA JENJANG PENDIDIKAN YANG DIIKUTI (*nama*) WAKTU ITU? ***(Kode)***	APA TINGKAT/ KELAS YANG DIDUDUKI (*nama*) WAKTU ITU? ***(Kode)***	APA ALASAN UTAMA (*nama*) BELUM PERNAH ATAU TIDAK BERSEKOLAH LAGI? ***(Kode)***
401	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624
1	☐	☐	☐☐	☐	☐☐	☐	☐	A B X	☐	☐	☐	☐☐	☐	☐☐
2	☐	☐	☐☐	☐	☐☐	☐	☐	A B X	☐	☐	☐	☐☐	☐	☐☐
3	☐	☐	☐☐	☐	☐☐	☐	☐	A B X	☐	☐	☐	☐☐	☐	☐☐
4	☐	☐	☐☐	☐	☐☐	☐	☐	A B X	☐	☐	☐	☐☐	☐	☐☐
5	☐	☐	☐☐	☐	☐☐	☐	☐	A B X	☐	☐	☐	☐☐	☐	☐☐
6	☐	☐	☐☐	☐	☐☐	☐	☐	A B X	☐	☐	☐	☐☐	☐	☐☐
7	☐	☐	☐☐	☐	☐☐	☐	☐	A B X	☐	☐	☐	☐☐	☐	☐☐
8	☐	☐	☐☐	☐	☐☐	☐	☐	A B X	☐	☐	☐	☐☐	☐	☐☐
9	☐	☐	☐☐	☐	☐☐	☐	☐	A B X	☐	☐	☐	☐☐	☐	☐☐
10	☐	☐	☐☐	☐	☐☐	☐	☐	A B X	☐	☐	☐	☐☐	☐	☐☐

Kode 611 dan 621:

Partisipasi Sekolah
1. Tidak/belum pernah bersekolah
2. Masih bersekolah
3. Tidak bersekolah lagi

Kode 613 dan 622: Jenjang Pendidikan dan Kode 615: Ijazah/STTB

01. Paket A
02. SDLB
03. SD
04. MI
05. SPM/PDF Ula
06. Paket B
07. SMP LB
08. SMP
09. MTs
10. SPM/PDF Wustha
11. Paket C
12. SMLB
13. SMA
14. MA
15. SMK
16. MAK
17. SPM/PDF Ulya
18. D1/D2
19. D3
20. D4
21. S1
22. Profesi
23. S2
24. S3
25. **Tidak Punya Ijazah SD *(khusus 615)***

Kode 614 dan 623: Tingkat/Kelas

Kode 614: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, **8 (Tamat)**
Kode 623: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- ***Jika pernah/sedang kuliah Profesi, kode 1***
- ***Jika pernah/sedang kuliah S2, kode 6***
- ***Jika pernah/sedang kuliah S3, kode 7***

Kode 618: Program Makanan Tambahan

A. YA, PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS
B. YA, PROGRAM LAINNYA
X. Tidak mendapatkan

Kode 624: Alasan Tidak Sekolah

01. Sedang mengikuti pendidikan prasekolah
02. Tidak ada biaya sekolah
03. Bekerja/mencari nafkah
04. Menikah
05. Mengurus rumah tangga
06. Merasa pendidikan cukup
07. Sekolah jauh
08. Cacat/disabilitas
09. Mengalami perundungan/ *bullying*
10. Belum cukup umur
11. Lainnya

BLOK VII. KETERANGAN KEPEMILIKAN TABUNGAN, INKLUSI KEUANGAN, DAN KETENAGAKERJAAN

No. Urut ART	*Untuk ART Umur 5 Tahun ke Atas*		*Untuk ART Umur 10 Tahun ke Atas*					
					Jika bekerja atau sementara tidak bekerja (703=pilihan A dilingkari atau 704=1)			
	APAKAH (*nama*) MEMILIKI REKENING TABUNGAN BAIK ATAS NAMA SENDIRI ATAU BERSAMA-SAMA DI LEMBAGA KEUANGAN (PERBANKAN, KOPERASI)? 1. Ya 5. Tidak	**DALAM SETAHUN TERAKHIR**, APAKAH (*nama*) MENGGUNAKAN PRODUK/LAYANAN JASA KEUANGAN DARI LEMBAGA JASA KEUANGAN (KONVENSIONAL ATAU SYARIAH) SEPERTI: TABUNGAN, KREDIT, DEPOSITO, SAHAM, REKSADANA, ASURANSI, PEMBIAYAAN KENDARAAN, PINJAMAN *ONLINE*, DLL.? 1. Ya 5. Tidak	**SELAMA SEMINGGU TERAKHIR**, APA SAJA KEGIATAN YANG DILAKUKAN (*nama*)? ***(Pilihan jawaban harus dibacakan)*** A. BEKERJA B. SEKOLAH C. MENGURUS RUMAH TANGGA D. LAINNYA SELAIN KEGIATAN PRIBADI X. Tidak melakukan kegiatan	***Jika tidak bekerja (703 pilihan A tidak dilingkari)*** **SELAMA SEMINGGU TERAKHIR**, APAKAH (*nama*) MEMPUNYAI PEKERJAAN/USAHA, TETAPI SEMENTARA TIDAK BEKERJA? 1. Ya 5. Tidak → ***ART berikutnya/ Blok VIII***	**SELAMA SEMINGGU TERAKHIR**, APA LAPANGAN USAHA ATAU BIDANG PEKERJAAN UTAMA DARI TEMPAT PEKERJAAN (*nama*)? ***Tuliskan selengkap-lengkapnya*** ***(Kode lapangan usaha atau bidang pekerjaan utama diisi oleh pemeriksa. Kode dapat dilihat pada halaman terakhir VSEN25.K)***	**SELAMA SEMINGGU TERAKHIR**, APA STATUS/ KEDUDUKAN (*nama*) DALAM PEKERJAAN UTAMA? ***(Kode)***	**SELAMA SEMINGGU TERAKHIR**, BERAPA JUMLAH JAM KERJA (*nama*) DARI **PEKERJAAN UTAMA**? ***(Jam)***	**SELAMA SEMINGGU TERAKHIR**, BERAPA JUMLAH JAM KERJA (*nama*) DARI **SELURUH PEKERJAAN**? ***(Jam)***
401	701	702	703	704	705	706	707	708
1	☐	☐	A B C D X	☐	..... ☐☐	☐	☐☐	☐☐
2	☐	☐	A B C D X	☐	..... ☐☐	☐	☐☐	☐☐
3	☐	☐	A B C D X	☐	..... ☐☐	☐	☐☐	☐☐
4	☐	☐	A B C D X	☐	..... ☐☐	☐	☐☐	☐☐
5	☐	☐	A B C D X	☐	..... ☐☐	☐	☐☐	☐☐
6	☐	☐	A B C D X	☐	..... ☐☐	☐	☐☐	☐☐
7	☐	☐	A B C D X	☐	..... ☐☐	☐	☐☐	☐☐
8	☐	☐	A B C D X	☐	..... ☐☐	☐	☐☐	☐☐
9	☐	☐	A B C D X	☐	..... ☐☐	☐	☐☐	☐☐
10	☐	☐	A B C D X	☐	..... ☐☐	☐	☐☐	☐☐

Penjelasan 702: Lembaga Jasa Keuangan

a. Perbankan: Bank umum (konvensional atau syariah) dan unit usaha syariah, Bank Perekonomian Rakyat/BPR (konvensional atau syariah).
b. Pasar Modal: Manajer investasi (konvensional atau syariah, perusahaan efek, sekuritas, layanan urun dana (konvensional atau syariah).
c. Lembaga Pembiayaan: Perusahaan pembiayaan, unit usaha syariah perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura (konvensional atau syariah).
d. Perasuransian: Perusahaan asuransi (konvensional atau syariah), unit syariah perusahaan asuransi.
e. Dana Pensiun: Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) (konvensional atau syariah), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) (konvensional atau syariah), unit syariah DPPK.
f. Lembaga Keuangan Mikro (LKM): LKM (konvensional atau syariah), Bank Wakaf Mikro (BWM), *Baitul Maal waa Tamwil* (BMT)
g. Pergadaian: Perusahaan gadai (konvensional atau syariah), unit usaha syariah perusahaan pergadaian.
h. *Fintech Lending*: *Fintech lending*/pinjaman online (konvensional atau syariah).

Kode 706: Status/Kedudukan dalam Pekerjaan

(Jika (704=1), 706 tidak boleh berkode 5 atau 6)

1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar
3. Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar
4. Buruh/karyawan/pegawai
5. Pekerja bebas
6. Pekerja keluarga atau tidak dibayar

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 1

BLOK VIII. KETERANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No. Urut ART	Dalam 3 bulan terakhir, apakah (*nama*) menggunakan telepon seluler (HP)/ nirkabel untuk keperluan komunikasi? 1. Ya 5. Tidak	Dalam 3 bulan terakhir, apakah (*nama*) memiliki/ menguasai telepon seluler (HP)/ nirkabel? 1. Ya 5. Tidak	Dalam 3 bulan terakhir, berapa jumlah *simcard* aktif yang digunakan (*nama*) pada HP, *tablet*, atau perangkat lainnya, menurut provider/ operator berikut: Telkomsel?	Indosat/Tri?	XL Axiata?	Lainnya?	Dalam 3 bulan terakhir, apa saja jenis komputer yang digunakan (*nama*)? *(Pilihan jawaban harus dibacakan)* A. PC/*desktop* B. *Laptop/note book* C. *Tablet* X. Tidak menggunakan komputer	Dalam 3 bulan terakhir, apakah (*nama*) pernah menggunakan internet (termasuk Facebook, X, Youtube, Instagram, Whatsapp, dll.)? 1. Ya 5. Tidak→ ***ART berikutnya/ Blok IX***	Dalam 3 bulan terakhir, media apa saja yang digunakan (*nama*) untuk menggunakan internet? *(Pilihan jawaban harus dibacakan)* A. PC/*desktop* B. *Laptop/note book* C. *Tablet* D. HP/ponsel E. Lainnya	Dalam 3 bulan terakhir, di mana saja (*nama*) menggunakan internet? *(Pilihan jawaban harus dibacakan)* A. Rumah sendiri B. Bukan rumah sendiri C. Tempat bekerja/kantor D. Gedung sekolah/kampus E. Tempat umum F. Dalam kondisi bergerak	Dalam 3 bulan terakhir, untuk apa saja (*nama*) menggunakan internet? *(Pilihan jawaban harus dibacakan)* A. Mendapat informasi B. Mengirim/menerima *e-mail* C. Media sosial/jejaring sosial D. Pembelian barang/jasa E. Penjualan barang/jasa F. Fasilitas finansial (*e-banking*) G. Pembelajaran *online* H. Hiburan I. Pembuatan konten digital J. Lainnya	Dalam 3 bulan terakhir, seberapa sering (*nama*) menggunakan internet? *(Kode)*
401	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J	☐

- **Menggunakan HP** yang dimaksud tidak harus menggunakan HP yang dimiliki sendiri atau dibeli/dibayar sendiri oleh individu yang menggunakan.
- **Memiliki/menguasai HP** apabila anggota rumah tangga tersebut memiliki/menguasai HP dengan minimal 1 kartu yang aktif dalam 3 bulan terakhir.
- **Menggunakan internet** apabila seseorang meluangkan waktu untuk menggunakan internet, sehingga ia dapat memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet. Termasuk menggunakan internet walaupun tidak memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup (*log in* dan *log out*) internet. Siapa saja dimasukkan menggunakan meskipun hanya tinggal melanjutkan.
- **Mengakses internet untuk hiburan** misalnya *download*/main gim, menonton tv, *download*/menonton film/video, mendengarkan radio, *download* gambar dan musik menggunakan internet.
- **Pembuatan konten digital** misalnya mengunggah konten, menggunakan *cloud storage* (Google *Drive*, *Dropbox*, dll.), menggunakan *software* yang dijalankan melalui internet untuk mengedit dokumen (teks, *spreadsheet*, presentasi), dll.

Kode 812: Frekuensi Menggunakan Internet

1. Setiap hari
2. Minimal satu kali dalam seminggu, tetapi tidak setiap hari
3. Tidak mengakses lebih dari seminggu

Lanjutan Lampiran 1

BLOK IX. KETERANGAN BEPERGIAN DAN KORBAN KEJAHATAN

No. Urut ART	Sejak 1 Januari-31 Desember 2024, apakah (*nama*) pernah bepergian keluar **kabupaten/kota**, bukan bepergian rutin, **minimal 6 jam di tempat tujuan**, tidak untuk sekolah atau bekerja? 1.Ya 5.Tidak→***905***	*Jika pernah bepergian (901=1)* Berapa kali (*nama*) bepergian selama periode: **1 Januari 2024** sampai dengan **30 Juni 2024**? *(Kali)*	**1 Juli 2024** sampai dengan **31 Desember 2024**? *(Kali)*	Pada **kondisi bepergian yang terakhir**, apa maksud utama (*nama*) melakukan bepergian? *(Kode)*	Sejak 1 Januari - 31 Desember 2024, apakah (*nama*) pernah menjadi korban kejahatan pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, atau lainnya? 1. Ya 5. Tidak → *ART berikutnya/ Blok X*	Sejak 1 Januari - 31 Desember 2024, berapa kali (*nama*) menjadi korban kejahatan dan berapa kejadian yang dilaporkan ke polisi? ***(Jika ≥ 7, Tulis '7')*** Pencurian: Jumlah kejadian *(Kali)*	Pencurian: Jumlah kejadian yang dilaporkan ke polisi	Penganiayaan: Jumlah kejadian *(Kali)*	Penganiayaan: Jumlah kejadian yang dilaporkan ke polisi	Pencurian dengan kekerasan: Jumlah kejadian *(Kali)*	Pencurian dengan kekerasan: Jumlah kejadian yang dilaporkan ke polisi	Pelecehan seksual: Jumlah kejadian *(Kali)*	Pelecehan seksual: Jumlah kejadian yang dilaporkan ke polisi	Lainnya: Jumlah kejadian *(Kali)*	Lainnya: Jumlah kejadian yang dilaporkan ke polisi
401	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915
1	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Kode 904: Maksud Utama Bepergian

01. Berlibur/rekreasi
02. Profesi/bisnis
03. Misi/pertemuan/kongres/seminar
04. *Training*/pendidikan/pelatihan
05. Kesehatan/berobat
06. Berziarah/keagamaan
07. Mengunjungi teman/keluarga
08. Mudik/pulang kampung hari raya
09. Olahraga/kesenian
10. Belanja/*shopping*
11. Lainnya

- **Bepergian rutin** adalah bepergian ke tempat/tujuan utama dengan frekuensi paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.
- **Pelaporan kejahatan** yang dimaksud adalah jika suatu kejadian kejahatan secara resmi dilaporkan melalui kanal pelaporan/ Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian.

Suatu peristiwa kejahatan dianggap telah dilaporkan ke polisi apabila:

a. Korban kejahatan telah melaporkannya ke polisi.
b. Orang lain melaporkan peristiwa kejahatan tersebut ke polisi.
c. Polisi mengetahuinya sendiri atau tertangkap tangan.

9

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 1

BLOK X. KETERANGAN GANGGUAN FUNGSIONAL (UNTUK ART UMUR 2 TAHUN KE ATAS)

No. Urut ART	*Isikan kode 1 jika umur ≥ 2 tahun atau kode 0 jika umur < 2 tahun* 1 → *1002* 0 → *ART berikutnya/ Blok XI*	APAKAH (*nama*) MENGALAMI KESULITAN/ GANGGUAN PENGLIHATAN? 1. Ya, sama sekali tidak bisa melihat 2. Ya, banyak kesulitan 3. Ya, sedikit kesulitan 4. Tidak mengalami kesulitan	APAKAH (*nama*) MENGALAMI KESULITAN/ GANGGUAN PENDENGARAN? 5. Ya, sama sekali tidak bisa mendengar 6. Ya, banyak kesulitan 7. Ya, sedikit kesulitan 8. Tidak mengalami kesulitan	APAKAH (*nama*) MENGALAMI KESULITAN/GANGGUAN BERJALAN ATAU NAIK TANGGA? 1. Ya, sama sekali tidak bisa berjalan/naik tangga 2. Ya, banyak kesulitan 3. Ya, sedikit kesulitan 4. Tidak mengalami kesulitan	APAKAH (*nama*) MENGALAMI KESULITAN/GANGGUAN MENGGUNAKAN/ MENGGERAKKAN TANGAN/JARI? 5. Ya, sama sekali tidak bisa menggunakan/ menggerakkan tangan/jari 6. Ya, banyak kesulitan 7. Ya, sedikit kesulitan 8. Tidak mengalami kesulitan	APAKAH (*nama*) MENGALAMI KESULITAN/GANGGUAN DALAM HAL MENGINGAT ATAU BERKONSENTRASI? 1. Ya, selalu mengalami kesulitan 2. Ya, seringkali mengalami kesulitan 3. Ya, sedikit mengalami kesulitan 4. Tidak mengalami kesulitan	APAKAH (*nama*) MENGALAMI GANGGUAN PERILAKU DAN/ATAU EMOSIONAL? 5. Ya, selalu mengalami gangguan 6. Ya, seringkali mengalami gangguan 7. Ya, sedikit mengalami gangguan 8. Tidak mengalami gangguan	APAKAH (*nama*) MENGALAMI KESULITAN/GANGGUAN BERBICARA DAN/ATAU MEMAHAMI/ BERKOMUNIKASI DENGAN ORANG LAIN? 1. Ya, sama sekali tidak bisa memahami/ dipahami/berkomunikasi 2. Ya, banyak mengalami kesulitan 3. Ya, sedikit mengalami kesulitan 4. Tidak mengalami kesulitan	APAKAH (*nama*) MENGALAMI KESULITAN/GANGGUAN UNTUK MENGURUS DIRI SENDIRI? (SEPERTI MANDI, MAKAN, BERPAKAIAN, BUANG AIR BESAR, BUANG AIR KECIL) 5. Ya, sama sekali tidak bisa mengurus diri sendiri 6. Ya, banyak mengalami kesulitan 7. Ya, sedikit mengalami kesulitan 8. Tidak mengalami kesulitan	**DALAM SETAHUN TERAKHIR,** APAKAH (*nama*) MENERIMA BANTUAN SOSIAL DARI **PEMERINTAH PUSAT** BERUPA ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL (ATENSI)? 1. Ya 5. Tidak
401	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

- **Gangguan/keterbatasan fungsi** ditandai oleh kondisi ketidakmampuan atau kehilangan ataupun kelainan baik dari psikologis, fisiologis, maupun struktur atau fungsi anatomis.
- Petugas tidak diperkenankan memutuskan bahwa responden tidak mengalami gangguan fungsional tertentu berdasarkan apa yang dilihat secara kasat mata.
- Gangguan/keterbatasan fungsi antara lain: kesulitan melihat, kesulitan mendengar, berbicara tidak lancar, kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa, lambat dalam belajar/memahami pelajaran, keterbatasan berjalan, keterbatasan bergerak, kesulitan mengambil barang kecil menggunakan tangan/jari.
- **Setiap orang bisa mengalami lebih dari satu jenis gangguan.**
- **Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)** yaitu layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kehidupan layak, dukungan keluarga, perawatan sosial, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental, pelatihan vokasional pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial, asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas.

https://www.bps.go.id

BLOK XI. KETERANGAN KELUHAN KESEHATAN DAN RAWAT JALAN

No. Urut ART	JAMINAN KESEHATAN APA SAJA YANG DIMILIKI (*nama*)? A.BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) B.BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri C.Jamkesda D.Asuransi swasta E.Perusahaan/ kantor X.Tidak memiliki	**DALAM SEBULAN TERAKHIR,** APAKAH (*nama*) MEMPUNYAI KELUHAN KESEHATAN (PANAS, BATUK, PILEK, DIARE, PUSING, PENYAKIT KRONIS, DSB.)? 1.Ya 5.Tidak → ***ART berikutnya/ Blok XII***	APAKAH KELUHAN KESEHATAN TERSEBUT MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA PEKERJAAN, SEKOLAH, ATAU KEGIATAN SEHARI-HARI? 1.Ya 5.Tidak	**DALAM SEBULAN TERAKHIR,** APAKAH (*nama*) PERNAH MENGOBATI SENDIRI? 1.Ya 5.Tidak	**DALAM SEBULAN TERAKHIR,** APAKAH (*nama*) PERNAH RAWAT JALAN? 1. Ya → ***1107*** 5.Tidak → ***Lanjut ke ART berikutnya/ Blok XII***	APA ALASAN UTAMA (*nama*) TIDAK RAWAT JALAN? ***(Kode)***	**DALAM SEBULAN TERAKHIR,** DI MANA SAJA TEMPAT (*nama*) RAWAT JALAN? A.RS Pemerintah B.RS Swasta C.Klinik D.Praktik dokter/bidan/perawat E.Puskesmas/Pustu/Pusling F.UKBM (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan) G.Pelayanan kesehatan tradisional H.Lainnya	**DALAM SEBULAN TERAKHIR,** BERAPA KALI (*nama*) RAWAT JALAN? ***(Kali)***	JAMINAN KESEHATAN APA SAJA YANG **DIGUNAKAN** (*nama*) UNTUK RAWAT JALAN? A. BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) B. BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri C. Jamkesda D. Asuransi swasta E. Perusahaan/kantor X. Tidak menggunakan	***Jika 1109 pilihan A, B, dan C tidak dilingkari*** APA SAJA ALASAN (*nama*) TIDAK MENGGUNAKAN JKN/JAMKESDA UNTUK RAWAT JALAN? A. Tidak tahu cara memanfaatkan jaminan kesehatan B. Tidak punya biaya (transportasi, dll.) C. Kartu JKN tidak aktif D. Menggunakan asuransi selain JKN/Jamkesda E. Prosedur/persyaratan sulit dipenuhi F. Tidak ada faskes yang mudah dijangkau dari rumah responden G. Tidak ada petugas pemberi pelayanan jaminan kesehatan H. Waktu tunggu pelayanan lama/antre panjang I. Lainnya, ***tuliskan:*** X. Tidak memiliki JKN/Jamkesda
401	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110
1	A B C D E **X**	☐	☐	☐	☐	☐	A B C D E F G H	☐☐	A B C D E **X**	A B C D E F G H I _____ **X**
2	A B C D E **X**	☐	☐	☐	☐	☐	A B C D E F G H	☐☐	A B C D E **X**	A B C D E F G H I _____ **X**
3	A B C D E **X**	☐	☐	☐	☐	☐	A B C D E F G H	☐☐	A B C D E **X**	A B C D E F G H I _____ **X**
4	A B C D E **X**	☐	☐	☐	☐	☐	A B C D E F G H	☐☐	A B C D E **X**	A B C D E F G H I _____ **X**
5	A B C D E **X**	☐	☐	☐	☐	☐	A B C D E F G H	☐☐	A B C D E **X**	A B C D E F G H I _____ **X**
6	A B C D E **X**	☐	☐	☐	☐	☐	A B C D E F G H	☐☐	A B C D E **X**	A B C D E F G H I _____ **X**
7	A B C D E **X**	☐	☐	☐	☐	☐	A B C D E F G H	☐☐	A B C D E **X**	A B C D E F G H I _____ **X**
8	A B C D E **X**	☐	☐	☐	☐	☐	A B C D E F G H	☐☐	A B C D E **X**	A B C D E F G H I _____ **X**
9	A B C D E **X**	☐	☐	☐	☐	☐	A B C D E F G H	☐☐	A B C D E **X**	A B C D E F G H I _____ **X**
10	A B C D E **X**	☐	☐	☐	☐	☐	A B C D E F G H	☐☐	A B C D E **X**	A B C D E F G H I _____ **X**

Kode 1106: Alasan Utama Tidak Rawat Jalan
1.Tidak punya biaya berobat
2.Tidak punya biaya transportasi
3.Tidak ada yang mendampingi
4.Mengobati sendiri
5.Merasa tidak perlu
6.Tidak ada sarana transportasi
7.Waktu tunggu pelayanan lama
8.Lainnya

- **Jaminan kesehatan yang dimiliki** adalah jaminan dalam bentuk kartu atau apapun yang dapat digunakan untuk pembiayaan kesehatan bila nama yang tertera dalam kartu atau lainnya melakukan perawatan kesehatan, seperti: ke dokter, puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya.
- **Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti: panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), karena kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya.
- **Terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari** adalah tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya.
- **Rawat jalan** adalah upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah.
- **Menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat jalan** adalah bila biaya berobat jalan anggota rumah tangga seluruhnya atau sebagian dibiayai oleh penjamin kesehatan.

11

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XII. KETERANGAN RAWAT INAP DAN MEROKOK

No. urut ART	Dalam setahun terakhir, apakah (*nama*) pernah rawat inap? 1.Ya 5.Tidak → *1206*	Dalam setahun terakhir, di mana saja tempat (*nama*) rawat inap? A.RS Pemerintah B.RS Swasta C.Klinik D.Praktik bidan E.Puskesmas F.Pelayanan kesehatan tradisional G.Lainnya	Dalam setahun terakhir, berapa hari (*nama*) rawat inap? *(Hari)*	Jaminan kesehatan apa saja yang digunakan (*nama*) untuk rawat inap? A. BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) B. BPJS Kesehatan Non-PBI/ Mandiri C. Jamkesda D. Asuransi swasta E. Perusahaan/kantor X. Tidak menggunakan	*Jika 1204 pilihan A,B, dan C tidak dilingkari* Apa saja alasan (*nama*) tidak menggunakan JKN/Jamkesda untuk rawat inap? A. Tidak tahu cara memanfaatkan jaminan kesehatan B. Tidak ada biaya (transportasi, dll.) C. Kartu JKN tidak aktif D. Menggunakan asuransi selain JKN/Jamkesda E. Prosedur/persyaratan sulit dipenuhi F. Tidak ada faskes yang mudah dijangkau dari rumah responden G. Tidak ada petugas pemberi pelayanan jaminan kesehatan H. Waktu tunggu pelayanan lama/antre panjang I. Lainnya, *tuliskan:* X. Tidak memiliki JKN/Jamkesda	*Untuk ART Umur 15 Tahun ke Atas*		
						Selama sebulan terakhir, apakah (*nama*) merokok menggunakan rokok elektrik/vape? 1. Ya, setiap hari 2. Ya, tidak setiap hari 5. Tidak 8. Tidak tahu	Selama sebulan terakhir, apakah (*nama*) merokok tembakau? 1.Ya, setiap hari 2.Ya, tidak setiap hari 5.Tidak 8.Tidak tahu → *ART berikutnya/ Blok XIII*	Apakah dulu, sebelum sebulan terakhir (*nama*) pernah merokok tembakau? 1.Ya, setiap hari 2.Ya, tidak setiap hari 5.Tidak 8.Tidak tahu
401	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208
1	☐	A B C D E F G	☐☐☐	A B C D E X	A B C D E F G H I _____ X	☐	☐	☐
2	☐	A B C D E F G	☐☐☐	A B C D E X	A B C D E F G H I _____ X	☐	☐	☐
3	☐	A B C D E F G	☐☐☐	A B C D E X	A B C D E F G H I _____ X	☐	☐	☐
4	☐	A B C D E F G	☐☐☐	A B C D E X	A B C D E F G H I _____ X	☐	☐	☐
5	☐	A B C D E F G	☐☐☐	A B C D E X	A B C D E F G H I _____ X	☐	☐	☐
6	☐	A B C D E F G	☐☐☐	A B C D E X	A B C D E F G H I _____ X	☐	☐	☐
7	☐	A B C D E F G	☐☐☐	A B C D E X	A B C D E F G H I _____ X	☐	☐	☐
8	☐	A B C D E F G	☐☐☐	A B C D E X	A B C D E F G H I _____ X	☐	☐	☐
9	☐	A B C D E F G	☐☐☐	A B C D E X	A B C D E F G H I _____ X	☐	☐	☐
10	☐	A B C D E F G	☐☐☐	A B C D E X	A B C D E F G H I _____ X	☐	☐	☐

- **Rawat inap** adalah upaya penyembuhan keluhan kesehatan dengan menginap selama satu malam atau lebih di unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional, termasuk rawat inap untuk persalinan.
- **Responden yang pernah rawat inap adalah** responden yang telah selesai menjalani rawat inap, tidak termasuk bila pada saat pendataan sedang menjalani rawat inap.
- **Menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap** adalah bila biaya rawat inap anggota rumah tangga seluruhnya atau sebagian dibiayai oleh penjamin kesehatan.
- **Jumlah hari** adalah jumlah hari rawat inap dalam satu tahun terakhir.
- **Rokok elektrik/vape** adalah alat yang berfungsi untuk mengubah zat-zat kimia menjadi uap dan mengalirkannya ke paru-paru, di mana zat kimia tersebut merupakan campuran zat, seperti nikotin dan *propylene glycol*. Alat rokok elektrik/vape terdiri atas komponen penguap, baterai isi ulang, pengatur elektronik, dan wadah cairan yang akan diuapkan.
- **Merokok** merupakan aktivitas membakar tembakau kemudian menghisap asapnya baik menggunakan rokok maupun pipa pada sebulan terakhir sampai saat pendataan.
- **Rokok tembakau** meliputi rokok putih, rokok kretek, cerutu, lisong, pipa cangklong/linting/kawung yang diisi tembakau. Termasuk juga orang yang menghisap *shisha/waterpipe*.

https://www.bps.go.id

BLOK XIII. KETERANGAN IMUNISASI, ASI, DAN MP-ASI (UNTUK ART UMUR 0-59 BULAN)						
PERTANYAAN	BALITA 1		BALITA 2		BALITA 3	
Nama dan No. Urut Balita *(Salin dari Blok IV 402 dan 401):* Nama & No. Urut Pemberi Informasi	.....__ __ .....__ __		.....__ __ .....__ __		.....__ __ .....__ __	
1301. Umur (*nama balita*) dalam bulan *(Hitung dari Blok IV 406)*	☐☐ bulan		☐☐ bulan		☐☐ bulan	
IMUNISASI (UNTUK ART UMUR 0-59 BULAN)						
SAYA AKAN MENANYAKAN BEBERAPA PERTANYAAN MENGENAI IMUNISASI						
1302. APAKAH (*nama balita*) PERNAH DIBERI IMUNISASI?	Ya ..... 1 Tidak ..... 5→***1307***		Ya ..... 1 Tidak ..... 5→***1307***		Ya ..... 1 Tidak ..... 5→***1307***	
1303. APAKAH BAPAK/IBU MEMPUNYAI CATATAN IMUNISASI SEPERTI BUKU KIA/KMS ATAU KARTU BEROBAT/DOKUMEN LAIN **YANG TERTULIS TANGGAL IMUNISASI** (*nama balita*)? BOLEHKAH SAYA MELIHATNYA?	Ya, dapat ditunjukkan ..... 1 →***1304.i*** Ya, tidak dapat ditunjukkan ..... 2 Tidak ada kartu/buku ..... 5 } ***1304.ii***		Ya, dapat ditunjukkan ..... 1 →***1304.i*** Ya, tidak dapat ditunjukkan ..... 2 Tidak ada kartu/buku ..... 5 } ***1304.ii***		Ya, dapat ditunjukkan ..... 1 →***1304.i*** Ya, tidak dapat ditunjukkan ..... 2 Tidak ada kartu/buku ..... 5 } ***1304.ii***	
1304. *Jenis imunisasi* *Pada 1304.i isian tanggal, bulan, dan tahun:* *Tulis '44' jika kartu menunjukkan bahwa imunisasi diberikan, tetapi tanggal, bulan, dan tahun tidak ada.* *Tulis '66' jika tidak ada keterangan bahwa imunisasi diberikan, tetapi responden mengingat bahwa imunisasi pernah diberikan.* *Tulis '00' jika imunisasi tidak/belum diberikan.*	***Jika 1303 = 1*** i. Imunisasi berdasarkan catatan Tanggal-Bulan-Tahun ***(DD/MM/YY)***	***Jika 1303 = 2 atau 5*** ii. Imunisasi berdasarkan ingatan 1. Ya, diberi imunisasi 5. Tidak/belum diberi imunisasi	***Jika 1303 = 1*** i. Imunisasi berdasarkan catatan Tanggal-Bulan-Tahun ***(DD/MM/YY)***	***Jika 1303 = 2 atau 5*** ii. Imunisasi berdasarkan ingatan 1. Ya, diberi imunisasi 5. Tidak/belum diberi imunisasi	***Jika 1303 = 1*** i. Imunisasi berdasarkan catatan Tanggal-Bulan-Tahun ***(DD/MM/YY)***	***Jika 1303 = 2 atau 5*** ii. Imunisasi berdasarkan ingatan 1. Ya, diberi imunisasi 5. Tidak/belum diberi imunisasi
A. **HEPATITIS B (<24 JAM)**	___/___/___	☐	___/___/___	☐	___/___/___	☐
B. **BCG**	___/___/___	☐	___/___/___	☐	___/___/___	☐
C. **POLIO TETES 1**	___/___/___	☐	___/___/___	☐	___/___/___	☐
D. **DPT-HB-HIB 1**	___/___/___	☐	___/___/___	☐	___/___/___	☐
E. **POLIO TETES 2**	___/___/___	☐	___/___/___	☐	___/___/___	☐
F. **ROTA VIRUS (RV) 1**	___/___/___	☐	___/___/___	☐	___/___/___	☐
G. **PCV 1**	___/___/___	☐	___/___/___	☐	___/___/___	☐

13

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 1

PERTANYAAN	BALITA 1		BALITA 2		BALITA 3	
Nama dan No. Urut Balita *(Salin dari Blok IV 402 dan 401):*	.....__ __		.....__ __		.....__ __	
Jenis imunisasi *Pada 1304.i isian tanggal, bulan, dan tahun:* *Tulis '44' jika kartu menunjukkan bahwa imunisasi diberikan, tetapi tanggal, bulan, dan tahun tidak ada.* *Tulis '66' jika tidak ada keterangan bahwa imunisasi diberikan, tetapi responden mengingat bahwa imunisasi pernah diberikan.* *Tulis '00' jika imunisasi tidak/belum diberikan.*	***Jika 1303 = 1*** i. Imunisasi berdasarkan catatan Tanggal-Bulan-Tahun ***(DD/MM/YY)***	***Jika 1303 = 2 atau 5*** ii. Imunisasi berdasarkan ingatan 1. Ya, diberi imunisasi 5. Tidak/belum diberi imunisasi	***Jika 1303 = 1*** i. Imunisasi berdasarkan catatan Tanggal-Bulan-Tahun ***(DD/MM/YY)***	***Jika 1303 = 2 atau 5*** ii. Imunisasi berdasarkan ingatan 1. Ya, diberi imunisasi 5. Tidak/belum diberi imunisasi	***Jika 1303 = 1*** i. Imunisasi berdasarkan catatan Tanggal-Bulan-Tahun ***(DD/MM/YY)***	***Jika 1303 = 2 atau 5*** ii. Imunisasi berdasarkan ingatan 1. Ya, diberi imunisasi 5. Tidak/belum diberi imunisasi
H. **DPT-HB-HIB 2**	___/___/___	☐	___/___/___	☐	___/___/___	☐
I. **POLIO TETES 3**	___/___/___	☐	___/___/___	☐	___/___/___	☐
J. **ROTA VIRUS (RV) 2**	___/___/___	☐	___/___/___	☐	___/___/___	☐
K. **PCV 2**	___/___/___	☐	___/___/___	☐	___/___/___	☐
L. **DPT-HB-HIB 3**	___/___/___	☐	___/___/___	☐	___/___/___	☐
M. **POLIO TETES 4**	___/___/___	☐	___/___/___	☐	___/___/___	☐
N. **POLIO SUNTIK (IPV) 1**	___/___/___	☐	___/___/___	☐	___/___/___	☐
O. **ROTA VIRUS (RV) 3**	___/___/___	☐	___/___/___	☐	___/___/___	☐
P. **CAMPAK-RUBELLA (MR)**	___/___/___	☐	___/___/___	☐	___/___/___	☐
Q. **POLIO SUNTIK (IPV) 2**	___/___/___	☐	___/___/___	☐	___/___/___	☐
R. **JAPANESE ENCEPHALITIS (JE)**	___/___/___	☐	___/___/___	☐	___/___/___	☐
S. **PCV 3**	___/___/___	☐	___/___/___	☐	___/___/___	☐
T. **DPT-HB-HIB LANJUTAN**	___/___/___	☐	___/___/___	☐	___/___/___	☐
U. **CAMPAK-RUBELLA (MR) LANJUTAN**	___/___/___	☐	___/___/___	☐	___/___/___	☐
Pastikan tidak ada pencatatan imunisasi yang terlewat (Periksa kembali isian 1304)						

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 1

PERTANYAAN	BALITA 1	BALITA 2	BALITA 3
Nama dan No. Urut Balita *(Salin dari Blok IV 402 dan 401):*	.....__ __	.....__ __	.....__ __
1305. DI MANA SAJA (*nama balita*) MENDAPAT IMUNISASI?	RS Pemerintah/RS Swasta .....A Klinik.....B Praktik dokter/bidan ..... C Puskesmas/Pustu/Pusling.....D Polindes/Poskesdes..... E Posyandu .....F Lainnya, ***tuliskan***:_____ G	RS Pemerintah/RS Swasta .....A Klinik.....B Praktik dokter/bidan..... C Puskesmas/Pustu/Pusling.....D Polindes/Poskesdes..... E Posyandu .....F Lainnya, ***tuliskan***:_____ G	RS Pemerintah/RS Swasta ..... A Klinik ..... B Praktik dokter/bidan.....C Puskesmas/Pustu/Pusling ..... D Polindes/Poskesdes ..... E Posyandu .....F Lainnya, ***tuliskan***: _____ G
1306. SIAPA SAJA YANG MEMBERIKAN IMUNISASI PADA (*nama balita*)?	Dokter spesialis anak .....A Dokter umum.....B Bidan .....C Perawat.....D Tenaga kesehatan lainnya .....E Lainnya, ***tuliskan***:_____F	Dokter spesialis anak .....A Dokter umum.....B Bidan .....C Perawat.....D Tenaga kesehatan lainnya .....E Lainnya, ***tuliskan***:_____F	Dokter spesialis anak .....A Dokter umum ..... B Bidan ..... C Perawat ..... D Tenaga kesehatan lainnya .....E Lainnya, ***tuliskan***: _____ F
1307. ***Jika balita tidak pernah diberi imunisasi (1302 = 5),*** APA ALASAN (*nama balita*) TIDAK PERNAH DIIMUNISASI? A. TIDAK TAHU MANFAAT IMUNISASI B. TIDAK MEMILIKI BIAYA C. TIDAK TAHU PROGRAM IMUNISASI D. KHAWATIR DENGAN EFEK SAMPING VAKSIN E. KHAWATIR DENGAN KANDUNGAN DALAM VAKSIN F. RAGU TERHADAP EFEKTIVITAS IMUNISASI G. LAINNYA, ***tuliskan:***	Ya Tidak A).....1 .....5 B).....1 .....5 C). .....1 .....5 D).....1 .....5 E).....1 .....5 F).....1 .....5 G) .....1 .....5 ***tuliskan***:_____	Ya Tidak A) .....1 .....5 B) .....1 .....5 C) .....1 .....5 D) .....1 .....5 E) .....1 .....5 F).....1 .....5 G).....1 .....5 ***tuliskan***:_____	Ya Tidak A) .....1 .....5 B) .....1 .....5 C) .....1 .....5 D) .....1 .....5 E) .....1 .....5 F).....1 .....5 G).....1 .....5 ***tuliskan***:_____
A S I DAN MP-ASI (UNTUK ART UMUR 0-23 BULAN)			
Cek umur balita dari 1301, berikan tanda centang (√)			
Balita berumur 0-23 bulan Balita berumur ≥ 24 bulan	☐ → ***1308*** ☐ → ***Balita berikutnya/Blok XIV***	☐ → ***1308*** ☐ → ***Balita berikutnya/Blok XIV***	☐ → ***1308*** ☐ → ***Balita berikutnya/Blok XIV***
1308. A. APAKAH (*nama baduta*) PERNAH DISUSUI/DIBERI AIR SUSU IBU (ASI)?	Ya.....1 Tidak .....5 Tidak tahu .....8 } ***1310***	Ya ..... 1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8 } ***1310***	Ya .....1 Tidak.....5 Tidak tahu..... 8 } ***1310***
B. PADA UMUR BERAPA (*nama baduta*) PERTAMA KALI DIBERIKAN MAKANAN/MINUMAN SELAIN ASI? *(Isikan 99, jika belum pernah diberikan makanan/minuman selain ASI)*	__ __ bulan	__ __ bulan	__ __ bulan

15

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 1

PERTANYAAN	BALITA 1	BALITA 2	BALITA 3
Nama dan No. Urut Balita *(Salin dari Blok IV 402 dan 401):*	.....__ __	.....__ __	.....__ __
1309. **SELAMA SEHARIAN KEMARIN**, APAKAH (*nama baduta*) DISUSUI/DIBERI ASI?	Ya.....1 Tidak .....5 Tidak tahu 8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8
1310. **SELAMA SEHARIAN KEMARIN**, APAKAH (*nama baduta*) MENERIMA CAIRAN, TERMASUK CAIRAN YANG DIKOMBINASIKAN DENGAN MAKANAN LAIN DAN CAIRAN YANG DIKONSUMSI DI LUAR RUMAH?	Ya Tidak Tidak tahu	Ya Tidak Tidak tahu	Ya Tidak Tidak tahu
A. SUSU SELAIN ASI (SUSU FORMULA, SUSU BUBUK, SUSU SEGAR, UHT)? *Jika "Ya", isikan berapa kali susu selain ASI dikonsumsi baduta.*	A).....1 .....5 .....8 ☐ *kali*	A).....1 .....5 .....8 ☐ *kali*	A).....1 .....5 .....8 ☐ *kali*
B. MINUMAN LAIN TANPA GULA (AIR PUTIH, SUP/ KALDU, TEH/KOPI TAWAR, AIR TAJIN, DLL.)?	B).....1 .....5 8	B).....1 .....5 8	B).....1 .....5 8
C. MINUMAN BERPEMANIS GULA (JUS BUAH, MINUMAN RINGAN, TEH/KOPI MANIS, SUSU KENTAL MANIS, DLL.)?	C).....1 .....5 8	C).....1 .....5 8	C).....1 .....5 8
1311. **SELAMA SEHARIAN KEMARIN,** APAKAH (*nama baduta*) DIBERI MAKANAN, BAIK BERUPA MAKANAN PADAT, MAKANAN SETENGAH PADAT, ATAU MAKANAN LUNAK? *Jika "Ya", isikan berapa kali baduta diberi makanan padat, setengah padat, atau lunak.*	Ya.....1 ☐ kali Tidak ..... 5 Tidak tahu ..... 8 } ***Balita berikutnya/ Blok XIV***	Ya.....1 ☐ kali Tidak..... 5 Tidak tahu..... 8 } ***Balita berikutnya/ Blok XIV***	Ya.....1 ☐ kali Tidak.....5 Tidak tahu..... 8 } ***Balita berikutnya/ Blok XIV***
1312. SAYA INGIN MENANYAKAN TENTANG SEMUA YANG DIKONSUMSI OLEH (*nama baduta*) SEHARIAN KEMARIN, TERMASUK MAKANAN YANG DIKONSUMSI DI LUAR RUMAH ATAU JAJAN. **SELAMA SEHARIAN KEMARIN**, APAKAH (*nama baduta*) MAKAN?	Ya Tidak Tidak tahu	Ya Tidak Tidak tahu	Ya Tidak Tidak tahu
A. BIJI-BIJIAN DAN UMBI-UMBIAN (NASI, BUBUR, JAGUNG, PASTA, ROTI/PANEKUK, UBI, KENTANG, SORGUM, DLL.)?	A) .....1 .....5 8	A) .....1 .....5 8	A).....1 .....5 8
B. MAKANAN DARI KACANG-KACANGAN (KACANG TANAH, KEDELAI, TAHU, TEMPE, ATAU KACANG LAINNYA)?	B) .....1 .....5 8	B) .....1 .....5 8	B).....1 .....5 8
C. PRODUK TURUNAN SUSU (KEJU, YOGURT, DLL.)?	C) .....1 .....5 8	C) .....1 .....5 8	C).....1 .....5 8
D. DAGING, IKAN (SAPI, AYAM, KAMBING, IKAN, MAKANAN LAUT, DAGING/IKAN DALAM KALENG, DLL.)?	D) .....1 .....5 8	D) .....1 .....5 8	D).....1 .....5 8
E. TELUR (AYAM, ITIK, PUYUH, DLL.)?	E) .....1 .....5 8	E) .....1 .....5 8	E).....1 .....5 8
F. BUAH DAN SAYUR TINGGI VITAMIN A, TERMASUK SAYURAN BERDAUN GELAP (WORTEL, LABU, BAYAM, DLL.)?	F).....1 .....5 8	F).....1 .....5 8	F).....1 .....5 8
G. BUAH ATAU SAYURAN LAINNYA (LABU SIAM, GAMBAS, ALPUKAT, JERUK, DLL.)?	G).....1 .....5 8	G).....1 .....5 8	G).....1 .....5 8
H. MAKANAN MANIS, GURIH, DAN MAKANAN MENGANDUNG KARBOHIDRAT YANG DIGORENG (BAKWAN, KENTANG GORENG, SINGKONG/UBI GORENG, DONAT, CAKE, BISKUIT, MAKANAN RINGAN, PERMEN, COKLAT, DLL.)?	H) .....1 .....5 8	H) .....1 .....5 8	H).....1 .....5 8

https://www.bps.go.id

BLOK XIV. KETERANGAN PENOLONG PERSALINAN (UNTUK ART PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN)			
PERTANYAAN	**PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)**	**PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)**	**PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)**
Nama dan No. Urut PPK Umur 10-54 Tahun: Umur *(Salin dari Blok IV 407)*: Nama & No. Urut Pemberi Informasi *(Salin dari Blok IV 402 & 401)*:	..... __ __ __ __ tahun ..... __ __	..... __ __ __ __ tahun ..... __ __	..... __ __ __ __ tahun ..... __ __
1401. A. APAKAH (*nama*) PERNAH HAMIL?	Ya, pernah hamil ..... 1 Ya, sedang hamil.....2 Tidak..... 5→ ***PPK berikutnya/ Blok XV***	Ya, pernah hamil ..... 1 Ya, sedang hamil.....2 Tidak..... 5→ ***PPK berikutnya/ Blok XV***	Ya, pernah hamil ...1 Ya, sedang hamil..... 2 Tidak..... 5→ ***PPK berikutnya/ Blok XV***
B. PADA UMUR BERAPA (*nama*) HAMIL **PERTAMA KALI**?	__ __ tahun	__ __ tahun	__ __ tahun
1402. A. APAKAH (*nama*) PERNAH MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP?	Ya .....1 Tidak..... 5→ ***PPK berikutnya/Blok XV***	Ya .....1 Tidak..... 5→ ***PPK berikutnya/Blok XV***	Ya ..... 1 Tidak..... 5→ ***PPK berikutnya/Blok XV***
B. PADA UMUR BERAPA (*nama*) MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP **PERTAMA KALI?**	__ __ tahun	__ __ tahun	__ __ tahun
1403. KAPAN MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP YANG TERAKHIR?	2 tahun yang lalu atau kurang...1 Lebih dari 2 tahun yang lalu .....2 ***PPK berikutnya/Blok XV*** ←	2 tahun yang lalu atau kurang...1 Lebih dari 2 tahun yang lalu.....2 ***PPK berikutnya/Blok XV*** ←	2 tahun yang lalu atau kurang...1 Lebih dari 2 tahun yang lalu.....2 ***PPK berikutnya/Blok XV*** ←
1404. A. DI MANA (*nama*) MELAHIRKAN *(nama anak lahir hidup yang terakhir)*?	RS Pemerintah/RS Swasta..... 1 Klinik ..... 2 Praktik dokter/bidan/perawat ... 3 Puskesmas ..... 4 Pustu ..... 5 Polindes/Poskesdes ..... 6 Rumah ..... 7 Lainnya 8	RS Pemerintah/RS Swasta..... 1 Klinik ..... 2 Praktik dokter/bidan/perawat ... 3 Puskesmas ..... 4 Pustu ..... 5 Polindes/Poskesdes ..... 6 Rumah ..... 7 Lainnya 8	RS Pemerintah/RS Swasta..... 1 Klinik ..... 2 Praktik dokter/bidan/perawat ... 3 Puskesmas ..... 4 Pustu..... 5 Polindes/Poskesdes ..... 6 Rumah ..... 7 Lainnya 8

17

https://www.bpsk.id

Lanjutan Lampiran 1

PERTANYAAN	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut PPK Umur 10-54 Tahun: Umur *(Salin dari Blok IV 407)*:	..... __ __ __ __ tahun	..... __ __ __ __ tahun	..... __ __ __ __ tahun
B. SIAPA YANG MENOLONG PROSES KELAHIRAN TERAKHIR?	Dokter kandungan ..... 1 Dokter umum ..... 2 Bidan ..... 3 Perawat..... 4 Tenaga kesehatan lainnya..... 5 Dukun beranak/paraji..... 6 Lainnya ..... 7 Tidak ada 8	Dokter kandungan ..... 1 Dokter umum ..... 2 Bidan ..... 3 Perawat..... 4 Tenaga kesehatan lainnya..... 5 Dukun beranak/paraji..... 6 Lainnya ..... 7 Tidak ada 8	Dokter kandungan ..... 1 Dokter umum ..... 2 Bidan..... 3 Perawat..... 4 Tenaga kesehatan lainnya..... 5 Dukun beranak/paraji..... 6 Lainnya ..... 7 Tidak ada 8
C. BERAPA BERAT (*nama anak lahir hidup yang terakhir*) KETIKA DILAHIRKAN?	< 2,5 kg ..... 1 ≥ 2,5 kg..... 2 Tidak ditimbang ..... 5 Tidak tahu 8	< 2,5 kg ..... 1 ≥ 2,5 kg..... 2 Tidak ditimbang ..... 5 Tidak tahu 8	< 2,5 kg ..... 1 ≥ 2,5 kg..... 2 Tidak ditimbang ..... 5 Tidak tahu 8
1405. BERAPA LAMA SETELAH KELAHIRAN (*nama anak lahir hidup yang terakhir*) PERTAMA KALI DILETAKKAN DI ATAS DADA IBU DENGAN BERSENTUHAN KULIT SECARA LANGSUNG?	<1 jam setelah lahir..... 1 1-23 jam setelah lahir ..... 2 ≥24 jam setelah lahir ..... 3 Tidak pernah..... 5 Tidak tahu..... 8	<1 jam setelah lahir..... 1 1-23 jam setelah lahir ..... 2 ≥24 jam setelah lahir ..... 3 Tidak pernah..... 5 Tidak tahu..... 8	<1 jam setelah lahir..... 1 1-23 jam setelah lahir ..... 2 ≥24 jam setelah lahir ..... 3 Tidak pernah..... 5 Tidak tahu..... 8

https://www.bps.go.id

BLOK XV. AKSES TERHADAP MAKANAN (DITANYAKAN PADA KRT/PASANGAN/ART 15 TAHUN KE ATAS)

Nama dan No. Urut Pemberi Informasi: ..... ☐☐

SEKARANG SAYA AKAN MENGAJUKAN BEBERAPA PERTANYAAN MENGENAI AKSES TERHADAP MAKANAN.

1501. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA **KHAWATIR TIDAK AKAN MEMILIKI CUKUP MAKANAN** UNTUK DISANTAP KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya ..... 1 Tidak ..... 5 Tidak tahu ..... 8 Menolak menjawab 9
1502. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA **TIDAK DAPAT MENYANTAP MAKANAN SEHAT DAN BERGIZI** KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya ..... 1 Tidak ..... 5 Tidak tahu ..... 8 Menolak menjawab 9
1503. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA HANYA **MENYANTAP SEDIKIT JENIS MAKANAN** KARENA TIDAK MEMILIKI UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya ..... 1 Tidak ..... 5 Tidak tahu ..... 8 Menolak menjawab 9
1504. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA **MELEWATKAN SATU WAKTU MAKAN PADA SUATU HARI TERTENTU** KARENA TIDAK MEMILIKI UANG ATAU SUMBER DAYA LAIN YANG CUKUP UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN?	Ya ..... 1 Tidak ..... 5 Tidak tahu ..... 8 Menolak menjawab 9
1505. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA **MAKAN LEBIH SEDIKIT DARIPADA SEHARUSNYA** KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya ..... 1 Tidak ..... 5 Tidak tahu ..... 8 Menolak menjawab 9
1506. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA RUMAH TANGGA **KEHABISAN MAKANAN** KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya ..... 1 Tidak ..... 5 Tidak tahu ..... 8 Menolak menjawab 9
1507. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA **MERASA LAPAR TAPI TIDAK MAKAN** KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN?	Ya ..... 1 Tidak ..... 5 Tidak tahu ..... 8 Menolak menjawab 9
1508. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA **TIDAK MAKAN SEHARIAN** KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya ..... 1 Tidak ..... 5 Tidak tahu ..... 8 Menolak menjawab 9

BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN

Nama dan No. Urut Pemberi Informasi: ..... ☐☐

1601. BERAPA JUMLAH KELUARGA YANG TINGGAL DI DALAM BANGUNAN TEMPAT TINGGAL INI?	☐ keluarga *(Isikan 7, jika terdapat 7 keluarga atau lebih)*

BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN

1602. APA STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL YANG DITEMPATI?	Milik sendiri ..... 1 Kontrak/sewa ..... 2 Bebas sewa ..... 3 Dinas ..... 4 Lainnya, ***tuliskan:*** _____ 5 } ***1604***
1603. APA JENIS BUKTI KEPEMILIKAN TANAH BANGUNAN TEMPAT TINGGAL INI?	Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART ..... 1 SHM bukan atas nama ART dengan perjanjian pemanfaatan tertulis ..... 2 SHM bukan atas nama ART tanpa perjanjian pemanfaatan tertulis ..... 3 Sertifikat selain SHM (SHGB, SHMSRS) ..... 4 Surat bukti lainnya (Girik, AJB, *Letter* C, dll.) ... 5 Tidak punya 6
1604. BERAPA LUAS LANTAI RUMAH BANGUNAN TEMPAT TINGGAL?	☐☐☐ m² (*Bulatkan dalam meter persegi*)
1605. APAKAH KEPALA RUMAH TANGGA/PASANGAN-NYA/ANAKNYA MEMILIKI RUMAH LAIN, SELAIN RUMAH YANG DITEMPATI SAAT INI?	Ya ..... 1 Tidak 5
1606. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA ATAP RUMAH TERLUAS?	Beton ..... 1 Genteng ..... 2 Seng ..... 3 Kayu/sirap ..... 4 Asbes ..... 5 Bambu/jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia ..... 6 Lainnya 7
1607. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA DINDING RUMAH TERLUAS?	Tembok ..... 1 Plesteran anyaman bambu/kawat ..... 2 Kayu/papan/batang kayu ..... 3 Bambu/anyaman bambu ..... 4 Lainnya 5
1608. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA LANTAI RUMAH TERLUAS?	Marmer/granit ..... 1 Keramik/ubin/tegel/teraso ..... 2 Parket/vinil/karpet ..... 3 Kayu/papan ..... 4 Semen/bata merah ..... 5 Bambu/tanah ..... 6 Lainnya 7

19

http://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN

1609. A. APAKAH MEMILIKI FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR DAN SIAPA SAJA YANG MENGGUNAKAN?	Ada, digunakan hanya ART sendiri ..... 1 Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu ..... 2 Ada, di MCK komunal ..... 3 Ada, di MCK umum/ siapapun menggunakan ..... 4 Ada, ART tidak menggunakan ..... 5 Tidak ada fasilitas ..... 6 } ***1610.A***
B. [***Jika 1609.A = 1, 2, atau 3***]. APAKAH JENIS KLOSET YANG DIGUNAKAN?	Leher angsa ..... 1 Plengsengan dengan tutup ..... 2 Plengsengan tanpa tutup ..... 3 Cemplung/cubluk 4
C. DI MANAKAH TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TINJA?	Tangki septik ..... 1 IPAL ..... 2 Kolam/sawah/sungai/danau/laut ..... 3 Lubang tanah ..... 4 Pantai/tanah lapang/kebun ..... 5 Lainnya ..... 6 } ***1610.A***
D. SUDAH BERAPA LAMA TANGKI SEPTIK INI DIBUAT/DIBANGUN?	☐☐ tahun Tidak tahu 98
E. **DALAM 5 TAHUN TERAKHIR,** BERAPA KALI TANGKI SEPTIK INI DIKOSONGKAN/ DILAKUKAN PENYEDOTAN?	☐ kali (*Isikan 6, jika 6 kali atau lebih*) Tidak pernah ..... 7 Tidak tahu 8
1610. A. APA SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK **MINUM**?	Air kemasan bermerek ..... 1 Air isi ulang ..... 2 } ***1611.A*** Leding ..... 3 Sumur bor/pompa ..... 4 Sumur terlindung ..... 5 Sumur tak terlindung ..... 6 Mata air terlindung ..... 7 Mata air tak terlindung ..... 8 } ***1610.C*** Air permukaan (sungai/ danau/waduk/kolam/irigasi) ..... 9 Air hujan ..... 10 Lainnya ..... 11 } ***1611.A***

BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN

B. [***Jika 1610.A = 3 (leding)***]. APA MEDIA UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MENGAKSES SUMBER AIR UTAMA UNTUK MINUM?	Perpipaan meteran ..... 1 Perpipaan tanpa meteran ..... 2 Hidran umum ..... 3 Keran umum ..... 4 Terminal air ..... 5 Tidak ada ..... 6 Tidak tahu ..... 8 } ***1611.A***
C. [***Jika 1610.A = 4, 5, 6, 7, atau 8 (sumur/pompa/mata air)***]. BERAPA JARAK KE TEMPAT PENAMPUNGAN LIMBAH/KOTORAN/TINJA TERDEKAT?	< 10 m ..... 1 ≥ 10 m ..... 2 Tidak tahu 8
1611. A. DI MANAKAH LOKASI SUMBER/FASILITAS AIR MINUM TERSEBUT?	Di rumah/kawasan dalam pagar rumah ..... 1 → ***1612*** Di luar kawasan pagar rumah 2
B. BERAPA LAMA WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENGAMBIL AIR KE SUMBER/FASILITAS AIR SAMPAI KEMBALI LAGI KE RUMAH?	☐☐☐ menit Tidak tahu 998
1612. **DALAM SETAHUN TERAKHIR**, APAKAH RUMAH TANGGA PERNAH MENGALAMI KEKURANGAN AIR MINUM UNTUK KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SELAMA MINIMAL 24 JAM?	Ya ..... 1 Tidak ..... 5 Tidak tahu 8
1613. BAGAIMANA KONDISI FISIK SUMBER AIR UTAMA UNTUK MINUM MENURUT ANDA?	Ya / Tidak A. KERUH ..... 1 / 5 B. BERWARNA ..... 1 / 5 C. BERASA ..... 1 / 5 D. BERBUSA ..... 1 / 5 E. BERBAU ..... 1 / 5
1614. A. APA SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK **MANDI/CUCI/DLL.**?	Air kemasan bermerek ..... 1 Air isi ulang ..... 2 } ***1615.A*** Leding ..... 3 Sumur bor/pompa ..... 4 Sumur terlindung ..... 5 Sumur tak terlindung ..... 6 Mata air terlindung ..... 7 Mata air tak terlindung ..... 8 Air permukaan (sungai/ danau/waduk/kolam/irigasi) ..... 9 Air hujan ..... 10 Lainnya. ..... 11 } ***1615.A***

https://www.bps.go.id

BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN	
B. [*Jika 1614.A = 3 (leding)*]. APA MEDIA UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MENGAKSES SUMBER AIR UTAMA UNTUK **MANDI/CUCI/DLL.**?	Perpipaan meteran ..... 1 Perpipaan tanpa meteran ..... 2 Hidran umum ..... 3 Keran umum ..... 4 Terminal air ..... 5 Tidak ada ..... 6 Tidak tahu 8
1615. A. BOLEHKAH SAYA MELIHAT TEMPAT DI MANA ANGGOTA RUMAH TANGGA ANDA BIASA MENCUCI TANGAN?	Ya, di dalam rumah ..... 1 Ya, di luar rumah ..... 2 Tidak ada tempat cuci tangan ..... 3 Tidak diizinkan melihat ..... 4 } ***1616.A***
B. Amati ketersediaan air di tempat mencuci tangan! Verifikasi dengan memeriksa keran/pompa atau baskom, ember, wadah air atau sejenisnya.	Tersedia air ..... 1 Tidak tersedia air 5
C. Cek ketersediaan sabun atau deterjen di tempat mencuci tangan!	Tersedia sabun/detergen ..... 1 Tidak tersedia sabun/detergen 5
1616. A. APAKAH SUMBER UTAMA PENERANGAN RUMAH TANGGA INI?	Listrik PLN dengan meteran ..... 1 Listrik PLN tanpa meteran ..... 2 Listrik non-PLN ..... 3 Bukan listrik ..... 4 } ***1617***
B. BERAPA DAYA TERPASANG DI RUMAH INI? 1. 450 *Watt* 2. 900 *Watt* 3. 1.300 *Watt* atau lebih	Meteran 1 ☐ Meteran 2 ☐ Meteran 3 ☐ *(Isikan daya untuk setiap meteran yang terpasang)*
1617. APAKAH JENIS BAHAN BAKAR UTAMA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMASAK?	Listrik ..... 1 Elpiji 5,5 kg/*blue gaz* ..... 2 Elpiji 12 kg ..... 3 Elpiji 3 kg ..... 4 Gas kota ..... 5 Biogas ..... 6 Minyak tanah ..... 7 Briket ..... 8 Arang ..... 9 Kayu bakar ..... 10 Lainnya ..... 11 Tidak memasak di rumah 0

BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN	
1618. APAKAH **RUMAH TANGGA** MELAKUKAN PEMILAHAN SAMPAH DAN BERAPA JENIS PEMILAHAN SAMPAH YANG DILAKUKAN?	Ya, 2 jenis pemilahan sampah ..... 1 Ya, 3 jenis atau lebih pemilahan sampah ..... 2 Tidak dilakukan pemilahan sampah 5
1619. A. **DALAM SEBULAN TERAKHIR**, APAKAH RUMAH TANGGA MENERIMA LAYANAN PENGUMPULAN SAMPAH DARI RUMAH KE RUMAH?	Ya ..... 1 Tidak ..... 5 → ***1620.A***
B. APAKAH **PETUGAS PENGUMPUL SAMPAH** MELAKUKAN PEMILAHAN SAMPAH DAN BERAPA JENIS PEMILAHAN SAMPAH YANG DILAKUKAN?	Ya, 2 jenis pemilahan sampah ..... 1 Ya, 3 jenis atau lebih pemilahan sampah ..... 2 Tidak dilakukan pemilahan sampah ..... 5 Tidak tahu 8
C. BERAPA KALI **PETUGAS PENGUMPUL SAMPAH** MELAKUKAN PENGUMPULAN SAMPAH DALAM SATU MINGGU?	Setiap hari ..... 1 Setiap 2-3 hari sekali ..... 2 Setiap seminggu sekali ..... 3 Tidak rutin 5
1620. A. **DALAM SEBULAN TERAKHIR**, APAKAH RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN TEMPAT PENGUMPULAN SAMPAH BERSAMA (KOMUNAL)?	Ya ..... 1 Tidak ..... 5 → ***1621***
B. BERAPA PERKIRAAN JARAK DARI RUMAH KE TEMPAT PENGUMPULAN SAMPAH BERSAMA (KOMUNAL)?	≤ 200 m ..... 1 Lebih dari 200 m 2
C. APAKAH **PETUGAS PENGUMPUL SAMPAH DI TEMPAT PENGUMPULAN SAMPAH BERSAMA (KOMUNAL)** MELAKUKAN PEMILAHAN SAMPAH DAN BERAPA JENIS PEMILAHAN SAMPAH YANG DILAKUKAN?	Ya, 2 jenis pemilahan sampah ..... 1 Ya, 3 jenis atau lebih pemilahan sampah ..... 2 Tidak dilakukan pemilahan sampah ..... 5 Tidak tahu 8
D. BERAPA KALI **PETUGAS PENGUMPUL SAMPAH DI TEMPAT PENGUMPULAN SAMPAH BERSAMA (KOMUNAL)** MELAKUKAN PENGUMPULAN SAMPAH DALAM SATU MINGGU?	Setiap hari ..... 1 Setiap 2-3 hari sekali ..... 2 Setiap seminggu sekali ..... 3 Tidak rutin ..... 5 Tidak tahu 8

21

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN

		Ya	Tidak
1621. **DALAM SEBULAN TERAKHIR**, APAKAH RUMAH TANGGA MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH BERIKUT INI:	A. DISETOR KE BANK SAMPAH	1	5
	B. DIDAUR ULANG/DIBUAT KOMPOS/	1	5
	C. PAKAN TERNAK (TERMASUK BUDI DAYA MAGGOT	1	5
	D. DIBAKAR	1	5
	E. DITIMBUN	1	5
	F. DIBUANG SEMBARANGAN (SUNGAI/SELOKAN/DLL.)	1	5
	G. LAINNYA	1	5

1622. **DALAM SETAHUN TERAKHIR**, SEBERAPA KHAWATIR ANDA/ART LAINNYA DENGAN KEAMANAN DIRI SAAT BERJALAN KAKI SENDIRIAN PADA MALAM HARI DI LINGKUNGAN SEKITAR RUMAH (SLS terkecil)?	TIDAK KHAWATIR 1 CENDERUNG TIDAK KHAWATIR 2 CENDERUNG KHAWATIR 3 KHAWATIR 4 Tidak relevan 7

BLOK XVII. AKSES TERHADAP LAYANAN KEUANGAN

		Ya	Tidak
1701. **DALAM SETAHUN TERAKHIR**, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA/MENCAIRKAN KREDIT?	A. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)	1	5
	B. KREDIT DARI BANK UMUM SELAIN KUR	1	5
	C. KREDIT DARI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)	1	5
	D. KREDIT DARI KOPERASI	1	5
	E. PERORANGAN DENGAN BUNGA	1	5
	F. PEGADAIAN	1	5
	G. PERUSAHAAN *LEASING*	1	5
	H. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)	1	5
	I. PINJAMAN *ONLINE*	1	5
	J. PNM-MEKAAR	1	5
	K. LAINNYA	1	5
1702. **DALAM SETAHUN TERAKHIR**, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI UANG ELEKTRONIK?	A. UANG ELEKTRONIK BERBASIS SERVER (DOMPET DIGITAL/*E-WALLET*)	1	5
	B. UANG ELEKTRONIK BERBASIS KARTU/*CHIP* (*E-MONEY*)	1	5

BLOK XVIII. KETERANGAN KEPEMILIKAN BARANG

		Ya	Tidak
1801. APAKAH RUMAH TANGGA INI MEMILIKI BARANG-BARANG SEBAGAI BERIKUT?	A. TABUNG GAS 5,5 KG ATAU LEBIH	1	5
	B. LEMARI ES/KULKAS	1	5
	C. AC	1	5
	D. PEMANAS AIR (*WATER HEATER*)	1	5
	E. TELEPON RUMAH (PSTN)	1	5
	F. KOMPUTER/*LAPTOP*/*TABLET*	1	5
	G. EMAS/PERHIASAN MINIMAL 10 GRAM	1	5
	H. SEPEDA MOTOR	1	5
	I. PERAHU	1	5
	J. PERAHU MOTOR	1	5
	K. MOBIL	1	5
	L. TELEVISI LAYAR DATAR MINIMAL 30 INCH	1	5
	M. TANAH/LAHAN	1	5
	N. UANG TUNAI/TABUNGAN SENILAI 10 GRAM EMAS	1	5

1802. ***Jika 1801.M = 1.*** JIKA MEMILIKI TANAH/LAHAN, SIAPA PEMILIK TANAH/LAHAN TERSEBUT?	KRT A Pasangan KRT B Anak C ART lainnya D

BLOK XIX. KETERANGAN SUMBER PENGHASILAN RUMAH TANGGA

1901. A. APAKAH SUMBER TERBESAR PEMBIAYAAN DI RUMAH TANGGA INI?	ART yang bekerja 1 Kiriman uang/barang 2 → ***1901.C*** Hasil investasi (deposito, saham, sukuk, reksa dana, royalti, dll.) 3 → ***Blok XX*** Tabungan 4 → ***Blok XX*** Pensiunan 5 → ***Blok XX***
B. ***Jika 1901.A = 1.*** SIAPAKAH ART YANG MENANGGUNG PEMBIAYAAN TERBESAR?	Nama ART : ..... No.Urut ART : ☐☐
C. ***Jika 1901.A = 2.*** APABILA MENERIMA KIRIMAN UANG/BARANG DARI MANAKAH SUMBER UTAMANYA?	Orang tua 1 Anak 2 Famili lain 3 Lainnya 4

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XX. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL			
2001. **DALAM SETAHUN TERAKHIR,** APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI ATAU MENERIMA JAMINAN SOSIAL BERUPA:	Ya / Tidak	BERAPA JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI ATAU MENERIMA JAMINAN SOSIAL TERSEBUT?	APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG SUDAH MELAKUKAN **KLAIM MANFAAT** JAMINAN SOSIAL TERSEBUT? Ya / Tidak
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
A. JAMINAN PENSIUN/VETERAN	A. .....1 → ***2001.iii.A*** ..... 5 → ***2001.B***	A. _____ orang	A. 1 5
B. JAMINAN HARI TUA	B. .....1 → ***2001.iii.B*** ..... 5 → ***2001.C***	B. _____ orang	B. 1 5
C. JAMINAN/ASURANSI KECELAKAAN KERJA	C. .....1 → ***2001.iii.C*** ..... 5 → ***2001.D***	C. _____ orang	C. 1 5
D. JAMINAN/ASURANSI KEMATIAN	D. .....1 → ***2001.iii.D*** ..... 5 → ***2001.E***	D. _____ orang	D. 1 5
E. JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP)	E. .....1 → ***2001.iii.E*** ..... 5 → ***2001.F***	E. _____ orang	E. 1 5
F. PESANGON PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)	F. .....1 → ***2001.iii.F*** ..... 5 → ***2002***	F. _____ orang	F. 1 5
2002. **DALAM SETAHUN TERAKHIR,** APAKAH RUMAH TANGGA ANDA PERNAH MENJADI PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)?	Ya .....1 Tidak ..... 5 → ***2004***		
2003. A. APAKAH SAAT INI RUMAH TANGGA ANDA MASIH TERCATAT/ MENJADI PENERIMA PKH?	Ya .....1 Tidak ..... 5 } ***2004*** Tidak tahu 8		
B. DI MANA RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN PKH?	Kantor pos .....1 ATM .....2 Kantor bank .....3 Agen bank .....4 Pendamping, ketua kelompok 5		
C. **DALAM SETAHUN TERAKHIR,** UNTUK APA SAJA BANTUAN PKH DIPERGUNAKAN? ADA LAGI? *(Pilihan jawaban boleh lebih dari satu yang dipilih)*	Belanja pangan .....A Biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga (sewa rumah/kontrak, listrik, air, telepon, bahan bakar, dll.) ..... B Biaya pengobatan .....C Biaya perawatan ibu hamil ..... D Biaya sekolah .....E Pembayaran hutang/kredit .....F Lainnya, ***tuliskan***: _____ G		
2004. JIKA TERDAPAT ART UMUR 5-24 TAHUN, BERSEKOLAH YANG MENERIMA PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS (***Jika 618 terdapat ART yang kode A dilingkari***), SEBUTKAN APA SAJA MENU YANG DIPEROLEH **SELAMA SEMINGGU TERAKHIR**:	Ya / Tidak A. DAGING .....1 5 B. IKAN .....1 5 C. AYAM .....1 5 D. TAHU/TEMPE .....1 5 E. SAYUR .....1 5 F. SUSU .....1 5 G. LAINNYA, ***tuliskan:*** _____ 1 5		
2005. APAKAH RUMAH TANGGA ANDA PERNAH MENJADI PENERIMA PROGRAM BPNT/PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS?	Ya .....1 Tidak .....5 → ***2007***		

23

DRAFT www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XX. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL				
2006. **DALAM 4 BULAN TERAKHIR**, SEBUTKAN INFORMASI PEMBELIAN/ PENGGUNAAN PROGRAM BPNT/PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS: A. APAKAH RUMAH TANGGA MENERIMA PROGRAM BPNT/ PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS PADA 4 BULAN TERAKHIR?	***Bulan Januari 2025*** Ya ..... 1 Tidak.....5→***Desember '24***	***Bulan Desember 2024*** Ya ..... 1 Tidak.....5→***November '24***	***Bulan November 2024*** Ya ..... 1 Tidak ..... 5→***Oktober '24***	***Bulan Oktober 2024*** Ya..... 1 Tidak ..... 5→ ***2006***
B. APAKAH ANDA MENGETAHUI BERAPA NILAI YANG DITERIMA DARI PROGRAM BPNT/PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS?	Ya, ***tuliskan***.....1 Rp. _ _ _ . _ _ _ ,- Tidak ..... 5→***2006.D***	Ya, ***tuliskan*** ..... 1 Rp. _ _ _ . _ _ _ ,- Tidak.....5→***2006.D***	Ya, ***tuliskan*** ..... 1 Rp. _ _ _ . _ _ _ ,- Tidak ..... 5→***2006.D***	Ya, ***tuliskan*** ..... 1 Rp. _ _ _ . _ _ _ ,- Tidak .....5→***2006.D***
C. UNTUK PENERIMAAN BERAPA BULAN?	___ Bulan	___ Bulan	___ Bulan	___ Bulan
D. DI MANA RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA PROGRAM BPNT/ PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS TERSEBUT?	Kantor pos..... 1 ATM.....2 Kantor bank.....3 Agen bank.....4 Pendamping, ketua kelompok.....5	Kantor pos ..... 1 ATM .....2 Kantor bank ..... 3 Agen bank.....4 Pendamping, ketua kelompok.....5	Kantor pos ..... 1 ATM .....2 Kantor bank ..... 3 Agen bank.....4 Pendamping, ketua kelompok.....5	Kantor pos..... 1 ATM ..... 2 Kantor bank.....3 Agen bank..... 4 Pendamping, ketua kelompok.....5
E. UNTUK APA SAJA PROGRAM BPNT/PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS DIPERGUNAKAN? ADA LAGI?	Belanja pangan ..... A Biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga .....B Biaya pengobatan.....C Biaya perawatan ibu hamil .....D Biaya sekolah ..... E Pembayaran hutang/kredit .....F Lainnya, ***tuliskan:*** _____ G	Belanja pangan.....A Biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga ..... B Biaya pengobatan .....C Biaya perawatan ibu hamil ..... D Biaya sekolah.....E Pembayaran hutang/kredit .....F Lainnya, ***tuliskan:*** _____G	Belanja pangan..... A Biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga ..... B Biaya pengobatan .....C Biaya perawatan ibu hamil ..... D Biaya sekolah.....E Pembayaran hutang/kredit ..... F Lainnya, ***tuliskan:*** _____G	Belanja pangan..... A Biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga .....B Biaya pengobatan .....C Biaya perawatan ibu hamil .....D Biaya sekolah ..... E Pembayaran hutang/kredit .....F Lainnya, ***tuliskan:*** _____ G
2007. **DALAM SETAHUN TERAKHIR**, APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA BANTUAN/PROGRAM DARI **PEMERINTAH** SEBAGAI BERIKUT:		Ya Tidak A. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) ..... 1 5 B. BANTUAN PADAT KARYA TUNAI (PKT) ..... 1 5 C. BANTUAN PANGAN PEMERINTAH (BERAS DARI BADAN PANGAN NASIONAL/BAPANAS) ... 1 5 D. PROGRAM BANTUAN SERTIFIKASI TANAH 1 5		
2008. A. APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI USAHA MIKRO ATAU KECIL? *Usaha mikro atau kecil bisa pada sektor apapun, tidak terbatas pada sektor industri atau perdagangan*	Ya .....1 *Tuliskan No. Urut ART* 1)☐☐ ; 2)☐☐ ; 3)☐☐ ; 4)☐☐ Tidak .....5 *Penjelasan:* 1. ***Usaha mikro*** *memiliki modal usaha maksimal Rp1 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal 2 miliar.* 2. ***Usaha kecil*** *memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai Rp15 miliar.*			

BLOK XX. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL

		Ya	Tidak
B. **DALAM SETAHUN TERAKHIR**, APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA DARI PEMERINTAH SEBAGAI BERIKUT:	(i) PELATIHAN TEKNIS PRODUKSI	1	5
	(ii) PERIZINAN KOMERSIL/SERTIFIKASI	1	5
	(iii) PEMASARAN/DIGITALISASI USAHA	1	5
	(iv) PELAPORAN KEUANGAN	1	5
	(v) FASILITAS PERMODALAN	1	5

		Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir	
2009. A. **DALAM SETAHUN TERAKHIR,** APAKAH RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN/BANTUAN SOSIAL/SUBSIDI DARI **PEMERINTAH DAERAH** BERUPA **BANTUAN RUTIN**?	Ya .....1 → ***2009.A. i s.d. v***	(i) BANTUAN RUTIN UNTUK PANGAN	Rp. __ __ . __ __ __ . __ __ __,–
		(ii) BANTUAN RUTIN UNTUK ANAK	Rp. __ __ . __ __ __ . __ __ __,–
	Tidak ..... 5 → ***2009.B***	(iii) BANTUAN RUTIN UNTUK LANSIA	Rp. __ __ . __ __ __ . __ __ __,–
		(iv) BANTUAN RUTIN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS	Rp. __ __ . __ __ __ . __ __ __,–
		(v) BANTUAN RUTIN LAINNYA	Rp. __ __ . __ __ __ . __ __ __,–
B. **DALAM SETAHUN TERAKHIR,** APAKAH RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN/BANTUAN SOSIAL/SUBSIDI DARI **PEMERINTAH DAERAH** BERUPA **BANTUAN TIDAK RUTIN**?	Ya ..... 1 → ***2009.B. i***	**Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir**	
	Tidak ..... 5 → ***Blok XXI***	(i) BANTUAN TIDAK RUTIN	Rp. __ __ . __ __ __ . __ __ __,–

PERTANYAAN	ANAK UMUR 2-4 TAHUN (1)	ANAK UMUR 2-4 TAHUN (2)	ANAK UMUR 2-4 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut Anak Umur 2-4 Tahun:	..... __ __	..... __ __	..... __ __
Umur *(Salin dari Blok IV 407):*	__ __ tahun	__ __ tahun	__ __ tahun
Nama & No. Urut Pemberi Informasi *(Salin dari Blok IV 402 & 401):*	..... __ __	..... __ __	..... __ __

BLOK XXI. KETERANGAN PENGASUHAN ANAK UMUR 2-4 TAHUN

2101. BERAPA BANYAK BUKU ANAK-ANAK ATAU BUKU BERGAMBAR YANG ADA DI RUMAH INI UNTUK *(nama anak)*?	☐☐ buku *Isikan 10, jika ada 10 buku atau lebih*	☐☐ buku *Isikan 10, jika ada 10 buku atau lebih*	☐☐ buku *Isikan 10, jika ada 10 buku atau lebih*
2102. SAYA INGIN MENGETAHUI BENDA-BENDA APA SAJA YANG *(nama anak)* MAINKAN KETIKA DIA BERMAIN DI RUMAH. APAKAH *(nama anak)* BERMAIN DENGAN:	Ya / Tidak / Tidak Tahu	Ya / Tidak / Tidak Tahu	Ya / Tidak / Tidak Tahu
A. MAINAN BUATAN SENDIRI, SEPERTI BONEKA, MOBIL-MOBILAN, ATAU MAINAN LAINNYA YANG DIBUAT DI RUMAH?	A) .....1 .....5 8	A).....1 .....5 8	A).....1 .....5 8
B. MAINAN YANG DIBELI DARI TOKO ATAU MAINAN BUATAN PABRIK?	B) .....1 .....5 8	B).....1 .....5 8	B).....1 .....5 8
C. MAINAN DARI PERALATAN RUMAH TANGGA (SEPERTI MANGKUK, PANCI) ATAU BENDA YANG DIDAPAT DARI LUAR RUMAH (SEPERTI RANTING POHON, BATU, KULIT KERANG, ATAU DAUN)?	C) .....1 .....5 8	C).....1 .....5 8	C) .....1 .....5 8

25

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XXII. CATATAN

Kunjungan I	:	Tanggal:	Mulai:	☐☐ : ☐☐	Selesai:	☐☐ : ☐☐
Kunjungan II	:	Tanggal:	Mulai:	☐☐ : ☐☐	Selesai:	☐☐ : ☐☐

https://www.bps.go.id

Kode 705: Lapangan Usaha (diisi oleh pemeriksa)

01.Pertanian tanaman padi dan palawija
02.Hortikultura
03.Perkebunan
04.Perikanan
05.Peternakan
06.Kehutanan dan pertanian lainnya
07.Pertambangan dan penggalian
08.Industri pengolahan
09.Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin
10.Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi
11. Konstruksi
12. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor
13. Pengangkutan dan pergudangan
14. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
15. Informasi dan komunikasi
16. Aktivitas keuangan dan asuransi
17. Real estat
18. Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis
19. Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya
20. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib
21. Pendidikan
22. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial
23. Kesenian, hiburan, dan rekreasi
24. Aktivitas jasa lainnya
25. Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja
26. Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya

Waktu selesai wawancara: ☐☐ : ☐☐

LAMPIRAN 2
METADATA

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rasio Peserta Didik per Rombel	Perbandingan antara jumlah peserta didik dengan jumlah rombongan belajar (rombel) di setiap jenjang pendidikan.	$= \frac{\textit{jumlah peserta didik di jenjang pendidikan i}}{\textit{jumlah rombongan belajar di jenjang pendidikan i}}$	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2	Rasio Rombel per Kelas	Perbandingan antara jumlah rombongan belajar (rombel) dengan jumlah kelas di setiap jenjang pendidikan.	$= \frac{\textit{jumlah rombongan belajar di jenjang pendidikan i}}{\textit{jumlah kelas di jenjang pendidikan i}}$	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
3	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Akademik S1/D4	Jumlah guru yang berkualifikasi S1/D4 dibagi dengan jumlah seluruh guru pada jenjang yang sama, dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	$= \frac{\textit{jumlah guru di jenjang pendidikan i yang berkualifikasi S1/D4}}{\textit{jumlah guru di jenjang pendidikan i}}$	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
4	Rasio Murid-Guru	Perbandingan antara jumlah peserta didik dengan jumlah guru di setiap jenjang pendidikan.	$= \frac{\textit{jumlah murid di jenjang pendidikan i}}{\textit{jumlah guru di jenjang pendidikan i}}$	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 2

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Usia 3–6 Tahun	Perbandingan antara jumlah penduduk usia 0–6 tahun yang masih/pernah bersekolah di jenjang pendidikan PAUD pada tahun ajaran 2024/2025 dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang PAUD (umur 3–6 tahun). Dalam hal ini, PAUD meliputi Taman Kanak-kanak, Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal, PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll.	$APKPAUD = \frac{JMPAUD}{JP3-6} x100\%$ APK PAUD: APK PAUD JMPAUD: Jumlah penduduk umur 0–6 tahun yang mengikuti PAUD JP3–6: Jumlah penduduk umur 3–6 tahun	Susenas Maret
6	Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar)	Indikator ini mengukur angka partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yaitu: a. Pendidikan anak usia dini (Prasekolah) yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan PAUD. b. Sekolah Dasar/sederajat.	$TP_6 = \frac{(N_{6PAUD} + N_{6SD})}{N_6} x100\%$ TP6: Tingkat partisipasi anak usia 6 tahun di program pembelajaran yang terorganisir N6PAUD: Jumlah anak usia 6 tahun yang belajar di PAUD pada periode tertentu N6SD: Jumlah anak usia 6 tahun yang belajar di SD pada periode tertentu N6: Jumlah populasi anak usia 6 tahun pada periode yang sama Usia yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah usia sekolah (*school age*), bukan usia ketika pengumpulan data Susenas dilakukan.	Susenas Maret

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 2

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Angka Kesiapan Sekolah (AKS)	Perbandingan antara jumlah penduduk yang saat ini bersekolah kelas 1 SD sederajat dan sebelumnya pernah mengikuti PAUD dengan jumlah penduduk kelas 1 SD sederajat. Dalam hal ini, PAUD meliputi Taman Kanak-kanak, Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal, PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll.	$AKS = \frac{JM1SDPAUD}{JM1SD} x100\%$ AKS: Angka Kesiapan Sekolah JM1SDPAUD: Jumlah murid kelas 1 SD sederajat yang pernah mengikuti PAUD JM1SD: Jumlah murid kelas 1 SD sederajat	Susenas Maret
8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SD sederajat (7–12 tahun).	$APKSD = \frac{JMSD}{JP7-12} x100\%$ APKSD: APK SD sederajat JMSD: Jumlah murid SD sederajat JP7–12: Jumlah penduduk umur 7–12 tahun	Susenas Maret
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMP sederajat (13–15 tahun).	$APKSMP = \frac{JMSMP}{JP13-15} x100\%$ APKSMP: APK SMP sederajat JMSMP: Jumlah murid SMP sederajat JP13–15: Jumlah penduduk umur 13–15 tahun	Susenas Maret

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 2

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat (16–18 tahun).	$APKSM = \frac{JMSM}{JP16-18} x100\%$ APKSM: APK SMA/SMK sederajatJMSM: Jumlah murid SMA/SMK sederajatJP16–18: Jumlah penduduk umur 16–18 tahun	Susenas Maret
11	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT)	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan PT (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan PT (19–23 tahun).	$APKPT = \frac{JMPT}{JP19-23} x100\%$ APKPT: APK PT JMPT: Jumlah murid PT JP19–23: Jumlah penduduk umur 19–23 tahun	Susenas Maret
12	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7–12 Tahun	Proporsi penduduk kelompok usia 7–12 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk usia 7–12 tahun.	$APS_{7-12} = \frac{Jumlah\ penduduk\ umur\ 7-12\ tahun\ yang\ masih\ bersekolah}{Jumlah\ penduduk\ umur\ 7-12\ tahun} x100\%$	Susenas Maret

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 2

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13–15 Tahun	Proporsi penduduk kelompok usia 13–15 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk usia 13–15 tahun.	$APS_{13-15} = \frac{\textit{Jumlah penduduk umur 13 – 15 tahun yang masih bersekolah}}{\textit{Jumlah penduduk umur 13 – 15 tahun}} x100\%$	Susenas Maret
14	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16–18 Tahun	Proporsi penduduk kelompok usia 16–18 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk usia 16–18 tahun.	$APS_{16-18} = \frac{\textit{Jumlah penduduk umur 16 – 18 tahun yang masih bersekolah}}{\textit{Jumlah penduduk umur 16 – 18 tahun}} x100\%$	Susenas Maret
15	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19–23 Tahun	Proporsi penduduk kelompok usia 19–23 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk usia 19–23 tahun.	$APS_{19-23} = \frac{\textit{Jumlah penduduk umur 19 – 23 tahun yang masih bersekolah}}{\textit{Jumlah penduduk umur 19 – 23 tahun}} x100\%$	Susenas Maret
16	Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat	Perbandingan antara jumlah penduduk umur 7–12 tahun yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD sederajat dengan jumlah penduduk umur 7–12 tahun.	$APMSD = \frac{JMSD7-12}{JP7-12} x100\%$ APMSD: APM SD sederajat JMSD7–12: Jumlah murid SD sederajat umur	Susenas Maret

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 2

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			7–12 tahun JP7–12: Jumlah penduduk umur 7–12 tahun	
17	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat	Perbandingan antara jumlah penduduk umur 13–15 tahun yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP sederajat dengan jumlah penduduk umur 13–15 tahun.	$APMSMP = \frac{JMSMP13-15}{JP13-15} x100\%$ APMSMP: APM SMP sederajat JMSMP13–15: Jumlah murid SMP sederajat umur 13–15 tahun JP13–15: Jumlah penduduk umur 13–15 tahun	Susenas Maret
18	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK Sederajat	Perbandingan antara jumlah penduduk umur 16–18 tahun yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat dengan jumlah penduduk umur 16–18 tahun.	$APMSM = \frac{JMSM16-18}{JP16-18} x100\%$ APMSM: APM SMA/SMK sederajatJMSM16–18: Jumlah murid SMA/SMK sederajat umur 16–18 tahunJP16–18: Jumlah penduduk umur 16–18 tahun	Susenas Maret
19	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Tinggi (PT)	Perbandingan antara jumlah penduduk umur 19–23 tahun yang masih bersekolah di jenjang pendidikan PT dengan jumlah penduduk umur 19–23 tahun.	$APMPT = \frac{JMPT19-23}{JP19-23} x100\%$ APMPT: APM PT JMPT19–23: Jumlah murid PT umur 19–23 tahun JP19–23: Jumlah penduduk umur 19–23 tahun	Susenas Maret

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 2

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Angka Anak Tidak Sekolah Usia 7–12 Tahun, Usia 13–15 Tahun, dan Usia 16–18 Tahun	Anak tidak sekolah adalah anak-anak dan remaja usia sekolah, yaitu 7–12 tahun, usia 13–15 tahun, dan usia 16–18 tahun yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan.	$PS_i = \frac{N_{PSi}}{N_i} x100\%$ PSi: Angka anak tidak sekolah pada kelompok usia sekolah i NPSi: Jumlah penduduk dalam kelompok usia sekolah i yang tidak terdaftar di sekolah pada periode tertentu Ni: Jumlah penduduk yang termasuk dalam kelompok usia sekolah i pada periode yang sama Usia yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah usia sekolah (*school age*), bukan usia ketika pengumpulan data Susenas dilakukan.	Susenas Maret
21	Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan	Persentase siswa yang pada tahun ajaran sekarang tidak melanjutkan sekolah lagi sebelum lulus dari jenjang pendidikan tertentu, terhadap siswa yang pada tahun ajaran lalu masih bersekolah di jenjang pendidikan yang sama.	$Angka\ Putus\ Sekolah = \frac{A}{B} x\ 100\%$ Keterangan A : Jumlah siswa yang pada tahun ajaran sekarang tidak melanjutkan pendidikan sebelum lulus dari jenjang pendidikan tertentu B : Jumlah siswa pada tahun ajaran lalu yang masih bersekolah di jenjang pendidikan yang sama.	Susenas Maret

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 2

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA/SMK sederajat	Persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu sesuai kelompok umur referensi pada jenjang pendidikan tersebut. Untuk Indikator nasional di Indonesia kelompok umur referensi adalah 1—3 tahun di atas batas usia kelas terakhir pada usia dari tiap jenjang pendidikan. Terdapat tiga kelompok umur referensi, yaitu: a. tingkat penyelesaian SD sederajat penduduk umur 13—15 tahun, b. tingkat penyelesaian SMP sederajat penduduk umur 16—18 tahun, dan c. tingkat penyelesaian SMA/SMK sederajat penduduk umur 19—21 tahun. Umur yang digunakan dalam penghitungan indikator ini adalah umur pada saat awal tahun pembelajaran.	$Tingkat\ Penyelesaian\ Pendidikan = \frac{A}{B} x\ 100\%$ Keterangan i : jenjang pendidikan (SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA/SMK sederajat) A : Jumlah penduduk dalam rentang umur pendidikan tertentu yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut B : Jumlah penduduk yang termasuk dalam rentang umur untuk jenjang pendidikan yang sama	Susenas Maret
23	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk 15 Tahun ke Atas	Jenjang pendidikan tertinggi yang telah diselesaikan oleh seseorang setelah mengikuti kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah di mana ditandai dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah	$Tingkat\ Pendidikan\ Tertinggi = \frac{A}{B} x\ 100\%$ Keterangan A : Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan tertentu B : Jumlah penduduk 15 tahun ke atas	Susenas Maret

https://www.bps.go.id

Lanjutan Lampiran 2

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24	Angka Melek Huruf (AMH)	Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk berumur 15 tahun ke atas	$AMH_{15+} = \frac{A}{B} x\ 100\%$ Keterangan A : Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang melek huruf B : Jumlah penduduk 15 tahun ke atas	Susenas Maret
25	Rata-Rata lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Untuk mereka yang tamat SD sederajat diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP sederajat diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA/SMK sederajat diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.	KeteranganXi : Lama sekolah penduduk ke-i yang berumur 15 tahun ke atas B : Jumlah penduduk 15 tahun ke atas $RLS = \frac{1}{n} x \sum_{i=1}^{n} X_i$	Susenas Maret

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

SENSUS EKONOMI 2026

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://www.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3863816
Homepage : http://www.bps.go.id E-mail: bpshq@bps.go.id

ISSN 2086-4566

9 772086 456606